



BUKU PUTIH

FRAKSI PKS
DPR RI

Oposisi
Kritis dan
Konstruktif



BUKU PUTIH FRAKSI PKS DPR RI

**Oposisi
Kritis dan
Konstruktif**

Persembahan
Fraksi PKS DPR RI

Buku Putih Fraksi PKS DPR RI Oposisi Kritis dan Konstruktif

Kumpulan sikap Fraksi PKS DPR RI sebagai oposisi
terhadap Kebijakan Pemerintah

Penanggung Jawab : Pimpinan Fraksi PKS DPR RI
Penyusun : Tim Ahli Fraksi PKS DPR RI

Penerbit Fraksi PKS DPR RI

Website : fraksi.pks.id/

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis atau penerbit.

Pengantar

Ketua Fraksi PKS DPR RI



Puji syukur alhamdulillah Fraksi PKS DPR dapat terus berkiprah untuk membela kepentingan rakyat dan menjaga NKRI di parlemen. Kiprah ini tidak lepas dari visi PKS di parlemen yaitu menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berkarakter, bermartabat, adil dan sejahtera.

Fraksi PKS selalu berusaha menjadi wakil rakyat yang amanah, yang berjuang all out dalam membela kepentingan rakyat di parlemen meski kami sadar jumlah kami terbatas (50 orang dari 575 anggota DPR). Karena itu langkah kami tidak pernah surut termasuk pilihan sikap PKS untuk menjadi oposisi di DPR RI dengan seluruh konsekuensinya. Bagi Fraksi PKS, pilihan sikap oposisi penting sebagai pelajaran politik dan demokrasi untuk menjaga suara rakyat agar tetap didengar, agar DPR tetap menjadi kekuatan kontrol dan penyeimbang dari eksekutif.

Meski jumlah terbatas, kemampuan terbatas, suara terbatas, tapi Fraksi PKS punya semangat yang besar, punya pikiran yang besar, punya harapan yang besar karena Fraksi PKS tidak pernah merasa sendirian. Fraksi PKS yakin perjuangan di parlemen sejalan dengan suara dan kepentingan rakyat dan itu dibuktikan dari sikap-sikap kritis dan penolakan terhadap sejumlah undang-undang dan kebijakan yang mendapat penolakan luas dari rakyat dan elemen masyarakat sipil.

Sikap tegas Fraksi PKS yang kritis dan konstruktif tersebut kami himpun dalam Buku Putih yang ada di hadapan pembaca sekalian yang berisi sikap-sikap Fraksi PKS sebagai oposisi. Sikap tersebut disajikan dalam bentuk narasi singkat maupun infografik sehingga mudah dicerna dan dipahami.

Buku Putih Fraksi PKS DPR RI ini berisi kumpulan data dan informasi terkait kinerja PKS di senayan dalam mengawal dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang mudah dan jelas mengenai tugas-tugas serta hasil kerja PKS dalam bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Disajikan dengan visualisasi dan narasi yang menarik dan mudah dimengerti sehingga diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai isu dan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Atas nama pimpinan Fraksi PKS DPR RI saya sampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih, *jazakumullah ahsanul jaza'*, kepada seluruh Anggota Fraksi PKS DPR RI yang telah secara Atraktif, Kreatif dan Subtantif menjalankan tugas dan garis perjuangan Fraksi yang pro keumatan, pro kerakyatan, dan pro kebangsaan (nasionalisme Indonesia). Apresiasi dan terima kasih juga saya sampaikan kepada tim ahli yang terlibat dalam pembuatan buku ini, yang telah bekerja keras untuk mengumpulkan dan menyajikan data yang akurat dan terpercaya.

Akhir kata, saya berharap buku ini dapat menjadi jendela informasi yang efektif bagi publik atas kiprah dan kinerja Fraksi PKS DPR RI sehingga semakin meningkat kepercayaan dan kecintaan rakyat kepada PKS. Untuk itu, terus doakan kami, dukung kami, koreksi kami agar tetap *istiqomah* dalam menjaga NKRI dan membela kepentingan rakyat di parlemen.

Salam hormat,
Senayan, Maret 2023

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Kata Sambutan

Presiden PKS



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Dalam sebuah kesempatan, saya memberikan arahan kepada Fraksi PKS DPR RI. Yakni tentang pentingnya membuat buku kiprah fraksi dalam bentuk data dan info grafis. Alhamdulillah, buku tersebut kini telah selesai diterbitkan.

Respons cepat F-PKS dibawah pimpinan Dr. Jazuli Juwaini ini membuat saya bahagia. Karena menunjukkan komitmen kuat F-PKS, untuk menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi sepak terjang 50 Anggota F-PKS DPR RI. Di periode ini, begitu panjang daftar kiprah mereka dalam menyuarakan kepentingan rakyat. Mulai dari menolak RUU Cipta Kerja hingga menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dengan cara Walk Out. Semua ini harus disampaikan ke publik. Agar mengetahui apa dan bagaimana Para Legislator dari PKS bekerja di Gedung DPR RI.

Buku ini memiliki perbedaan karena menyajikan sikap-sikap Fraksi PKS sebagai oposisi di parlemen data dan angka dalam bentuk info grafik. Sehingga tampilannya menjadi lebih menarik. Data dan angka yang ada terasa lebih memikat dan mempunyai cerita tersendiri. Harapannya, melalui penyajian buku semacam ini membuat publik lebih mudah mencerna dan cepat memahami. Juga dapat menyedot ketertarikan sebanyak mungkin masyarakat untuk membacanya.

Kehadiran buku ini semakin menegaskan bahwa F-PKS memiliki kesadaran literasi (Literacy Awareness) yang tinggi. Sebuah hal yang teramat langka di tengah terjangan Era Digital saat ini.

Saya yakin, buku ini akan menjadi jejak sejarah penting yang tak lekang oleh waktu. Karena semua yang ditulis akan abadi.

Terimakasih kepada Dr. Jazuli Juwaini dan Anggota DPR RI dari F-PKS serta Tim Ahli dan Humas F-PKS yang sudah berikhtiar menghadirkan karya monumental ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakaatuh

Ahmad Syaikhu
Presiden PKS

KATA SAMBUTAN

KETUA MAJELIS SYURA PKS
Dr. H. Salim Segaf Al-Jufri, MA



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam keadilan dan sejahtera,
Puji syukur kepada Allah Ta'ala karena bangsa Indonesia masih diberikan nikmat persatuan dalam kemajemukan bangsa dan PKS menjadi bagian yang mengokohkannya. Semoga Indonesia semakin maju dan sejahtera, tentu saja dengan kerja keras dan pengorbanan dari seluruh komponen bangsa.

Saya menyambut gembira terbitnya Buku Putih Fraksi PKS dengan Judul "Oposisi Kritis dan Konstruktif" yang merekam sikap-sikap Fraksi PKS sebagai oposisi di parlemen dalam 9 tahun terakhir (2014-2023). Buku ini menjadi salah satu bukti pertanggung-jawaban publik para wakil rakyat dari PKS, agar sikap-sikap Fraksi PKS dalam membela dan mengadvokasi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara dapat diketahui dan dipahami rakyat lebih luas lagi.

Fraksi PKS di parlemen memiliki Visi : " Terdepan dalam memperjuangkan kepentingan Rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berkarakter, bermartabat, adil dan sejahtera". Sejalan dengan arahan pimpinan PKS, garis perjuangan Fraksi PKS adalah kepentingan rakyat bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Alhamdulillah, PKS mengalami peningkatan suara dan kursi yang menggembirakan dari pemilu ke pemilu. Peningkatan suara PKS juga diikuti peningkatan jumlah kursi parlemen dari 40 kursi (periode 2014-2019) menjadi 50 kursi DPR RI (periode 2019-2024) dan 1.479 anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kita optimis pada pemilu

2024 mendatang suara dan kursi PKS akan semakin bertambah seiring dengan peningkatan kepercayaan rakyat kepada PKS.

Setiap partai politik pasti ingin menang dan berkesempatan memimpin Indonesia. Demikian juga dengan PKS. Namun saya perlu tegaskan bahwa jika Allah takdirkan PKS meraih kemenangan maka kemenangan PKS tersebut adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada kemenangan bagi PKS kecuali kemenangan itu dirasakan oleh rakyat.

Penegasan ini penting agar kita tidak kehilangan orientasi bahwa perjuangan politik dan kemenangan kita semata-mata upaya untuk memperluas risalah kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Sama sekali bukan untuk diri kita sendiri, apalagi dengan tujuan membangga-banggaan diri.

Untuk itu, kita harus terus memantaskan diri menjadi partai pemenang dan memenuhi seluruh prasyarat kemenangan itu. Tampilkan bahwa kita layak menjadi pemenang. Diantara syarat kemenangan yang kita pelajari bertahun-tahun ikut pemilu antara lain soliditas struktur, kader, dan simpatisan; program partai yang menyentuh kebutuhan rakyat; dan kinerja pejabat publik PKS yang terus melayani rakyat, hadir di tengah-tengah rakyat, dan menyelesaikan permasalahan rakyat. Tentu di atas itu semua yang utama adalah pertolongan Allah SWT.

Saya mengapresiasi peran-peran pelayanan dan advokasi yang dilakukan Anggota Legislatif PKS dari pusat hingga daerah. Saya terus mendorong agar struktur PKS, para pejabat publik, dan kader-kader PKS harus terus bergerak menyentuh rakyat, membantu dan melayani rakyat, hadir di tengah-tengah rakyat guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi rakyat sehingga PKS benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Fraksi PKS DPR telah menunjukkan komitmen dan konsistensinya dalam membela kepentingan rakyat utamanya dalam kapasitas sebagai oposisi. Dalam kapasitas tersebut, sebagaimana saya

pesankan, oposisi kita adalah oposisi yang kritis dan konstruktif. Kritik pada kebijakan, bukan pada person pejabat pemerintahan. Kritik kita sampaikan dengan argumentatif dan mengedepankan solusi sehingga bukan hanya asal beda atau mencari sensasi belaka.

Hal itu ditunjukkan dengan sikap-sikap Fraksi PKS di Parlemen yang tegas membela kepentingan rakyat dan menolak segala bentuk kebijakan yang semakin membebani rakyat kecil seperti kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, gas elpiji 3 kg, iuran BPJS, dan harga kebutuhan pokok lainnya. Juga kritik Fraksi PKS terhadap kebijakan utang yang semakin membebani APBN dan menjadi tanggungan anak cucu kita, kebijakan importasi, proyek IKN, kereta cepat, dll.

Atas semua kritik kebijakan tersebut, saya tak lelah berpesan agar PKS terus menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa. Sebagai partai politik, PKS hanya satu bagian dari elemen bangsa Indonesia. Ada banyak elemen bangsa lainnya yang mencurahkan pikiran, kepedulian, dan kontribusinya untuk bangsa ini. Kunci keberhasilan bangsa ini ada pada kebersamaan dan kolaborasi kita dengan seluruh elemen bangsa Indonesia. Maka. PKS harus menjadi faktor yang mengokohkan kolaborasi kebangsaan tersebut.

Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan selamat atas terbitnya buku ini seraya mendoakan agar seluruh anggota Fraksi PKS di DPR RI dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota diberi kekuatan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Semoga bangsa ini semakin maju, adil, dan sejahtera menjadi Baldatun Thoyyibatun wa Rabbun Ghafur.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

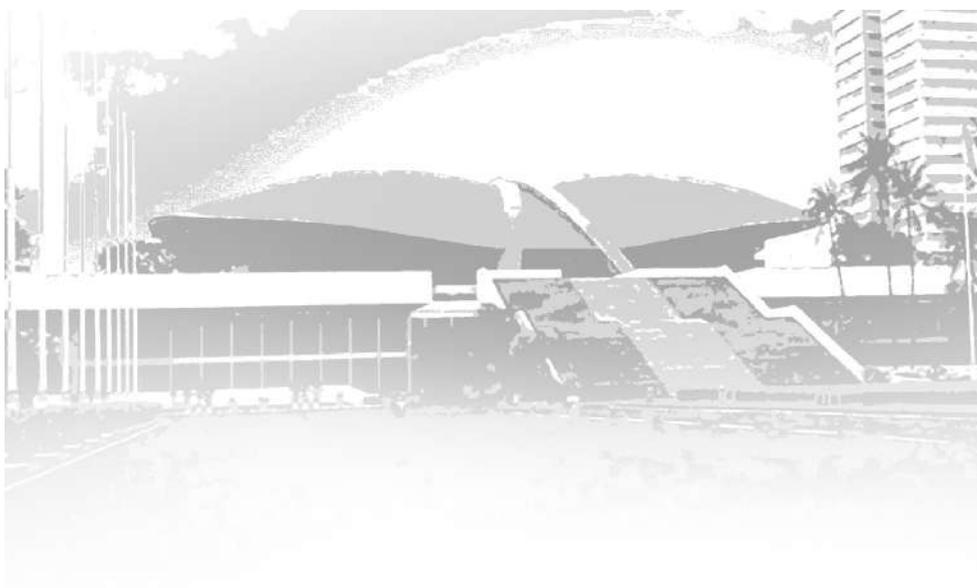
Jakarta, Mei 2023

Dr. H. Salim Segaf Al-Jufri, MA



Daftar Isi

Pengantar Ketua Fraksi PKS DPR RI	ii
Kata Sambutan Presiden PKS	iv
Kata Sambutan Ketua Majelis Syura PKS	vi
Daftar Isi	ix
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	1
Visi Misi	2
Perjuangan Politik	3
Program Unggulan	4
Ringkasa EKsekutif	7
Perjuangan Fraksi PKS Sebagai Oposisi di Parlemen	11
Perjuangan dalam Fungsi Legislasi	13
RUU Inisiatif Fraksi PKS 2014-2022.....	43
Perjuangan Fraksi PKS Melahirkan Undang-Undang Keummatan	49



Perjuangan Fraksi PKS Melahirkan Undang-Undang Kerakyatan dan Kebangsaan	53
Perjuangan dalam Fungsi Pengawasan	67
Perjuangan dalam Fungsi Anggaran	93
INFO GRAFIS	99
INBANG	103
POLHUKAM	209
KESRA	265
KEUANGAN	369
LEGISLASI	407
MOMENTUM	419
KALEDOISKOP Sikap Fraksi PKS DPR RI	443
Yuk Kenali Aleg Kamu	455



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif Atraktif Substantif



H. Sukamta, Ph.D
Wakil Polhukam

Drs. H. Adang Daradjatun
Wakil Bidang Kinerja

Hb. Aboe Bakar Alhabsyi
Bendahara Fraksi

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. Ledia Hanifa Amalia, S.Si, M.Psi.T
Sekretaris Fraksi

H. Suryadi Jaya Purnama, S.T
Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si
Wakil Kesra

H. Ecky Awal Mucharam
Wakil Ekonomi dan Keuangan

Dr. H. Mulyanto, M.Eng
Wakil Bidang

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Habib Aboe Bakar Alhabsyi

Bendahara Fraksi PKS DPR RI

H. Suryadi Jaya Purnama, S.T

Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

H. Sukamta, Ph.D

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Polhukam

Drs. H. Adang Daradjatun

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Kinerja

Dr. H. Mulyanto, M.Eng

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Inbang

Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Kesra

H. Ecky Awal Mucharam

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Ekonomi dan Keuangan

SILATURAHIM & DIALOG

PROGRAM LEGISLASI
NASIONAL TAHUN 2023
BERSAMA ORMAS ISLAM
DAN TOKOH

Visi

Terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berkarakter, bermartabat, adil, dan sejahtera

Misi

- 1 Memperkuat dan mendorong lahirnya undang-undang yang melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
- 2 Mendorong politik anggaran yang berpihak kepada penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia yang handal
- 3 Mendorong lembaga DPR menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif, dengan cara melakukan pengawasan yang kritis konstruktif dan kuat terhadap jalannya pembangunan
- 4 Turut menjaga wibawa bangsa dan negara di mata internasional, melalui peran diplomasi yang menjadi bagian dari tugas DPR.
- 5 Meningkatkan kontribusi pemikiran strategis dalam pengokohan kehidupan berbangsa dan bernegara



Perjuangan Politik

Perjuangan politik Fraksi PKS DPR RI berfokus pada tiga isu utama, yakni keumatan, kerakyatan, dan kebangsaan.

- **Isu keumatan** berhubungan dengan komitmen Fraksi PKS DPR RI untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam dan umat-umat agama lainnya, baik di Indonesia maupun belahan dunia lain, dengan berpegang pada prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan.
- **Isu kerakyatan** berkorelasi erat dengan komitmen Fraksi PKS DPR RI untuk mengadvokasi kepentingan rakyat dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, tanpa diskriminasi, ketimpangan, maupun penyalahgunaan kekuasaan.
- **Isu kebangsaan** berkaitan dengan komitmen Fraksi PKS DPR RI untuk merawat, mengokohkan, dan menjalankan nilai-nilai dasar bangsa dan negara Indonesia, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.

BABAK FINAL

**LOMBA BACA
 KITAB
 KUNING**
 TINGKAT NASIONAL
 EDISI VI TAHUN 2022

Diikuti Para Juara 1
 Tingkat Provinsi

- PANEL JURI**
- R.H. Spuhada, Syarkuni, M.Pd.
Timah Juara Nasional 2019
 Universitas Islam Sumatera Utara
 - Dr. KH. Muhsin Abdul Karim, MA.
Timah Juara Nasional 2019
 Universitas Islam Sumatera Utara
 - Dr. KH. Ali Akhmad, MA, Al-Hafidz.
Timah Juara Nasional 2019
 Universitas Islam Sumatera Utara
- Moderasi: **Mamat Alkatiri**



Program Unggulan

Berikut beberapa Program Unggulan Fraksi PKS:

- 1 **Hari Aspirasi Rakyat**
 Karpas merah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Anggota DPR Fraksi PKS, tanpa sulit dan berbelit. Memperkuat fungsi representasi dan relasi konstituensi yang kokoh di DPR.
- 2 **Lomba Baca Kitab Kuning**
 Menghidupkan kecintaan pelajar pada ilmu, ulama, pesantren serta khasanah pengetahuan Islam dari sumbernya yang original dan otentik.
- 3 **Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan**
 Bentuk komitmen kebangsaan Fraksi PKS dengan membahas isu-isu fundamental demokrasi dan kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdaskan. Menghadirkan tokoh PKS, tokoh bangsa dan pakar yang terkemuka.
- 4 **Lomba Membaca Teks Proklamasi Mirip Presiden Soekarno**
 Menghayati makna proklamasi dan menumbuhkan semangat patriotisme generasi bangsa untuk terus menjaga kemerdekaan dalam dimensi kekinian.

- 5 **Diskusi Nasional Memperingati Mosi Integral Natsir**
Memperingati Peristiwa Sejarah penting tentang sebuah hasil keputusan parlemen mengenai bersatunya kembalinya sistem pemerintahan Indonesia dalam sebuah kesatuan yang digagas oleh Mohammad Natsir.
- 6 **Parlementaria (PKS Legislative Report, PKS Legislative Corner, InternshiPKS, e-Newsletter)**
Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.
- 7 **Lomba Pidato Biografi Tokoh Nasional**
Mengenalkan tokoh pahlawan bangsa dan perjuangannya kepada generasi bangsa agar dapat meneladani mereka dan tidak ada mata rantai sejarah yang putus.
- 8 **Lomba Karya Tulis Kebangsaan**
Menumbuhkan semangat nasionalisme generasi muda, memupuk rasa cinta tanah air, peduli terhadap kondisi bangsa dan negara melalui tulisan ide dan gagasan untuk kemajuan Indonesia



- 9 **Diplomasi Parlemen & Ambassador Talks**
Upaya Fraksi mendukung diplomasi RI melalui peran diplomasi parlemen. Fraksi PKS melaksanakan kunjungan resmi ke negara-negara sahabat dalam rangka menjalin persahabatan dan kerjasama dengan parlemen negara sahabat, organisasi internasional, duta besar, dan mitra strategis internasional lainnya



RINGKASAN EKSEKUTIF

Fraksi PKS DPR tegak dan tegas memilih sikap oposisi terhadap Pemerintah di Parlemen sejak resmi dilantik pada 1 Oktober 2019. Satu pilihan sikap yang sederhana bagi Fraksi PKS sederhana keinginan PKS untuk menghadirkan demokrasi yang kuat melalui kerja-kerja Parlemen yang bewibawa dalam menghadirkan *checks and balances*. Alhamdulillah dengan izin Allah, Fraksi PKS DPR RI telah berusaha keras memberikan kerja-kerja terbaik untuk rakyat dan bangsa Indonesia sesuai dengan visi yang melekat yaitu **“Terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berkarakter, bermartabat, adil dan Sejahtera”**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Fraksi PKS DPR RI menghadirkan lima Misi, yaitu (1) mendorong lahirnya Undang Undang yang melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, (2) politik anggaran yang berpihak kepada rakyat, (3) menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif secara kritis konstruktif, (4) menjaga wibawa bangsa dan negara di dunia internasional, dan (6) kontribusi pemikiran strategis terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam implementasi Visi dan Misi Fraksi tersebut, orientasi dan arah kegiatan Fraksi selalu mengandung tiga pesan utama,

yaitu: **Keummatan, Kerakyatan, dan Kebangsaan**. Artinya semua aktivitas dan kegiatan perjuangan FPKS DPR RI di parlemen selalu dilandasi oleh semangat membela umat dan rakyat serta mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme kebangsaan. Gagasan tentang nasionalisme kebangsaan ini agar termanifestasi dalam perilaku, kebiasaan, hingga menjadi karakter, khususnya bagi kader-kader PKS dan masyarakat secara umumnya.

Dalam menjalankan peran sebagai oposisi di Parlemen, Fraksi PKS terlibat aktif dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPR mulai dari fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran hingga diplomasi dan representasi. Fraksi PKS juga aktif melakukan terobosan kegiatan untuk mendekatkan Fraksi PKS dengan para pemangku kepentingan bangsa dengan semangat kolaborasi untuk menjaga dan mamajukan NKRI.

Dalam fungsi legislasi, di periode 2014-2019 FPKS DPR RI menginisiasi beberapa RUU penting dan terlibat aktif dalam mengusulkan dan membidani lahirnya beberapa RUU yang terkait dengan persoalan keummatan, kerakyatan dan kebangsaan. Fraksi PKS tegas menolak sejumlah undang-undang yang sarat dengan kepentingan oligarki, bermuatan resentralisasi, menciderai demokrasi dan yang paling krusial merugikan kepentingan rakyat kecil (buruh, petani, nelayan, peternak, pedagang kecil dan pelaku UMKM). Fraksi PKS menolak pengesahan Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid 19, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), RUU Cipta Kerja, RUU Ibu Kota Negara, RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perpu Cipta Kerja, RUU Kesehatan, dll.

Dalam fungsi anggaran, sikap FPKS DPR RI sangat jelas terhadap advokasi kerakyatan dan keummatan. Konsistensi posisi Fraksi PKS yang menegaskan APBN untuk kesejahteraan rakyat tercermin dan dapat dilihat dari berbagai pandangan dan pendapat resmi Fraksi terkait APBN serta mendorong perbaikan kualitas APBN. Fraksi PKS menolak penggunaan APBN yang tidak prioritas dan tidak proper seperti untuk penyertaan modal negara (PMN) terhadap sejumlah proyek tidak prioritas dan tidak direncanakan dengan baik sejak awal seperti Proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung hingga proyek IKN. Sebaliknya mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi subsidi, dana desa, serta insentif yang berdampak luas bagi kepentingan rakyat banyak. Tentu saja dengan distribusi yang tepat sasaran dan akuntabel dengan basis data yang valid dan akurat.

Dalam fungsi pengawasan, Fraksi PKS DPR RI fokus dalam tiga persoalan, yaitu pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, pelaksanaan RPJMN, dan pelaksanaan program mitra kerja parlemen. Beberapa hal penting yang dilakukan oleh Fraksi PKS DPR RI adalah mengawal sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat luas maupun yang memiliki dampak besar bagi kemaslahatan bangsa, di antaranya: Fraksi PKS tegas menolak kenaikan harga-harga dan tarif seperti BBM, TDL, Gas LPG dan harga-harga kebutuhan pokok; tegas menolak kenaikan iuran BPJS kelas 3; kenaikan biaya administrasi STNK dan BPKB; kenaikan bea materai; menolak belanja gorden DPR; serta tegas menolak maraknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, menolak kebijakan importasi khususnya pangan dan sumber daya alam yang merugikan petani, nelayan dan peternak serta menolak penjualan aset negara dan/atau BUMN kepada swasta/asing karena mengancam kedaulatan ekonomi nasional. Fraksi PKS juga tegas menolak kebijakan pembangunan yang bertumpu pada utang serta mengkritisi peningkatan utang negara yang jelas bebannya akan ditanggung generasi mendatang (anak cucu kita), dan beberapa sikap yang membela kepentingan rakyat lainnya.

Selain itu, dalam rangka mendalami persoalan kebangsaan dan menghasilkan substansi isu strategis, Fraksi PKS DPR RI telah menyelenggarakan seminar atau *focus group discussion* (FGD) di setiap masa sidang dengan menghadirkan tokoh-tokoh nasional berbagai latar belakang, mulai dari pemerintah, TNI/Polri, Ulama, Birokrat, Akademisi, aktivis dan lain sebagainya. Fraksi PKS menyelenggarakan Program Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan untuk membahas isu-isu fundamental kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdaskan dengan mengundang para tokoh, guru bangsa, dan pakar terkemuka. Fraksi PKS juga rutin menyelenggarakan Program PKS *Legislative Corner* dan *Public Expose* untuk membahas sikap-sikap PKS di DPR terhadap isu dan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Fraksi PKS juga berinisiatif menggelar aneka kegiatan secara rutin yang membangkitkan semangat nasionalisme generasi bangsa seperti Lomba Baca Kitab Kuning pada momentum Hari Santri Nasional yang bertujuan untuk menghormati dan memuliakan ulama dan santri serta kitab-kitab rujukan *ahlu sunnah wal jamaah*; Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Presiden Sukarno untuk menghayati nilai-nilai kemerdekaan; Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa untuk meneladani nilai-nilai kepahlawanan; Lomba Karya Tulis Kebangsaan untuk menggali pemikiran dan gagasan serta kecintaan generasi muda terhadap keindonesiaan. Fraksi PKS aktif memperingati momen-momen kepahlawanan seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, Hari Mosi Integral M. Natsir, hingga inisiatif mengusulkan Gelar Pahlawan Nasional seperti kepada Mr. Kasman Singodimedjo, Rahmah el Yunusiah, Syaikhona Kholil, dll.

Dalam rangka khidmat dan pelayanan PKS untuk rakyat Fraksi PKS menjadi Fraksi teraktif dalam mengeluarkan kebijakan “Potong Gaji Anggota Dewan” untuk membantu korban musibah di tanah air. Fraksi PKS juga menjadi pioneer dalam menyelenggarakan Hari Aspirasi di DPR RI, dua kali dalam sepekan, setiap Hari Selasa dan Hari Jum’at. Fraksi PKS DPR RI adalah fraksi yang pertama kali di parlemen yang mencanangkan Hari Aspirasi dan diikuti oleh fraksi-fraksi PKS di daerah. Model pengelolaan hari aspirasi Fraksi PKS bahkan menjadi model dan percontohan bagi DPR RI secara kelembagaan.

Fraksi PKS juga aktif melakukan diplomasi parlemen untuk masalah-masalah kemanusiaan, penghentian perang dan konflik, kemerdekaan bangsa Palestina, serta promosi budaya dan pariwisata Indonesia. Untuk itu, Fraksi PKS melaksanakan Kunjungan Fraksi ke Mitra Internasional baik negara maupun organisasi internasional seperti ke Amerika Serikat, Inggris, Italia, Swiss, Perancis, serta badan-badan PBB seperti UNHCR, UNDP, UNESCO, dll. Untuk memperkuat diplomasi parlemen tersebut Fraksi PKS juga menggelar *Ambassadors Talks* yang menghadirkan para duta besar negara sahabat dan organisasi internasional.



PERJUANGAN FRAKSI PKS SEBAGAI OPOSISI DI PARLEMEN

Perjalanan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf diwarnai dengan dinamika dalam penyelenggaraan negara berkelindan dengan upaya kita dalam memitigasi pandemi Covid-19 yang tidak mudah. Indonesia mengalami gelombang kedua Covid-19 pada bulan Juli 2021 dan berangsur membaik hingga akhir tahun 2021. Tentu upaya penanganan pandemi yang serius dengan kebijakan yang *prudent* atau *scientific based policy* hal mana yang agak diabaikan pemerintah di awal diharapkan semakin mendorong keberhasilan penanganan pandemi ke depan.

Di luar kebijakan penanganan pandemi, Fraksi PKS mendapati banyak kebijakan pemerintah yang bukan hanya problematik tapi juga melanggar prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan demokratik. Ada kecenderungan kuat pengelolaan negara mengarah pada dominasi oligarki, sentralisasi, dan pelemahan demokrasi dalam banyak aspek. Dan, hal ini menjadi fokus kritik publik yang bisa kita ikuti melalui analisis media, forum-forum diskusi, hingga aksi demonstrasi.

Fraksi PKS DPR RI memiliki banyak sekali kritik dan catatan atas kebijakan tersebut. Mulai dari kritik dan penolakan Fraksi PKS terhadap sejumlah undang-undang bidang ekonomi, kritik dan

penolakan terhadap kebijakan utang yang ugal-ugalan dan terus membengkak, kebijakan impor pangan, megaprojek pemerintah yang dipaksakan dan tanpa perhitungan, hingga catatan atas praktek penegakan hukum yang berkeadilan dan kebijakan sosial politik pemerintah dalam mengafirmasi aspirasi dan kritik masyarakat.

Fraksi PKS menilai sejumlah kebijakan ekonomi dan pembangunan pemerintah mengarah pada liberalisasi sektor ekonomi penting bagi rakyat dan hanya menguntungkan oligarki ekonomi politik tertentu. Di samping itu Fraksi PKS menilai sejumlah undang-undang yang belakangan disahkan mengarah pada reentralisasi dan menciderai prinsip-prinsip desentralisasi yang merupakan capaian penting dari reformasi 1998. Atas dasar pemikiran fundamental dan fondasional tersebut, Fraksi PKS menolak dan memberikan catatan kritis atas sejumlah RUU dan kebijakan pemerintah.



PERJUANGAN DALAM FUNGSI LEGISLASI

Legislasi merupakan fungsi utama DPR yaitu fungsi membentuk undang-undang yang menjadi landasan pembangunan nasional untuk memenuhi tujuan bernegara yang termaktub dalam konstitusi, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Politik legislasi Fraksi PKS DPR sejalan dengan tujuan bernegara dengan titik tekan pada upaya untuk menghadirkan undang-undang yang berpihak pada kepentingan rakyat, kepentingan umat, dan kepentingan bangsa yang menjaga dan mengokohkan nasionalisme Indonesia. Legislasi yang berpihak pada umat maknanya adalah produk undang-undang yang melindungi dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan umat beragama yang diakui di Indonesia. Legislasi yang berpihak pada rakyat maknanya yang memenuhi hajat hidup orang banyak, berpihak pada rakyat kecil, dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Agar rakyat Indonesia mendapatkan kesejahteraan dan pelayanan publik terbaik dari negara. Agar rakyat menjadi subjek dari pembangunan. Agar rakyat menjadi tuan di negerinya sendiri, berdaya dan berdikari (berdiri di atas kaki sendiri).

Sementara itu, legislasi yang berpihak pada pengokohan nasionalisme Indonesia maknanya yang melindungi, mempromosikan, dan mengokohkan nilai, karakter, dan kepribadian bangsa. Nasionalisme ini penting karena menunjukkan eksistensi dan deferensiasi bangsa Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia. Kata Bung Karno Proklamator kita, tidak ada bangsa yang benar-benar sama. Setiap bangsa punya identitas dan kepribadiannya masing-masing. Jika identitas ini hilang atau luntur maka hal itu pertanda bangsa dalam kondisi bahaya.

Sebagai oposisi Fraksi PKS dengan tegas menolak RUU yang menciptakan oligargik, resentralisasi, kemunduran demokrasi, meliberalisasi ekonomi dan asset-aset negara, merugikan kepentingan rakyat kecil (buruh dan pekerja), bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945

1. Tolak Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Fraksi PKS menolak Perpu 1/2020 dengan argumentasi utama bahwa Perpu ini seharusnya tidak boleh membuat norma hukum yang berpotensi bertentangan dengan konstitusi antara lain tercabutnya hak budget rakyat yang diwakili oleh DPR RI. Fraksi KPS menyebut Perpu ini telah membuka banyak ruang terbuka yang berbahaya bagi sistem keuangan. Hal ini terkait dengan kekuasaan Pemerintah dalam penetapan APBN yang mereduksi kewenangan DPR, kekuasaan tak terbatas KSK, kekebalan hukum, dibukanya peluang kebijakan *bail-out* dan *blanket guarantee* adalah contoh-contohnya. Ini sangat berbahaya.

Pertama, PERPPU di Pasal 12 ayat 2 menyatakan bahwa Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara hanya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. Hal ini telah menghilangkan kewenangan serta peran DPR dan membuat APBN tidak diatur dalam Undang-Undang atau yang setara. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23 ayat 1 telah menyatakan bahwa kedudukan dan status APBN adalah UU yang ditetapkan setiap tahun. Kemudian, RAPBN harus diajukan oleh Presiden untuk dibahas dan disetujui oleh DPR sebagaimana ditegaskan Pasal 23 ayat 2 dan ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.

Kedua, PERPPU di Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan PERPPU ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Maka hal ini bertentangan dengan prinsip supermasi hukum dan prinsip negara hukum. Padahal UUD NRI Tahun 1945 melalui perubahan pertama tahun 1999 sampai perubahan keempat tahun 2002, telah menjamin tegaknya prinsip-prinsip supremasi hukum. UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dan adanya pengakuan yang sama di hadapan hukum.

Ketiga, PERPPU Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Maka hal ini tidak sesuai dengan prinsip dasar keuangan negara dan meniadakan adanya peran BPK untuk menilai dan mengawasi. Padahal Peran BPK untuk memeriksa tanggung jawab keuangan adalah amanat konstitusi, sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

UUD NRI Tahun 1945 telah menjamin adanya *distribution of power* sehingga mekanisme *check and balances* dapat bekerja dengan baik. Bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk UU (Pasal 20 ayat 1) dan memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 20A ayat 1). Sedangkan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan

(Pasal 4 ayat 1) dan bahwa MK dan MA memiliki Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1). Serta bahwa ada 10 lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, KY, BPK, Bank Sentral, dan KPU). Dengan memperhatikan jaminan yang dikokohkan dalam UUD NRI Tahun 1945 terkait tentang supremasi Hukum, Pembentukan Undang-Undang, Pembentukan APBN, juga hak dan kewajiban Lembaga-lembaga negara, maka beberapa Pasal krusial dalam PERPPU No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan berpotensi melanggar UUD NRI Tahun 1945.

Selain itu, Perpu berimplikasi pada sistem otorisasi dan tata kelola APBN, keuangan negara, dan moneter karena sumlah undang-undang terkait hal itu dinyatakan tidak berlaku dengan Perpu ini. Perpu ini memusatkan kekuasaan pengelolaan APBN, keuangan negara dan sumber-sumber moneter kepada Pemerintah dengan mereduksi fungsi kontrol dan tata kelola yang baik. Selain itu, skema pemulihan ekonomi berdasarkan Perpu tidak berpihak pada kelompok masyarakat miskin dan lebih berpihak pada investasi.

2. Tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP)

Fraksi PKS menganggap Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa telah final. Dirumuskan oleh tokoh-tokoh bangsa dengan semangat kebersamaan sehingga akhirnya disepakati sebagai konsensus bersama. Oleh karena itu segala upaya yang ingin mengotak-atik Pancasila, membongkar kembali lima sila yang telah menjadi konsensus kebangsaan harus ditolak karena bukan saja tidak menghormati *legacy* para pendiri bangsa, lebih jauh berpotensi memecah belah bangsa dan mengoyak rasa persatuan. Fraksi PKS gelagat tidak baik itu muncul dalam inisiatif RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila.

Fraksi PKS sangat keberatan dengan tidak dimuatnya ketentuan terkait dengan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme kedalam ketentuan mengingat dari RUU ini. Hal ini menurut kami merupakan suatu kekeliruan yang fatal, sebab ketentuan tersebut masih berlaku dan belum dicabut sampai saat ini. Perlu disampaikan bahwa Fraksi

PKS sudah berkali-kali memberikan masukan untuk memasukkan ketentuan terkait TAP MPRS ini kedalam ketentuan mengingat dari RUU Haluan Ideologi Negara. Akan tetapi sampai saat ini ketentuan tersebut tidak masuk kedalam ketentuan mengingat. Padahal sejarah telah membuktikan bahwa ada pihak-pihak atau golongan yang ingin mengubah ideologi negara kita menjadi ideologi terlarang, sehingga menurut kami ketentuan tentang TAP MPRS itu selama masih hidup dan dinyatakan berlaku mutlak harus dimasukkan dalam ketentuan mengingat dari RUU Haluan Ideologi Pancasila karena hal ini adalah esensi penting dan ruh dari ideologi negara melalui Ideologi Pancasila.

Fraksi PKS menolak Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang. Karena RUU tersebut seharusnya memasukkan ketentuan terkait dengan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dimasukkan kedalam ketentuan RUU. Fraksi PKS juga menolak ketentuan RUU ini yang dikhawatirkan mengaburkan dan mereduksi maka Pancasila dengan menyederhanakannya menjadi Ekasila dan Trisila.

Sikap tegas Fraksi PKS terhadap draf RUU HIP ini semata bentuk kecintaan dan keinginan kuat agar Pancasila bisa diimplementasikan secara konsekuen sesuai pemahaman dan sejarahnya untuk mengokohkan identitas bangsa. Sebaliknya tidak menjadi ideologi yang mengikuti selera zaman, lepas dari pemahaman dasar dan sejarahnya, sehingga kehilangan elan vitalnya dalam membangun jati diri bangsa. Apalagi jika Pancasila dimonopoli dan dikooptasi oleh kepentingan politik kelompok tertentu.

Berbagai ormas Islam akhirnya juga memberikan respon yang keras dan tegas agar tidak ada lagi upaya mengotak-atik apalagi mereduksi Pancasila sebagai dasar negara dan konsensus kebangsaan Indonesia. Hal ini tercermin dari pernyataan sikap PBNU dan PP Muhammadiyah.

PBNU antara lain menegaskan bahwa Pancasila adalah titik temu (*kalimatun sawa*) yang disepakati sebagai dasar negara adalah hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai sejak Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang dihasilkan oleh Tim Sembilan, dan rumusan final yang disahkan

oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. PBNU juga menyatakan jangan mengulangi kesalahan masa lampau terkait monopoli tafsir atas Pancasila. Hal itu tidak boleh terulang lagi. Kendati demikian hal ini bukan merupakan dasar dan alasan yang dapat membenarkan perluasan dan/atau penyempitan tafsir atas Pancasila dalam suatu undang-undang yang isinya mengatur demokrasi politik Pancasila dan demokrasi ekonomi Pancasila sebagaimana RUU HIP.

Obsesi untuk menafsirkan Pancasila secara ekspansif akan menimbulkan eksese negatif berupa menguatnya kontrol negara dalam kehidupan masyarakat. Penguatan ekseseif kelembagaan BPIP dapat melahirkan kembali BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di zaman Orde Baru yang prakteknya menjadi alat sensor ideologi masyarakat. Pancasila yang terlalu ambisius akan kehilangan roh sebagai ideologi pemersatu, yang pada gilirannya dapat menimbulkan benturan-benturan norma dalam masyarakat. RUU HIP dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik. Anyaman kebangsaan yang sudah dengan susah payah dirajut oleh founding fathers bisa koyak kembali dengan rumusan-rumusan pasal RUU HIP yang polemis. Tidak ada urgensi dan kebutuhan sama sekali untuk memperluas tafsir Pancasila dalam undang-undang khusus. Sebaiknya proses legislasi RUU HIP dihentikan dan seluruh komponen bangsa memusatkan energinya untuk keluar dari pandemi dan berjuang memulihkan perekonomian nasional.

Sementara itu PP Muhammadiyah antara lain menyatakan bahwa secara hukum kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara sudah sangat kuat. Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Memasukkan Trisila dan Ekasila maupun Ketuhanan yang berkebudayaan ke dalam pasal RUU HIP dengan alasan historis pidato Soekarno 1 Juni 1945 sama dengan mereduksi Pancasila rumusan final pada 18 Agustus 1945, serta mengundang kontroversi dengan mengabaikan Piagam Jakarta 22 Juni 1955 sebagai satu kesatuan rangkaian proses kesejarahan. Kontroversi akan berkembang jika Trisila dan Ekasila maupun Ketuhanan yang berkebudayann dimasukkan dengan alasan historis, maka 7 kata dalam Piagam Jakarta juga dapat dimasukkan ke dalam pasal RUU HIP dengan alasan historis yang sama.

Di dalam RUU HIP terdapat materi-materi tentang Pancasila yang bertentangan dengan rumusan Pancasila sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya pada Bab III (Pasal 5, 6, dan 7). Selain itu terdapat banyak materi yang menyiratkan adanya satu sila yang ditempatkan lebih tinggi dari sila yang lainnya, termasuk yang mempersempit dan mengesampingkan rumusan final sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Materi-materi yang bermasalah tersebut secara substantif bertentangan dengan Pancasila yang setiap silanya merupakan satu kesatuan yang utuh. Hal tersebut juga bertentangan dengan azas kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan sebagaimana diatur dalam pasal 5 (c) UU 12/2011 yang di dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden nomor 7/2018 sudah sangat kuat.

Oleh karena itu, Muhammadiyah mendesak DPR untuk lebih sensitif dan akomodatif terhadap arus aspirasi terbesar masyarakat Indonesia yang menolak RUU HIP dengan tidak memaksakan diri melanjutkan pembahasan RUU HIP untuk kepentingan kelompok tertentu dan hendaknya mengutamakan persatuan dan kemajuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bangsa Indonesia perlu belajar dari dua pengalaman sejarah kekuasaan di masa lalu ketika perumusan Perundang-undangan atau kebijakan penerapan ideologi Pancasila disalahgunakan dan dijadikan instrumen kekuasaan yang bersifat monolitik oleh penguasa. DPR, pemerintah dan bangsa Indonesia hendaknya tidak mengulangi kesalahan sejarah tersebut, karena jelas bertentangan dengan Pancasila dan merugikan kepentingan seluruh hajat hidup bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

3. Tolak Pengesahan RUU Tentang Cipta Kerja

Sejak awal F-PKS mengkritisi latar belakang pemerintah mengajukan RUU Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan iklim investasi. Kritisi Fraksi PKS jangan sampai tujuan yang baik itu bertentangan dengan asas pembentukan perundang-undangan yang baik dan norma konstitusi yang merugikan masyarakat. Apa pasal? Arah

dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja setidaknya telah berdampak terhadap 1.203 Pasal dari 79 undang-undang. Dengan demikian, F-PKS menyadari bahwa substansi pengaturan yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja ini sangat kompleks karena terdiri dari banyak Undang-Undang yang akan diubah sekaligus, serta memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan baik secara formil maupun materil sehingga dikhawatirkan tidak sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang telah kita sepakati bersama.

Setelah berjuang dan mengikuti jalannya rapat pembahasan tingkat I RUU tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) pada Panja Badan legislasi, F-PKS memberikan sejumlah catatan atas penolakan terhadap RUU Cipta Kerja, yaitu:

Pertama, secara khusus, F-PKS mengapresiasi sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja terkait kemudahan berusaha yang apabila dijalankan secara konsisten dan konsekuen berpotensi memangkas dan menekan biaya berusaha di Indonesia. Selain itu, F-PKS juga memberikan apresiasi kepada Panja RUU Cipta Kerja yang telah menerima sebagian masukan kami untuk mencabut pembahasan sejumlah undang-undang yang dalam pandangan kami memuat substansi bertentangan dengan semangat konstitusi seperti: Undang-Undang Pers, Undang-Undang terkait klaster Pendidikan, Undang-Undang Kebidanan, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang UMKM dan Koperasi serta pencabutan Pasal 170 RUU Cipta Kerja yang mengatur perihal terkait dengan Kewenangan Pemerintah Pusat dalam mengubah ketentuan yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan khususnya secara hierarki yang menempatkan PP dibawah Undang-Undang sehingga sangat inkonstitusional apabila Pasal 170 ini tetap dilanjutkan, sebab hal tersebut dapat mengeliminasi ketentuan norma yang lebih tinggi dengan ketentuan norma yang lebih rendah dan ini sangat bertentangan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kita pedomani selama ini.

Kedua, secara umum, F-PKS mengkritisi RUU Cipta Kerja baik secara formil dalam proses pembahasannya maupun aspek substantif yang kami nilai bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang kita sepakati pasca amendemen konstitusi. Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pedoman dalam membentuk regulasi. RUU Cipta Kerja mengandung cacat formil pemenuhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena tidak terpenuhinya asas keterbukaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya selama proses pembahasan RUU tersebut. FPKS menilai bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja terkesan dipaksakan ditengah keprihatinan dan keterbatasan kita dalam menghadapi pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pembahasan selama masa pandemik tersebut menyebabkan terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, koreksi dan penyempurnaan terhadap RUU Cipta Kerja. Selama masa pembahasan F-PKS juga mencatat bahwa proses penyusunan dan pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) tidak dilaksanakan secara runtut dan dengan waktu yang memadai sehingga berpotensi mengabaikan aspek kecermatan dan kualitas legislasinya.

Ketiga, secara substansi F-PKS menilai sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja masih memuat substansi yang bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang kita sepakati pasca amandemen konstitusi. Ketentuan-ketentuan yang ditolak dalam RUU Cipta Kerja tidak hanya terkait dengan masalah investasi di Indonesia akan tetapi juga terkait dengan perubahan regulasi yang berpotensi menyebabkan merajalelanya praktik korupsi dan inefisiensi birokrasi. Disamping itu, RUU ini juga tidak sesuai dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum dengan tetap memperhatikan semangat kepastian hukum dan penyederhaan peraturan karena banyaknya Peraturan Pemerintah yang akan dibuat paska berlakunya RUU Ini yang justru semakin menyebabkan kompleksitas regulasi yang lebih rumit. Untuk itu terkait dengan ketentuan-ketentuan yang ditolak dalam RUU ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan dalam RUU Cipta Kerja memuat substansi liberalisasi sumber daya alam yang dapat mengancam kedaulatan negara melalui pemberian kemudahan kepada pihak swasta dan asing. Ketentuan ini dapat dicermati dengan dibentuknya Bank

Tanah yang utamanya untuk kepentingan investasi, pemberian Hak Atas Tanah bagi Warga Negara Asing (WNA) melalui pemberian Sertifikat Hak Milik atas Rumah Susun (SHMRS), pemberian Hak Pengelolaan atas tanah negara kepada badan hukum swasta, dan dibukanya peluang bagi tenaga asing untuk mengumpulkan data informasi geospasial di seluruh Indonesia. Termasuk pengenaan royalti 0% bagi pertambangan batubara yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan pemurnian.

- 2) RUU Cipta Kerja memuat substansi pengaturan yang merugikan Pekerja/buruh Indonesia melalui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pengusaha. Hal ini tercermin dalam perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan kerja, upah, dan pesangon.
- 3) RUU Cipta Kerja memuat pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dalam pasal 37 RUU Cipta Kerja terkait perubahan UU Kehutanan, ketentuan penyediaan luas minimum 30% untuk fungsi kawasan hutan dari Daerah Aliran Sungai dihapus. Selain itu, kewajiban membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran juga dihapuskan bagi pemegang izin usaha perkebunan. Begitu juga di sektor panas bumi dengan dihapusnya ketentuan izin pemanfaatan Kawasan konservasi perairan yang akan mengancam kelestarian Lingkungan hidup.
- 4) RUU Cipta Kerja berpotensi membuka ruang untuk liberalisasi Pendidikan. Dalam rapat pembahasan RUU di badan legislasi, Panitia Kerja sepakat untuk mencabut seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Pendidikan dari RUU Cipta Kerja dan akan dibuat sebuah ketentuan pasal baru yang mengatur tentang perizinan berusaha bidang Pendidikan dan pengaturan tentang Perguruan Tinggi Asing dalam Kawasan Ekonomi Khusus yang diusulkan oleh pemerintah atau BUMN. Namun dalam draft hasil akhir, rumusan pasal tentang perizinan berusaha bidang Pendidikan diserahkan pengaturannya ke dalam Peraturan Pemerintah sehingga kewenangan pemerintah

untuk mengatur semua bidang pendidikan menjadi tidak terbatas. Sedangkan untuk pengaturan pendidikan di dalam Kawasan Ekonomi Khusus pasal baru yang dirumuskan tidak menyebutkan pengkhususan untuk Perguruan Tinggi Asing. Artinya norma baru tersebut berlaku untuk seluruh jenis dan jenjang Pendidikan.

- 5) Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan supremasi hukum karena substansi pengawasannya menutup ruang pengawasan dan audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta memberikan imunitas bagi pengurus dan pejabat pengambil Kebijakan (Pasal 153 dan 154 RUU). Ketentuan tersebut juga bertentangan dengan prinsip *equality before the law* sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Ketentuan pemberian Imunitas bagi penyelenggara Negara serta minimnya mekanisme kontrol dan pengawasan dalam sistem kelembagaan negara sangatlah berbahaya apabila diterima dan menjadi preseden buruk dalam praktik kenegaraan. Hal demikian tidak dapat diterima manakala kewenangan dan penguasaan alokasi sumber daya ekonomi yang sedemikian besar melalui LPI ternyata kebijakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia. Kita tentu tidak lupa pada pernyataan sekaligus peringatan dari *Lord Acton* (John Emerich Edward Dalberg-Acton), seorang Begawan Hukum dan Politik berkebangsaan Inggris "*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*";
- 6) Kebijakan dalam RUU Cipta Kerja terkait impor komoditas Pertanian, impor komoditas Peternakan, impor komoditas Perkebunan termasuk pangan, pembukaan akses bagi kapal tangkap berbendera asing tidak sejalan dengan kepentingan nasional dalam rangka perlindungan dan pemajuan petani, nelayan serta kedaulatan pangan;
- 7) Substansi RUU Cipta Kerja lebih berorientasi kepada fasilitasi Pelaku Usaha besar dan Penanaman Modal Asing daripada pemberian dukungan dan konsep kebijakan yang komprehensif bagi pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi. Termasuk kurangnya dukungan riset dan teknologi terhadap pengembangan UMKM di Indonesia.
- 8) RUU Cipta Kerja memberikan kewenangan yang sangat besar bagi Pemerintah namun tidak diimbangi dengan sistem

pengawasan dan pengendalian terhadap aspek penegakan hukumnya. Idealnya, apabila pemerintah mempermudah perizinan maka sistem pengenaan sanksinya harus lebih ketat dengan mengembangkan sistem penegakan hukum yang baik. Disamping itu ketidakjelasan terhadap rumusan sanksi yang akan disesuaikan dengan RKUHP adalah suatu hal yang tidak mendasar sebab RUU KUHP belum selesai dibuat dan disetujui sehingga dimana letak kepastian hukumnya karena bisa saja isi dari RUU KUHP nantinya akan berbeda dengan ketentuan sanksi yang terdapat didalam RUU Cipta Kerja ini.

- 9) RUU Cipta kerja mengatur bahwa Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh badan hukum asing ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Fraksi PKS berpendapat bahwa masalah kepemilikan Bank terkait dengan masalah modal perbankan yang terkait dengan penentuan kesehatan modal perbankan seperti tingkat solvabilitas, liquiditas, CAR, dan cadangan kerugian sebaiknya diberikan kepada UU OJK dan UU Perbankan serta UU yang terkait dengan Sistem Keuangan sebaiknya bukan diatur dalam RUU ini.

Sejalan dengan penolakan Fraksi PKS, UU tentang Cipta Kerja yang pada akhirnya dinyatakan cacat formil/inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD NRI Tahun 1945.

4. Tolak Pengesahan RUU Ibu Kota Negara

Secara substansi, Fraksi PKS memberikan catatan substansi terhadap materi muatan yang terdapat dalam RUU IKN. Catatan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa materi muatan yang terdapat dalam RUU IKN tidak sejalan dengan prinsip konstitusionalisme, pembangunan berkelanjutan, efisiensi penganggaran serta penghormatan dan penghargaan terhadap sejarah perjalanan bangsa. Adapun beberapa catatan substansi Fraksi PKS terhadap RUU IKN adalah sebagai berikut:

Pertama, beberapa materi muatan yang terdapat dalam RUU IKN mengandung beberapa permasalahan konstitusionalitas. Fraksi PKS melihat bahwa konsep IKN yang dirancang sebagai daerah khusus tanpa adanya penjelasan lebih lanjut, tidak sejalan dengan

konsep negara kesatuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 UUD 1945 serta konsensus nasional “Empat Pilar Kebangsaan”.

Konsep Daerah khusus tanpa ada penjelasan yang lebih rinci dalam RUU IKN menempatkan penyelenggaraan pemerintah daerah IKN dikelola oleh Otorita IKN di mana pengisian jabatan kepala Otorita IKN dilakukan melalui penunjukan oleh Presiden. Fraksi PKS memandang bahwa pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan kembali konsep penyelenggaraan pemerintahan IKN melalui kelembagaan Otorita IKN mengingat konstitusi Pasal 18 ayat(3) dan 18 ayat(4) UUD 1945 hanya mengenal kelembagaan Gubernur dan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah tingkat provinsi.

RUU IKN juga menetapkan bahwa di wilayah IKN tidak ada pelembagaan keterwakilan masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fraksi PKS jelas menolak konsep ini karena penyelenggaraan pemerintah daerah tanpa adanya kelembagaan DPRD tidak hanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 tetapi juga akan melahirkan otoritarianisme di Ibu Kota Negara.

Selain itu Fraksi PKS juga keberatan terhadap konsep pembagian wilayah IKN yang disebut “setingkat provinsi” tanpa adanya penegasan lebih lanjut terkait status kewilayahan dibawahnya. Fraksi PKS memandang bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 telah menetapkan konsep pembagian kewilayahan dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota. Konsep pembagian kewilayahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 bersifat definitif sehingga tidak memberikan tafsir lain dalam penerapan Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945. Oleh sebab itu penggunaan frasa “setingkat provinsi” dan tidak adanya penegasan lebih lanjut perihal pembagian wilayah turunan dalam IKN sebagaimana diatur dalam RUU IKN sangatlah kurang tepat dan tidak sejalan dengan penyelenggaraan negara yang didasarkan pada konsep negara kesatuan.

Kedua, karakteristik Indonesia yang beragam dan masyarakat adat yang terikat oleh wilayah adat, belum dijelaskan secara detail tentang teknis memperhatikan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat dalam RUU tersebut serta melibatkan mereka dalam

perencanaannya. Ketiga, dalam pemindahan ibu kota tersebut harus ada jaminan berupa kesiapan infrastruktur kehidupan, kesiapan wilayah dan kesiapan instansi untuk pindah ke ibu kota Baru. Jika tidak, akan berpotensi memberikan dampak kerentanan ketahanan keluarga para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan ikut dipindahkan ke ibu kota baru tersebut yang jumlahnya setidaknya mencapai 180.000 jiwa.

Keempat, pembangunan IKN akan mengakibatkan perubahan lingkungan dan kawasan hutan yang mengancam kehidupan hewan-hewan dan tumbuhan (keanekaragaman hayati) yang jumlahnya ribuan. Kelima, perlunya rencana induk yang baik dan transparan, meliputi berbagai aspek komprehensif termasuk pendanaannya serta terintegrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RUU ini. Hal ini menjadi penting untuk menghindari terjadinya proyek pembangunan mangkrak dan *over budget*. Keenam, terkait pemindahan IKN sendiri, sampai saat ini tidak pernah ada penjelasan hasil studi kelayakan alasan terpilihnya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, sebagai Ibu Kota Negara yang baru. Bahkan dalam Naskah Akademik (NA) RUU IKN pun tidak ada. Pentingnya perencanaan ini harus berkaca pada kegagalan pemindahan Ibu Kota negara lain yang saat ini justru masuk peringkat 10 kota dengan perencanaan tata kota paling buruk di dunia oleh sebuah platform arsitektur, *Rethinking The Future* (RTF). Di antaranya dua ibu kota baru, yaitu Brasilia, ibu kota Brasil dan Naypyidaw, ibu kota Myanmar.

Ketujuh, pendanaan IKN harus memperhatikan kemampuan fiskal yaitu ketika keseimbangan primer APBN positif. Artinya bahwa tidak boleh ada konsekuensi penambahan utang atas adanya proyek IKN. Apalagi kondisi APBN kita saat ini sedang berdarah dan defisit. Kedelapan, RUU IKN harus menjamin sumber pendanaan lain dengan skema KPBU dalam proyek IKN tidak melibatkan dan/ atau membebani APBN pada kemudian hari. Kesembilan, RUU IKN harus dapat menjamin tidak ada pemindahtanganan barang milik negara yang sebelumnya digunakan oleh kementerian/ lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta dan/atau provinsi lainnya, karena hal tersebut berisiko merugikan negara. Kesepuluh, pengadaan tanah untuk IKN yang mengambil tanah hak milik pribadi, tanah adat dan tanah eks kesultanan harus dengan pemberian ganti rugi yang adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesebelas, kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional harus berada di ibu kota negara. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Keduabelas, Ibu kota negara seharusnya menjadi *center of gravity* yang menjadi area yang paling penting bagi pertahanan dan keamanan negara. Oleh sebab itu, wilayah ibu kota haruslah memiliki arsitektur sistem pertahanan yang baik dalam memberikan perlindungan pusat kegiatan politik dan administrasi negara. Namun demikian, rancangan pemindahan Ibu Kota Negara saat ini belum memiliki perencanaan yang jelas terkait dengan tahapan pemindahan struktur pertahanan. Ketiga belas, Pemindahan status Ibu Kota Negara yang ditargetkan akan dilakukan pada semester I (satu) tahun 2024 sangatlah terburu-buru.

5. Tolak Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS)

Fraksi PKS **MENOLAK** Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual/RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk ditetapkan sebagai UU. Penolakan tersebut bukan karena tidak setuju perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terutama kaum perempuan, melainkan karena RUU TPKS ini tidak memasukkan secara komprehensif seluruh Tindak Pidana Kesusilaan yang meliputi: kekerasan seksual, perzinaan, dan penyimpangan seksual yang menurut kami menjadi esensi penting bagi pencegahan dan perlindungan dari kekerasan seksual.

Fraksi PKS dengan tegas menolak segala bentuk kejahatan seksual sehingga perlu diberikan pemberatan hukuman. Kejahatan seksual itu meliputi kekerasan seksual, seks bebas, dan seks menyimpang yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, norma agama, dan adat ketimuran. Ketiganya merusak tatanan keluarga bahkan peradaban bangsa. Untuk itu, ketiganya harus diatur secara bersamaan dalam sebuah UU yang komprehensif tentang tindak pidana kesusilaan/tindak pidana kejahatan seksual.

Pengaturan komprehensif ini penting untuk melindungi bukan hanya korban kekerasan seksual tapi korban-korban kejahatan seksual lainnya akibat seks bebas dan seks menyimpang. Fraksi PKS

ingin agar ketiganya diatur dalam UU khusus sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling menguatkan. Tanpa pengaturan komprehensif dimaksud perlindungan terhadap korban menjadi tidak kuat, tidak utuh, atau parsial.

Faktanya, baik kekerasan seksual, seks bebas, dan seks menyimpang semuanya menghasilkan korban dan korbannya adalah anak-anak kita, remaja, perempuan, orang tua dan keluarga Indonesia. Dan dalam banyak kasus mereka yang terlibat seks bebas dan seks menyimpang kerap mengalami kekerasan seksual berupa pelecehan seksual, eksploitasi seksual, hingga pemaksanaan aborsi akibat hubungan di luar nikah, dll. sebagaimana data-data pengaduan kekerasan seksual di luar perkawinan (pacaran) yang diterima dan dipaparkan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, Pusat Advokasi PKS, dan lembaga-lembaga advokasi kekerasan seksual lainnya. Yang sangat menyedihkan kasus-kasus seks bebas dan seks menyimpang serta kekerasan seksual akibat perilaku tersebut semakin marak dan meningkat grafiknya dari tahun ke tahun.

Untuk itu, Fraksi PKS berpendapat jangan pisahkan tindak pidana kekerasan seksual seolah-olah berdiri sendiri. Ia harus diatur komprehensif dengan tindak pidana kesusilaan lainnya (seks bebas dan seks menyimpang) agar pencegahan dan perlindungan terhadap korban bisa berlaku efektif dan maksimal. Sayangnya, RUU TPKS/PKS tidak mengakomodir usulan pengaturannya yang komprehensif tersebut sehingga bukannya memperkuat upaya penghapusan kekerasan seksual dan perlindungan korban tetapi justru menimbulkan bias tafsir legalisasi seks bebas dan menyimpang (karena tidak adanya kekerasan). Akibatnya upaya penghapusan terhadap segala bentuk kejahatan seksual dipastikan tidak akan efektif.

Penolakan Fraksi PKS terhadap RUU TPKS juga semata-mata untuk mengingatkan DPR bahwa sebenarnya terdapat semangat untuk mengatur tindak pidana kesusilaan secara lengkap dan komprehensif di dalam RUU KUHP. Dan hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. Dalam Pertimbangan Hukumnya, Hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa diperlukan langkah perbaikan untuk melengkapi pasal-pasal yang mengatur tentang Tindak Pidana Kesusilaan oleh pembentuk undang-undang.

Dengan disahkannya RUU TPKS menjadi undang-undang kita kehilangan momentum untuk mendapatkan pengaturan komprehensif tentang tindak pidana kesusilaan. Fraksi PKS berpandangan mengeluarkan tindak pidana kekerasan seksual dari kerangka komprehensif pembahasan tindak pidana kesusilaan berpotensi menimbulkan multitafsir pada aspek delik pemidanaannya sebagaimana polemik yang terjadi saat ini. Hal ini menyebabkan pengaturan yang parsial dan melemahkan upaya pencegahan dan penindakan segala jenis tindak pidana kesusilaan yang meresahkan dan mengancam masyarakat. Fraksi PKS menyimpulkan bahwa RUU TPKS jika berdiri sendiri tanpa adanya aturan hukum Indonesia yang melarang perzinahan dalam perluasan pasal 284 KUHP dan larangan LGBT sebagai perluasan pasal 292 KUHP, maka muatan RUU TPKS berisi norma *sexual consent*.

Fraksi PKS pada saat itu mengingatkan bahwa DPR bersama Pemerintah punya PR untuk melengkapi dan memperbaiki pasal-pasal yang mengatur tindak pidana kesusilaan sebagaimana Putusan MK, yaitu meliputi kekerasan seksual, perzinahan, dan penyimpangan seksual. Sejatinya Fraksi PKS ingin agar pembahasan RUU TPKS dilakukan secara paralel dengan pasal-pasal tindak pidana kesusilaan dalam RUU KUHP sehingga lebih utuh, lengkap, integral serta tidak tumpang tindih (*overlapping*) sekaligus, yang paling penting, tidak menimbulkan pemaknaan lain yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Fraksi PKS aktif merumuskan pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan yang komprehensif dan RUU KUHP yang akhirnya disahkan dan mengatur semua bentuk tindak pidana kesusilaan seperti perzinahan dan seks menyimpang yang mengkhawatirkan dan mengancam kehidupan masyarakat.

Sebagai catatan : Perjuangan Fraksi PKS, meskipun gagal di UU TPKS, mendapat respon positif dan diafirmasi dalam sejumlah pasal UU KHUP yang baru yang mengakomodir perluasan pasal tentang perzinahan yang tidak hanya terbatas pada pelaku yang terikat perkawinan tapi berlaku bagi siapa saja antara laki-laki dan perempuan. UU KUHP yang baru juga memberikan norma pencabulan baik yang dilakukan terhadap lain jenis maupun sesama jenis. Demikian juga norma larangan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo/kohabitasi).

6. Tolak Pasal Penghinaan Presiden, Pemerintah dan Lembaga Negara dan Penegasan Larangan LGBT dalam Pesengesahan RUU KUHP

Fraksi PKS DPR memberikan dua catatan tegas dalam persetujuan RUU KUHP dalam rapat paripurna yaitu (1) penghapusan atau pencabutan pasal penghinaan Presiden/Wapres, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara dan (2) menuntut penegasan larangan perilaku LGBT.

Fraksi PKS konsisten sejak awal meminta pasal penghinaan Presiden/Wapres, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara ini dicabut, bahkan sejak awal-awal pembahasan 5-10 tahun yang lalu. Karena pasal ini berpotensi menjadi pasal karet dan mengancam demokrasi. Pasal ini bisa disalahgunakan penguasa untuk memberangus kritik masyarakat. Padahal, semangat untuk mereformasi produk kolonial, sementara pasal penghinaan Presiden/Wapres, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara ini sejarahnya melindungi penguasa kolonial. Hal ini ironis dan bisa setback demokrasi yang susah payah telah diperjuangkan melalui reformasi tahun 1998.

Terkait penegasan larangan dan pidana perilaku LGBT, Fraksi PKS melihat hal ini sudah sangat darurat melihat trend perkembangan penyimpangan moral ini dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan ada desakan dan kampanye sistematis yang memaksakan legalitas perilaku menyimpang ini. Dasar negara Pancasila dan UUD 1945 jelas tidak memberi ruang bahkan melarang perilaku LGBT. Sebab, ini bukan persoalan kebebasan dan hak asasi manusia namun penyimpangan. Kebebasan di Indonesia dibatasi oleh undang-undang berdasarkan norma agama dan budaya luhur bangsa sehingga tidak ada kebebasan tanpa batas atau bebas nilai seperti LGBT. Untuk itu, Fraksi PKS meminta dengan tegas perilaku LGBT dan semua jenis kampanyenya jelas pelanggaran nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang beradab dan merusak karakter bangsa. Sehingga semestinya kita tidak perlu ragu atau setengah hati menegaskan larangan LGBT dalam RUU KUHP.

Disamping itu, Fraksi PKS mengapresiasi bab kesusilaan dalam RUU KUHP yang lebih maju dengan adanya perluasan pasal tentang perzinahan dan kohabitasi (kumpul kebo), meskipun ada sejumlah catatan penguatan. Selain itu, RUU KUHP juga mengatur larangan bagi setiap orang melakukan perbuatan

cabul baik dilakukan terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya, yang bisa menjadi pintu masuk pidana bagi perilaku LGBT. Hanya saja pasal tersebut perlu lebih tegas menyebutkan larangan LGBT, mencakup perilakunya dan segala bentuk kampanyenya di ruang publik.

7. Tolak Pengesahan RUU (Revisi) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Fraksi PKS menolak Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi Undang-undang, karena Fraksi PKS menilai masih diperlukan pengkajian yang mendalam terhadap substansi perubahan undang-undang dimaksud. Adapun catatan Kritis F-PKS:

Pertama, berkaitan dengan Metode Omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Fraksi PKS menegaskan bahwa metode apapun yang akan digunakan haruslah bertujuan untuk mereformasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan agar menjadi lebih baik, berkualitas, dan berpihak kepada kepentingan rakyat dan Negara. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan problem tumpang tindih peraturan perundang-undangan, baik dari sisi konten/muatan, maupun teknis penataannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya metode yang pasti, baku, dan standar untuk menjadi pedoman yang sudah ditentukan serta dituangkan terlebih dahulu dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengalaman penyusunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disusun dengan menggunakan Metode Omnibus, alih-alih mengejar percepatan dan kepentingan penciptaan lapangan kerja, hal itu justru mengabaikan kualitas hasilnya karena kurangnya partisipasi dari masyarakat dan para *stakeholders*. Upaya untuk akselerasi pencapaian tujuan undang-undang tidak boleh dilakukan dengan menyimpangi tata cara dan pedoman baku yang berlaku demi mencapai tujuan tersebut karena hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUDNRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: telah terbukti

secara hukum bahwa tata cara pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta menyimpangi sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan substansial pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa proses pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUDNRI Tahun 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil. Selain itu, dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan Metode Omnibus yang mempunyai sifat kekhususan tersebut.

Kedua, Fraksi PKS mengusulkan sejumlah prasyarat penggunaan Metode Omnibus untuk menjamin adanya kepastian hukum, meningkatkan kualitas legislasi, dan melibatkan partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan undang-undang. Fraksi PKS mengusulkan prasyarat penggunaan Metode Omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa Metode Omnibus hanya dapat digunakan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan terhadap satu bidang atau satu topik khusus tertentu (Kluster). Penggabungan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Metode Omnibus dapat dilakukan untuk mengubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama terhadap satu bidang atau satu topik khusus tertentu (Kluster), agar penyusunan peraturan perundangan tersebut fokus hanya berkaitan dengan satu tema spesifik tertentu.
- 2) Penggunaan Metode Omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan dalam tahapan Perencanaan. Pentingnya menetapkan penggunaan Metode Omnibus dalam dokumen perencanaan adalah untuk menjelaskan perihal urgensi, ruang lingkup peraturan perundang-undangan terdampak, serta kompleksitas kebutuhan hukum sehingga memerlukan penggunaan Metode Omnibus untuk menyusun peraturan perundang-undangannya. Hal ini agar penggunaan Metode Omnibus

didasarkan pada pertimbangan yang matang mengingat penyusunannya melibatkan lebih dari 1 (satu) peraturan perundang-undangan dengan jenis dan hierarki yang sama.

- 3) Bahwa diperlukan pengaturan tentang alokasi waktu yang memadai untuk penyusunan peraturan perundang-undangan yang menggunakan Metode Omnibus agar penyusunannya tidak dilakukan dengan tergesa-gesa dengan mengabaikan partisipasi publik. Belajar dari pengalaman penyusunan UU Nomor 11 Tahun 2020 yang berkaitan dengan 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang di mana 77 (tujuh puluh tujuh) undang-undang merupakan perubahan undang-undang dan 1 (satu) undang-undang berupa pencabutan undang-undang yang dibahas dalam waktu relatif singkat (sejak 20 April s.d. 3 Oktober 2020) sehingga pembahasannya tidak optimal karena minimnya akses partisipasi publik. Ketika pengesahan RUU tentang Cipta Kerja pada Rapat Paripurna 5 Oktober 2020, tidak ada kejelasan perihal draft RUU cipta Kerja hasil pembahasan Panja Badan Legislasi, bahkan beredar beberapa versi draft RUU yang berbeda-beda. Hal ini membuktikan betapa serampangnya dalam melakukan pembahasan UU tentang Cipta Kerja tersebut.

Ketiga, Fraksi PKS TIDAK SEPAKAT jika materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan Metode Omnibus HANYA dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan tersebut (Pasal 97A). Hal ini karena ketentuan tersebut membatasi adanya revisi suatu materi muatan langsung di peraturan perundang-undangan asal (induk) yang terdampak oleh peraturan perundang-undangan yang menggunakan Metode Omnibus. Padahal sejatinya materi muatan tersebut juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistematika peraturan perundang-undangan asal (induk) nya, sehingga sudah semestinya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan asal (induk). Dalam pembentukan undang-undang, akses dari pemberlakuan ketentuan ini nantinya bisa menyandera pembentuk undang-undang karena TIDAK memiliki kebebasan untuk melakukan revisi materi muatan yang terdapat dalam undang-undang dengan Metode Omnibus pada undang-undang asalnya (induk).

Keempat, Fraksi PKS menolak ketentuan tentang perbaikan Rancangan Undang-undang setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam Rapat Paripurna DPR, karena hal ini membenarkan praktik legislasi yang tidak baik sehingga merendahkan marwah pembentuk undang-undang. Meskipun dalam Pasal 72 Ayat (1a) Draft RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa perbaikan hanya meliputi perbaikan terhadap kesalahan teknis penulisan yang dilakukan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas RUU tersebut, namun pada praktiknya ketentuan ini rawan untuk disalahgunakan.

Kelima, Fraksi PKS menegaskan bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus melibatkan pihak yang pro dan kontra secara seimbang serta partisipasi masyarakat secara bermakna, baik dari kalangan akademisi perguruan tinggi, organisasi masyarakat, maupun masyarakat umum. Selain itu, untuk mengoptimalkan partisipasi publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, Fraksi PKS mendorong agar setiap rancangan peraturan perundang-undangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas sehingga memberikan kesempatan kepada publik untuk turut mengkritisi dan memberikan masukan. Sejatinya sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, masyarakat memiliki hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) dalam proses penyusunan kebijakan publik yang akan berdampak kepada masyarakat.

Keenam, Fraksi PKS memberikan catatan perihal pengaturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan berbasis elektronik untuk diperjelas mengenai ruang lingkup dan pembatasannya agar dalam praktiknya tidak menimbulkan multitafsir. Perlu diperjelas mengenai apa yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik, apakah meliputi proses pembahasan dalam rapat-rapat di DPR yang dapat dilakukan secara virtual tanpa kehadiran fisik di ruang rapat.

Ketujuh, Fraksi PKS mengkritisi perihal pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan

Daerah Provinsi yang diambil alih menjadi dikoordinasikan oleh Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan karena hal ini bertentangan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah.

Kedelapan, Fraksi PKS mengusulkan agar dilakukan pembahasan yang lebih mendalam terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan mengundang para pakar hukum, akademisi di bidang Ilmu Perundang-undangan, serta praktisi untuk mendapatkan pandangan yang lebih jernih dan komprehensif. Selain itu, sebaiknya revisi ini TIDAK dimaksudkan semata-mata untuk memberikan payung hukum terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun sebagai upaya untuk menyusun tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang ada dalam rangka perbaikan kualitas legislasi agar memihak kepada kepentingan rakyat. Dengan disahkannya perubahan undang-undang ini, maka tetap harus ada pembahasan ulang secara benar terhadap UU tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan cacat formil/inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD NRI Tahun 1945.

8. Tolak Pengesahan RUU Bea Meterai

Fraksi PKS DPR RI menolak kenaikan bea meterai sebesar 70% dari Rp 3.000 dan Rp 6.000 menjadi satu tarif Rp 10.000. Dibandingkan pada awal pembahasan RUU Bea Meterai pada periode 2014 – 2019, saat ini Indonesia berada di jurang resesi yang bisa menjalar menjadi krisis ekonomi. Kenaikan Bea Meterai berpotensi semakin melemahkan daya beli masyarakat dan menjadi beban baru bagi perekonomian, karena kita tahu meterai digunakan untuk berbagai urusan dan kepentingan masyarakat. Maka, prinsip dasarnya tidak boleh menyulitkan dan membebani masyarakat luas yang pasti terdampak dengan kenaikan cukup besar tersebut.

9. Tolak Pengesahan RUU Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP)

Fraksi PKS menyatakan menolak pengesahan RUU HPP karena dalam sejumlah ketentuannya menaikkan tarif pajak. Fraksi PKS menyatakan tidak sepakat dengan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen yang berlaku mulai 1 April 2022 dan 12 persen yang berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Kenaikkan tarif PPN akan kontraproduktif dengan rencana pemulihan ekonomi nasional. Hal tersebut karena sumber PPN terbesar berasal PPN dalam negeri yang berupa konsumsi masyarakat, lalu PPN impor yang merupakan konsumsi bahan modal dan bahan baku bagi industri.

UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP juga belum memberikan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, bahkan UU ini dianggap sebagai bentuk kebijakan perpajakan yang timpang. Tergerusnya rasa keadilan masyarakat, terlihat dari klausul pasal yang mengatur tentang program pengungkapan sukarela wajib pajak dan pengenaan pajak terhadap sejumlah kebutuhan pokok. Kebijakan pengungkapan sukarela wajib pajak dalam UU HPP sebagai bentuk lain dari program Tax Amnesty jilid 2, karena terdapat kesamaan prinsip dengan Tax Amnesty yang berlaku pada 2016, yakni adanya tarif khusus bagi wajib pajak yang bersedia mengungkapkan asetnya. Program pengungkapan sukarela wajib pajak itu menunjukkan kebijakan perpajakan yang semakin timpang dan jauh dari prinsip-prinsip keadilan. Tax Amnesty merupakan kebijakan yang tidak mencerminkan prinsip keadilan. Pengusaha kelas kakap sebagai wajib pajak yang menjadi sasaran program itu akan mendapatkan keringanan, tapi di sisi lain RUU HPP membebani masyarakat luas dengan pengenaan pajak bahan pokok. Sebagai catatan, Tax Amnesty Jilid I sebagai pelaksanaan UU 11/2016 tentang Pengampunan Pajak tidak terbukti meningkatkan penerimaan negara jangka panjang. Pada periode 2018, rasio perpajakan hanya mencapai 10,2 persen dan 2020 hanya mencapai 8,94 persen. Pemerintah banyak memberikan berbagai insentif dan fasilitas perpajakan diberikan kepada masyarakat berpendapatan tinggi, pemerintah justru terus mengejar sumber-sumber perpajakan dari masyarakat berpendapatan rendah. Sistem administrasi perpajakan yang tidak efisien terus menjadi permasalahan dalam pembangunan.

10. Tolak Pengesahan RUU Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD)

Fraksi PKS merupakan satu-satunya Fraksi menolak pengesahan RUU HKPD. UU No. 1 Tahun 2022 ini ditenggarai tidak sejalan dengan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 dan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 dalam membangun otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Bahkan semakin menjauh dari amanat Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 dimana “hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang”. Semangat otonomi daerah tidak terlihat dalam RUU HKPD, karena justru cenderung memperkuat resentralisasi oleh pemerintah pusat. Inovasi pengelolaan fiskal dalam rangka pembangunan daerah dikebiri, dengan banyaknya program pembangunan yang harus ‘disetir’ atas nama Program Strategis Nasional (PSN).

Bahkan banyak penolakan oleh Pemerintah Daerah (pemda), baik pemerintah provinsi, pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten atas pasal-pasal yang cenderung banyak merugikan keuangan pemerintah daerah. Semangat otonomi daerah tidak terlihat dalam RUU HKPD, karena justru cenderung memperkuat resentralisasi oleh pemerintah pusat. Keberadaan UU HKPD tidak akan banyak membantu mengurangi ketergantungan anggaran daerah terhadap transfer pusat yang mencapai hingga 80,10 persen. Bahkan dikhawatirkan akan semakin mengancam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berada pada kisaran 12,87 persen dari total APBD.

11. Catatan Kritis RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK)

Fraksi PKS memberikan banyak masukan atas RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dan selama proses pembahasan, banyak masukan dari Fraksi PKS yang telah diakomodir. Secara umum hasil pembahasan RUU PPSK telah memiliki tujuan baik untuk memperkuat sektor keuangan, dan meningkatkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hasil pembahasan yang mengembalikan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam kepada kementerian yang

membidangi Koperasi dan tidak oleh OJK patut diapresiasi. OJK hanya mengatur dan mengawasi koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Kerangka stabilitas sistem keuangan sudah seharusnya menutup celah adanya kemungkinan kebijakan *bail-out* atau penyelamatan sektor keuangan yang menggunakan APBN.

12. Catatan Kritis Pengesahan RUU Mineral Batubara (Minerba)

Fraksi PKS memberikan catatan kritis terhadap UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) di antaranya meminta agar sebagian kewenangan sektor minerba diberikan kepada pemerintah daerah, meminta agar BUMN dan BUMD mendapat prioritas dalam pengusahaan sektor minerba terutama untuk izin pemegang PKP2B yang akan selesai masa kontraknya, meminta agar pemerintah konsisten dalam upaya menaikkan nilai tambah sektor minerba dengan kewajiban pembangunan smelter oleh pemegang izin usaha minerba, meminta pembatasan luas wilayah izin usaha minerba secara tegas, meminta penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan sektor minerba di daerahnya serta meminta pengelolaan sektor minerba memperhatikan masalah lingkungan dan kelestariannya.

Sejalan dengan pandangan atas UU Minerba, Fraksi PKS meminta Pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan meningkatkan pajak progresif dan menerapkan pembagian royalti yang lebih proporsional dan adil bagi daerah penghasil batubara. Hal ini karena peningkatan harga batubara di pasar internasional secara timpang lebih menguntungkan pengusaha batubara yang sudah tajir melintir. Hal ini tentu tidak adil karena masyarakat dan pemerintah daerah yang menanggung semua dampak kerusakan lingkungan atas eksploitasi batu bara yang dilakukan para pengusaha. Pemerintah perlu menata ulang semua aturan bisnis batu bara, jangan sampai aturan yang ada hanya menguntungkan dan melindungi pengusaha saja. Saat ini Peraturan Pemerintah hanya mengatur 5 layer harga batubara acuan (HBA). Semakin tinggi harga HBA maka persentase pajaknya semakin tinggi. Dari rentang prosentase pajak 14 persen sampai 28 persen. Ketika HBA di atas USD 100/ton, maka pajaknya menjadi 28 persen. Fraksi PKS mengusulkan penambahan 2 layer untuk HBA di atas 200/ton dikenakan royalti 33 persen dan untuk HBA di atas USD 300/

ton dikenakan royalti 38 persen. Ini memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan akan menambah penerimaan negara secara optimal.

13. Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja

Fraksi PKS sejak awal menolak pengesahan RUU Cipta Kerja karena banyak permasalahan baik secara materiil maupun formil. Pada akhirnya UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi terutama dari sisi formil pembentukan undang-undang. Fraksi PKS mengkritik pemerintah yang kemudian menerbitkan Perpu untuk menjawab Putusan MK tersebut. Dalam pandangan Fraksi PKS penerbitan Perpu tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Formil UU tentang Cipta Kerja karena TIDAK MENGAKOMODASI poin-poin perbaikan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Fraksi PKS menilai bahwa Perpu tentang Cipta Kerja sama sekali tidak menjawab amanat putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah menetapkan koridor perbaikan secara prosedural dan materiil terhadap UU tentang Cipta Kerja sehingga penerbitan Perpu ini tidak menggugurkan status 'inkonstitusional bersyarat' terhadap UU tentang Cipta Kerja”.

Penerbitan Perpu tentang Cipta Kerja tidak memenuhi persyaratan adanya 'hal ikhwal kegentingan yang memaksa'. Fraksi PKS menilai alasan Pemerintah untuk menerbitkan Perpu tidak terukur dan kurang tepat, dibandingkan dengan melakukan revisi terhadap UU tentang Cipta Kerja melalui mekanisme legislasi di DPR sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian Formil UU tentang Cipta Kerja. Meskipun ekonomi global melambat, seperti sudah terjadi sejak pertengahan 2022, namun pemulihan ekonomi nasional relatif stabil. Kondisi saat ini justru menunjukkan tidak adanya potensi resesi, krisis, maupun ancaman inflasi tinggi. Oleh sebab itu, Fraksi PKS menilai bahwa berdasarkan kondisi ekonomi tersebut, maka tidak ada urgensi yang genting dan mendesak yang bisa dijadikan dasar untuk Pemerintah menerbitkan Perpu.

Selain itu, keputusan Pemerintah untuk menerbitkan Perpu tentang Cipta Kerja dengan mengesampingkan pilihan untuk melakukan revisi UU tentang Cipta Kerja melalui mekanisme legislasi dengan melibatkan DPR. Hal ini merupakan manifestasi kekuasaan yang jauh dari penghormatan terhadap semangat demokrasi yang

mengedepankan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya. Atas dari itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) meminta agar Perpu tentang Cipta Kerja dicabut dengan mengatur segala akibat hukum dari pencabutan tersebut. Di sisi lain, meminta agar segera melakukan revisi terhadap UU Cipta Kerja. Fraksi PKS, mendorong agar dilakukan perbaikan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui mekanisme perubahan undang-undang di DPR dengan melibatkan partisipasi publik secara bermakna dan maksimal sejalan dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja.

14. Tolak RUU Kesehatan

Fraksi PKS menolak RUU Kesehatan karena mengarah liberalisasi dan lemahkan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat. Hal ini juga sejalan dengan aspirasi hamper semua organisasi profesi kesehatan yang juga menolak RUU ini. RUU Kesehatan dilakukan dengan metode omnibus law sehingga berimplikasi pada banyak undang-undang di sektor kesehatan, oleh karenanya perlu perncermatan yang serius. Mengingat penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merata, adil, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan dan dijamin pemerintah.

Maka pembahasan RUU ini harus dilakukan secara menyeluruh, teliti, dan melibatkan pemangku kepentingan terkait sehingga tidak ada pengaturan yang luput, kontradiksi, dan bahkan baru diundangkan sudah diuji ke MK atau tidak lama kemudian harus direvisi atau bahkan menimbulkan kontroversi polemik yang berlarut-larut seperti UU Cipta Kerja yang juga ditolak oleh Fraksi PKS.

Fraksi PKS berpendapat bahwa penyusunan RUU Kesehatan yang dibahas dengan metode omnibus ini berpotensi menyebabkan kekosongan pengaturan, kontradiksi pengaturan, dan juga belum melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan terutama organisasi-organisasi profesi kesehatan. Ada pengaturan dalam beberapa UU yang dihapuskan dalam draft RUU Kesehatan ini. Sehingga, hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum. Antara lain, dihapuskannya aturan mengenai SIPB bidan, juga dihapuskannya mengenai praktik kebidanan yang mengatur tempat praktik dan jumlahnya sesuai dengan tingkat pendidikan bidan. Fraksi PKS

berpendapat bahwa penugasan pemerintah kepada BPJS yang merupakan badan hukum publik yang bersifat independen harus disertai kewajiban pemerintah dan pendanaannya. Di samping itu, anggaran kesehatan harus dialokasikan secara memadai untuk memastikan bahwa negara memberi layanan kesehatan berkualitas yang aksesibel bagi masyarakat Indonesia.

Fraksi PKS berpendapat bahwa ada kerawanan dalam draft RUU Kesehatan pasal 236 mengenai tenaga medis dan tenaga Kesehatan warga negara asing dapat melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dalam rangka investasi atau non investasi bisa mengarah pada liberalisasi sector kesehatan yang tidak terkontrol sehingga mengancam pelayanan kesehatan masyarakat dan tenaga medis atau tenaga kesehatan Indonesia.

Fraksi PKS berpendapat bahwa di semua negara pengaturan tentang profesi kesehatan diatur dalam UU tersendiri. Oleh karena itu, seharusnya draft RUU Kesehatan ini tidak menghapus materi pengaturan profesi-profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Inilah yang kemudian memantik respon penolakan dari kalangan organisasi profesi kesehatan.



RUU INISIATIF FRAKSI PKS 2014-2022

Sejak awal periode 2014 Fraksi PKS mengambil inisiatif dan mengusulkan sejumlah undang-undang penting yang diharapkan mampu mengokohkan keummatan, kerakyatan dan kebangsaan Indonesia, yaitu RUU Tentang Kewirausahaan, RUU Tentang Ketahanan Keluarga, RUU Tentang Perlindungan Simbol Agama dan Tokoh Agama, dan RUU Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol.

1. RUU Tentang Kewirausahaan Nasional

RUU Kewirausahaan Nasional diusulkan Fraksi PKS sejak tahun 2015. RUU ini murni dan *genuine* usul inisiatif Fraksi PKS DPR sebagai bentuk komitmen Fraksi PKS untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri secara ekonomi. Dengan RUU ini diharapkan mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan ekstensif bagi rakyat kecil dengan berbagai kebijakan afirmatif yang memungkinkan rakyat kecil, UMKM, memiliki akses yang mudah terhadap permodalan dan program-program pemberdayaan. RUU ini telah menjadi usul inisiatif sejak Periode 2014-2019 dan dilanjutkan pada periode berjalan 2019-2024. Dalam perkembangannya substansi dari RUU inisiatif Fraksi PKS

ini diakomodir dalam UU tentang Ekonomi Kreatif, UU Cipta Kerja, hingga UU Tentang Perkoperasian.

2. RUU Tentang Ketahanan Keluarga (RUU KK)

Merupakan ikhtiar Fraksi PKS untuk mengokohkan keluarga Indonesia menjadi keluarga yang sejahtera dan bermartabat. RUU sempat diusulkan pada Prolegnas 2020 meski belum mendapatkan persetujuan bersama. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional dan pilar utama ketahanan nasional dihadapkan pada kerentanan sosial akibat pengaruh globalisasi yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam tatanan keluarga, sehingga diperlukan kebijakan ketahanan keluarga sebagai arus utama dalam pembangunan nasional yang berpihak pada perlindungan dan kepentingan keluarga.

Fraksi PKS menyatakan pentingnya RUU KK dengan sejumlah argumentasi sebagai berikut: Pertama, RUU KK diperlukan sebagai payung hukum dalam mengatur mengenai Ketahanan Keluarga, hal ini dikarenakan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai keluarga yang berlaku saat ini masih parsial dan belum dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Kedua, hadirnya RUU KK sebagai *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, yang mengatur Ketahanan Keluarga secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri secara komprehensif sehingga dapat memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi Keluarga.

Ketiga, kehadiran RUU KK merupakan hal yang penting dan mendesak untuk mengembalikan dan menguatkan fungsi keluarga dalam kebijakan Ketahanan Keluarga yang bersifat hulu dan mampu berpihak pada kepentingan Keluarga dan memberikan perlindungan kepada Keluarga.

Keempat, RUU KK mendorong Pengarusutamaan Ketahanan Keluarga sebagai strategi yang mengintegrasikan perspektif Ketahanan Keluarga secara rasional dan sistematis pada setiap tahap dan siklus pembangunan.

Kelima, kehadiran klausul Rencana Induk Pembangunan Ketahanan Keluarga (RI-PKK) sebagai pedoman Pembangunan Ketahanan Keluarga yang menjadi acuan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Keenam, RUU KK mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan kebijakan pengembangan lingkungan ramah keluarga yang meliputi pekerjaan ramah keluarga dan wilayah ramah keluarga.

Ketujuh, RUU KK telah mengatur perlindungan keluarga secara komprehensif. Perlindungan Ketahanan Keluarga meliputi perlindungan eksistensi Keluarga, perlindungan legalitas Keluarga, perlindungan Keluarga dari kerentanan.

Kedelapan, RUU KK mendorong terselenggaranya sistem informasi Ketahanan Keluarga secara terintegrasi. Data yang update dan valid dalam suatu sistem informasi Ketahanan Keluarga dibutuhkan digunakan untuk perencanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi, pusat data dan informasi, pengaduan, media belajar terkait dengan Ketahanan Keluarga, basis perencanaan pengembangan sumber daya manusia nasional.

Kesembilan, klausul Pendidikan Ketahanan Keluarga dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga menguatkan fungsi dan peran keluarga sebagai tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak, sebagaimana amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat pendidikan informal yang sangat kuat memberikan peran pendidikan pada keluarga maupun lingkungan sekitar.

3. RUU Perlindungan Simbol Agama dan Tokoh Agama

RUU ini merupakan ikhtiar Fraksi PKS untuk menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia dengan jalan pemuliaan dan penghormatan symbol-simbol dan tokoh-tokoh agama apapun yang ada di Indonesia. RUU ini masih dalam tahap proses penyusunan dan harmonisasi di Baleg DPR RI. RUU ini merupakan realisasi salah satu janji politik PKS selama masa kampanye tahun 2019, yaitu memperjuangkan RUU tentang Perlindungan Tokoh

Agama (termasuk Ulama). Adapun urgensi dari RUU ini:

Pertama, para Tokoh Agama adalah orang-orang yang sangat dibutuhkan keberadaannya di tengah masyarakat karena peran mereka dalam menjaga dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Para tokoh agama pun sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara karena jasa mereka dalam merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan.

Kedua, para tokoh Agama berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan persekusi, kekerasan fisik dan non fisik, maupun ancaman hukum saat mereka melaksanakan perannya dalam menyampaikan muatan keagamaan kepada umatnya. Perlindungan ini sangat diperlukan karena mereka merupakan kelompok yang rentan mendapatkan persekusi dan tindakan kekerasan, sebab saat menyampaikan materi keagamaan yang sesuai dengan ajaran kitab suci seringkali bersinggungan dengan agama lain yang tidak sejalan.

Ketiga, simbol agama adalah sesuatu yang disakralkan dan dimuliakan oleh para penganut agama, menodai dan melecehkan simbol agama sama dengan merendahkan para penganutnya yang akan memicu terjadinya konflik dan perpecahan di antara para penganut agama. Untuk menjaga kerukunan antar umat beragama maka diperlukan adanya perlindungan terhadap semua simbol agama dari segala bentuk penodaan, pelecehan dan pengrusakan.

Keempat, kondisi peraturan dan perundang-undangan yang ada saat ini belum memadai untuk memberikan perlindungan kepada para tokoh agama dan simbol agama, akibatnya sering terjadi tindakan persekusi terhadap para tokoh agama dan penodaan serta perusakan terhadap simbol agama.

Isu krusial dari RUU ini antara lain : (1) Pelindungan fisik kepada Tokoh Agama dari tindakan diskriminatif, persekusif, dan intimidatif dalam menyampaikan ajaran Agama; (2) Perlindungan hukum bagi Tokoh Agama dari tuntutan hukum atas pernyataan dan/atau perbuatan yang dilakukan dalam menyampaikan ajaran Agama; (3) Pelindungan Simbol Agama; (4) Pembentukan Dewan Pelindungan dan Pemberdayaan Tokoh Agama (DPPTA)

4. RUU Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol

Merupakan ikhtiar Fraksi PKS untuk menekan maraknya peredaran minuman beralkohol yang merusak generasi bangsa. Minuman beralkohol adalah sumber masalah kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai negara berketuhanan, Indonesia semestinya memiliki regulasi yang jelas dan tegas terkait peredaran minuman beralkohol.

RUU ini masih dalam tahap proses penyusunan dan harmonisasi di Baleg DPR RI. FPKS menginisiasi dan memperjuangkan agar materi muatan RUU ini dapat menekan dan mengendalikan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol, yang efek terhadap penggunaannya menyebabkan kehilangan kesadaran sehingga dapat memicu tindakan kriminalitas. FPKS berkomitmen agar dalam RUU ini diatur secara tegas soal pembatasan rantai distribusi dan konsumsi minuman beralkohol, serta menyasar pembatasan dalam hal produksinya. Namun, sayangnya pembahasan ini stagnan selama beberapa masa sidang dikarenakan perbedaan pandangan antara Fraksi PKS, PPP, PAN yang menginginkan Frame Pelarangan, sementara Pemerintah dan beberapa Fraksi Lain menginginkan Frame Pengendalian dengan pelarangan terbatas. Poin krusial yang menjadi perhatian F-PKS:

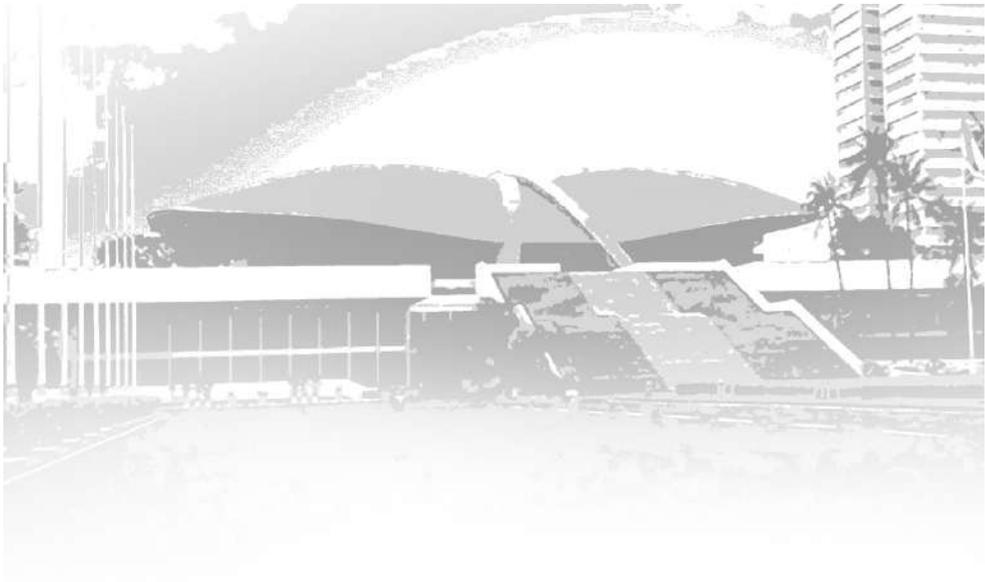
1) Judul

Masih seperti pada periode sebelumnya, judul menjadi perdebatan panjang yang belum mencapai kata sepakat, antara Pelarangan / Pengaturan / Pembatasan / Pengendalian. Jika harus merubah judul maka menjadi 'RUU tentang Minuman Beralkohol' saja yang lebih netral, karena jika pengendalian/pengaturan maka leading sector yang muncul adalah perdagangan.

2) Mengusulkan dimasukkannya Kementerian Sosial sebagai bagian dari tim agar dapat melakukan rehabilitasi dan kerja sosial, dan menjadikan Kementerian Kesehatan sebagai leading sector.

3) Mengusulkan Perubahan Bab Pidana menjadi Bab Sanksi, mengingat ada beberapa bentuk pelanggaran yang dapat diberi hukuman berupa denda, rehabilitasi dan kerja sosial.

- 4) Mengusulkan Pelarangan mengendarai kendaraan dan berjalan bagi orang-orang yang dalam pengaruh alkohol dengan kadar tertentu dengan melakukan tes kadar alkohol.
- 5) Mengusulkan alih fungsi pabrik/produsen minuman beralkohol serta tanaman yang digunakan untuk memproduksi minuman beralkohol secara bertahap agar pihak-pihak yang terkena larangan ini tetap bisa memiliki alternatif penghasilan.
- 6) Memasukkan pada bagian penjelasan bahwa wisatawan yang dimaksud adalah wisatawan asing, dengan asumsi minol merupakan kebiasaan/kelaziman bagi sebagian wisatawan asing.
- 7) Melakukan penyesuaian pada sanksi penjara dan denda agar lebih sesuai dengan kondisi dan aturan hukum lain yang lebih baru.



PERJUANGAN FRAKSI PKS MELAHIRKAN UNDANG-UNDANG KEUMMATAN

1. Undang-Undang Perbankan Syariah

FPKS menginisiasi dan mendorong disahkan undang-undang perbankan syariah. Pengesahan RUU tentang Perbankan Syariah menjadi Undang-Undang Perbankan Syariah pada 17 Juni 2008.

2. Undang-Undang Tentang Wakaf

FPKS menginisiasi dan mendorong disahkan UU ini agar wakaf menjadi bagian dari perekonomian di Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Wakaf pada 27 Oktober 2008.

3. Undang-Undang Anti Pornografi

Fraksi PKS memperjuangkan RUU ini karena menyadari bahaya akses terhadap pornografi dan pornoaksi yang merusak mental dan kepribadian generasi bangsa. Dengan UU ini negara punya instrumen untuk membentengi generasi bangsa dari penyebaran budaya dan atau tontonan yang destruktif.

4. Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat

Revisi UU zakat diharapkan bisa dijadikan payung hukum optimalisasi kewajiban zakat bagi Umat Islam, pengelolaan zakat, dan pendistribusian zakat yang baik, namun diakhir pembahasan muncul beberapa pasal dalam UU ini sangat merugikan umat Islam karena akan memberangus eksistensi LAZNAS karena pengelolaan zakat dibuat bersifat sentralistik sehingga FPKS melakukan lobi agar LAZNAS yang dikelola ormas sudah berprestasi, maka harus dipertimbangkan eksistensinya. Lobi menghasilkan kesepakatan: LAZNAS diberikan waktu yang cukup untuk beradaptasi dan syarat akreditasi oleh kementerian tidak diperumit, serta hal-hal yang pokok saja. Serta diperpanjangkan masa adaptasi dari 2 tahun menjadi 5 tahun, dengan penyederhanaan syarat-syarat akreditasi. RRU ini disahkan menjadi UU pada 25 November 2011.

5. Undang-Undang Tentang Pesantren

Fraksi PKS menjadi pengusung lahirnya Undang-Undang Pesantren pada akhir periode DPR 2014-2019 sebagai ikhtiar untuk memajukan pendidikan pesantren dengan pengakuan, pembinaan, pemberdayaan, perbaikan dan peningkatan dukungan anggaran dan sarana prasarana. UU ini menguatkan keberpihakan negara pada pesantren sebagai soko guru pendidikan nasional dan benteng penjaga akhlak serta moralitas bangsa. Dengan UU ini Fraksi PKS berharap pesantren di Indonesia makin berkualitas sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan, agama, dan peradaban. UU mengakui semua jenis pesantren yang beragam di Indonesia sehingga semua karakteristik pesantren yang ada terakomodir dalam UU. Fraksi PKS dalam pendapat akhir UU secara tegas mengatakan bahwa pesantren terdiri atas:

- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengajian kitab kuning mengakomodasi usulan dan kekhasan pesantren NU;
- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin mengakomodasi pesantren bercorak khusus, seperti: Gontor dan sejenisnya;

- c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum mengakomodasi karakter pesantren lain di luar dua corak sebelumnya yang diusulkan oleh Muhammadiyah dan beberapa ormas lain.

Fraksi PKS mendukung penuh pelaksanaan UU Pesantren yang mengharuskan Pemerintah untuk mengalokasi dana untuk pesantren. Fraksi PKS mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Dana Abadi). Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 merupakan aturan lanjutan dari UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (pasal 49 ayat 2).

Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2019 menyatakan, Dana Abadi Pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan pesantren. Pesantren sendiri adalah Lembaga pendidikan yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia sejak sebelum Indonesia Merdeka. Lembaga pendidikan ini terus berkembang hingga kini jumlahnya mencapai 27.722 Pesantren berdasarkan data Pontren Kemenag. Dengan keluarnya Perpres Dana Abadi Pesantren maka Pemerintah sudah membuat Peraturan turunan yang legal untuk melaksanakan UU Pesantren. Antara lain untuk merealisasikan bantuan pendanaan Pesantren yang bersifat abadi, hingga masa yang akan datang.

Fraksi PKS bersama Umat akan terus mengawal dan mengkritisi agar tujuan dari Perpres untuk membantu Pesantren betul-betul bisa dilaksanakan secara adil dan amanah. Sehingga adanya Perpres ini akan membantu Pesantren sebagaimana harapan dunia Pesantren dan para Ulama Pengasuh Pesantren sesuai ketentuan UU. Hidayat mengingatkan jangan sampai aturan ini hanya memberikan harapan tanpa perwujudan apalagi menghadirkan ketidakadilan. Atau malah menyulitkan Pesantren dan para Kiyainya, sebagaimana dikhawatirkan oleh sebagian Pesantren dan Kiyai.

6. Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal (JPH)

UU ini bisa menjadi payung hukum atas penjaminan kehalalan produk baik barang/jasa, sehingga masyarakat muslim aman

dalam mengkonsumsi barang/jasa dan terhindar dalam pengelabuan keharaman produk. Pengesahan RUU ini menjadi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) pada 25 September 2014.

7. Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Yang diperjuangkan FPKS:

- 1) Perubahan paradigma bahwa regulator dan operator haji haruslah pihak yang berbeda sehingga bisa dilakukan evaluasi;
- 2) Pembentukan Badan Penyelenggara Haji Indonesia (BPHI) dan Majelis Amanah Haji (MAH) sebagai pengawas;
- 3) Membuat aturan tentang KBIH, Pengelolaan Haji Khusus dan Umroh yang beberapa kali menimbulkan kerugian besar di masyarakat.
- 4) Jemaah haji usia 65 tahun ke atas mendapatkan prioritas kuota Haji Reguler;
- 5) Nomor tunggu antrian haji dapat diwariskan kepada ahli waris, jika dalam masa lamanya menunggu jemaah haji meninggal dunia atau tidak mampu lagi menunaikan ibadah haji.

8. Undang-Undang Tentang Pengelolaan Keuangan Ibadah Haji

FPKS menginisiasi UU ini agar dana haji dikelola Lembaga Keuangan Syariah (LKS) guna menjaga kehalalan sumber dana yang digunakan jamaah haji. Maksud dikelolanya dana haji oleh LKS adalah mengantisipasi tercampurnya dana haji seseorang dengan unsur yang tidak jelas kehalalannya atau disebut riba. Serta pengelolaan keuangan ibadah haji dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional pada 29 September 2014.



PERJUANGAN FRAKSI PKS MELAHIRKAN UNDANG-UNDANG KERAKYATAN DAN KEBANGSAAN

1. Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik

FPKS mendorong lahirnya UU ini untuk memberikan jaminan pelayanan yang prima dari instansi dan aparatur negara kepada masyarakat. UU ini mengubah paradigma aparatur sipil dari abdi negara menjadi pelayan masyarakat yang terikat maklumat dan kontrak pelayanan dengan masyarakat.

2. Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan

FPKS memperjuangkan UU ini karena menjadi momentum bagi perbaikan pendataan kependudukan secara nasional. Dengan data dan informasi yang benar maka pelayanan negara kepada rakyat/penduduk bisa dilaksanakan secara optimal. Basis data yang benar juga memungkinkan penyaluran program-program pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, dan efisien.

3. Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin

FPKS konsen mengawal lahirnya UU ini karena memberikan dasar yang kuat (mandatory) agar negara menyalurkan

program pengentasan kemiskinan secara terencana, terukur, dan komprehensif. UU mengintegrasikan seluruh potensi dan program penanggulangan kemiskinan yang selama ini tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan sektor.

4. Undang-Undang Tentang Tabungan Perumahan Rakyat

FPKS ikut mendorong RUU ini menjadi UU. Adanya regulasi tentang perumahan rakyat ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak, lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap keluarga Indonesia untuk mendapatkan kehidupan sejahtera lahir batin.

5. Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam

FPKS menginisiasi dan memperjuangkan ditetapkannya UU ini agar nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam mendapatkan perlindungan, keadilan, dan meningkat kesejahteraannya.

6. Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas

FPKS menginisiasi, mendorong, bahkan anggota FPKS menjadi Ketua Panja RUU ini. Memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, keadilan sebagai warga negara bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, serta mendorong terciptanya lingkungan yang ramah dengan penyandang disabilitas.

7. Undang-Undang Tentang Sistem Perbukuan

FPKS menginisiasi dan mendorong RUU ini untuk mencegah penyimpangan konten dalam buku pendidikan, serta memperjuangkan buku pendidikan gratis dan kemudahan akses buku dengan tingkat harga terjangkau. Selain itu, memastikan terdistribusinya buku pendidikan sampai ke daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T), dan penyediaan buku pendidikan untuk penyandang disabilitas,

8. Undang-Undang Tentang Paten

FPKS menginisiasi dan memperjuangkan UU ini agar memberikan afirmasi kepada para inventor lokal dengan

memberikan kemudahan dan insentif dalam pendaftaran paten sehingga mendorong daya saing, inovasi, dan kreativitas mereka dalam melakukan invensi yang dapat diterapkan dalam bidang industri, memberikan kemudahan dan insentif dalam pendaftaran paten sehingga mendorong daya saing, inovasi, dan kreativitas mereka dalam melakukan invensi yang dapat diterapkan dalam bidang industri. FPKS juga mengusulkan agar UU Paten harus bersinergi dengan kepentingan nasional Indonesia, terutama dalam hal perlindungan atas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Disamping itu, dalam menerjemahkan hukum internasional terhadap hukum nasional Indonesia, Pemerintah harus mengedepankan keberpihakan pada kepentingan Indonesia tanpa melanggar prinsip-prinsip internasional.

9. Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis

FPKS menginisiasi dan memperjuangkan UU Merek dan Indikasi Geografis agar menjamin terciptanya iklim investasi yang kondusif terkait penghargaan terhadap merek lokal agar dapat bersaing dengan merek asing, harus mengedepankan semangat perbaikan ekonomi bangsa yang didasarkan pada kepentingan nasional. FPKS juga mendorong Pemerintah harus menjamin adanya penyederhanaan proses pendaftaran merek yang relatif memakan waktu yang lama, karena akan menghambat akselerasi pertumbuhan usaha yang mengedepankan sarana promosi efektif melalui penyebarluasan merek, harus menjamin bahwa masyarakat lokal akan mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah setempat agar lebih mudah mendaftarkan hasil geografis daerahnya untuk mendapatkan perlindungan hukum.

10. Undang-Undang Tentang Pemajuan Kebudayaan

FPKS menjaga RUU ini agar tidak menyimpang dan tidak melegalisasi budaya khurafat (seperti mantra, jampi-jampi) dan budaya negatif yang harus dipertahankan. FPKS mengusulkan kebudayaan berazaskan norma agama, Pancasila, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, serta bertujuan untuk menciptakan peradaban bangsa. FPKS juga mengusulkan agar pemajuan kebudayaan Indonesia mendorong agar budaya-budaya positif dilestarikan, sedangkan budaya negatif untuk dikoreksi

sebagai bagian dari budaya nasional. Disamping itu juga melobi agar dihapuskan beberapa pasal yang multitafsir yang dikhawatirkan dijadikan alat untuk mengkriminalisasi da'i di daerah minoritas dan umat islam dalam nahi munkar menolak kontes miss universe atau miss yang lain dengan dalih penghalangan terhadap pemajuan bangsa.

11. Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

FPKS ikut menginisiasi dan memperjuangkan RUU ini agar memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia, dan mendorong pemerintah menyiapkan program pemberdayaan kaitannya dengan moratorium dan keputungan pekerja migran Indonesia.

12. Undang-Undang Tentang Kekeantinaan Kesehatan

FPKS ikut memperjuangkan RUU ini dan memberikan perhatian pada poin-poin berikut;

- 1) Perlunya diupayakan sinergisitas dengan RUU Perubahan atas UU No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (KIHT) karena memiliki banyak kesamaan,
- 2) Ketersediaan personil baik kesehatan, keamanan, maupun keimigrasian, serta fasilitas pemeriksaan (termasuk laboratorium) dan tempat isolasi, pada semua titik yang ditentukan,
- 3) Mekanisme pembatasan atau pengawasan kepada PPNS Kekeantinaan Kesehatan yang diberi kekuasaan sangat besar dalam RUU ini,
- 4) Penyelenggaraan kekeantinaan kesehatan yang melibatkan dunia internasional harus mempertimbangkan keamanan dan kedaulatan negara,
- (5) Dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar diperlukan sosialisasi yang massif, serta kerja sama dengan beberapa instansi seperti Kemensos, Polri & TNI.

13. Undang-Undang Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

FPKS ikut memperjuangkan UU ini. Poin krusial yang menjadi perhatian FPKS:

- 1) Mempertegas peran sektor SDA:
 - a. Sebagai bagian penting dari tugas dan fungsi pemerintah dalam meningkatkan optimalisasi penerimaan PNBPN mengingat sektor ini merupakan kontributor terbesar saat ini
 - b. Mengeksplisitkan obyek PNBPN yang berkaitan tidak hanya dengan izin pemanfaatan sumber daya alam tetapi juga yang menyangkut royalti, iuran tetap, iuran eksplorasi dan eksploitasi serta kompensasi penggunaan data dan informasi. Hal ini agar RUU PNBPN ini sejalan dengan UU Migas dan Minerba
- 2) Mendorong instansi pengelola PNBPN (Kementerian dan Lembaga Pemerintah) agar lebih profesional dan responsif dengan memberikan kejelasan tenggat waktu penunaian tugas serta sanksi administratif yang tegas
- 3) Menambah tingkat sanksi administratif dan pidana kepada Wajib Bayar yang terlambat membayar PNBPN Terhutang agar mempunyai efek jera secara psikologis

14. Undang-Undang Tentang Kebidanan

Poin Krusial yang diperjuangkan FPKS:

- 1) Peningkatan kompetensi Bidan sekaligus solusi agar para Bidan bisa memenuhi standar kompetensi dalam batasan waktu yang ditetapkan.
- 2) Perumusan standar pendidikan Bidan dan pengawasan berkelanjutan
- 3) Pegaturan tentang upaya pemerataan Bidan keseluruhan wilayah Indonesia dengan memperhatikan tingkat kebutuhan masyarakat sekaligus kesejahteraan dan keselamatan para Bidan.
- 4) Pegaturan tentang Bidan WNA harus segera dibuat mengingat karena bidan termasuk jenis tenaga kesehatan yang masuk dalam kriteria perdagangan bebas WTO.
- 5) Kewenangan Bidan dalam penanganan pasien harus diperjelas agar tidak tumpang tindih dengan profesi lain dan menjadi lebih aman bagi semua pihak.

15. UU Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Fraksi PKS mendukung dan memberikan masukan konstruktif RUU Perlindungan Data Pribadi. RUU ini telah lama ditunggu dan dibutuhkan agar negara kita dapat optimal melindungi data pribadi rakyat Indonesia seperti *profiling data*, pelindungan data WNI dari akses ilegal di luar negeri dan berbagai hal lainnya. Fraksi PKS juga fokus pada upaya melindungi data dengan mendorong server harus di Indonesia, sanksi yang bertingkat kemudian menjaga objektivitas lembaga pengawas PDP. Fraksi PKS juga aktif menerima aspirasi dari masyarakat mulai dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Asosiasi E-Commerce Indonesia, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), dan Kepala Kantor Perwakilan US-ASEAN Business Council dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.

16. Revisi UU Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Fraksi PKS setuju untuk melanjutkan Otonomi Khusus Papua dengan pengesahan Revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dengan catatan. **Pertama**, terkait Dana Otsus Papua. FPKS meminta pemerintah pusat meningkatkan pengawasan pengelolaan Dana Otsus, agar alokasi Dana Otsus per sektor dapat dilakukan dengan tepat dan akurat, karena pada dasarnya adalah dana rakyat yang harus digunakan untuk kepentingan rakyat Papua. **Kedua**, terkait pemekaran wilayah dan pembentukan daerah otonom baru di Papua. FPKS meminta kepada pemerintah baik di pusat maupun di Papua, agar pemekaran daerah jangan sampai mendorong menguatnya regionalisasi berbasis primordial karena absennya kebijakan untuk merangkai sinergi lintas daerah. **Ketiga**, mengenai peran lembaga khusus di Papua. Fraksi PKS mengetahui dan memahami dinamika lembaga-lembaga khusus di Papua, tentu saja ada banyak hal yang menggembirakan. Tapi tidak sedikit juga yang mengkhawatirkan kita. Fraksi PKS meminta pemerintah daerah di Papua memperhatikan keterwakilan adat dan perempuan dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas anggota MRP sehingga mampu menyuarakan kepentingan orang asli Papua. **Keempat**, partisipasi masyarakat Papua. Fraksi PKS

ingin mengingatkan bahwa Otsus Papua bukan milik elit, melainkan juga milik masyarakat, terutama Orang Asli Papua. Masyarakat dan Orang Asli Papua berhak untuk mendapatkan akses politik dan kesempatan dalam memperjuangkan kepentingannya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan Orang Asli Papua, baik secara politik maupun ekonomi, harus dilakukan karena hal itu merupakan roh otonomi khusus Papua. **Kelima**, rencana induk pembangunan Papua. Fraksi PKS menyampaikan usulan substansi soal wajibnya Papua memiliki rencana induk (*grand design*) pembangunan daerah. Termasuk di dalamnya adalah rencana strategis pengelolaan, penggunaan, dan pengawasan dana Otsus. Rencana induk itu diharapkan bisa memperhatikan semua aspek yang ada di Papua. Terutama upaya melakukan pembangunan ekonomi dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam, penciptaan pasar dan kegiatan ekonomi lainnya, haruslah didahului oleh kebijakan yang sistematis mempersiapkan Orang Asli Papua untuk berpartisipasi dan mengambil keuntungan darinya.

17. UU Tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru

Fraksi PKS menyetujui pemekaran sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat menjadi **UU Provinsi Papua Tengah, UU Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan UU Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan**. Tujuan utama pemekaran ini untuk meningkatkan jangkauan rentang kendali dan pelayanan publik bagi masyarakat. Pada saat yang sama wilayah tersebut harus dipastikan dapat tumbuh sesuai dengan potensi dan karakternya sehingga mampu melakukan akselerasi pembangunan di daerahnya. Fraksi PKS memberikan catatan kritis sebagai berikut. **Pertama**, FPKS meminta agar pemekaran di provinsi Papua dan Papua Barat dapat menjadi stimulus untuk perkembangan ekonomi dan pariwisata di daerah tersebut. Sehingga, rakyat pada provinsi tersebut, khususnya dari kalangan Orang Asli Papua (OAP), dapat memperoleh kesejahteraan sebagai imbal balik hasil dari pemekaran tersebut. **Kedua**, FPKS memandang perlunya koordinasi dan perencanaan yang cermat menyangkut pemindahan aset, personel, dan dokumen dari provinsi asal, agar tidak menimbulkan persoalan serius yang mengganggu

jalannya pemerintahan nantinya. **Ketiga**, FPKS menekankan Pemerintah perlu memprioritaskan peningkatan dan pematapanSDMyangberkualitasdanberdayasaingsehingga menjadi modal dalam membangun dan memajukan Papua dimasa yang akan datang. **Keempat**, FPKS menginginkan agar pemekaran provinsi di Papua ini dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Orang Asli Papua. **Kelima**, FPKS meminta agar pengangkatan Penjabat Kepala Daerah pada provinsi tersebut harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan waktu yang tertera pada UU ini.

18. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Fraksi PKS mendukung penuh reformasi hukum kolonial KUHP menjadi berciri dan berkarakter NKRI. Fraksi PKS setuju untuk mewujudkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berciri khas dan berkarakter hukum nasional dan dibuat oleh anak bangsa sendiri. Mengingat UU KUHP yang selama ini berlaku adalah hukum buatan kolonial Belanda. Tidak dapat dipungkiri mengandung perspektif hukum kolonial yang bukan saja tidak relevan dengan perkembangan zaman, namun juga tidak sejalan dengan karakter bangsa Indonesia.

Maka, Fraksi PKS mendukung penuh upaya untuk merevisi UU KUHP dengan sejumlah catatan kritis sebagai berikut. **Pertama**, Fraksi PKS mengapresiasi sejumlah pembaharuan yang dibawa dalam Rancangan Undang-Undang KUHP yaitu: Penerapan asas legalitas dengan penghormatan terhadap nilai kearifan lokal, penerapan asas *ultimum remidium* terhadap pidana pemenjaraan serta pembedaan korporasi. Fraksi PKS juga mendukung penuh semangat RUU KUHP dalam menegakkan etika dan moral masyarakat dengan reformulasi delik-delik kesusilaan dalam RUU KUHP. Ikhtiar tersebut diwujudkan dengan mereformulasi delik perzinahan sehingga memperluas ruang lingkup perbuatan zina, kriminalisasi perilaku kohabitasi, mereformulasi delik pencabulan sehingga dapat menjangkau pelaku pencabulan yang bersifat lain jenis (heteroseksual) dan sesama jenis (homoseksual) termasuk segala bentuk jenis kampanye dan propaganda atas perbuatan asusila tersebut yang dalam pandangan Fraksi PKS tidak selaras dengan nilai Pancasila dan falsafah ketimuran. Dalam konteks ini, Fraksi PKS

tegas menolak intervensi negara lain termasuk organisasi internasional yang memprotes aturan tersebut karena dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia. Bagi Fraksi PKS, hal ini terkait kedaulatan hukum bangsa Indonesia yang sesuai nilai, jati diri dan karakter bangsa Indonesia sehingga bukan semata soal hak asasi manusia apalagi jika hak asasi itu berlaku tanpa batas seperti HAM Barat.

Kedua, meski demikian, Fraksi PKS tetap memberikan catatan kritis bahkan penolakan atas sejumlah pasal KUHP baru yang bertentangan dengan semangat dan agenda reformasi, demokratisasi, kebebasan berpendapat dan pemajuan hak-hak sipil. Sebaliknya masih bernuansa kolonial, seperti pasal penghinaan presiden, pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Fraksi PKS melihat pasal tersebut bisa menjadi 'pasal karet' di tangan penguasa berwatak otoriter sehingga bisa mengancam demokrasi dan kebebasan berpendapat rakyat untuk menyampaikan kritik dan koreksi kepada penguasa. Oleh karena itu, Fraksi PKS meminta pasal tersebut dibatalkan pada pengesahan RUU KUHP yang lalu.

19. UU Tentang Pemasyarakatan

Fraksi PKS menyetujui dan terlibat aktif dalam pengesahan revisi RUU Kemasyarakatan terutama dalam mengatasi *overcrowding* Lapas. Ada 3 (tiga) hal penting yang disoroti PKS dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan di Lapas. Pertama, Fraksi PKS sangat mendukung upaya merevitalisasi lembaga pemasyarakatan agar semakin profesional, kredibel, dan humanis. Kedua, FPKS dalam rangka akselerasi tercapainya fungsi dan tujuan pemasyarakatan, perlu untuk mengoptimalkan penyelenggaraan program-program rehabilitasi dan reintegrasi sosial seperti pendidikan, latihan keterampilan kerja, dan penempatan kerja. Ketiga, FPKS menilai bahwa sangat penting untuk segera membangun Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan yang terintegrasi dengan *database* kelembagaan, proses bisnis, sumber daya manusia, data, layanan dan aplikasi, infrastruktur, keamanan, audit teknologi informasi dan pusat data.

20. UU Tentang Kejaksaan

Fraksi PKS menyetujui dan terlibat aktif dalam pengesahan revisi RUU Kejaksaan dengan sejumlah catatan penting. **Pertama**, perihal definisi & kedudukan lembaga kejaksaan harus diletakkan secara seimbang sesuai dengan kekhasan dan keunikannya dalam sistem ketatanegaraan di Republik Indonesia. **Kedua**, perumusan norma terkait tugas dan wewenang jaksa sebagai aparat penegak hukum harus didasarkan pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). **Ketiga**, ketentuan terkait larangan rangkap jabatan bagi Jaksa dan Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang eksisting perlu dipertahankan dalam rangka menjaga fokus, profesionalitas dan imparialitas dari penyandang profesi jaksa itu sendiri. Selain itu penormaan yang dapat memberikan jaminan kesejahteraan yang adil dan layak bagi Jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 17 RUU Kejaksaan perlu untuk dipertahankan.

21. UU Tentang Mahkamah Konstitusi

Fraksi PKS menyetujui revisi (perubahan ketiga) RUU Tentang Mahkamah Konstitusi dengan sejumlah catatan. **Pertama**, Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, politik hukum yang melandasi perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi haruslah berorientasi pada penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi serta meningkatkan independensi dan profesionalitas dari hakim konstitusi. **Kedua**, Dalam rangka penguatan kelembagaan, Mahkamah Konsitusi perlu diberikan ruang dalam memberikan penafsiran terhadap konstitusi, sehingga putusan-putusan yang dikeluarkan dapat menjadi terobosan hukum terhadap pelbagai masalah hukum ketatanegaraan yang kita hadapi dimasa depan.

Ketiga, Untuk menjaga integritas, independensi dan profesionalitas dari hakim konstitusi, maka Fraksi PKS berpendapat perlunya perumusan ulang terkait syarat usia dan perodesasi masa jabatan hakim. Syarat usia perlu disesuaikan sehingga hakim konstitusi yang kelak terpilih benar-benar merupakan seorang negarawan paripurna yang memahami semangat konstitusi dan tidak lagi terjebak pada kepetingan politik partisan. **Keempat**, Pembentukan Majelis Kehormatan

Mahkamah Konstitusi dalam rangka menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sangat penting guna menjaga integritas Hakim Mahkamah Konstitusi sekaligus wibawa lembaga.

Kelima, Perubahan ketiga terhadap Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi hendaklah berorientasi prospektif (masa depan) dan bukannya retrospektif (saat ini) apalagi secara retroaktif (berlaku surut). Keenam, Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud diatas tidak akan ada artinya apabila Mahkamah Konsititusi tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat kapasitas kelembagaannya dengan menjunjung enam prinsip dasar perilaku hakim yaitu independensi (*independence*), ketidakterpilihkan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepatutan dan sopan santun (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*) sebagaimana disepakati dalam *Bangalore Principles of Judicial Conduct*.

22. UU Tentang Jalan

Fraksi PKS melalui UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan memperjuangkan dukungan anggaran pembangunan jalan umum untuk Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat. Selain itu Fraksi PKS juga memperjuangkan diperhitungkannya faktor kemampuan bayar pengguna jalan tol dan pemenuhan SPM terkait penyesuaian tarif tol. Dalam hal konsesi jalan tol telah berakhir Fraksi PKS memperjuangkan agar status jalan tol diubah menjadi jalan bebas hambatan non-tol.

23. UU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EB-ET)

Fraksi PKS mendukung rancangan RUU EB-ET dalam rangka meningkatkan bauran energi hijau yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan pemanasan global. EB-ET ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Namun demikian pengembangan EB-ET ini harus disesuaikan dengan sumber daya energi yang kita miliki dan jangan sampai memberatkan keuangan negara dan PLN. Fraksi PKS juga mendesak agar RUU EB-ET ini segera dibahas oleh Pemerintah agar pengembangan EB-ET di tanah air dapat meningkat secara signifikan.

24. UU Tentang Ekonomi Kreatif

Pengesahan RUU ini menjadi Undang-Undang No 24 / 2019 tentang Ekonomi kreatif, pada tanggal 24 Oktober 2019. Tujuh point penting yang kita dukung dalam undang-undang ini adalah; (1) mengatur ekonomi kreatif mulai hulu hingga hilir; (2) pemberian insentif bagi para pelaku ekonomi kreatif; (3) pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif; (4) dalam hal pengelolaan keuangan untuk membantu pengembangan ekonomi kreatif, pemerintah pusat atau daerah dapat membentuk BLU dalam memberi pelayanan bagi pelaku ekonomi kreatif; (5) melindungi hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif berupa kekayaan intelektual sebagai jaminan atau kolateral; (6) ketersediaan infrastruktur ekonomi kreatif; (7) adanya rencana induk ekonomi kreatif.

25. UU Tentang Keolahragaan

Undang-undang Keolahragaan Nasional ini merupakan revisi terhadap Undang-undang No. 3/2005 tentang Sistem keolahragaan Nasional. Pengesahan RUU ini menjadi UU No. 11 / 2022 tentang Keolahragaan. Norma-Norma Substansi Perubahan RUU Keolahragaan yang Berdampak Positif bagi Olahraga Indonesia; (1) Penguatan olahraga sebagai penguatan dari SDG's, untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia; (2) Penguatan olahragawan sebagai profesi, pengaturan mengenai adanya jaminan perlindungan jaminan sosial melalui SJSN; (3) Dalam hal pendanaan, RUU ini mengatur mengenai dana perwalian keolahragaan; (4) Dalam hal kelembagaan KONI-KOI, adanya pengaturan yang jelas mengenai tugas dan kewenangan KONI-KOI serta penguatan sinergitas KONI-KOI; (5) Dalam hal pemajuan olahraga prestasi, dalam RUU ini diatur adanya pengaturan mengenai DBON untuk pusat dan desain olahraga daerah untuk daerah provinsi; (6) hal pengelolaan kejuaraan dan industri olahraga, dalam RUU ini diatur mengenai hak dan kewajiban penonton dan *supporter*; (7) Adanya pengaturan mengenai olahraga berbasis teknologi digital atau elektronik; (8) untuk kepentingan olahraga nasional dibentuk sistem data keolahragaan nasional terpadu; (9) penyelesaian sengketa olahraga, diatur hanya ada satu badan arbitrase yang bersifat mandiri dan keputusannya final dan mengikat serta dibentuk

berdasarkan Piagam Olimpiade; (10) Dalam hal olahraga penyandang disabilitas, dalam RUU ini diselaraskan dengan UU Penyandang Disabilitas dan dilakukan penguatan dimana pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Komite Paralimpiade Indonesia, organisasi olahraga penyandang disabilitas dan atau induk organisasi cabang ditingkat pusat dan daerah dengan menekankan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.



PERJUANGAN DALAM FUNGSI PENGAWASAN

Dalam fungsi pengawasan, Fraksi PKS DPR RI fokus dalam tiga area, yaitu pelaksanaan UUD 1945, Undang Undang, dan aturan pelaksanaannya berupa (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dst), pelaksanaan RPJMN, dan pelaksanaan program mitra kerja parlemen (kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya).

Pertama, pengawasan Fraksi PKS didasarkan pada kriteria ukuran dasar terpenuhinya tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan Konstitusi (melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial).

Kedua, pengawasan Fraksi PKS mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) dengan prinsip-prinsip umum yang dapat dipedomani antara lain:

- 1) Partisipasi, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

- 2) Aturan hukum, yaitu hukum harus adil, tanpa pandang bulu, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
- 3) Transparan, yaitu adanya kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan.
- 4) Daya tanggap, yaitu proses yang dilakukan di setiap institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
- 5) Berorientasi konsensus, yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.
- 6) Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- 7) Efektivitas dan efisiensi, yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber yang ada.
- 8) Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.
- 9) Bervisi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.
- 10) Saling keterkaitan, yaitu adanya kebijaksanaan yang saling memperkuat dan terkait serta tidak bisa berdiri sendiri.

Ketiga, pengawasan Fraksi PKS mendorong kualitas pelayanan publik yang semakin baik dari waktu-waktu oleh negara dan badan-badan pemerintahan. Fraksi PKS ingin memastikan aparaturnegara hadir sebagai pelayan rakyat karena mereka dibiayai oleh rakyat dan melaksanakan amanat rakyat.

Keempat, pengawasan Fraksi PKS mendorong terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi bagi rakyat sebagaimana amanat UUD 1945 bahwa pengelolaan perekonomian nasional bertujuan

untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka Bab-nya di dalam UUD digabung “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”.

Pasal 33 UUD 1945 mengandung 5 ayat dan mengatur soal pengelolaan ekonomi dan sumber daya nasional. Pada Ayat (1) dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak mesti dikuasai oleh negara termaktub dalam Ayat (2). Ayat (3), menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Ayat (4) pasal yang sama menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Perekonomian nasional juga harus dijalankan berdasarkan efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan mandiri serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Lalu pada Ayat (5) disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Ayat (1) hingga (4) diatur terpisah melalui undang-undang.

Sepanjang sejarah republik ini amanat Pasal 33 UUD tersebut belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Banyak kebijakan negara dalam bidang perekonomian yang berpihak pada pemodal dan investor, sebaliknya memarginalkan—jika tidak dikatakan tidak berpihak—pada rakyat kecil. Terlalu banyak contoh yang bisa dikemukakan, dan dalam persoalan ini Fraksi PKS akan selalu bersikap kritis dan tegas berada di posisi rakyat.

Dengan kerangka politik pengawasan di atas, Fraksi PKS berkomitmen mengevaluasi semua undang-undang dan kebijakan negara di berbagai bidang/sector yang tidak berpihak dan tidak menguntungkan rakyat. Sebaliknya Fraksi PKS mendorong dan hadirkan undang-undang dan kebijakan yang menjamin pelayanan dan kesejahteraan rakyat serta pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam kerangka itulah Fraksi PKS DPR memperjuangkan, mengawal, dan akhirnya menghadirkan UU Pelayanan Publik, UU Penanganan Fakir Miskin, hingga UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang melahirkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Fraksi PKS dengan sadar mengusulkan RUU Kewirausahaan Nasional untuk menjamin setiap warga negara mendapatkan kemudahan berwirausaha dengan akses modal dan pelatihan yang mudah dan dijamin negara.

Dalam kerangka tersebut di atas, Fraksi PKS bereaksi atas isu-isu publik yang kami nilai membebani ekonomi rakyat. Fraksi PKS ingin agar negara ini tidak dengan mudah mengambil kebijakan yang membebani rakyat, sebaliknya menyelesaikan berbagai permasalahan secara sistemik dan fundamental serta mengoptimalkan berbagai peluang sosial ekonomi yang justru memberdayakan rakyat.

Dalam mengambil sikap oposisi, jika ada kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, Fraksi PKS tidak hanya menolak membabi-butakan, tapi senantiasa menghadirkan solusi alternatif yang dapat dilakukan pemerintah. Fraksi PKS misalnya pernah menyampaikan secara langsung proposal (konsep) pengelolaan harga bahan bakar minyak hingga menemukan berapa sebenarnya harga keekonomian dari BBM yang beredar di pasaran. Fraksi PKS juga acapkali mengajukan formula subsidi untuk rakyat dalam rapat-rapat pembahasan anggaran di DPR untuk memastikan rakyat yang hidup di atas sedikit garis kemiskinan bisa terproteksi program-program pemberdayaan. Sejumlah isu di bawah ini menunjukkan pembelaan yang jelas dan tegas Fraksi PKS terhadap kepentingan rakyat bangsa dan negara.

1. Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kelas III dan Mengusulkan Penggunaan Hak Interpelasi Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Fraksi PKS dengan tegas menolak kenaikan iuran BPJS Kelas III. Di tengah kondisi rakyat yang sulit, pemerintah seperti kehilangan sensitivitas. Pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS pada Mei 2020. Pada perawatan kelas III, iuran Rp 25.500 meningkat menjadi Rp 42.000. Peserta kelas II, iuran sebesar Rp 51.000 dinaikkan menjadi Rp 100.000. Pada kelas I, iuran yang sebelumnya Rp 80.000 dinaikkan sampai Rp 150.000.

Interpelasi merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Pengajuan interpelasi dari PKS merupakan upaya mereka menjaga kehormatan parlemen. Pasalnya, DPR berhak mendapatkan penjelasan pemerintah soal kenaikan iuran itu karena tak sesuai dengan hasil rapat Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan yang tidak akan menaikkan iuran BPJS.

Fraksi PKS juga selalu mengkritisi manajemen BPJS Kesehatan yang dikatakan selalu mengalami defisit sehingga menyebabkan tunggakan pembayaran tagihan ke banyak rumah sakit. Bahkan Fraksi PKS sempat mewacanakan akan membentuk panitia khusus hak angket untuk mencari solusi terkait dengan besarnya tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan kepada pihak rumah sakit yang belum diselesaikan. Hal ini semata-mata untuk mengurai permasalahan dan solusinya secara komprehensif sehingga jaminan kesehatan terhadap seluruh warga negara tetap dapat ditunaikan secara bertanggung jawab oleh negara.

Fraksi PKS mendesak solusi yang komprehensif dan jangka panjang sebab tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan ini bisa berdampak sistemik terhadap jaminan kesehatan masyarakat. Jika negara gagal memberikan jaminan kesehatan bisa saja terperosok kepada negara gagal (*failed state*).

Jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara kepada rakyatnya. Ini amanat konstitusi dan undang-undang. Jangan sampai negara ini menjadi negara gagal akibat abai atau gagal melayani rakyatnya yang membutuhkan pertolongan kesehatan. Jangan sampai kebijakan pemerintah berhenti pada solusi jangka pendek dan parsial yakni sekadar menambal defisit dana BPJS tanpa menyelesaikan penyebab sistemik defisit tersebut. Jangan sampai masalah terus berulang dan akhirnya BPJS bangkrut/*collapse* dan seluruh rakyat terkena dampaknya.

Fraksi PKS serius mengawal dan mengawasi upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan BPJS Kesehatan. Mengingat permasalahan BPJS Kesehatan yang terus defisit ini mengancam keberlangsungan operasional rumah sakit. Sudah banyak rumah sakit mengeluh ke DPR bahkan terbuka di ruang publik soal tunggakan dan keterlambatan pembayaran BPJS. Rumah sakit tidak mungkin bisa berjalan tanpa biaya operasional. Akibat tunggakan ini banyak rumah sakit yang terancam tidak bisa melayani lagi pasien BPJS atau setidaknya membatasi pelayanan pasien BPJS. Pasien pun sudah banyak yang mengeluh karena banyak rumah sakit kini mengurangi jumlah pasien BPJS dan layanannya.

2. Tolak Kenaikan Harga Gas LPG 3 Kg dan Minta Perbaiki Distribusi

Gas melon 3 kg masih menjadi kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat yang tidak mampu. Fraksi PKS selalu menjaga agar ketersediaan dan harganya selalu dapat diakses oleh masyarakat. Fraksi PKS menolak kenaikan harga eceran tertinggi (HET) gas 3 kg bersubsidi. Setiap tahun Fraksi PKS meminta agar kuota gas melon ini selalu ditambah agar kebutuhan yang terus meningkat dapat terpenuhi. Di tengah upaya pemerintah yang kerap gagal dalam mengurangi angka kemiskinan, ketersediaan gas melon ini sangatlah penting. Lebih penting lagi proses distribusinya yang harus tepat sasaran. Pemerintah harus memperkuat pengawasan distribusi gas melon dan menindak tegas setiap upaya pengoplosan dan kebocoran agar hak masyarakat tidak mampu tetap terjaga. Sistem distribusi harus diperkuat dengan menyempurnakan data masyarakat tidak mampu sehingga gas melon ini dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya.

Di sisi lain, Fraksi PKS terus mendorong dan mengawal agar pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga terus berjalan dan mencapai target yaitu sebesar 4 juta sambungan jargas rumah tangga (SR) pada tahun 2024. Ketersediaan jargas ini sangat penting agar masyarakat mendapatkan energi yang lebih bersih dan murah. Produksi gas dalam negeri cukup berlimpah sehingga perlu jargas yang cukup untuk menyerapnya. Sayangnya tahun 2021 Pemerintah baru dapat membangun 662 ribu sambungan atau baru 16 persen dari target. Di tahun 2021 Pemerintah mengalokasikan Rp. 1.2 triliun untuk pembangunan 120.776 SR sambungan jargas. Sementara di tahun 2022 merosot anggarannya menjadi hanya sebesar 41 ribu sambungan jargas. Fraksi PKS meminta agar anggaran negara dialokasikan secara memadai agar target 4 juta sambungan dapat terealisasi di tahun 2024.

3. Tolak Kenaikan Harga-Harga Kebutuhan Pokok

Kenaikan harga kebutuhan pokok merupakan isu yang terus terjadi setiap tahunnya khususnya menjelang hari raya dan akhir tahun. Kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga di antaranya adalah ayam per ekor, minyak curah, beras dan telur. Kemudian daging sapi, cabai rawit merah dan bawang merah.

Untuk meredam gejolak harga pangan Fraksi PKS mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk turun langsung ke lapangan mengecek harga, ketersediaan, produksi dan distribusi kebutuhan bahan pangan. Kemendag juga perlu melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah yang memiliki surplus komoditas pangan, agar daerah yang kekurangan pangan dapat terjaga supply nya, karena salah satu penyebab naiknya harga barang adalah berkurangnya pasokan dan meningkatnya demand. Selain itu juga dapat diadakan pasar murah, bazar murah, atau kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), serta melakukan inovasi dalam menjaga ketersediaan bahan pangan melalui berbagai kegiatan, misalnya mengintensifkan gerakan swadaya masyarakat dalam menanam tanaman pangan, gerakan hemat energi dan pangan.

4. Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi

BBM merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga Fraksi PKS terus mengawal agar kebutuhan tersebut terpenuhi. Fraksi PKS secara umum terus memantau ketersediaan dan harga BBM. Bahkan Fraksi PKS *walk out* dari sidang paripurna dalam rangka menolak kenaikan BBM. Untuk jenis BBM umum Fraksi PKS meminta agar Pemerintah dan Pertamina efisien dan menyesuaikan harga dengan kondisi harga minyak dunia. Seringkali harga minyak dunia sudah turun tapi harga BBM di dalam negeri belum diturunkan Pertamina. Hal ini dapat memicu naiknya inflasi yang akan menggerus daya beli masyarakat. Khusus untuk BBM bersubsidi dan juga BBM penugasan maka Fraksi PKS selalu meminta agar kuotanya ditambah karena banyaknya masyarakat yang masih bergantung pada ketersediaan BBM tersebut. Solar bersubsidi juga harus dicukupkan untuk kalangan petani dan nelayan yang sangat bergantung penghidupannya pada ketersediaan solar bersubsidi ini. Seiring dengan upaya agar BBM bersubsidi tersebut tepat sasaran bagi yang berhak, Fraksi PKS meminta agar distribusi BBM ini tidak membuat repot dan menyulitkan masyarakat dengan beragam aturan (aplikasi), dll.

5. Tolak Kenaikan TDL dan Penghapusan Kelas 450 VA

Fraksi PKS menolak rencana Pemerintah untuk menaikkan tarif listrik di awal tahun 2022. Masyarakat masih dalam situasi pandemi, daya beli mereka belum pulih. Sektor industri juga belum

bangkit. PHK terjadi di beberapa sektor industri yang terdampak pandemi. Sebagian besar masyarakat mengeluh dengan besarnya beban pengeluaran yang harus ditanggung. Naiknya tarif dapat memicu kenaikan inflasi. Dan inflasi akan melemahkan daya beli masyarakat, kemudian secara langsung akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Alih-alih menaikkan tarif listrik, seharusnya Pemerintah menambah bantalan sosial berupa diskon tagihan listrik, sehingga rakyat terbantu dalam situasi pandemi ini. Fraksi PKS juga menolak wacana penghapusan pelanggan 450 VA. Hal ini akan menambah sulit kehidupan masyarakat tidak mampu karena harus berlangganan dengan daya yang lebih besar di luar kebutuhannya.

6. Tolak Kenaikan Tarif Toll dan KRL

Di tengah pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini Pemerintah telah beberapa kali menaikkan tarif tol. Terkait hal ini Fraksi PKS selalu menolak kenaikan tarif tol karena akan semakin menaikkan laju inflasi akibat naiknya biaya logistik. Selain itu Fraksi PKS meminta agar Pemerintah meneliti secara transparan terlebih dahulu kemauan bayar pengguna atau *willingness to pay* (WTP) dan kemampuan bayar atau *ability to pay* (ATP) dari para pengguna yang dapat dilihat dari hasil survei. Terkait penerapan sistem tol otomatis tanpa buka kaca atau *Multi Lane Free Flow* (MLFF), Fraksi PKS berpendapat hal ini berpotensi pada ancaman PHK bagi puluhan ribu karyawan jalan tol, sehingga Fraksi PKS meminta KemenPUPR memberikan arahan kepada Badan Usaha Pelaksana sistem MLFF sehingga tidak menimbulkan dampak PHK karyawan jalan tol.

Pemerintah juga berencana menaikkan tarif commuter line kereta rangkaian listrik (KRL) Jabodetabek. Tarif KRL diperkirakan naik menjadi Rp 5.000,- untuk 25 km pertama dan untuk tarif lanjutan KRL 10 km berikutnya tetap di angka Rp. 1.000,-. Menanggapi hal tersebut FPKS berpendapat bahwa tarif dasar KRL Commuter Line belum saatnya dinaikkan. Pengguna jasa KRL sendiri banyak yang menolak kenaikan tarif ini dan meminta agar kenaikan itu dikaji ulang. Fraksi PKS juga menolak wacana pemberlakuan kenaikan tarif tol hanya untuk orang kaya, Fraksi PKS berpendapat bahwa adanya diskriminasi tersebut justru akan membuat orang-orang kaya akan kembali menggunakan kendaraan pribadi dan malah berpotensi menyebabkan kemacetan. Fraksi PKS mengingatkan

bahwa transportasi massal ditujukan untuk semua kalangan, baik itu orang yang kaya maupun tidak.

7. Tolak APBN Untuk Danai Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dan Usul Pansus Hak Angket Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Fraksi PKS sejak awal tegas menolak penggunaan APBN untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Pemerintah sendiri sejak awal menjanjikan bahwa proyek ini tidak akan menggunakan dana APBN melainkan dana konsorsium swasta. Akan tetapi kenyataannya, APBN harus menutup modal untuk membiayai proyek ini melalui PMN yang digelontorkan kepada PT KAI sebagai anggota konsorsium. Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Fraksi PKS menolak penggunaan APBN untuk hal yang tidak esensial seperti dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung karena mencederai asas keadilan sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Pemerintah telah mengorbankan APBN yang tengah dalam kondisi 'berdarah' saat ini karena digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Dalam perkembangannya, tata kelola pembangunan infrastruktur dan pengelolaan kereta cepat juga bermasalah. Fraksi PKS memberikan banyak catatan terkait proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, selain biayanya yang membengkak hingga harus mendapatkan suntikan APBN, proyek ini juga tercatat sering kali terjadi kecelakaan. Setidaknya terjadi tiga kecelakaan besar yaitu meledaknya pipa Pertamina, rubuhnya salah satu tiang penyangga kereta cepat dan tabrakan antara kereta teknis dengan kereta pengangkut penumpang. Isu lain yang penting untuk dicermati adalah adanya wacana penghentian operasional KA Argo Parahyangan demi mendorong penggunaan moda Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Fraksi PKS menolak penghapusan KA Argo Parahyangan karena masyarakat membutuhkan banyak alternatif transportasi. Kemudian terkait harga tiket, PT. KCIC diperkirakan akan mematok tarif tiket KCJB Rp. 125 ribu sampai Rp. 250 ribu untuk tiga tahun pertama. Setelah itu, tarifnya naik menjadi Rp. 150 ribu hingga Rp. 350 ribu. Harga tiket tersebut terlalu rendah sehingga berpotensi mengambil ceruk pasar angkutan bus dan travel. Fraksi

PKS memperjuangkan adanya batas atas dan batas bawah harga tiket kereta api, hal ini untuk menjamin adanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin keberlangsungan usaha UMKM di bidang transportasi seperti bus dan travel.

8. Tolak dan kritisi kenaikan biaya haji yang memberatkan rakyat kecil petani, nelayan, buruh, pedagang kecil dll yang sudah menabung bertahun-tahun

Pemerintah menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2023 sebesar Rp. 90,05 juta. Dari jumlah tersebut biaya perjalanan ibadah haji (Bpih) yang harus dibayar jamaah sebesar 49,81 juta. Ada kenaikan sekitar 10 juta dari tahun 2022 yang sebesar 39,6 juta.

Fraksi PKS menolak besaran BPIH 2023 dengan pertimbangan utama : *Pertama*, dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi jemaah haji yang sudah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi, yang sebagian besar adalah kalangan masyarakat kelas menengah bawah, seperti petani, nelayan, dan pedagang kecil, dimana mereka mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk bisa mendaftar haji. Sementara, jika mereka terpaksa harus menambah jumlah pembayaran hingga dua kali lipat, maka akan sangat memberatkan jemaah. *Kedua*, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang baru pulih setelah mengalami resesi dan perlambatan dalam dua tahun terakhir yang berdampak pada lesunya aktivitas ekonomi pedagang, petani, dan nelayan karena sebagian besar berhenti beroperasi sehingga membuat kondisi keuangan para calon jemaah haji menjadi tidak stabil.

Bagi Fraksi PKS biaya tersebut masih terlalu tinggi dan seharusnya masih bisa diturunkan dengan berbagai efisiensi dan negosiasi dengan pihak-pihak terkait seperti komponen penerbangan, menghilangkan regulasi zonasi hotel/pemukiman jamaah, opsi mengubah pola permukiman dengan pemberian uang tunai kepada jemaah sebagai kompensasi biaya makan bagi jemaah, memangkas durasi haji dari semula 40 hari menjadi 30 hari dimana terkait ketersediaan bandara pemerintah bisa mengusulkan ke pemerintah Saudi mengoptimalkan bandara baru maupun lama, serta renegotiasi dengan pihak Arab Saudi khususnya para PT pengelola pelayanan masyair sehingga biaya untuk komponen pelayanan masyair dapat ditekan serasional mungkin.

Fraksi PKS sejak awal telah menawarkan konsep pengelolaan keuangan haji dan penyelenggaraan haji untuk menjaga *sustainability* pembiayaan haji serta desain pengelolaan dana haji yang baik, berkeadilan, serta sesuai dengan syariat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sehingga dapat memberikan keringanan terhadap biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung oleh jemaah. Salah satunya, Fraksi PKS mendorong BPKH untuk segera menyusun *roadmap* terukur yang tidak lebih dari 8 tahun yang sampai pada gilirannya seluruh nilai manfaat hasil dari pengelolaan dana haji oleh BPKH pada tahun berjalan terbagi habis untuk seluruh jemaah haji. Fraksi PKS mengharapkan supaya tidak ada nilai manfaat yang nilainya besar namun (sebagaimana yang terjadi saat ini dimana terdapat akumulasi nilai manfaat yang mencapai Rp15 triliun) belum terdefiniskan secara tepat terkait siapa pihak pemiliknya sehingga terancam tidak memperoleh jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Namun Fraksi PKS menyatakan belum puas lantaran kinerja BPKH jauh dari harapan karena hingga saat ini capaian dana manfaat rata-rata hanya menyentuh kisaran 3,5 hingga 7% per tahun, padahal biaya yang diperlukan setiap tahunnya lebih dari Rp9 triliun. Oleh karena itu, Fraksi PKS juga mendorong BPKH untuk bekerja secara lebih berani namun tetap berhati-hati dalam menginvestasikan dana haji ke berbagai instrumen yang mampu memberikan imbal hasil yang besar dengan nilai, sekurang-kurangnya dua digit, atau hingga menyentuh tiga digit mengingat langkah tersebut sangat memungkinkan karena peluangnya ada dan terbuka lebar, misalnya dengan investasi pada ekosistem haji seperti perhotelan di Mekah dan Madinah yang okupansinya mencapai 80% sepanjang tahun, investasi pada pengelolaan perjalanan ibadah umrah dan investasi lain yang aman, tetapi menghasilkan return yang lebih besar.

Fraksi PKS menaruh harapan besar agar di masa mendatang menjadi tidak mustahil bila suatu hari nanti dimana nilai manfaat yang diperoleh dari hasil kelolaan dana haji berhasil mencapai dua hingga tiga kali lipat, jemaah dapat hanya membayar 25-30 persen dari BPIH meskipun BPIH-nya telah menembus angka seratus juta atau lebih sekalipun. Namun disayangkan, dengan berkaca pada realitas hari ini, apa yang terjadi justru jauh dari ekspektasi. Pasalnya, meski pengelolaan keuangan haji yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun, tetapi pola pembiayaan terhadap

penyelenggaraan haji tetap masih saja dilakukan dengan kurang efisien. Ditambah, hasil dari pengelolaan dana haji yang masih terbilang konservatif dengan imbal hasil rata-rata 3,5-7% persen per tahun. Terkait problematika itu, Fraksi PKS memandang bahwa praktik tersebut mencerminkan tata kelola pengelolaan keuangan haji dan penyelenggaraan ibadah haji yang kurang baik sehingga harus diakhiri meskipun tetap harus mempertimbangkan berbagai kaidah syariat dalam upaya keluar dari kondisi yang sangat rumit ini. Sebab dalam kaidah fikih dikatakan.

9. Tolak Pembangunan yang Bertumpu pada Utang dan *Warning* Utang Negara Yang Melampaui Ratio PDB

Utang Negara kian melambung. Rasio utang terhadap PDB meningkat secara tajam. Posisi terakhir utang Pemerintah per 31 Oktober 2022 tembus mencapai Rp. 7.496,7 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 38,36%. Pembayaran bunga utang yang kian menyempitkan fiskal negara, diperkirakan akan mencapai Rp. 403,9 triliun, sampai dengan akhir tahun 2022. Nilai tersebut porsinya mencapai 20,87% dari total belanja pemerintah pusat tahun 2022.

Berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri, kata Bung Karno. Nyatanya, dalam kurun waktu 2014-2022 terjadi peningkatan jumlah utang dan pembayaran bunganya yang signifikan. Pada tahun 2014 utang Pemerintah sebesar Rp. 2.608,78 Triliun, dalam kurun waktu tujuh tahun meningkat secara signifikan hingga Rp. 7.496,7 Triliun.

Berdasarkan data, utang Indonesia dan bunganya dari Tahun ke Tahun menunjukkan pembengkakan yang signifikan.

Tahun	Nilai Utang	Nilai Bunga
2017	Rp. 3.995 triliun	Rp. 216,6 triliun
2018	Rp. 4.418 triliun	Rp. 257,9 triliun
2019	Rp. 4.786 triliun	Rp. 275,5 triliun
2020	Rp. 6.074 triliun	Rp. 314,1 triliun
2021	Rp. 6.908 triliun	Rp. 343,5 triliun
2022	Rp. 7.496,7 triliun (Oktober 2022)	Rp. 403,9 triliun RAPBN 2023: 441,4 triliun

Peningkatan jumlah utang Pemerintah tidak bisa dilepaskan dari kebijakan defisit yang diterapkan oleh Pemerintah dalam mengelola APBN setiap tahunnya. Besarnya angka defisit setiap tahunnya berpotensi terjadinya *default* atau gagal bayar utang.

Hasil Reviuw Kestinambungan Fiskal Tahun 2020 BPK RI menunjukkan bahwa indikator kerentanan utang pada tahun 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan oleh International Monetary Fund (IMF) dan International Debt Relief (IDR). Selain itu, indikator kestinambungan fiskal 2020 sebesar 4,27 persen telah melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411 – Debt Indicators, yaitu di bawah 0 persen.

Fraksi PKS menolak pembangunan negara yang bertumpu pada utang yang kian melambung. Fraksi PKS tak henti mengingatkan bahwa pembayaran utang dan bunganya yang terus membengkak akan membebani generasi yang akan datang. Dan jika jerat utang itu semakin besar dan melampaui kemampuan keuangan negara untuk mengembalikannya, maka Indonesia bisa kehilangan marwahnya untuk menjadi negara yang berdaulat dalam berbagai bidang.

10. Tolak Impor Produk Pangan

Fraksi PKS mengkritik pemerintah yang selalu mudah mengeluarkan kebijakan impor pangan tanpa ada studi kelayakan dan didukung data yang akurat. Kebijakan impor beras misalnya, acapkali menimbulkan polemik lantaran data stok beras antara yang dimiliki Badan Urusan Logistik (BULOG) dan Kementerian Pertanian (Kementan) berbeda. Adanya perbedaan data stok beras di Indonesia ini menandakan kurang harmonis kerja antar instansi pemerintah. Sehingga, kebijakan impor beras yang diambil dianggap tidak akurat, bahkan merugikan para petani Indonesia. Bahkan, Fraksi PKS menilai aneh kebijakan impor beras, diantaranya dilakukan pada saat stok dalam negeri yang tinggi, alasannya penambahan cadangan karena kekhawatiran kondisi terburuk. Kebijakan beras ini selalu banyak kontradiktif bila menyangkut persoalan impor. Alasan dibuat-buat dan bertentangan dengan kondisi dalam negeri. Di sisi lain pemerintah selalu mengatakan hasil tanam tahun ini membaik. Tapi impor *kok* jalan terus? Atas dasar itu, Fraksi PKS mendesak pemerintah agar tidak terus melakukan sandiwara pada

persoalan impor beras ini. Dikatakannya, tahun lalu pemerintah melakukan kebijakan sunyi impor beras, dimana tiba-tiba ada impor tanpa pembahasan dan penjelasan.

11. Kritik Tata Niaga Minyak Goreng, Usul Pansus Hak Angket Kelangkaan dan Kemahalan Harga Minyak Goreng

Pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 terjadi persoalan melambungnya harga dan langkanya minyak goreng. Persoalan ini berdampak kepada kehidupan masyarakat, utamanya ibu rumah tangga dan pedagang kecil. Fraksi PKS meminta Pemerintah harus dapat menyelesaikan persoalan minyak goreng, bahkan menindak tegas mafia tersebut jika benar terbukti. Fraksi PKS mengusulkan penggunaan hak angket untuk masalah minyak goreng. Penggunaan hak angket diatur Pasal 199 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Pasal 199 Ayat 1 berbunyi, "Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi".

Fraksi PKS meminta agar Pemerintah mengatur tata kelola minyak goreng yang produknya mendadak berkurang jumlahnya di pasaran dan harganya naik tajam. Produksi tahunan minyak sawit yang berlimpah seharusnya dapat menjamin kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Pemerintah perlu segera turun tangan langsung menyelesaikan masalah ini dengan memasok minyak goreng curah bagi masyarakat serta mengatur tata niaga minyak goreng kemasan. Pengelolaan minyak goreng tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Pemerintah harus sigap turun ke lapangan dan memeriksa rantai pasokan mulai dari pabrik kelapa sawit ke pabrik minyak goreng serta distribusi pemsarannya. Pemerintah jangan melemah dan harus ada tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku bagi mereka yang menimbun minyak goreng ini.

12. Fraksi PKS Kritik Pemerintah Gagal Wujudkan Kedaulatan Pangan

Dalam penilaian Fraksi PKS, Pemerintah gagal mewujudkan kedaulatan pangan untuk rakyat. Padahal kedaulatan pangan

adalah jalan toll menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Mengingat Indonesia memiliki semua potensi sumber daya alam yang tidak dimiliki negara manapun berupa hasil bumi: beras, kedelai, jagung, garam, ikan, daging sapi hingga bahan baku minyak goreng. Alih-alih mewujudkan kedaulatan, untuk urusan kemandirian pangan pun dalam sejumlah komoditas masih harus impor setiap tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari data impor tiap tahun sebagai berikut:

Tahun	Impor Beras	Impor Gula	Impor Daging Sapi	Impor Kedelai
2017	305,27 ribu ton	4,48 juta ton	160,19 ribu ton	2,67 juta ton
2018	2,25 juta ton	5,02 juta ton	207,42 ribu ton	2,58 juta ton
2019	444,5 ribu ton	4,09 juta ton	262,25 ribu ton	2,67 juta ton
2020	356,28 ribu ton	5,53 juta ton	223,42 ribu ton	2,47 juta ton
2021	407,74 ribu ton	5,45 juta ton	273,53 ribu ton	2,48 juta ton
2022	301,7 ribu ton (Jan - okt)	4,37 juta ton (alokasi)	266,6 ribu ton.	1,37 juta ton (Jan - Agst)

Data impor pangan di atas bertentangan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang banyak mengungkapkan ide-ide tentang ketahanan pangan nasional dengan memastikan kecukupan kebutuhan pangan, keterjangkauan dan penghentian impor pangan. Menurutnya memaksimalkan potensi dalam negeri adalah kunci keberhasilan. Pertanyaannya selama hampir 8 tahun ini sejauh mana perkembangan pengelolaan pangan di Indonesia? Sampai disini, Fraksi PKS menarik kesimpulan bahwa semua yang disampaikan presiden Jokowi terkait dengan penghentian impor dan kedaulatan pangan hanyalah lip service belaka.

Dalam pandangan Fraksi PKS, penyebab kedaulatan pangan belum juga bisa terwujud karena pemerintah tidak memiliki kebijakan pertanian dari hulu ke hilir yang komprehensif, pemerintah juga gagal mengatur tata niaga kebutuhan pokok dan pangan masyarakat. Akibatnya pangan yang melimpah di waktu panen tidak terserap pemerintah. Atau tiba-tiba Indonesia mengalami krisis minyak goreng di pasaran seperti yang terjadi akhir tahun lalu. Petani pun tak kunjung sejahtera, selain sawah yang semakin menyempit, biaya tanam berupa benih dan pupuk kerap melambung, sementara ketika panen harga jatuh. Di sisi lain, pemerintah tidak memiliki data stok pangan yang benar-benar akurat, sementara ketika terjadi kekurangan stok pangan solusinya acapkali mengandalkan impor dari negara lain seperti baru-baru ini pemerintah melalui Bulog akan kembali mengimpor beras 200 ribu ton untuk memenuhi stok pangan pada bulan Desember 2022.

Degradasi pengelolaan pangan nasional ini disebabkan karena tidak jelasnya kebijakan pemerintah itu sendiri. Sebagai contoh anggaran pangan terus mengalami penurunan. Pada 2015, anggaran Kementerian Pertanian masih sekitar Rp. 37,72 triliun. Angka ini terus mengalami penyusutan sampai Pada tahun 2022, dipatok hanya sekitar Rp. 14,45 triliun. Rendahnya anggaran kementerian pertanian ini menyebabkan banyaknya target-target tahunan yang tidak bisa dipenuhi.

13. Kritisi Peta Jalan Pendidikan 2020-2035

Fraksi PKS mengkritisi Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 yang telah diluncurkan Kemendikbud. Peta jalan Pendidikan sebagai dokumen negara yang akan menjadi dasar kebijakan Pendidikan sampai dengan tahun 2035 belum dilengkapi dengan dasar hukum dan kajian dalam bentuk naskah akademik. Peta jalan juga belum memasukkan layanan penyandang disabilitas, skema bagi guru honorer, dan skema layanan non-diskriminasi pendidikan negeri dan swasta, serta skema anggaran Pendidikan terutama dalam pemenuhan anggaran Pendidikan 20 persen dalam APBN/D serta memastikan realisasi anggaran tersebut digunakan untuk Pendidikan. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan dari Peta Jalan Pendidikan ini dengan melibatkan seluruh stake holder pendidikan.

14. Kritisi Anggaran Digitalisasi Sekolah Triliunan Rupiah

Program digitalisasi sekolah pada 2021 yang menelan anggaran hingga Rp.3trilliun,yang masih belum matang dari sisi perencanaan, sehingga terkesan terburu-buru. Wilayah 3T belum tercover penuh jaringan internet, sedangkan SDM guru kita juga masih belum siap, harusnya selesaikan PR ini dulu. Niat pemerintah untuk digitalisasi sekolah di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) melalui pengadaan laptop, proyektor, dan perangkat teknologi informasi (TIK) dinilai kurang tepat sasaran. Sarana pendukung digital itu wajib ada akses internet, sedangkan data pemerintah sendiri menunjukkan wilayah 3T masih sulit dijangkau sinyal. Merujuk Data Kominfo 2020, bahwa infrastruktur 4G yang telah dibangun telah mencapai 83.218 desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Dari 20.341 desa di wilayah 3T, masih ada 9.113 desa lainnya yang belum terselimuti jaringan 4G. Dia merujuk Data Kominfo 2020, bahwa infrastruktur 4G yang telah dibangun telah mencapai 83.218 desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Dari 20.341 desa di wilayah 3T, masih ada 9.113 desa lainnya yang belum terselimuti jaringan 4G. Selain itu soal kesiapan sumber daya manusia terutama guru dan tenaga kependidikan dalam program digitalisasi ini harus dipersiapkan terlebih dahulu.

15. Fraksi PKS Kritisi Program Kampus Merdeka

Salah satu episode penting dalam Kebijakan Merdeka Belajar adalah Kampus Merdeka. Kampus merdeka memiliki 4 pokok kebijakan yaitu: pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, PTNBH, dan Hak belajar 3 Semester di luar program studi. Namun, selama ini hanya kebijakan Hak Belajar 3 Semester di luar program studi yang mendapatkan banyak perhatian berupa pengawalan dan pembentukan panja oleh anggota DPR. Sedangkan 3 pokok kebijakan lain belum mendapatkan perhatian yang serius. Selain itu, evaluasi dan pengawasan dari pelaksanaan kebijakan Hak Belajar 3 Semester di luar program studi terfokus kepada implementasi program MBKM berupa 8 program yang dilakukan oleh Kemendikbud dengan sasaran kebijakan adalah mahasiswa.

Padahal kebijakan Hak belajar 3 semester di luar program studi juga memiliki program dengan sasaran kebijakan adalah program studi (PT) yaitu Program Studi menjadi *Center of Excellence*

(CoE). Program ini juga luput dari perhatian, padahal program ini memberikan bantuan pembiayaan terhadap PT sesuai dengan 2 skema yang diberikan dan berkaitan erat dengan 8 program kegiatan di luar Prodi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil evaluasi yang komprehensif perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh dari Kebijakan Kampus Merdeka. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek dilaksanakan secara tepat sasaran dan dilakukan sesuai dengan tahapan kebijakan publik dengan melihat kesiapan PT. Evaluasi dan pengawasan secara menyeluruh juga perlu dilakukan bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dari program Kampus Merdeka.

16. Kritisi Kurikulum Merdeka

Learning lost atau berkurangnya pengetahuan dan keterampilan secara akademis” yang sebenarnya sudah terjadi sebelum pandemi namun di perparah dengan adanya pandemi Covid-19. Namun belum ada kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah bahkan mengeluarkan kurikulum baru yang disebut dengan kurikulum merdeka. Terdapat beberapa permasalahan.

Pertama, perubahan kurikulum 13 (Kurtilas) menjadi Kurikulum Merdeka yang prosesnya yang belum semuanya terbuka. Kedua, proses pembahasan kurikulum Merdeka tidak transparan (Tidak ada Naskah Akademik, Tidak ada hasil informasi evaluasi Kurtilas), tidak berkonsultasi dan tidak melibatkan DPR sebagai mitra Kemendikbud Ristek. Baru diberikan setelah DPR memintanya kepada Kemendikbud Ristek. Ketiga, mewaspadaai masuknya beberapa substansi seperti *Comprehensive Sexuality Education (CSE)*/Pendidikan Seksual Komprehensif); persetujuan seks (*sexual consent*). Beberapa muatan materi sejarah yang akan menimbulkan kontroversi di masyarakat; memasukkan tokoh-tokoh komunis sedangkan tidak memasukkan tokoh-tokoh Islam.

17. Fraksi PKS Tagih Janji Poros Maritim Jokowi

Indonesia memiliki luas wilayah laut sebesar 5,8 juta km² dengan rincian 3,1 juta km² merupakan laut tertorial dan 2,7 juta km² merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Indonesia juga memiliki 17.504 pulau dan yang telah diberi nama (toponimi) dan

telah diverifikasi oleh PBB sebanyak 16.056 pulau. Posisi geoekonomi dan geopolitik wilayah laut Indonesia sangat strategis, dimana 45% dari seluruh barang dan komoditas yang diperdagangkan di dunia dengan nilai US\$ 1.500 trilyun/tahun diangkut melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) (UNCTAD, 2012).

Tanggal 23 September sudah sejak tahun 1964 ditetapkan oleh Presiden Soekarno sebagai Hari Maritime Nasional. Bung Karno pada National Maritime Convention I tahun 1963 menyatakan *National Building to build Indonesia becomes a great nation, a powerful nation, a wealthy nation and a tranquil nation. Nation can be powerful, only if it controls the ocean: "To control the ocean, we must control sufficient fleet"*. Yang secara sederhana di artikan untuk membangun Indonesia sebagai sebuah Negara yang besar dan Negara yang kaya adalah dengan mengendalikan laut.

Asa terkait dengan kejayaan maritime tersebut perlahan mulai tumbuh ketika pada tahun 2014 yang lalu Presiden Jokowi menyampaikan sebuah visi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia yang digadang-gadang merupakan bentuk tantangan terhadap *Maritime Silk Road* yang dicanangkan oleh Presiden Xie Jinping. Tahun ini hampir 7 tahun berlalu masa kepemimpinan Presiden Jokowi, nasib Visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia semakin tenggelam ditelan waktu.

Fraksi PKS menilai kelambanan bahkan kegagalan visi poros maritim dunia disebabkan pemerintah tidak fokus dan tidak memiliki skala prioritas dalam kebijakan yang mendukung ke arah sana. Ambil contoh, Fraksi PKS melalui Anggota Komisi IV Saadiah Uluputty dalam sebuah Rapat Komisi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (Rabu 23 Maret 2022) pernah menanyakan janji pemerintah terkait pembangunan Ambon New Port untuk mendukung Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Adapun Ambon New Port kabarnya batal dibangun. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono beralasan, tidak ada anggaran untuk pembangunan Ambon New Port. Fraksi PKS menilai alasan tidak ada anggaran sangat tidak masuk akal dan tidak adil. Padahal Ambon Port adalah janji Presiden Jokowi dan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan yang sudah berulang kali ke Maluku membicarakan janji tersebut. Alasan ketiadaan anggaran menjadi tidak adil ketika saat yang sama pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk kereta cepat di Bandung dan membangun Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Tetapi ketika janji pemerintah untuk Ambon

New Port, pemerintah beralasan tidak ada anggaran. Padahal, kontribusi ikan di Maluku untuk negara sebesar 37 persen.

18. Kritik Pemberian Subsidi yang Tidak Tepat Sasaran

Fraksi PKS mengkritik manajemen pemerintah dalam mengelola subsidi. Banyak subsidi pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran. Hal ini tentu merugikan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Untuk diketahui, besarnya alokasi belanja subsidi energi pada tahun 2022 sebesar Rp 502,4 triliun. Hasil Survey Susenas BPS 2021, dari Rp 80,4 triliun subsidi Peralite yang dinikmati rumah tangga. Ternyata 80% di antaranya dinikmati rumah tangga mampu sedangkan 20% dinikmati rumah tangga tidak mampu. Dari Rp15 triliun subsidi Solar yang dinikmati rumah tangga. Ternyata 95% adalah rumah tangga mampu, sehingga hanya 5% rumah tangga tidak mampu.

Sementara itu, sebagian besar subsidi listrik diterima kelompok masyarakat yang tergolong mampu. Hanya 26% kelompok masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan subsidi. Anggaran Subsidi Listrik sangat besar, tetapi lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat yang tergolong mampu. Masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam kelompok 40% hanya menikmati 26% dari subsidi listrik. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan subsidi listrik masih bermasalah. Diperkirakan kondisi tersebut masih terjadi pada tahun 2022.

Besarnya alokasi anggaran subsidi LPG 3 Kg tahun 2022 sebesar Rp. 134,78 triliun, diprediksi masih tidak tepat sasaran (inclusion dan exclusion error). Diperkirakan 32% rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah hanya menikmati 22% dari subsidi LPG 3Kg, sementara 86% dinikmati oleh kelompok yang lebih mampu. Diperkirakan terdapat 12,5 juta rumah tangga miskin dan rentan tidak menerima subsidi, 2,7 juta kepala rumah tangga perempuan juga tidak menerima subsidi, 760 penyandang disabilitas yang tidak mampu juga tidak menerima subsidi dan sebanyak 4,06 juta kelompok masyarakat lanjut usia (Lansia) juga tidak menerima.

19. Kritisi Tata Kelola BUMN yang Terus Merugi

Fraksi PKS memberikan catatan kritis terhadap pengelolaan BUMN yang terus merugi. Contoh Jiwasraya, Garuda, Waskita, Indofarma, Bumi Putera, Krakatau Steel, PT DI. Anehnya pemerintah terus

mengusulkan dana penyertaan modal negara (PMN) untuk sejumlah BUMN. Fraksi PKS menolak PMN tersebut yang jelas tidak menyetujui BUMN, sebaliknya patut dicurigai menjadi 'bancakan' korporasi. Hal ini menunjukkan betapa buruknya tata kelola BUMN.

20. Usul Hak Angket Penyelenggaraan Pemilu 2019

Di awal Periode Dewan Tahun 2019, Fraksi PKS mengusulkan penggunaan Hak Angket dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Seperti diketahui bersama, pelaksanaan Pemilu 2019 memiliki banyak catatan evaluasi salah satunya adalah banyaknya kesalahan input dalam Sistem Perhitungan KPU serta banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia. Tercatat ada sebanyak 554 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan panitia pengawas pemilu yang meninggal dunia. Hadirnya Pansus tersebut akan bekerja mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan Pemilihan Umum mendatang. Melalui Pansus Pemilu ini, kita akan sama-sama mengevaluasi, bisa menyetujui masalah kematian KPPS, mengevaluasi salah input, serah mengevaluasi pelaksanaan secara umum, kebijakan Undang-Undang Pemilu serentak, dan menjadi langkah yang perlu kita lakukan secara sungguh-sungguh agar masalah pemilu kali ini tidak terulang pada Pemilu mendatang.

21. Usul Pansus Hak Angket Kasus Jiwasraya

Munculnya mega skandal Jiwasraya dengan gagal membayar polis nasabahnya hingga 12.4 Triliun. Ada sekitar 5,2 juta orang yang terdampak dengan kerugian Jiwasraya. Jiwasraya masih memiliki utang dan liabilitas yang terus meningkat dimana di bulan September 2019 kewajibannya mencapai Rp. 49,6 triliun. Apalagi, ada indikasi kejahatan sistematis dalam kasus ini. Indikasi fraud yang berlangsung lama ini terkait dengan lemahnya pengawasan dari OJK dan Kementerian BUMN. Dengan demikian, kasus Jiwasraya bersifat kompleks dan multidisiplin sehingga Fraksi PKS DPR RI akan mendorong terbentuknya pansus untuk mengusut kasus ini. Oleh karenanya diawal tahun 2020 Fraksi PKS memutuskan secara resmi mengajukan pembentukan Pansus Jiwasraya dengan tujuan mempercepat penyelidikan yang dilangsungkan secara tepat dan transparan.

22. Desak Pemerintah Mitigasi PHK Masal Paka Pandemi

Pertumbuhan ekonomi saat ini belum bisa memenuhi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas baik dari sisi tenaga kerjanya maupun dari sisi peningkatan kualitas tenaga kerja. Maka sepanjang tahun 2022 masih sangat banyak ancaman pemutusan tenaga kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan di Indonesia. Untuk mengantisipasi hal itu, Fraksi PKS meminta Pemerintah melakukan :

- (1) Refocusing kegiatan dan relokasi anggaran untuk mempercepat penanganan COVID-19, baik terkait isu kesehatan maupun ekonomi.
- (2) Menjamin ketersediaan bahan pokok dan menjaga daya beli masyarakat lapisan bawah (buruh, pekerja harian, petani, nelayan, serta pelaku UMKM).
- (3) Program Cash for Work, Padat Karya Tunai harus diperbanyak/dilipat gandakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 melalui dana desa dan program pemerintah daerah.
- (4) Memperbaiki implementasi kartu prakerja utk mengantisipasi pekerja yang kena PHK dan pekerjaan harian yg kehilangan penghasilan agar dapat meningkatkan kompetensi atau berwirausaha. Alokasi anggaran 10 triliun atau lebih.
- (5) Mendesak OJK memberikan relaksasi kredit UMKM bagi para pelaku UMKM.
- (6) Mencegah/mengupayakan sedikit mungkin kasus PHK di tingkat perusahaan;

23. Kawal Supremasi Hukum Yang Berkeadilan

Fraksi PKS mendukung setiap upaya untuk melakukan perbaikan dalam sistem hukum nasional, karena Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kesepakatan yang tertulis tebal dalam konstitusi ini harus kita taati bersama, kita jaga, dan kita pertahankan sampai kapan pun.

Fraksi PKS selalu tegak lurus menjaga Indonesia selalu menjadi negara yang berspuremasi hukum, yaitu hukum yang memberi kepastian dan keadilan kepada rakyat. Untuk itu, Fraksi PKS mengawasi dan mengontrol lembaga penegak hukum agar senantiasa profesional dalam menegakkan hukum dan aturan. Tidak boleh semena-mena terhadap rakyat, tidak boleh membuka peluang *abuse of power* dan *obstruction of justice* sehingga menyebabkan hilangnya keadilan di negeri ini. Lebih dari itu, perbuatan di atas akan melemahkan kepercayaan masyarakat kepada institusi penegak hukum. Dan yang lebih parah lagi menyebabkan lemahnya Indonesia sebagai negara hukum. Jika

itu terjadi alarm bahaya bagi masa depan Indonesia sebagai negara hukum. Untuk itu, Fraksi PKS merespon sejumlah isu dan mendorong kebijakan yang sejalan dengan reformasi penegakan hukum.

Fraksi PKS menyalahkan betul sejumlah peristiwa yang mencoreng wajah penegak hukum kita. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi penegakan hukum masih belum benar-benar berjalan dengan baik dan *on-track*. Fraksi PKS sangat prihatin dengan banyaknya kasus *abuse of power*, *obstruction of justice*, hingga kasus-kasus korupsi aparat penegak hukum.

Pertama, Fraksi PKS menyoroti menurunnya indeks persepsi korupsi Indonesia. Selain itu, kinerja KPK yang dipersepsi publik berdasarkan hasil survei integritas mengalami penurunan. Sejumlah kasus dalam sorotan publik antara lain keberadaan tersangka korupsi yang masih belum diketahui dan belum juga berhasil ditangkap hingga saat ini.

Kedua, Fraksi PKS juga sangat menyesalkan coreng moreng wajah kepolisian dalam kasus pembunuhan Brigadir Josua oleh mantan Kadiv Propam Mabes Polri, Ferdy Sambo. Kasus ini memperlihatkan sejumlah fakta: Pertama, adanya arogansi jabatan dan *abuse of power* yang masih kuat di tubuh Polri. Kedua, masih hidupnya budaya kekerasan yang berujung kematian di internal Polri. Kedua, adanya upaya rekayasa, pemalsuan keterangan, dan penghilangan barang bukti dalam kasus tersebut telah menurunkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap kasus-kasus lain yang diproses oleh kepolisian.

Ketiga, kita juga masih menyaksikan sejumlah praktik buruk dari perilaku aparat, seperti penggunaan kekerasan dalam mengantisipasi demonstrasi, penggunaan gas air mata yang tidak dibenarkan seperti dalam menangani massa suporter sepak bola dalam tragedi "Kanjuruhan Berdarah." Terdapat juga kasus-kasus serta dugaan keterlibatan sejumlah oknum perwira dalam judi online, pertambangan ilegal, dan peredaran narkoba, dll. Hal tersebut membutuhkan perhatian dan perbaikan serius dari institusi khususnya Kepolisian Republik Indonesia.

Keempat, Fraksi PKS masih terus menerima pengaduan meminta keadilan atas "Kasus KM 50" yang menyebabkan meninggalnya 6 nyawa Laskar FPI pada saat itu. Atas aspirasi dan pengaduan

keluarga korban, Fraksi PKS meminta lembaga yang berwenang, apakah Komnas HAM, kepolisian, dan pengadilan untuk terus melakukan investigasi agar keadilan benar-benar tegak di republik ini.

Keempat, Fraksi PKS sangat prihatin dan bersedih lagi-lagi wajah hukum tanah air tercoreng dalam kurun waktu singkat karena adanya 2 Hakim Agung dan 3 Hakim Yustisial di Mahkamah Agung (MA) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi hukum di Indonesia tengah berada di titik nadir. Mafia kasus pun dinilai masih bertebaran di berbagai lembaga peradilan negeri ini. Reformasi sistemis di bidang hukum masih jauh dari harapan.

24. Tolak Wacana Presiden 3 Periode dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Fraksi PKS menolak tegas dan menyayangkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang masih terus bergulir dari berbagai kalangan bahkan dari para elit politik dan pejabat negara. 3 Ketum Partai Politik, 2 Menteri Kabinet, bahkan Ketua MPR RI menghidupkan lagi wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Pun tak ketinggalan sejumlah organisasi relawan pendukung Jokowi terus meminta agar masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode. Demikian halnya dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Fraksi PKS menyesalkan dan mengelus dada kenapa sulit sekali menaati konstitusi yang telah menetapkan masa jabatan presiden 5 tahun? Perjuangan reformasi menyepakati pembatasan masa jabatan presiden dimaksudkan untuk mencegah lahirnya kembali otoritarianisme dan menghalangi siapapun untuk memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi stop wacana perpanjangan masa jabatan presiden-wapres dan mari kembali ke konstitusi. Entah tahapan pemilu 2024 sudah dilaksanakan oleh penyelenggara untuk kita sukseskan bersama. Kita perlu menatap ke depan mempersiapkan proses pergantian kepemimpinan yang lebih baik dan berkualitas.

25. Tolak Wacana Kembali ke Sistem Proporsional Tertutup

Fraksi PKS menolak wacana kembali ke sistem proporsional tertutup dalam memilih calon anggota legislatif. Wacana itu sendiri muncul

dari gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah pihak yang menginginkan berlakunya sistem proporsional tertutup dengan hanya memilih partai politik, sementara calon terpilih ditentukan oleh partai dan/atau berdasarkan nomor urut.

Bagi Fraksi PKS sistem pemilu legislatif proporsional terbuka selayaknya dipertahankan karena dinilai lebih representatif dan demokratis. Sistem proporsional terbuka yang diberlakukan sejak pemilu 2009 sejatinya mengoreksi negativitas dari sistem tertutup terutama dalam upaya memperkuat konstituensi dan legitimasi antara anggota legislatif terpilih dengan konstituen/pemilihnya. Dengan demikian sistem terbuka jauh lebih demokratis daripada sistem tertutup.

Sistem ini juga dinilai lebih demokratis karena memberi ruang yang setara dan adil bagi calon anggota legislatif untuk berkompetisi dalam pemilu merebut hati rakyat. Siapa pun yang memperoleh suara terbanyak dan partainya memperoleh kursi yang bersangkutan berhak menjadi wakil rakyat terpilih. Derajat legitimasi calon terpilih pun bisa dipertanggungjawabkan secara rasional dan objektif.

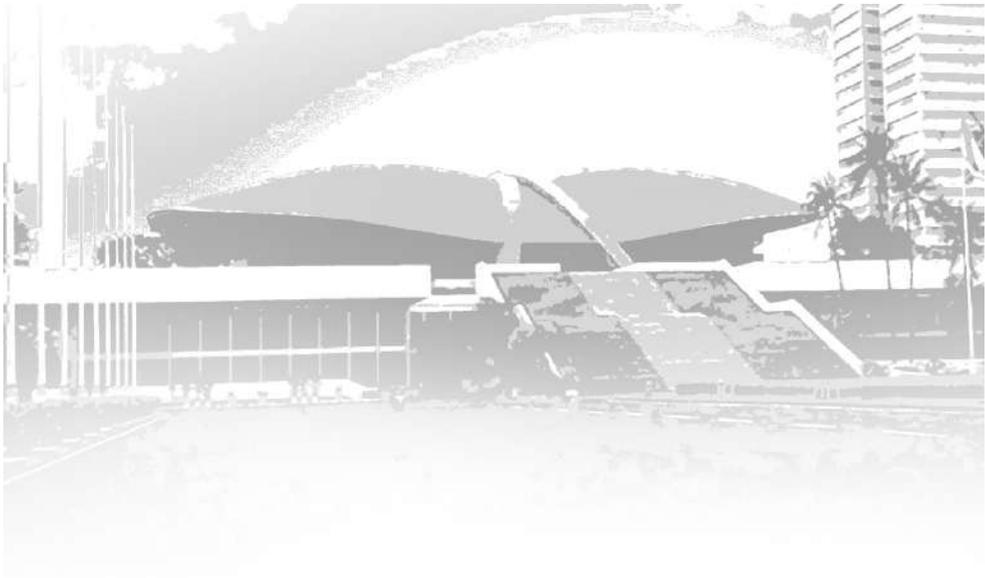
Di samping itu, rakyat bisa berinteraksi dan mengenal langsung calon anggota legislatif yang akan mereka pilih. Bisa membangun kontrak politik dan mengawal kinerja mereka selama lima tahun. Setelah itu, pada pemilu berikutnya rakyat bisa mengevaluasi apakah wakil mereka tersebut layak dipilih kembali atau tidak. Inilah makna representasi rakyat yang sesungguhnya. Rakyat memiliki kedaulatan untuk memilih, mengawal, dan mengevaluasi wakilnya. Derajat representasi juga jauh lebih kuat dan mengejawantahkan istilah yang kita kenal dalam sistem proporsional terbuka yaitu OPOVOV atau *One Person, One Vote, One Value*.

Penerapan sistem proporsional terbuka dengan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak sesungguhnya diperkuat dengan amar Putusan MK tanggal 23 Desember 2008. Melalui putusan tersebut MK menyatakan bahwa calon terpilih berdasarkan suara terbanyak dan bukan nomor urut. Siapa pun yang meraih suara terbanyak berhak menjadi wakil rakyat.

Sistem proporsional tertutup berlaku pada era orde lama dan orde baru dan terakhir paska reformasi pada pemilu 1999. Sistem ini

telah dievaluasi dan sejak pemilu 2004 berubah menjadi sistem proporsional terbuka. Evaluasi sejalan dengan tuntutan dan perkembangan demokratisasi yang lebih maju, dimana peran partai tetap sentral yang diimbangi kedekatan rakyat/pemilih dengan wakil mereka.

Ada penilaian yang mengatakan sistem terbuka telah mendorong liberalisasi politik (politik uang/transaksional) dan melemahkan partai politik. Dalam pandangan Fraksi PKS, argumentasi ini lemah, inti masalahnya bukan di sistemnya tapi regulasi, penegakan aturan, dan komitmen semua pihak dalam pemilu. Siapa yg bisa jamin sistem tertutup tidak terjadi liberalisasi, tidak oligarkis, yang kemudian bisa memasung hak politik rakyat? Tidak ada jaminan. Partai politik tetap kuat sepanjang menjalankan fungsinya dengan baik terutama dalam merekrut, menyeleksi, dan menetapkan caleg yang akan dipilih oleh rakyat. Partai tetap punya otoritas yang kuat dalam mendisiplinkan caleg dan alegnya termasuk dari kecenderungan liberalisasi politik.



PERJUANGAN DALAM FUNGSI ANGGARAN

Fraksi PKS selalu memberikan catatan kritis dalam setiap RUU APBN tak kurang 17-27 catatan termasuk *miderheidsnota*. Fraksi PKS mengkritisi antara lain: target ekonomi dan realisasinya, efisiensi belanja, bengkaknya utang dan bunganya, alokasi subsidi rakyat miskin yang seharusnya dipertahankan dan ditingkatkan, transfer ke daerah dan dana desa yang harus ditingkatkan, dll.

Politik Anggaran Fraksi PKS DPR RI sangat jelas yaitu anggaran yang berpihak pada kepentingan rakyat, pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan, serta yang mampu mendorong kemandirian nasional.

Pertama, Fraksi PKS menginginkan postur anggaran yang berpihak pada kepentingan rakyat dengan lebih besar lagi transfer anggaran ke daerah (dan desa) dalam kerangka desentralisasi fiskal mengingat seluruh rakyat Indonesia itu adanya di daerah-daerah, sumber daya ekonomi adanya juga di daerah-daerah, maka penguatan anggaran untuk pembangunan dari daerah sangat penting. Tentu saja hal itu harus diikuti dengan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel sehingga transfer APBN ke daerah benar-benar tepat sasaran dalam menyejahterakan rakyat Indonesia. Dalam istilah penulis: otonomi daerah (desentralisasi kewenangan dan desentralisasi fiskal) harus

menjadi berkah bagi rakyat, bukan segelintir elit daerah.

Kedua, Fraksi PKS menginginkan APBN yang sehat dan mandiri yang bertumpu pada pendapatan nasional yang terus tumbuh melalui akselerasi kebijakan perpajakan, pendalaman pasar keuangan domestik, dan upaya keras peningkatan ekspor komoditas dengan berbagai terobosan yang memperkuat daya saing kita. Kita butuh akselerasi pendapat dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya terbarukan (ekonomi kreatif) sehingga mampu memenuhi kebutuhan APBN untuk pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Kebutuhan anggaran untuk mensejahterakan rakyat sangat besar, untuk itu kapasitas APBN juga harus besar. Kapasitas besar itu harus semakin sehat, dimana defisit semakin rendah, tetap produktif untuk akselerasi pertumbuhan, keseimbangan primer menuju dan semakin positif, serta rasio utang yang semakin terkendali dalam batas aman.

Ketiga, Fraksi PKS menghendaki pemerataan keadilan ekonomi dan kesejahteraan tercermin dalam prioritas kebijakan pemerintah dalam APBN yang semakin komitmen dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan yang terefleksi dengan penguatan program perlindungan sosial (PKH, JKN, peningkatan akses pembiayaan UMKM, usaha ultra mikro, fasilitas perumahan yang murah bagi rakyat miskin, dll.).

Keempat, Fraksi PKS sejak dini mengingatkan bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) harus tetap menjadi prioritas utama dan tercermin dalam APBN melebihi pembangunan infrastruktur seperti yang terjadi saat ini. Pembangunan SDM itu tercermin dalam bentuk kebijakan/program penguatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, vokasional, dan kegiatan riset pengembangan yang menghasilkan penambahan nilai terhadap pembangunan secara keseluruhan.

Konsistensi dengan pandangan di atas, sikap-sikap Fraksi PKS tercermin dan dapat dilihat dari berbagai pandangan dan pendapat resmi Fraksi terkait APBN. Fraksi PKS terkenal sebagai Fraksi yang memberikan catatan serius, panjang, dan mendalam dalam setiap pembahasan RAPBN. Sejumlah isu yang selalu disoroti Fraksi PKS antara lain:

1. Fraksi PKS selalu mengkritik target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang acapkali tidak realistis dan tidak tercapai

karena dampak-dampak kebijakan kontraproduktif terbaru yang diambil pemerintah. Salah satu kebijakan yang sangat memberatkan rakyat adalah kenaikan harga BBM. Dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi rakyat belum juga hilang tetapi pemerintah tetap mengambil keputusan yang menambah beban berat.

2. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk mengantisipasi dampak resesi dunia terhadap ekonomi nasional. Sinyal resesi dunia semakin nyata seperti masalah stagflasi, kenaikan suku bunga acuan bank sentral, krisis energi hingga krisis utang.
3. Fraksi PKS mendesak pemerintah memperbaiki inflasi sisi penawaran (*cost push inflation*) karena langsung terkait dengan kesejahteraan rakyat yaitu inflasi bahan makanan, energi. Di sini pentingnya kedaulatan pangan dan tidak mengandalkan impor karena terkait rantai pasok global.
4. Fraksi PKS mendesak pemerintah supaya menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) dengan serius. Angka pengangguran masih tinggi sebanyak 8,40 juta jiwa atau 5,83% per Februari 2022. Tingkat pengangguran Indonesia tersebut masih belum kembali kepada posisi sebelum pandemi Covid-19 sebesar 6,88 juta jiwa atau 4,99% pada Februari 2020.
5. Fraksi PKS juga mendesak pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan dibarengi kebijakan yang konsisten bukan yang berlawanan seperti kenaikan BBM yang memukul daya beli dan konsumsi masyarakat. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang. Angka kemiskinan belum kembali ke periode sebelum pandemi sebanyak 24,79 juta jiwa (September 2019).
6. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) baik dari sisi kuantitas ataupun sisi kualitasnya.
7. Fraksi PKS memandang bahwa pemerintah tidak cukup hanya bergantung pada sumber pendapatan yang berasal dari komoditas sumber daya alam tapi perlu serius menggarap sumber penerimaan baru.
8. Fraksi PKS menilai bahwa target kenaikan penerimaan negara masih berada pada kisaran yang rendah dan dapat dicapai.

9. Fraksi PKS berpendapat bahwa Belanja Pemerintah pusat dalam setiap RAPBN belum menunjukkan kebijakan efisien maka harus terus dilakukan efisiensi.
10. Fraksi PKS masih berpendapat bahwa pembangunan IKN belum mendesak sehingga APBN dapat difokuskan kepada program program yang berdampak langsung kepada masyarakat miskin dan rentan secara luas.
11. Fraksi PKS juga mendorong dan mendesak Pemerintah tidak mengenakan pungutan atau pajak dalam bentuk apapun terhadap honor relawan di desa seperti kader posyandu, relawan jumentik, relawan Keluarga Berencana, Kader PLKB, Kader Pendamping Petani dan Nelayan. Termasuk juga dengan pengadaan-pengadaan yang bersifat kebutuhan primer (*primary need*) masyarakat desa dengan jumlah tidak besar dan bersumber dari Dana Desa.
12. Fraksi PKS tidak sependapat dengan rencana Pemerintah untuk mengubah subsidi gas elpiji 3 kg. Namun demikian Pemerintah harus memperbaiki target penerima agar Penerima gas LPG 3 Kg sesuai dengan target yaitu kelompok masyarakat miskin, rentan, tidak dan/ atau kurang mampu. Pemerintah harus menjamin ketersediaan gas LPG 3 Kg tersebut kepada yang berhak menerima dengan harga yang terjangkau.
13. Fraksi PKS berpendapat bahwa subsidi listrik untuk rakyat pengguna listrik 450 VA dan 900 VA yang layak perlu tetap diberikan. Pemerintah juga harus menjamin akses listrik bagi rumah tangga miskin/ rentan miskin/ dan tidak atau kurang mampu dengan memberikan layanan pemasangan listrik 450 VA gratis.
14. Fraksi PKS berpandangan bahwa alokasi anggaran infrastruktur harus dikelola secara terintegrasi agar memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab pemanfaatan anggaran infrastruktur melalui program padat karya tunai dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
15. Fraksi PKS berpendapat pentingnya peningkatan efektivitas alokasi anggaran Pendidikan yang signifikan. Kompetensi, kecukupan/ketersediaan, dan persebaran Guru ke seluruh wilayah dan daerah harus mendapat perhatian dan prioritas oleh Pemerintah, terutama bagi kemajuan Pendidikan di daerah-

daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar Indonesia). Fraksi PKS juga konsern dengan peningkatan kesejahteraan guru baik guru ASN maupun non ASN, swasta dan termasuk honorer harus menjadi prioritas dalam belanja pendidikan, antara lain dengan cara meningkatkan besaran dan cakupan tunjangan profesi guru (TPG), sehingga seluruh guru non ASN yang juga turut mencerdaskan kehidupan bangsa dapat mengakses dan menerima tunjangan profesi guru secara memadai. Kebijakan alokasi dana-dana bantuan Pendidikan, seperti BOS/BOPTN, beasiswa untuk siswa, mahasiswa, guru, dan dosen agar dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Fraksi PKS juga berpendapat bahwa kebijakan dan program pengembangan pemberdayaan pemuda harus menjadi prioritas strategis. Bonus Demografi merupakan momentum yang tepat dalam menguatkan daya dan peran pemuda.

16. Fraksi PKS berpendapat bahwa perubahan klasifikasi dan redesain pengelolaan anggaran TKD tetap harus selaras dengan semangat untuk mengurangi ketimpangan di daerah serta mendorong perbaikan kualitas belanja yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
17. Fraksi PKS mengingatkan kembali pentingnya transparansi, akuntabilitas serta mitigasi risiko terkait tata kelola Dana Bagi Hasil (DBH). Hal ini selaras dengan tujuan DBH untuk mengurangi ketimpangan fiskal dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
18. Fraksi PKS kembali mengingatkan komitmen alokasi DAK terhadap dukungan pemenuhan *mandatory spending* khususnya pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan, tambahan dukungan penguatan untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM), sarana dan prasarana fisik/nonfisik, komunikasi, serta penggalian/peningkatan potensi daerah. Selanjutnya, untuk DAK Fisik jenis penugasan berbasis tematik harus diimbangi dengan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana utama untuk layanan publik di daerah.
19. Fraksi PKS mendukung peningkatan alokasi Dana Desa sehingga dapat dimaksimalkan untuk mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

20. Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah terkait akumulasi utang saat ini yang sudah mencapai Rp 7.163 triliun yang setara dengan 37,91 persen terhadap PDB. Di mana saat ini utang Pemerintah telah melampaui batas yang direkomendasikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan International Debt Relief (IDR), rekomendasi IMF 25-35 persen terhadap PDB. Fraksi PKS juga mengingatkan masih tingginya pembiayaan utang akan meningkatkan beban belanja APBN di masa yang akan datang.
21. Fraksi PKS berpendapat bahwa pembiayaan investasi yang dianggarkan dengan dominasi klaster infrastruktur hampir menguasai setengah dari total anggaran pembiayaan investasi, pada saat ini merupakan hal yang tidak tepat.
22. Fraksi PKS berpendapat bahwa Pemerintah harus mampu mengoptimalkan anggaran secara produktif, sehingga meminimalisir timbulnya Sisa Lebih (Silpa).



INFO GRAFIS FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PKS DPR RI DALAM INFOGRAFIK

Persembahan
Humas
Fraksi PKS DPR RI

Fraksi PKS DPR RI dalam Infografik

Kumpulan Infografis yang
dirilis Fraksi PKS DPR RI dalam
rentang waktu 2019-2022

Penyusun : Heryadi Silvianto

Infografik : Aditya Angga

Desain Sampul : Adielia

Penerbit Humas Fraksi PKS DPR RI

Website : fraksi.pks.id/

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis atau penerbit.

Infografis FKKS DPR RI

*Agar data bukan sekedar angka,
namun jadi fakta yang
menggugah cerita.*

Seringkali dalam lahirnya sejumlah kebijakan di dasari oleh deretan argumentasi yang penuh dengan data dan fakta yang terserak. Tersaji dalam tumpukan halaman yang statis, monoton dan kaku.

Menemukan informasi di dalamnya seperti menjelajah ruang gelap yang sempit, penuh sesak dan perlu keahlian khusus dalam membacanya. Padahal dari sana ada banyak alasan mengapa sebuah program dan kebijakan perlu diperjuangkan hingga ditolak.

Argumentasi yang kuat tidak akan ada harganya ketika gagal ditampilkan sebagai sebuah pesan yang jelas, menggugah kesadaran dan memantik motivasi. Maka tidak jarang pandangan fraksi yang berlembar-lembar harus menjadi sangat sederhana

dalam satu balutan desain poster infografis.

Menyusun brief infografis perlu kemampuan khusus dan spesifik, meminta ketelitian dari setiap analis dalam menemukan sumber-sumber terbaik dan utama. Memastikan bahwa apa yang disusun menjadi dasar kuat membangun nalar dan logika dalam mengambil sikap.

Sikap yang ditunjukkan harus seiring sejalan dengan kegelisahan yang ditampilkan dalam infografis. Dari setiap kata punya data, sebuah sikap dilengkapi informasi lengkap.

Infografis meminta setiap fitur yang ada di dalamnya tampil mampu dipertanggungjawabkan dan dijelaskan. Ruang politik menjadi etalase gagasan yang ramai dan menarik.



Inbang

1 April 2021 | Isu Pangan | Komisi IV

Stop Impor Jahe!

PKS meminta Pemerintah memberikan sanksi tegas kepada semua importer yang melanggar aturan, bila perlu mencabut izin jika tidak mengindahkan ketentuan (Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, H. Johan Rosihan, S.T.).

Badan Karantina Kementan melakukan pemeriksaan fisik pada jahe impor terdapat cemaran tanah dan OPTK (Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina) berupa nematoda yang berpotensi membawa bakteri dan penyakit pertanian ke Indonesia.

Berikut merupakan Volume (kg) impor Jahe setiap tahunnya :

2017 : 53.439
2018 : 3.886.091
2019 : 21.782.749
2020 : 19.252.683

Berikut merupakan Nilai (US \$) impor Jahe setiap tahunnya :

2017 : 144.246
2018 : 2.888.301
2019 : 17.118.558
2020 : 16.932.768

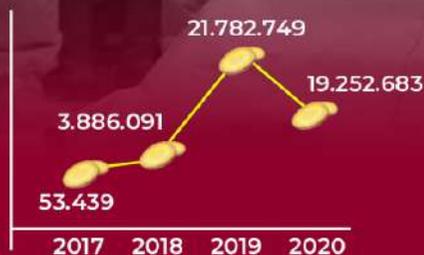
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto, produksi jahe Tanah Air sudah mencukupi kebutuhan Nasional yaitu 174.000 Ton (2019) dan 183.000 Ton (2020) dengan Estimasi Kebutuhan Jahe sekitar 142.110 – 149.652 Ton.

STOP IMPOR JAHE!

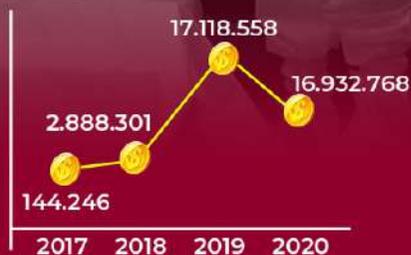
Badan karantina Kementan melakukan pemeriksaan fisik pada jahe impor terdapat cemaran tanah dan OPTK (Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina) berupa nematoda yang berpotensi membawa bakteri dan penyakit pertanian ke Indonesia.

PKS meminta Pemerintah memberikan sanksi tegas kepada semua importir yang melanggar aturan, bila perlu mencabut izin jika tidak mengindahkan ketentuan.

■ Volume (kg) impor Jahe tiap tahun



■ Nilai (US \$) impor Jahe tiap tahun



- Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto, produksi jahe Tanah Air **sudah mencukupi** kebutuhan nasional.



■ Produksi Jahe

2019 174.000 Ton

2020 183.000 Ton



■ Estimasi Kebutuhan Jahe

142.110 Ton - **149.652** Ton



H. Johan Rosihan, S.T.
(Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS)

Sumber foto (background) : Kompas.com

29 September 2021 | Transportasi | Komisi V

Banyak Bandara Sepi Pasca Diresmikan PKS: Ambisi Politik Tinggi Tapi Minim Kalkulasi !!!

Pemerintahan Presiden Joko Widodo gencar melakukan pembangunan infrastruktur bandara dengan dana jumbo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ironisnya, kini sejumlah bandara terkesan mati suri karena sepi penumpang dan tidak beroperasi.

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) | Diresmikan: 24 Mei 2018. Biaya: 2,6 triliun

Bandara Wiriadinata Tasikmalaya, Jawa Barat | Diresmikan: 27 Februari 2019 | Biaya: 30-45 miliar

Yogyakarta International Airport (YIA) | Diresmikan: 28 Agustus 2020 | Biaya: 11,3 Triliun

JB Soedirman Purbalingga, Jawa Tengah | Diresmikan: 3 Juni 2021 | Biaya: 350 miliar

Bandara Ngloram Blora, Jawa Tengah | Diresmikan: 17 Desember 2021 | Biaya: 80 miliar

Penyebab Sepi:
BANDARA

- Rute sepi penumpang
- Lokasi tidak strategis
- Infrastruktur menuju bandara belum memadai

Banyak Bandara Sepi Pasca Diresmikan, PKS: Ambisi Politik Tinggi, tapi Minim Kalkulasi !!!

- Pemerintahan Presiden Joko Widodo gencar melakukan **pembangunan infrastruktur bandara** dengan **dana jumbo** dari **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**. Ironisnya, kini sejumlah bandara terkesan mati suri karena sepi penumpang dan tidak beroperasi.



Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB)



Diresmikan: 24 Mei 2018.
Biaya: **2,6 triliun**

Bandara Wiriadinata Tasikmalaya, Jawa Barat



Diresmikan: 27 Februari 2019
Biaya: **30-45 miliar**

Yogyakarta International Airport (YIA)



Diresmikan: 28 Agustus 2020
Biaya: **11,3 Triliun**

JB Soedirman Purbalingga, Jawa Tengah



Diresmikan: 3 Juni 2021
Biaya: **350 miliar**

Bandara Ngloram Blora, Jawa Tengah



Diresmikan: 17 Desember 2021
Biaya: **80 miliar**

Penyebab Sepi :

- Rute sepi penumpang
- Lokasi tidak strategis
- Infrastruktur menuju bandara belum memadai

8 Juni 2021 | Isu Lingkungan | Komisi IV

Ancaman Untuk Laut Indonesia

8 Juni 2021 Hari Laut Sedunia (World Ocean Day)

PKS: Pemerintah Harus Serius Dalam Melindungi dan Melestarikan Laut Dari Kerusakan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menuliskan bahwa luas lautan Indonesia sekitar 3,25 juta km² dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,55 juta km². Luasnya lautan Indonesia ini melebihi luas daratan yakni 2,01 juta kilometer persegi.

Beberapa permasalahan laut di Indonesia:

1. Illegal Fishing | Penangkapan atau mencuri ikan secara ilegal (melanggar hukum) marak terjadi di wilayah kelautan Indonesia.
2. Rusaknya Hutan Mangrove | Luas mangrove di Indonesia mencapai 3,49 Juta Ha, namun 52% atau 1,82 juta Ha dalam kondisi rusak.
3. Pemanasan Global | Sekitar 80 persen CO₂ yang diproduksi manusia diserap lautan dan

membuatnya panas. Perairan yang hangat dapat mempengaruhi semua aspek di laut, mulai dari pemutihan karang hingga pola migrasi ikan.

4. Destructive Fishing

Penangkapan ikan dengan cara merusak. Cara yang sering dipakai yaitu menggunakan bahan yang berbahaya seperti portas dan sianida

5. Minyak dan Gas | Pengeboran dan pencairan MIGAS dapat merusak lingkungan laut. Perusahaan melakukan kelalaian sehingga minyak tumpah ke laut dan merusak. kelalaian sehingga minyak tumpah ke laut dan merusak.

6. Masalah Sampah | Indonesia salah satu negara penyumbang sampah terbesar di laut. Sampah yang masuk ke laut umumnya mengandung banyak plastik dan logam yang mengalami proses pelapukan dan penguraian yang cukup lama yaitu 50 – 400 tahun.

7. Perburuan Hi | Berburu hiu jenis apapun untuk diambil siripnya dan kemudian dijual.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menuliskan bahwa **luas lautan Indonesia sekitar 3,25 juta km² dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,55 juta km².** Luasnya lautan Indonesia ini melebihi luas daratan yakni 2,01 juta kilometer persegi.

! **Illegal Fishing**

Penangkapan atau mencuri ikan secara ilegal (melanggar hukum) marak terjadi di wilayah kelautan Indonesia.

! **Rusaknya Hutan Mangrove**

Luas mangrove di Indonesia mencapai 3,49 Juta Ha, namun 52% atau 1,82 juta Ha dalam kondisi rusak

! **Pemanasan Global**

Sekitar 80 persen CO₂ yang diproduksi manusia diserap lautan dan membuatnya panas. Peraliran yang hangat dapat mempengaruhi semua aspek di laut, mulai dari pemutihan karang hingga pola migrasi ikan.

! **Destructive Fishing**

Penangkapan ikan dengan cara merusak. Cara yang sering dipakai yaitu menggunakan bahan yang berbahaya seperti portas dan sianida.

! **Minyak dan Gas**

Pengeboran dan pencairan MIGAS dapat merusak lingkungan laut. Perusahaan melakukan kelalaian sehingga minyak tumpah ke laut dan merusak kelalaian sehingga minyak tumpah ke laut dan merusak.

! **Masalah Sampah**

Indonesia salah satu negara penyumbang sampah terbesar di laut. Sampah yang masuk ke laut umumnya mengandung banyak plastik dan logam yang mengalami proses pelapukan dan penguraian yang cukup lama yaitu 50 – 400 tahun.

! **Perburuan Hiu**

Berburu hiu jenis apapun untuk diambil siripnya dan kemudian dijual.



ANCAMAN UNTUK LAUT INDONESIA

8 Juni 2021 Hari Laut Sedunia (World Ocean Day)

PKS: Pemerintah Harus Serius Dalam Melindungi dan Melestarikan Laut Dari Kerusakan

17 Juni 2021 | Isu Lingkungan | Komisi IV

Indonesia Darurat Sampah

PKS Mendorong Pemerintah untuk serius menangani kondisi penumpukan sampah

Indonesia darurat sampah. Jumlah timbunan pada tahun 2020 mencapai 67,8 juta Ton. Namun, yang terkelola baru mencapai 35,9 juta Ton. Berarti sampah yang tidak terkelola mencapai 31,9 juta Ton, yang baru terkelola baru sebesar 53%, sehingga angka yang belum terkelola mencapai 47%.

Kemungkinan ke depan :

1. Jika setiap tahun hanya terkelola sebanyak 53%, maka sebanyak 30 juta ton sampah akan tidak terkelola setiap tahun
2. Artinya lebih dari 150 juta ton sampah yang akan tidak terkelola selama lima tahun ke depan
3. Hal ini akan menciptakan bencana lingkungan bagi air, udara, tanah, dan juga bencana sosial dan ekonomi.
4. Terutama menjadi ancaman utama dan akan membahayakan bagi pencemaran lingkungan dan juga pencemaran tanah

INDONESIA ! DARURAT SAMPAH

PKS Mendorong Pemerintah Untuk Serius Menangani Kondisi Penumpukan Sampah

■ Timbunan Sampah per Tahun 2020 → **67,8** Juta Ton



→ Terkelola **35,9** Juta Ton



→ Tidak terkelola **31,9** Juta Ton

Kemungkinan Kedepannya

- Jika setiap tahun hanya terkelola sebanyak 53%, maka sebanyak 30 juta ton sampah akan tidak terkelola setiap tahun.
- Lebih dari 150 juta ton sampah yang akan tidak terkelola selama lima tahun ke depan.
- Hal ini akan menciptakan bencana lingkungan bagi air, udara, tanah, bencana sosial, ekonomi, pencemaran lingkungan dan juga pencemaran tanah.



21 Februari 2022 | Lingkungan | Komisi IV

Sampah Dalam Negeri Tak Tertangani,
Impor Sampah Terus Terjadi

PKS: Stop Impor Sampah, Pemerintah Harus Serius Urus Limbah!

Setiap tanggal 21 Februari, Indonesia memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Namun sampai saat ini Indonesia masih berkebutakan dengan pengelolaan sampah dalam negeri.

Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada 2020. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 37,3% sampah di Indonesia berasal dari aktivitas rumah tangga. Sumber sampah terbesar berikutnya berasal dari pasar tradisional, yakni 16,4%. Sebanyak 15,9% sampah berasal dari kawasan.

Indonesia menghasilkan sekitar 300 kg limbah makanan per orang per tahun. Jumlah tersebut menjadi kedua terbesar di dunia.

Indonesia memiliki limbah elektronik sebanyak 1,61 juta metrik ton pada 2019. Menduduki posisi kelima di dunia.

Tak kunjung selesai, impor sampah juga menjadi beban tambahan bagi Tanah Air.

Merujuk pada data Comtrade, Impor limbah plastik Indonesia dari tahun ke tahun

2015: 97 ribu ton
2016: 120 ribu ton
2017: 128 ribu ton
2018: 320 ribu ton
2019: 249 ribu ton
2020: 181 ribu ton

Sampah Dalam Negeri Tak Tertangan Impor Sampah Terus Terjadi

PKS: STOP IMPOR SAMPAH, PEMERINTAH HARUS SERIUS URUS LIMBAH

Setiap tanggal **21 Februari**, Indonesia memperingati **Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)**. Namun, sampai saat ini Indonesia masih berkecukupan dengan pengelolaan sampah dalam negeri.

Pada tahun 2020 Indonesia menjadi penghasil sampah sebanyak **67,8 juta ton**.



37,3% Rumah Tangga
16,4% Pasar Tradisional
15,9% Sampah Kawasan



Indonesia **terbesar kedua dunia** dalam menghasilkan **300 kg** limbah makanan per orang per tahun.



1,61 juta metrik ton limbah elektronik di 2019. Posisi ke lima dunia.

Impor limbah plastik Indonesia dari tahun ke tahun (ribu ton):



Pada Permendag 92/2019, limbah non-B3 yang dapat diimpor hanya berupa sisa reja (sisa buangan) dan scrap. Limbah yang dimaksud juga tidak terkontaminasi limbah B3 atau limbah lainnya.

Namun, aturan ini tak selamanya diindahkan. Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan sering mendapati adanya limbah B3 dibusupkan masuk dalam kontainer yang berisi limbah non-B3.



28 Juni 2022 | Komoditas Pangan | Komisi IV

Penggunaan Kawasan Hutan Yang Tidak Prosedural

PKS Minta Pemerintah Tindak Tegas Perusahaan Hutan Pengemplang Pajak dan Merugikan Negara

Rekap penggunaan kawasan
hutan yang tidak prosedural di
8 provinsi

1 - Kalimantan Tengah

Kebun : 282 unit (3,9 Juta Ha)
Tambang: 629 unit (3,6 Juta Ha)
Kerugian: 158,5 Triliun

2 - Kalimantan Timur

Kebun : 86 unit (720 Ribu Ha)
Tambang: 223 unit (774 Ribu Ha)
Kerugian: 31,5 Triliun

3 - Kalimantan Barat

Kebun : 169 unit (2,1 Juta Ha)
Tambang: 384 unit (3,6 Juta Ha)
Kerugian: 121,4 Triliun

4 - Kalimantan Selatan

Kebun: 32 unit (370 Ribu Ha)
Tambang: 169 unit (84 Ribu Ha)
Kerugian: 9,6 Triliun

5 - Sulawesi Tenggara

Kebun : 9 unit (20 Ribu Ha)
Tambang: 251 unit (617 Ribu Ha)
Kerugian: 13,5 Triliun

6 - Riau

Kebun : 215 unit (333 Ribu Ha)
Tambang: -
Kerugian: 7,1 Triliun

7 - Jambi

Kebun : 52 unit (298 Ribu Ha)
Tambang: 31 unit (62 Ribu Ha)
Kerugian: 7,6 Triliun

8 - Jawa Barat

Kebun : 33 unit (623 Ribu Ha)
Tambang: 20 unit (328 Ribu Ha)
Kerugian: 13,4 Triliun

Penggunaan Kawasan Hutan Yang Tidak Prosedural

PKS MINTA PEMERINTAH TINDAK TEGAS PERUSAHAAN HUTAN PENGEMPLANG PAJAK DAN MERUGIKAN NEGARA

Rekap penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural di 8 provinsi

Kebun : **282 unit (3,9 Juta Ha)**
Tambang : **629 unit (3,6 Juta Ha)**
Kerugian : **158,5 Triliun**
Kalimantan Tengah

Kebun : **86 unit (720 Ribu Ha)**
Tambang : **223 unit (774 Ribu Ha)**
Kerugian : **31,5 Triliun**
Kalimantan Timur

Kebun : **169 unit (2,1 Juta Ha)**
Tambang : **384 unit (3,6 Juta Ha)**
Kerugian : **121,4 Triliun**
Kalimantan Barat

Kebun : **32 unit (370 Ribu Ha)**
Tambang : **169 unit (84 Ribu Ha)**
Kerugian : **9,6 Triliun**
Kalimantan Selatan

Kebun : **9 unit (20 Ribu Ha)**
Tambang : **251 unit (617 Ribu Ha)**
Kerugian : **13,5 Triliun**
Sulawesi Tenggara

Kebun : **215 unit (333 Ribu Ha)**
Tambang : **-**
Kerugian : **7,1 Triliun**
Riau

Kebun : **52 unit (298 Ribu Ha)**
Tambang : **31 unit (62 Ribu Ha)**
Kerugian : **7,6 Triliun**
Jambi

Kebun : **33 unit (623 Ribu Ha)**
Tambang : **20 unit (328 Ribu Ha)**
Kerugian : **13,4 Triliun**
Jawa Barat

Potensi Kerugian Negara

Kebun : **878 unit (8,45 Juta Ha)**
Tambang : **1707 unit (8,7 Juta Ha)**
Kerugian : **362 Triliun**



26 Agustus 2021 | Impor Pangan | Komisi IV

Fakta Impor Pangan Indonesia Semester I tahun 2021

PKS Minta Pemerintah Serious Lindungi Petani Indonesia Dengan Menekan Impor Pangan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sejak Januari-Juni 2021 atau sepanjang semester I-2021, Indonesia telah melakukan impor pangan hingga US\$ 6,13 miliar atau setara dengan Rp 88,21 triliun.

Cabai

Berdasarkan data BPS, impor cabai sepanjang Semester I-2021 sebanyak 27.851,98 ton dengan nilai US\$ 59,47 juta. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan realisasi impor pada Semester I-2020 yang hanya sebanyak 18.075,16 ton dengan nilai US\$ 34,38 juta

Gula

Impor gula terus meningkat dari tahun ke tahun. Paling tidak sampai tahun ini harus mengimpor 3,2 juta ton untuk

importasi gula untuk kebutuhan bahan baku industri makan dan minuman.

Gandum

Impor gandum di 2020 mencapai 10,2 juta ton dengan nilai US\$ 2,6 miliar. Sementara untuk tahun ini hingga Februari 2021 impor gandum mencapai 1,6 juta ton senilai US\$ 463 juta.

Bawang Putih

Impor bawang putih sepanjang Januari-Juni 2021 nilai mencapai US\$ 196,21 juta dengan volume impor sebanyak 181.106,24 ton.

Garam

Sepanjang Januari-Juni 2021, kebutuhan garam yang berhasil diimpor nilainya mencapai US\$ 44,19 juta dengan volume sebanyak 1,26 juta ton. Indonesia langganan impor garam dari beberapa negara. Namun yang paling sering adalah Australia, China, dan India.

FAKTA IMPOR PANGAN INDONESIA SEMESTER I TAHUN 2021

PKS Minta Pemerintah Serius Lindungi Petani Indonesia Dengan Menekan Impor Pangan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sejak Januari-Juni 2021 atau sepanjang semester I-2021, Indonesia telah melakukan **impor pangan hingga US\$ 6,13 miliar** atau setara dengan **Rp 88,21 triliun**.

Cabai

27.851,98 ton

(US\$ 59,47 juta)



Bawang Putih

181.106,24 ton

US\$ 196,21 juta



Gandum

Tahun 2020 :

10,2 juta ton

US\$ 2,6 miliar

Tahun 2021 :

1,6 juta ton

US\$ 463 juta.



Gula Pasir

3,2 juta ton

untuk kebutuhan bahan baku industri makan dan minuman.

Garam

Januari-Juni 2021:

1,26 juta ton

US\$ 44,19 juta



14 Januari 2022 | Ketahanan Pangan | Komisi IV

Harga Bahan Pangan Melonjak, PKS Tuntut Pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat

- Harga sejumlah bahan pokok dan bahan pangan, seperti bawang merah dan cabai, terus meroket.

- Kenaikan harga komoditas-komoditas itu menyebabkan tergerusnya daya beli masyarakat.

- Daging Sapi Rp 145.000/kg

- Cabai Rawit Besar Rp 93.000/kg

- Cabai Rawit Rp 120.000/kg

- Rawit Merah Keriting Rp 100.000/kg

- Ayam Broiler Rp 45.000/kg

- Bawang Putih Rp 37.000/kg

- Bawang Merah Rp 70.000/kg

- Telur Ayam Rp 28.000/kg

Secara tahunan, inflasi umum mencapai angka 4,35 persen, atau sudah lebih besar dari target atau estimasi Pemerintah dan BI yakni sebesar 4,2 persen.

Hasil Survei Konsumen yang dirilis Bank Indonesia (BI) menyebutkan, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juni 2022 berada pada level 128,2 atau menurun dibandingkan Mei 2022 yang berada pada level 128,9.

Harga Bahan Pangan Melonjak,

PKS Tuntut Pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat

Harga sejumlah bahan pokok dan bahan pangan, seperti bawang merah dan cabai, terus meroket.

Kenaikan harga komoditas-komoditas itu menyebabkan tergerusnya daya beli masyarakat.

Daging Sapi
Rp 145.000/kg

Ayam Broiler
Rp 45.000/kg

Cabai Rawit Besar
Rp 93.000/kg

Bawang Putih
Rp 37.000/kg

Cabai Rawit
Rp 120.000/kg

Bawang Merah
Rp 70.000/kg

Rawit Merah Keriting
Rp 100.000/kg

Telur Ayam
Rp 28.000/kg

Secara tahunan, inflasi umum mencapai angka **4,35 persen**, atau sudah lebih besar dari target atau estimasi Pemerintah dan BI yakni sebesar **4,2 persen**.

Hasil Survei Konsumen yang dirilis Bank Indonesia (BI) menyebutkan, **Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)** Juni 2022 berada pada level **128,2** atau menurun dibandingkan Mei 2022 yang berada pada level 128,9

27 April 2022 | Ketahanan Pangan | Komisi IV

Rakyat Kesulitan Beli Kebutuhan Pokok, PKS: Pemerintah Wajib Stabilkan Harga!

Jajak pendapat yang digelar Litbang Kompas pada awal April 2022 menunjukkan mayoritas responden mengalami kesulitan membeli kebutuhan pokok.

7 dari 10 responden mengaku kesulitan menjangkau bahan kebutuhan pokok.

- 31,8% kesulitan membeli barang karena mahal dan langka
- 27,6% kesulitan membeli bahan pokok karena harga mahal
- 11,6% mengalami kesulitan karena barang langka

Mayoritas rakyat, 66,3% menyebut Pemerintah gagal dan tidak mampu mengendalikan harga selama bulan puasa.

Ekonomi rumah tangga juga diguncang dengan kenaikan harga BBM jenis pertamax pada awal April.

8 dari 10 responden menyatakan terdampak kenaikan pertamax.

- 49,5% merasakan imbas langsung sebagai pengguna.
- 28,2% terdampak secara tidak langsung.

Rakyat Kesulitan Beli Kebutuhan Pokok

PKS: Pemerintah Wajib Stabilkan Harga!

■ Jajak pendapat yang digelar Litbang Kompas pada awal April 2022 menunjukkan **mayoritas responden mengalami kesulitan membeli kebutuhan pokok.**



7 dari 10 responden mengaku kesulitan menjangkau bahan kebutuhan pokok.

31,8%

kesulitan membeli barang karena mahal dan langka

27,6%

kesulitan membeli bahan pokok karena harga mahal

11,6%

mengalami kesulitan karena barang langka



mayoritas rakyat

66,3%

menyebut Pemerintah gagal dan tidak mampu mengendalikan harga selama bulan puasa.

■ Ekonomi rumah tangga juga diguncang dengan kenaikan harga BBM jenis pertamax pada awal April.



8 dari 10 responden menyatakan terdampak kenaikan pertamax.

49,5%

merasakan imbas langsung sebagai pengguna.

28,2%

terdampak secara tidak langsung

24 November 2022 | Impor Beras | Komisi IV

Wacana Impor Beras, Fraksi PKS: Utamakan Serap Hasil Panen Petani!

Pemerintah mengaku kesulitan melakukan pengadaan beras untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga akhir tahun 2023. Oleh sebab itu, Bulog menyarankan agar Pemerintah melakukan impor beras akan dilakukan untuk menjaga stok beras.

Cadangan Perum Bulog:
625.000 ton (November 2022)
Target akhir tahun: 1,2 ton CBP

Di sisi lain, Kementerian Pertanian atau Kementan mengatakan bahwa stok beras aman hingga akhir tahun.

(Data Kementan Nov 2022)

1. Proyeksi total produksi meningkat 2,31 persen (1,25 juta ton) dari 2021 sehingga secara kumulatif mencapai 55,67 juta ton.
2. Jika dikonversi ke beras, produksi tahun 2022 diperkirakan mencapai 32 juta ton. Sementara kebutuhan

konsumsi setahun sebesar 30,2 juta ton.

3. Pada tahun ini, diperkirakan Indonesia surplus beras mencapai 1,8 juta ton. Apabila ditambah surplus tahun sebelumnya, jumlah surplus mencapai 5,7 juta ton beras.

4. Produktivitas petani Indonesia mencapai 5-8 ton per hektare (ha).

Data BPS soal Produksi Beras Indonesia:

2018: 33,9 juta ton | 2019: 31,3 juta ton | 2020: 31,5 juta ton | 2021: 31,4 juta ton | 2022 (perkiraan): 32,07 juta ton

Alasan Cadangan Beras Rendah:

Petani langsung menjual beras ke konsumen, bukan Ke Perum Bulog. Hal ini karena harga yang ditetapkan Bulog hanya Rp9.700 per kilogram, sedangkan harga pasaran sudah di atas Rp10.000 per kilogram.

Wacana Impor Beras, PKS: UTAMAKAN SERAP HASIL PANEN PETANI!

- Pemerintah mengaku kesulitan melakukan pengadaan beras untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga akhir tahun 2023. Oleh sebab itu, Bulog menyarankan agar Pemerintah melakukan impor beras akan dilakukan untuk menjaga stok beras.

- Cadangan Perum Bulog:

625.000 Ton

Target Akhir Tahun:

1,2 juta Ton CBP



- Data Kementan November 2022



Proyeksi total **produksi meningkat 2,31 persen** (1,25 juta ton) dari 2021.



Produksi tahun 2022 diperkirakan mencapai **32 juta ton**. Sementara **kebutuhan konsumsi setahun** sebesar **30,2 juta ton**.



Pada tahun ini, diperkirakan Indonesia surplus beras mencapai 1,8 juta ton. Apabila ditambah surplus tahun sebelumnya, **jumlah surplus mencapai 5,7 juta ton beras**.



Produktivitas petani Indonesia mencapai **5-8 ton per hektare (ha)**.



6 Oktober 2021 | Isu Kartu Tani | Komisi IV

Program Kartu Tani, Solusi yang Tidak Efektif

PKS mendesak pemerintah untuk mengevaluasi Program Kartu Tani dan mengalihkan anggarannya untuk pembangunan sarana prasarana pertanian.

Setelah hampir 5 tahun dijalankan, Program Kartu Tani belum dapat dirasakan manfaatnya oleh para petani. Program yang dianggarkan dana 300 miliar ini malah menjadi sebuah pemborosan dan menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Anggaran 300 miliar sebaiknya dialihfungsikan untuk membangun irigasi atau program-program lain yang menstimulasi produktivitas petani.

1. Dari +/- 15 juta kartu yang dicetak, baru 2,28 juta kartu yang digunakan per Agustus 2021
2. Ketidaksiapan infrastruktur jaringan internet di daerah

PROGRAM KARTU TANI, SOLUSI YANG TIDAK EFEKTIF

PKS mendesak pemerintah untuk mengevaluasi Program Kartu Tani dan mengalihkan anggarannya untuk pembangunan sarana prasarana pertanian

- Setelah hampir 5 tahun dijalankan, Program dengan anggaran **300 miliar** ini belum dapat dirasakan manfaatnya oleh para petani.
- Menjadi sebuah pemborosan dan menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

- Sebaiknya dialihfungsikan untuk membangun irigasi atau program-program lain yang menstimulasi produktivitas petani.

- Kartu yang dicetak **15 Juta** yang digunakan baru **2,28 Juta**

Permasalahan:

- Ketidaksiapan infrastruktur jaringan internet di daerah.
- Ketidaksiapan jejaring kios yang menerima penggunaan Kartu Tani



23 Februari 2022 | Komoditas pangan | Komisi IV

Berbagai komoditas naik dan Langka

PKS: Stop membuat Kebijakan yang Membebani Rakyat

- Minyak Goreng Mahal & Langka harga di pasar Rp20.000 per liter
- Gas Elpiji 5,5kg dari harga Rp65.000 naik menjadi Rp76.000
- Materai Naik Dari: Rp6.000 ke: Rp10.000
- Kedelai Mahal menembus Rp11.000 per kilogram
- Tarif Tol Naik Gol 1 Jakarta- Surabaya dari harga Rp691.500 naik menjadi Rp722.000
- BBM Naik: Pertamina Turbo, Pertamina Dex, Dexlite kenaikan harga: Rp 1.500,- s.d Rp 2.650,-
- Gas Elpiji 12kg dari harga Rp139.000 naik menjadi Rp163.000
- PPN Naik dari: 10% ke 11%

Beragam Komoditas Naik dan Langka, **PKS: STOP MEMBUAT KEBIJAKAN YANG BEBANI RAKYAT**



Minyak Goreng Mahal & Langka
harga di pasar
Rp20.000
per liter



Materai Naik

Dari:
Rp6.000
ke:
Rp10.000



Kedelai Mahal
menembus
Rp11.000
per kilogram



Gas Elpiji 5,5kg
dari harga
Rp65.000
naik menjadi
Rp76.000



Gas Elpiji 12kg
dari harga
Rp139.000
naik menjadi
Rp163.000



Tarif Tol Naik

Gol 1 Jakarta-Surabaya dari harga
Rp691.500
naik menjadi
Rp722.000



BBM Naik

- Pertamina Turbo
- Pertamina Dex
- Dexlite

Kenaikan harga:
Rp 1.500 s.d
Rp 2.650



PPN Naik

Dari:
10% ke **11%**

22 Februari 2022 | Komoditas pangan | Komisi IV

Harga minyak goreng meroket
Masyarakat menjerit

PKS Desak Pemerintah Turunkan Harga Minyak Goreng

- Kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng telah dikeluarkan Pemerintah (Permendag No 6 Tahun 2022) dengan rincian :
 - Harga minyak curah Rp11.500/Liter
 - Minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500/Liter
 - Minyak goreng kemasan premium Rp 14.000/LiterKebijakan HET ini mulai berlaku sejak 1 Februari 2022.
- Fakta di lapangan, harga minyak goreng masih ada yang menyentuh Rp 20.000/Liter.
- Pemerintah menggelontorkan subsidi Rp 3,6 triliun untuk penyediaan minyak goreng murah. Namun, keberadaanya tetap ghaib di pasar.
- Persentase peningkatan penyaluran CPO dalam negeri

lebih besar untuk industri biodiesel dibandingkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan.
Industri biodiesel: 19,81%
Pangan (termasuk minyak goreng): 7,62%.

- Masalah berlarut-larut diduga kuat karena keberadaan kartel, penimbunan sepihak, dan persengkokolan produsen besar minyak goreng dalam penetapan harga.
- Dampak: masyarakat rela berdesak-desakan berebut minyak di tengah merebaknya Virus Covid-19 ini; menurunkannya daya beli masyarakat; meningkatnya biaya produksi dan menurunkan pendapatan bagi UMKM.

Harga Minyak Goreng Meroket,
Masyarakat Menjerit

PKS DESAK PEMERINTAH TURUNKAN HARGA MINYAK GORENG

Kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng telah dikeluarkan Pemerintah pada Permendag No 6 Tahun 2022 dengan rincian :

- ⦿ Harga minyak curah **Rp11.500** /liter
- ⦿ Minyak goreng kemasan sederhana **Rp13.500** /liter
- ⦿ Minyak goreng kemasan premium **Rp 14.000** /liter

Fakta di lapangan, **harga minyak goreng** masih ada yang menyentuh harga

Rp 20.000 per liter

Pemerintah menggelontorkan subsidi **Rp 3,6 triliun** untuk penyediaan minyak goreng murah. Namun, keberadaanya tetap ghaib di pasar.

Masalah berlarut-larut diduga kuat karena keberadaan kartel, penimbunan sepihak, dan persengkokolan produsen besar minyak goreng dalam penetapan harga.

Dampak: masyarakat rela berdesak-desakan berebut minyak di tengah merebaknya Virus Covid-19 ini; menurunnya daya beli masyarakat; meningkatnya biaya produksi dan menurunkan pendapatan bagi UMKM.



28 Juni 2022 | Wabah PMK | Komisi V

Wabah PMK Kembali Melanda Indonesia

PKS: Pemerintah Kebobolan dan Terlambat

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali muncul di Indonesia pada tahun 2022.

PMK menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kerbau, domba, kambing, dan lain sebagainya. Jumlah hewan ternak yang terinfeksi PMK adalah sebanyak 240.944 ekor per 24 Juni 2022.

Daerah yang terdampak PMK meliputi 19 provinsi yang tersebar di 216 kabupaten/kota. Kerugian akibat PMK ditaksir mencapai Rp9,9 Triliun.

Masuknya PMK disinyalir akibat perubahan regulasi tentang hewan atau produk hewan impor, yang awalnya berbasis country base menjadi zone base.

"Secara umum, terus terang, penanganan Pemerintah ini terlambat. Seharusnya apabila sudah diprediksi sejak awal, PMK tidak akan meluas. Namun, tidak dilakukan dengan cepat" drh. Slamet.

Wabah PMK Kembali Melanda Indonesia, PKS: Pemerintah Kebobolan dan Terlambat!

■ Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali muncul di Indonesia pada tahun 2022.

■ Jumlah hewan ternak terinfeksi

240.944 ekor
per 24 Juni 2022.

■ Masuknya PMK disinyalir akibat perubahan regulasi tentang hewan atau produk hewan impor, yang awalnya berbasis country base menjadi zone base.

■ Menyerang hewan berkuku belah;



Kerugian akibat PMK

Rp9,9 Triliun



Sapi



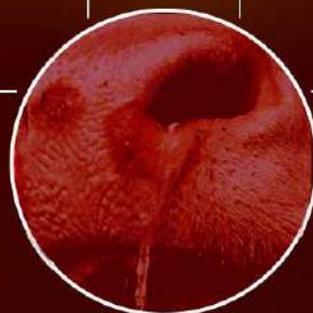
Kerbau



Kambing



Domba



Secara umum, terus terang, penanganan Pemerintah ini terlambat. Seharusnya apabila sudah dieradikasi sejak awal, PMK tidak akan meluas. Namun, tidak dilakukan dengan cepat

drh. H. Slamet

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS



9 Januari 2022 | IKN | Komisi V

Alasan Pemindahan Ibukota Negara
Belum Cukup Kuat, Terkesan Dibuat-Buat!

PKS Menolak Alasan Pemerintah Atas Pemindahan Ibu Kota Karena Tidak Relevan!

- Mengutip Bappenas (2019), terdapat sejumlah alasan IKN perlu dipindahkan : Jakarta sudah tidak memiliki daya dukung untuk mengatasi kepadatan penduduk, polusi, keterbatasan air bersih, kemacetan lalu lintas, dan sebagainya.

PKS Membantah :
Calon ibukota Negara baru pun mengalami hal yang serupa, banjir melanda pedesaan di sekitar titik IKN, dan keterbatasan air bersih hingga sekarang.

- Upaya pemerataan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa.

PKS membantah, Berdasarkan simulasi Computable General

Ekuililibrium(Model CG3) INDEF permindahan IKN tidak berdampak dan kecil terhadap gross domesik product (CDP) rill nasional yakni bernilai 0.02% untuk jangka pendek dan 0,00% untuk jangka panjang

- Mengubah mindset pembangunan darimodel pembangunan yang Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris

PKS membantah:
Pembangunan Indonesia Sentris tidak harus pindah IKN, apalagi APBN sedang tidak sehat karena defisit 4,65% terhadap PDB, utang 41,4% terhadap PDB dan masalah kesinambungan fiskal (indikator kerentanan utang melampaui batas).

Alasan Pemindahan Ibukota Negara
Belum Cukup Kuat, Terkesan Dibuat-Buat!

PKS MENOLAK ALASAN PEMERINTAH ATAS PEMINDAHAN IBU KOTA KARENA TIDAK RELEVAN!

Mengutip Bappenas (2019), terdapat sejumlah alasan IKN perlu dipindahkan

🔊 Jakarta sudah tidak memiliki daya dukung untuk mengatasi kepadatan penduduk, polusi, keterbatasan air bersih, kemacetan lalu lintas, dan sebagainya.

PKS Membantah!

Calon Ibukota Negara baru pun mengalami hal yang serupa, banjir melanda pedesaan di sekitar titik IKN, dan keterbatasan air bersih hingga sekarang.

🔊 Upaya pemerataan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa.

PKS Membantah!

Berdasarkan simulasi Computable General Equilibrium (Model CG3) INDEF pemindahan IKN tidak berdampak dan kecil terhadap gross domestik product (GDP) riil nasional yakni bernilai 0.02% untuk jangka pendek, dan 0,00% untuk jangka panjang.

🔊 Mengubah mindset pembangunan dari model pembangunan yang Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris

PKS Membantah!

Pembangunan Indonesia sentris tidak harus pindah IKN, apalagi APBN sedang tidak 'sehat' karena defisit 4,65% terhadap PDB, utang 41,4% terhadap PDB dan masalah kesinambungan fiskal (indikator kerentanan utang melampaui batas)



16 Januari 2022 | IKN | Komisi V

Pemindahan IKN Kejar Tayang,
Lingkungan Hidup Terancam!

PKS Menolak Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Karena Berpotensi Merusak Lingkungan & Konservasi

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) akan mengancam kondisi lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati di Kalimantan yang merupakan paru-paru dunia.

Sebaran spesies penting dapat dijumpai di Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Lindung yang berada di sekitar wilayah IKN dan Kawasan Pelestarian Alam berupa; Burung Endemik, Orang Utan, Beruang Madu, Lutung Merah, Owa Kelawat, Macan Dahan, Bekatan, Kucing Hutan, Rusa Sambar dan lainnya. Sekarang terancam punah.

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di wilayah Ibukota Negara Baru ada

sekitar:

- 527 jenis tumbuhan
 - lebih dari 100 mamalia
 - 180 jenis burung
 - 25 herpetofauna
- dan terdapat spesies dengan status konservasi tinggi, dilindungi, endemik dan spesies penting yang harus dilindungi.

Hasil Indeks Bahaya Banjir di sebagian besar hulu Teluk Balikpapan mencapai angka 0,75 (FWI, 2018). Kawasan ini notabene akan dibangun lokasi ring satu.

- Nilai Indeks Bahaya Banjir tersebut dikategorikan ke dalam zona bahaya tinggi banjir.
- Pembangunan besar-besaran di lokasi itu akan menambah potensi banjir di Ibukota Negara Baru.

Pemindahan IKN Kejar Tayang,
Lingkungan Hidup Terancam!

PKS MENOLAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BARU KARENA BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN & KONSERVASI

- Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) akan mengancam kondisi lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati di Kalimantan yang merupakan paru-paru dunia.
- Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di wilayah Ibukota Negara Baru ada sekitar:

 **527**
jenis tumbuhan

 **> 100**
mamalia

 **180**
jenis burung,

 **25**
herpetofauna

dan terdapat spesies dengan status konservasi tinggi, dilindungi, endemik dan spesies penting yang harus dilindungi.

- Sebaran spesies penting dapat dijumpai di Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Lindung yang berada di sekitar wilayah IKN dan Kawasan Pelestarian Alam berupa; Burung Endemik, Orangutan, Beruang Madu, Lutung Merah, Owa Kelawat, Macan Dahan, Bekatan, Kucing Hutan, Rusa Sambar dan lainnya. Sekarang **terancam punah**.

- Hasil Indeks Bahaya Banjir di sebagian besar hulu Teluk Balikpapan mencapai angka **0,75** (FWI, 2018). Kawasan ini notabene akan dibangun lokasi ring satu.

 Nilai Indeks Bahaya Banjir tersebut dikategorikan ke dalam **zona bahaya tinggi banjir**.

 Pembangunan besar-besaran di lokasi itu akan **menambah potensi banjir** di Ibukota Negara Baru.



2022 | IKN | Komisi V

Ibu Kota Pindah ke Kalimantan,
Bagaimana Soal Keamanan?

PKS Pertimbangkan Beban Anggaran Pertahanan IKN

Pemindahan ibu kota harus diikuti persiapan alutsista, karena persediaan alutsista mayoritas masih berada di Pulau Jawa.

Jika pindah, banyak alutsista yang perlu ditambah, seperti instalasi artileri udara, instalasi squadron tempur, termasuk

kantor dan kompleks anggota militer di sekitar ibu kota. Artinya, anggaran untuk alutsista harus ditambah.

TNI harus melakukan relokasi dan membentuk satuan-satuan baru. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 118 Triliun. Jumlah yang sangat besar.

Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Bagaimana Soal Keamanan? **PKS PERTIMBANGKAN BEBAN ANGGARAN PERTAHANAN IBU KOTA NEGARA BARU**



■ Pemindahan Ibu kota berdampak besar pada **beban anggaran** dan **risiko pertahanan**. Pemindahan ibu kota **harus diikuti persiapan alutsista**, karena persediaan alutsista mayoritas masih berada di Pulau Jawa.

■ Jika pindah, **banyak alutsista yang perlu ditambah**, seperti instalasi artileri udara, instalasi squadron tempur, termasuk kantor dan kompleks anggota militer di sekitar Ibu kota.

Total anggaran yang diperlukan :

Rp 118 Triliun

2 Juli 2022 | IKN | Komisi V

5 Negara Gagal Pindahkan Ibu Kota Negara

PKS: Indonesia Berpotensi Menjadi yang Selanjutnya

Aspek-aspek yang menyebabkan pemindahan Ibukota dinilai gagal ialah: minimnya jumlah penduduk/sepi di ibu kota baru, goyahnya kondisi ekonomi negara akibat pemindahan ibu kota, dan lambannya laju ekonomi di ibu kota baru.

Berikut sejumlah negara yang dikategorikan gagal dalam proyek pemindahan Ibu Kota Negara:

- Kazaktan, Almaty dinilai sudah padat dan rawan gempa. Namun, mirip dengan di Myanmar, pemindahan ibu kota ke lokasi yang jauh dipandang sebagai langkah rezim untuk mengamankan kekuasaan.
- Tanzania, Faktor keamanan, lokasi Dodoma dinilai lebih strategis karena pusat kota, serta memiliki iklim yang baik.
- Myanmar, Lebih cenderung ke

faktor keamanan, mengamankan kekuasaan rezim, dan dijadikan legacy oleh pemimpin junta militer.

- Malaysia, Kuala Lumpur dianggap sudah sangat macet dan padat.
- Australia, Jalan tengah dari persaingan antar dua kota, yakni Sydney dan Melbourne.

Indonesia, Sejak awal PKS menolak pemindahan Ibu Kota Negara Baru. Ada sejumlah faktor yang membuat PKS menolak pemindahan IKN, yakni ngebutnya pengesahan RUU IKN, defisit APBN, serta situasi pandemi Covid-19 belum sepenuhnya terkendali.

5 Negara Gagal Pindahkan Ibu Kota Negara

PKS: INDONESIA BERPOTENSI MENJADI YANG SELANJUTNYA.

Aspek-aspek yang menyebabkan pemindahan Ibukota dinilai gagal ialah: minimnya jumlah penduduk/sepi di ibu kota baru, goyahnya kondisi ekonomi negara akibat pemindahan Ibu kota, dan lambannya laju ekonomi di ibu kota baru.

Berikut sejumlah negara yang dikategorikan gagal dalam proyek pemindahan Ibu Kota Negara:



Sejak awal PKS menolak pemindahan Ibu Kota Negara Baru. Ada sejumlah faktor yang membuat PKS menolak pemindahan IKN, yakni ngebutnya pengesahan RUU IKN, defisit APBN, serta situasi pandemi Covid-19 belum sepenuhnya terkendali.

21 Januari 2022 | IKN | Komisi V

Belum Urgent, Anggaran Pembangunan IKN Abaikan Prioritas Sektor Pendidikan

PKS Ingatkan Pemerintah; Daripada Pindah IKN Lebih Baik Fokus Perhatikan Guru Honorer Di Indonesia

Berdasar data tahun 2018: guru bukan PNS di sekolah negeri 735,82 ribu orang. guru bukan PNS di sekolah swasta 798,2 ribu orang.

Jumlah tenaga guru honorer K2 saat ini mencapai 1,53 juta orang, dari jumlah guru keseluruhan di Indonesia sebanyak 3,2 juta orang.

Pada tahun 2022, Indonesia diprediksi kekurangan guru berstatus PNS sebanyak 1.167.802 orang. Sedangkan pada tahun 2024, kekurangan guru berstatus PNS diprediksi mencapai angka 1.312.759 orang.

Jika dana pembangunan Ibu Kota Negara baru yang berjumlah 466 TRILIUN digunakan untuk mengangkat status seluruh guru honorer di Indonesia menjadi PPPK, maka sebenarnya dana itu cukup untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer dalam jangka waktu kontrak 4 tahun ke depan. Itu artinya, selama 4 tahun mendatang, guru-guru ini bisa fokus untuk mengajar, kesejahteraan keluarga guru terangkat, dan generasi bangsa menjadi tercerdaskan.

Belum Urgent, Anggaran Pembangunan IKN Abaikan Prioritas Sektor Pendidikan

PKS Ingatkan Pemerintah;

Daripada Pindah IKN Lebih Baik Fokus Perhatikan Guru Honorer Di Indonesia



10 November 2021 | IKN | Komisi V

Pertahanan ibukota harus terjamin baik di darat, laut, maupun udara.

PKS Ingatkan, Letak IKN Baru Dekat Wilayah "konflik" Internasional

- Sengketa Laut Cina Selatan, saat ini Laut Cina Selatan tengah menjadi obyek sengketa enam negara Asia dengan sejumlah klaim tumpang tindih (competing claims) mengenai kepemilikan negara yang bersengketa, antara lain Tiongkok, Taiwan, Malaysia, Vietnam Filipina dan Brunei Darussalam.

- Konflik Sabah, Pemerintah Malaysia dan Filipina tengah bersengketa mengenai kepemilikan wilayah Sabah.

Padahal Ibukota negara merupakan area penting bagi negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi dan administrasi negara.

- Sengketa Blok Ambalat, merupakan obyek sengketa berkepanjangan antara Indonesia-Malaysia. Perairan Ambalat merupakan area yang memiliki cadangan minyak dan gas alam yang besar.

Pertahanan ibukota harus terjamin baik di darat, laut, maupun udara.

PKS INGATKAN, LETAK IKN BARU DEKAT WILAYAH “KONFLIK” INTERNASIONAL

Sengketa Laut Cina Selatan

Saat ini, Laut Cina Selatan tengah menjadi obyek sengketa enam negara Asia dengan sejumlah klaim tumpang tindih (competing claims) negara yang bersengketa, antara lain Tiongkok, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina dan Brunei



Konflik Sabah

Pemerintah Malaysia dan Filipina tengah bersengketa mengenai kepemilikan wilayah Sabah.



Sengketa Blok Ambalat

Blok Ambalat merupakan obyek sengketa berkepanjangan antara Indonesia-Malaysia. Perairan Ambalat merupakan area yang memiliki cadangan minyak dan gas alam yang besar.



“Padahal Ibukota negara merupakan area penting bagi negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi dan administrasi negara.”

11 Oktober 2021 | APBN untuk Kereta Cepat | Komisi IV

Inkonsisten, Presiden Setuju Biaya Kereta Cepat Pakai APBN

PKS Meminta Pemerintah Lebih Cermat Dalam Merencanakan Proyek Raksasa

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan nilai investasi Rp 86,6 Triliun ini mengalami pembengkakan biaya sebesar Rp 27 Triliun.

Pada tahun 2015 Presiden Jokowi mengatakan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak akan menggunakan APBN. "Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk B to B." kata Jokowi saat itu.

Namun pada 9 Oktober 2021 Presiden Jokowi restui penggunaan APBN untuk pendanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Hal tersebut terungkap dalam Perpres Nomor 93 Tahun 2021.

INKONSISTEN, PRESIDEN SETUJU BIAYA KERETA CEPAT PAKAI APBN

**PKS Meminta Pemerintah Lebih Cermat
Dalam Merencanakan Proyek Raksasa**

■ Tahun 2015

Presiden Jokowi mengatakan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung **tidak akan menggunakan APBN.**

"Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk B to B." kata Jokowi saat itu.



Panjang
142,3 KM



Target Operasi
2021



Nilai investasi
Rp 86,6 Triliun



Biaya membengkok
Rp 27 Triliun

■ 9 Oktober 2021

Presiden Jokowi restui penggunaan APBN untuk pendanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Hal tersebut terungkap dalam Perpres Nomor 93 Tahun 2021.



Nilai Saham

60%
PT Pilar Sinergi
BUMN Indonesia

40%
Beijing Yawan
HSR Co Ltd.



26 Februari 2022 | IKN | Komisi V

Per Tanggal 26 Februari
Tarif Tol Dalam Kota Naik,

PKS : Bataalkan Kenaikan Tarif Tol!

Penyesuaian tarif tol telah diatur dalam pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dengan perubahan terakhir pada PP Nomor 17 Tahun 2021.

Berikut merupakan Kenaikan Tarif Tol Dari Januari 2022 ke Februari 2022

:

Golongan 1 :

Dari Rp. 10.000
menjadi Rp. 10.500

Golongan 2 & 3 :

Dari Rp. 15.000
menjadi Rp. 15.500

Golongan 4 & 5 :

Dari Rp. 17.000
menjadi Rp. 17.500

Penyesuaian tariff tol tersebut dilakukan untuk ruas Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, H. Suryadi Jaya Purnama mendesak agar Pemerintah mengatur dulu SPM Jalan Tol melalui Peraturan Pemerintah sesuai dengan UU Jalan Baru kemudian memutuskan melakukan penyesuaian tarif Jalan Tol.

- Penyesuaian tarif tol telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dengan perubahan terakhir pada PP Nomor 17 Tahun 2021.

Per Tanggal 26 Februari Tarif Tol Dalam Kota Naik **PKS: BATALKAN KENAIKAN TARIF TOL**



Penyesuaian tarif tol dilakukan untuk ruas

- Cawang-Tomang-Pluit
- Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur - Jembatan Tiga/Pluit

“Fraksi PKS mendesak agar Pemerintah mengatur dulu SPM Jalan Tol melalui Peraturan Pemerintah sesuai dengan UU Jalan baru kemudian memutuskan melakukan penyesuaian tarif Jalan Tol.

H. Suryadi Jaya
Purnama, S.T.
(Anggota Komisi V
DPR RI FPKS)



- Daftar Kenaikan Tarif Tol
Dari Januari 2022 ke Februari 2022

- Golongan 1 **Rp 10.000** ➔ **Rp 10.500**
- Golongan 2 & 3 **Rp 15.000** ➔ **Rp 15.500**
- Golongan 4 & 5 **Rp 17.000** ➔ **Rp 17.500**



17 April 2022 | Jalan Tol | Komisi V

Klaim Capaian Pembangunan Jalan Tol, PKS : Hasilnya Belum Signifikan Dongkrak Ekonomi Negara

Selama 1978-2014, pembangunan jalan tol di Indonesia mencapai 802 kilometer, dengan rincian sebagai berikut :

- 1978-1998 : 561 KM
- 1999-2004 : 13 KM
- 2005-2014 : 228 KM
- 2015-2021 : 1698,9 KM (era Jokowi)

Namun, agresivitas pembangunan jalan tol pada era Jokowi belum berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

PDB tertinggi pada era SBY yaitu mencapai 6,50% pada tahun 2011 dengan mayoritas beda diangka >6%. Sedangkan PDB tertinggi pada era Jokowi yaitu mencapai 5,17% pada tahun 2018 dengan mayoritas hanya di angka 5%.

Biaya logistik Indonesia masih yang tertinggi di ASEAN yaitu sebesar 24% dari PDB, Sedangkan Thailand sebesar 15% dari PDB, Vietnam sebesar 20% dari PDB, dan Malaysia sebesar 13% dari PDB.

Klaim Capaian Pembangunan Jalan Tol, **PKS: Hasilnya Belum Signifikan Dongkrak Ekonomi Negara**

■ Selama 1978-2014, pembangunan jalan tol di Indonesia mencapai **802 kilometer**.

2005-2014
228 KM

2015-2021 (era Jokowi)

1698,9 KM

Tapi agresivitas pembangunan jalan tol Jokowi belum berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

1978-1998
561 KM

1999-2004
13 KM

■ PDB tertinggi era SBY:
6,50% (2011)
mayoritas beda di angka >6%

■ PDB tertinggi era Jokowi:
5,17% (2018)
mayoritas hanya di angka 5%

■ Biaya logistik Indonesia masih yang tertinggi di ASEAN

 **24%** dari PDB

 **15%** dari PDB

 **20%** dari PDB

 **13%** dari PDB



6 Maret 2023 | Energi | Komisi VII

Bukan Yang Pertama Kilang Minyak
Pertamina Terbakar,

PKS Desak Pemerintah Investigasi dan Evaluasi Menyeluruh

Kebakaran terjadi di Depo Pertamina Plumpang,
Jakarta Utara pada Jumat (3/3/2023) malam.

Insiden kebakaran di Depo Pertamina Plumpang
bukan terjadi untuk pertama kalinya. Sebelumnya
pada 2009 kejadian kebakaran juga pernah terjadi di
lokasi tersebut.

Selain di Depo Pertamina Plumpang, berikut ini
daftar kejadian kebakaran di kilang milik Pertamina
dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

1. Kilang Pertamina Balikpapan (15 Agustus 2019)
2. Kilang Pertamina Cepu (9 April 2020)
3. Kilang Pertamina Balongan (29 Maret 2021)
4. Kilang Pertamina Cilacap (11 Juni 2021)
5. Kilang Pertamina Cilacap (13 November 2021)
6. Kilang Pertamina Balikpapan (4 Maret 2022)
7. Kilang Pertamina Balikpapan (15 Mei 2022)
8. Kilang Pertamina Balongan (7 September 2022)
9. Kilang Pertamina Plumpang (3 Maret 2023)

KEBAKARAN DEPO DAN KILANG MINYAK PERTAMINA (KMP) BUKAN YANG PERTAMA, PKS DESAK PEMERINTAH INVESTIGASI DAN EVALUASI MENYELURUH!

Insiden kebakaran di Depo Pertamina Plumpang bukan terjadi untuk pertama kalinya. Sebelumnya pada 2009 kejadian kebakaran juga pernah terjadi di lokasi tersebut.

Daftar kejadian kebakaran Kilang Pertamina dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

KMP Balikpapan
(15 Agustus 2019)



KMP Cepu
(9 April 2020)



KMP Balongan
(29 Maret 2021)



KMP Cilacap
(11 Juni 2021)



KMP Cilacap
(13 November 2021)



KMP Balikpapan
(4 Maret 2022)



KMP Balikpapan
(15 Mei 2022)



KMP Balongan
(7 September 2022)



KMP Plumpang
(3 Maret 2023)



Foto : berbagai sumber

30 Juni 2022 | Jalan Tol | Komisi V

Minyak Curah dan BBM
Dibatasi Pakai Aplikasi,

PKS : Pemerintah Tidak Memecahkan Akar Masalah!

Pada Senin, 27 Juni 2022, Pemerintah melakukan uji coba pembelian Minyak Curah dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

Namun, Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Dari Fraksi PKS, Dr. H. Mulyanto, M.Eng. Peduli Lindungi hanya mempersulit masyarakat saja. Seharusnya yang dilakukan pemerintah ialah pembenahan pada tingkat produsen dan distributor migor curah karena bagaimanapun selagi kendala tersebut belum teratasi, maka harga minyak goreng akan terus mengalami kenaikan.

Lalu, pada Jumat, 1 Juli 2022, Pemerintah melalui Pertamina juga akan melakukan uji coba pembelian Peralite dan Solar menggunakan aplikasi MyPertamina pada jenis kendaraan tertentu di 11 wilayah.

Potensi masalah :

1. Jaringan internet di lokasi
2. Akses masyarakat yang membutuhkan gadget masih belum merata
3. Menyulitkan masyarakat, tidak efektif batasi kebocoran subsidi.

MINYAK CURAH DAN BBM DIBATASI PAKAI APLIKASI

PKS: PEMERINTAH TIDAK MEMECAHKAN AKAR MASALAH !

■ Senin, 27 Juni 2022, Pemerintah melakukan uji coba pembelian **Minyak Curah** dengan menggunakan aplikasi **Peduli Lindungi**.

■ Jumat, 1 Juli 2022, Pemerintah melalui Pertamina juga akan melakukan uji coba pembelian **Pertalite dan Solar** menggunakan aplikasi **MyPertamina** pada jenis kendaraan tertentu di 11 wilayah.



Potensi masalah:

1. Jaringan internet di lokasi
2. Akses masyarakat yang membutuhkan gadget masih belum merata
3. Menyulitkan rakyat, tidak efektif batasi kebocoran subsidi



Peduli Lindungi hanya mempersulit masyarakat saja. Seharusnya yang dilakukan pemerintah ialah pembenahan pada tingkat produsen dan distributor migor curah karena bagaimanapun selagi kendala tersebut belum teratasi, maka harga minyak goreng akan terus mengalami kenaikan

Dr. H. Mulyanto, M.Eng.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS

25 Maret 2021 | Lingkungan | Komisi IV

Indonesia Masih Impor Air?

Fraksi PKS : Seharusnya Pemerintah lebih memprioritaskan penyediaan air yang bersih dan berkualitas di dalam negeri terlebih dahulu dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Hingga saat ini, Indonesia masih mengimpor air. Mengutip data Badan Statistik (BPS), setidaknya ada tiga jenis air yang masih diimpor oleh Indonesia, yaitu Air Mineral, Air berkarbonasi alias sparkling water, Air berkarbonasi dengan rasa. Dimana Total Impor Air pada tahun 2020 sebesar US\$ 3,89 juta/Rp 56,4 M.

Namun, disaat yang sama Indonesia juga mengekspor air. Adanya ekspor air minum ini tentu sangat memprihatinkan, sebab masih adanya masyarakat yang membutuhkan air minum yang bersih dan berkualitas. Dimana Ekspor Air sepanjang tahun 2020 sebesar US\$ 14,5 juta/Rp 210,2 M.

INDONESIA MASIH IMPOR AIR?

Fraksi PKS : Seharusnya Pemerintah lebih memprioritaskan penyediaan air yang bersih dan berkualitas di dalam negeri terlebih dahulu dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.



- Hingga saat ini, **Indonesia masih mengimpor air.** Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), setidaknya ada tiga jenis air yang masih diimpor oleh Indonesia.



Air Mineral



Air berkarbonasi alias sparkling water



Air berkarbonasi dengan rasa

- Total impor 2020



- Namun, di saat yang sama **Indonesia juga mengekspor air.**
- Adanya **ekspor air minum** ini tentu sangat memprihatinkan, sebab **masih adanya masyarakat yang membutuhkan air minum yang bersih dan berkualitas.**

- Ekspor sepanjang 2020 **US\$ 14,5 juta/ Rp 210,2 M**

9 Januari 2021 | Pangan | Komisi IV

PKS Sesalkan Fluktuasi Kenaikan Harga Cabai dan Daging Sapi

Mahalnya harga cabai karena banyaknya petani yang gagal panen. Jadi meskipun harga cabai naik petani tidak diuntungkan, dan konsumen banyak dirugikan. Hal ini terjadi karena peran Pemerintah sebagai stabilisator lemah.

Berikut merupakan rincian harga daging sapi pada awal Desember 2020 – awal Januari 2021 (Dalam rupiah per kilogram) :

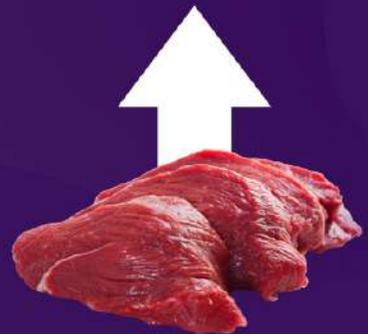
- o 1 Desember 2020 : 118.400
- o 5 Desember 2020 : 118.400
- o 10 Desember 2020 : 118.600
- o 15 Desember 2020 : 118.700
- o 20 Desember 2020 : 118.850
- o 25 Desember 2020 : 118.350
- o 30 Desember 2020 : 118.600
- o 4 Januari 2021 : 118.750
- o 8 Januari 2021 : 119.450

Berikut merupakan rincian harga cabe merah dan cabe rawit periode Desember 2020 – Januari 2021 :

- o 1 Desember 2020
 - Cabe Merah : 45.300
 - Cabe Rawit : 42.600
- o 4 Desember 2020
 - Cabe Merah : 47.450
 - Cabe Rawit : 43.800
- o 10 Desember 2020
 - Cabe Merah : 50.050
 - Cabe Rawit : 47.350
- o 15 Desember 2020
 - Cabe Merah : 51.150
 - Cabe Rawit : 47.950
- o 21 Desember 2020
 - Cabe Merah : 54.950
 - Cabe Rawit : 51.700
- o 28 Desember 2020
 - Cabe Merah : 59.550
 - Cabe Rawit : 58.600
- o 30 Desember 2020
 - Cabe Merah : 58.100
 - Cabe Rawit : 60.150
- o 4 Januari 2021
 - Cabe Merah : 57.550
 - Cabe Rawit : 68.100
- o 8 Januari 2021
 - Cabe Merah : 54.900
 - Cabe Rawit : 69.800

PKS Sesalkan Fluktuasi Kenaikan Harga Cabai dan Daging Sapi

Mahalnya harga cabai karena banyaknya petani yang gagal panen. Jadi meskipun harga cabai naik petani tidak diuntungkan, dan konsumen banyak dirugikan. Hal ini terjadi karena peran Pemerintah sebagai stabilisator lemah.



Keterangan :
Dalam rupiah per kilogram



Periode Des 2020 - Jan 2021

Grafis : Aditya Angga

Sumber : Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional



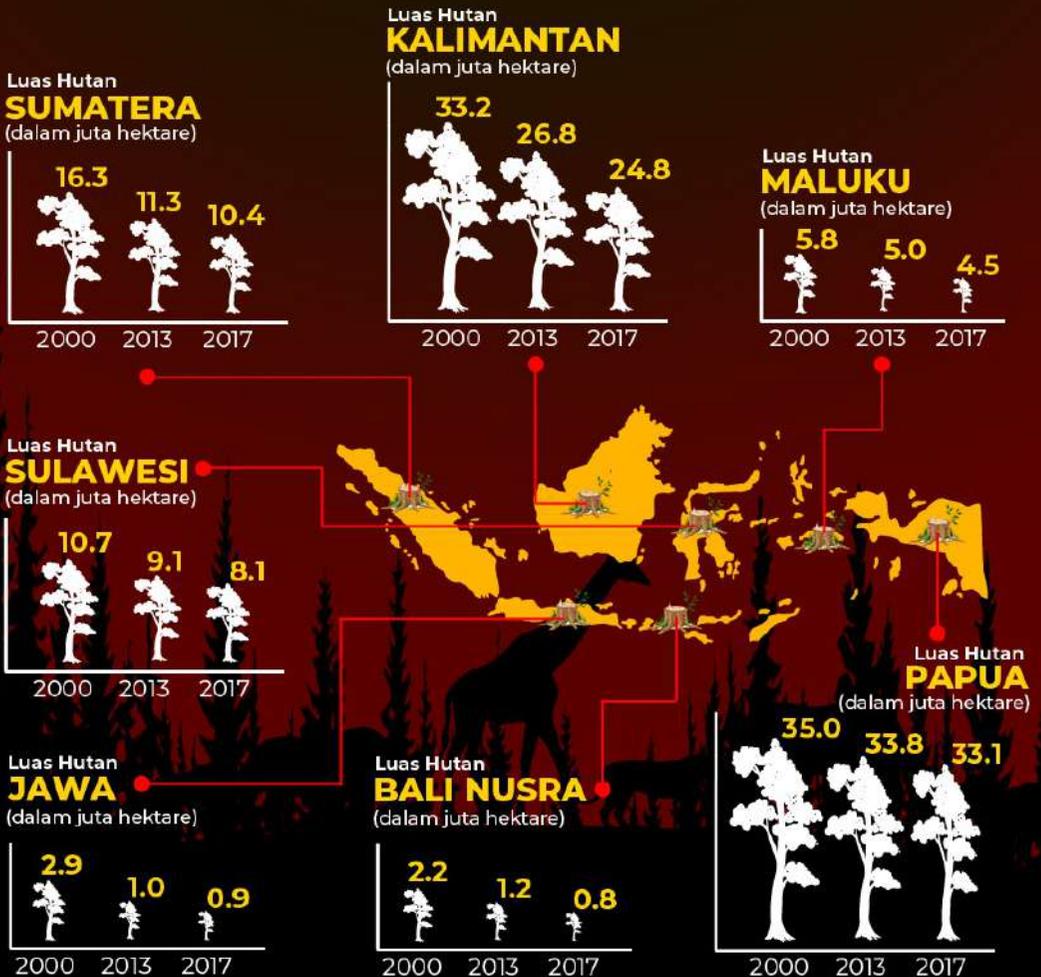
20 Januari 2021 | Lingkungan | Komisi IV

PKS Mengkritisi

dan Meminta Pemerintah Serius
Mencegah Laju Deforestasi Hutan
di Indonesia yang Menyebabkan
Bencana Awal & Banjir Bandang

- o Luas Hutan Sumatera
(dalam juta hektare)
Tahun 2000 : 16.3
Tahun 2013 : 11.3
Tahun 2017 : 10.4
- o Luas Hutan Sulawesi
(dalam juta hektare)
Tahun 2000 : 10.7
Tahun 2013 : 9.1
Tahun 2017 : 8.1
- o Luas Hutan Jawa
(dalam juta hektare)
Tahun 2000 : 2.9
Tahun 2013 : 1.0
Tahun 2017 : 0.9
- o Luas Hutan Bali Nusra
(dalam juta hektare)
Tahun 2000 : 2.2
Tahun 2013 : 1.2
Tahun 2017 : 0.8
- o Luas Hutan Papua
(dalam juta hektare)
Tahun 2000 : 35.0
Tahun 2013 : 33.8
Tahun 2017 : 33.1
- o Luas Hutan Maluku
(dalam juta hektare)
Tahun 2000 : 5.8
Tahun 2013 : 5.0
Tahun 2017 : 4.5
- o Luas Hutan Kalimantan
(dalam juta hektare)
Tahun 2000 : 33.2
Tahun 2013 : 26.8
Tahun 2017 : 24.8

PKS Mengkritisi dan Meminta Pemerintah Serius Mencegah Laju Deforestasi Hutan di Indonesia yang Menyebabkan Bencana Alam & Banjir Bandang



11 Desember 2021 | IKN | Komisi V

Jumlah 56 Anggota Pansus RUU IKN

Langgar Peraturan DPR 1/2020
F-PKS menyoroti pembentukan
Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara

Pasal 104 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib menyatakan jumlah maksimal pansus RUU IKN yaitu terdiri dari 30 anggota pansus dan 3 wakil ketua.

Sementara, dalam rapat Paripurna pada Selasa, 7 Desember 2021 lalu DPR menyepakati 56 anggota pansus dan 5 wakil ketua.

Anggota komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, H.Suryadi Jaya Purnama, S.T. mengatakan bahwa jumlah ini melebihi ketentuan yang telah diatur pada pasal 104 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

Jumlah 56 Anggota Pansus RUU IKN Langgar Peraturan DPR 1/2020

F-PKS menyoroti pembentukan Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara

- Pasal 104 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib menyatakan jumlah maksimal pansus RUU IKN

30 anggota pansus & **3** wakil ketua

- Sementara, dalam rapat Paripurna Selasa, 7 Desember 2021 lalu DPR menyepakati

56 anggota pansus & **5** wakil ketua



Jumlah ini melebihi ketentuan yang telah diatur pada Pasal 104 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib

H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
Anggota Komisi V DPR RI F-PKS



30 Desember 2021 | Energi | Komisi VII

Premium Dihapus,
Padahal Rakyat Masih Butuh

PKS Tolak Rencana Penghapusan BBM Jenis Premium

Pemerintah menggulirkan rencana penghapusan BBM jenis Premium pada tahun 2022 mendatang di tengah beban rakyat yang masih terdampak pandemi. Hal tersebut dikatakan merupakan bagian dari roadmap BBM Ramah Lingkungan yang diupayakan Pemerintah.

Nantinya, masyarakat akan menggunakan BBM minimal jenis Pertamina (RON 92) yang saat ini dijual oleh PT Pertamina pada harga Rp. 9.000/liter dan Pertamina Turbo (RON 98) pada harga Rp. 12.300/liter.

Alasan Pemerintah menghapus Premium karena permintaan yang menurun. Padahal, turunnya permintaan diakibatkan oleh pasokan Premium yang dikurangi. Penghapusan Premium akan menimbulkan efek domino. Biaya transportasi akan naik, barang-barang yang diangkut akan naik.

Premium Dihapus,
Padahal Rakyat Masih Butuh

PKS TOLAK RENCANA PENGHAPUSAN BBM JENIS PREMIUM

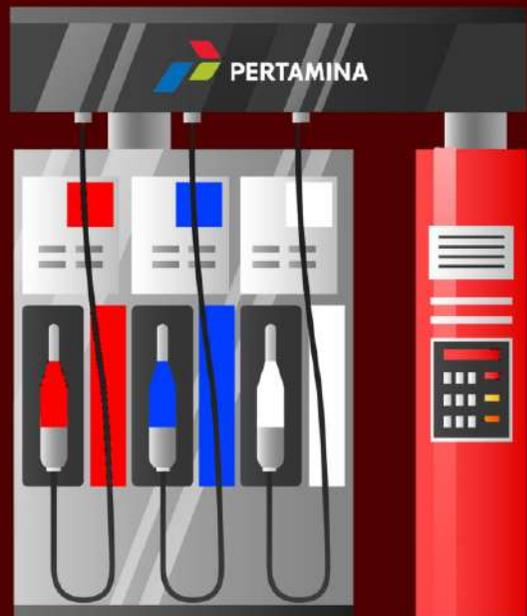
■ Pemerintah menggulirkan rencana **penghapusan** BBM jenis **Premium** pada tahun 2022 mendatang **di tengah beban rakyat** yang masih terdampak pandemi.

■ Hal tersebut dikatakan merupakan bagian dari roadmap BBM Ramah Lingkungan yang diupayakan Pemerintah.

 Nantinya, masyarakat akan menggunakan BBM **minimal** jenis **Pertamax (RON 92)** yang saat ini dijual oleh PT Pertamina pada harga **Rp9.000/liter** dan **Pertamax Turbo (RON 98)** pada harga **Rp12.300/liter**.

 Alasan Pemerintah menghapus Premium karena permintaan yang menurun. Padahal, turunnya permintaan diakibatkan oleh **pasokan Premium yang dikurangi**.

 Penghapusan Premium akan menimbulkan **efek domino**. Biaya transportasi akan naik, barang-barang yang diangkut akan naik.



12 Desember 2021 | Pangan | Komisi IV

Ironi Produsen Sawit,
Harga Minyak Goreng Melejit

Masyarakat Makin Sulit PKS Desak Pemerintah Atasi Lonjakan Harga Minyak Goreng

Per Senin, 1 November 2021, data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) hingga kini menyebutkan bahwa harga minyak goreng di sejumlah daerah mengalami lonjakan.

Faktor lonjakan harga minyak goreng :

- o Kenaikan harga minyak sawit mentah dunia
- o Kurangnya pasokan bahan baku di pasar minyak nabati dan lemak secara global akibat pandemi dan cuaca buruk. Dampak dari lonjakan harga minyak goreng :
- o Daya beli masyarakat menurun

- o Pelaku UMKM yang menggunakan minyak goreng semakin semakin terbebani
- o Kesejahteraan pedagang menurun, awalnya bisa menjual 50-60 liter minyak curah/hari, sekarang 20-30 liter minyak curah/hari.

Kenaikan harga minyak goreng curah Rp 7.000/liter dengan rincian sebagai berikut :

Harga minyak goreng curah Rp 20.150/liter

Harga minyak goreng kemasan Rp 18.000/liter hingga Rp 20.250/liter

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 7/2020, Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng adalah Rp 11.000/liter.

IRONI PRODUSEN SAWIT, HARGA MINYAK GORENG MELEJIT

MASYARAKAT MAKIN SULIT

PKS Desak Pemerintah Atasi Lonjakan Harga Minyak Goreng

- Per Senin (1/11/2021), data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) hingga kini menyebutkan bahwa harga minyak goreng di sejumlah daerah mengalami lonjakan.

Faktor:

- Kenaikan harga minyak sawit mentah dunia.
- Kurangnya pasokan bahan baku di pasar minyak nabati dan lemak secara global akibat pandemi dan cuaca buruk.

Dampak:

- Daya beli masyarakat menurun
- Pelaku UMKM yang menggunakan minyak goreng semakin terbebani
- Kesejahteraan pedagang menurun, awalnya bisa menjual

50-60 liter minyak curah/hari
sekarang

20-30 liter minyak curah/hari

- Kenaikan harga minyak goreng curah

Rp7.000 /liter



Harga minyak goreng curah

Rp20.150 /liter



Harga minyak goreng kemasan

Rp18.000 /liter

Hingga

Rp20.250 /liter

- Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 7/2020, Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng adalah

Rp11.000 /liter

15 Maret 2021 | Pangan | Komisi IV

Pemerintah Impor Garam 3,07 Juta Ton

PKS : Kasihan Petani Garam Jadi Korban Kebijakan Ugal-Ugalan

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan total impor garam selama 2021 akan mencapai 3,07 juta ton. Angka ini merupakan keputusan rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 25 Januari 2021.

Pada tahun 2020, sebesar 2,7 Juta Ton. Sedangkan pada tahun 2021, sebesar 3,07 Juta Ton (naik 13,88 persen).

Berikut merupakan rincian impor pada tahun 2021 :

- o 2.426.000 ton Garam industry atau Chlor Alkali Producer (CAP)
- o 646.000 ton Garam aneka pangan dan pertambangan
- o 5.501 ton Garam untuk farmasi, proanalisa, sampai kosmetik

Dengan :

- o Total kebutuhan garam pada 2021 sebesar 4,67 juta ton
- o Produksi diperkirakan sebesar 2,1 juta ton
- o Selisih yang perlu ditambah sebesar 2,57 juta ton

Mengapa Impor 3,07 Juta Ton????

PEMERINTAH IMPOR GARAM 3,07 JUTA TON

PKS: Kasihan Petani Garam Jadi Korban Kebijakan Ugal-Ugalan



■ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan total **impor garam** selama 2021 akan **mencapai 3,07 juta ton**. Angka ini merupakan keputusan rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 25 Januari 2021.

IMPOR

2020
2,7 Juta Ton

2021
3,07 Juta Ton
(naik 13,88 persen)

■ Rincian impor 2021 :

2.426.000 ton
Garam industri atau Chlor Alkali Producer (CAP)

646.000 ton
Garam aneka pangan dan pertambangan

5.501 ton
Garam untuk farmasi, proanalisa, sampai kosmetik.

• Total kebutuhan garam pada 2021

4,67 juta ton

• Produksi diperkirakan

2,1 juta ton

• Selisih yang perlu ditambah

2,57 juta ton

Mengapa Impor

3,07 juta ton



27 Januari 2021 | Tol | Komisi V

9 Ruas Tol Yang Bakal “Dijual” Tahun Ini

Berikut merupakan 9 ruas tol yang akan dijual tahun ini :

1. Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi
2. Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat
3. Cibitung – Cilincing
4. Cinere – Serpong
5. Bogor – Ciawi – Sukabumi
6. Depok – Antasari
7. Pematang – Batang
8. Batang – Semarang
9. Krian – Legundi – Bunder – Manyar

PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku pemilik mengalami kesulitan likuiditas. Porsi kepemilikan saham perusahaan pada sembilan ruas tol itu berkisar mulai 25 persen sampai dengan 99,9 persen. Waskita Karya menyatakan akan melepas kepemilikan saham Sembilan ruas jalan tol dengan nilai sekitar Rp 10 triliun – Rp 11 triliun pada 2021. Perusahaan akan menggunakan beberapa skema pelepasan seperti yang pernah dilakukan sebelumnya.

9 Ruas Tol Yang Bakal 'Dijual' Tahun Ini



7 Februari 2021 | Asuransi | Komisi VI

#Melawanlupa Jiwasraya Rugi Belum Kembali PMN Sudah Diraih

FPKS Menolak Pencairan Dana PMN untuk Jiwasraya

Berikut merupakan alur penurunan kualitas Jiwasraya dari tahun ke tahun :

1. 2002 : Perusahaan mengalami guncangan, tetapi masih mampu mencetak laba pada 2006 sehingga luput dari perhatian.
2. 2014 : Menjadi sponsor klub sepak bola dunia (Manchester City).
3. 2016 : Peringatan potensi gagal bayar dalam transaksi investasi dengan PT Hanson Internasional. Jiwasraya tidak optimal mengawasi portofolio reksadana.
4. 2017 : Mengalami kekurangan pencadangan hingga Rp 7,7 triliun. Sementara itu, Jiwasraya menyebutkan keuntungan sekitar Rp 360 miliar.
5. 2018 : Kerugian (audited) Jiwasraya mencapai Rp 15,3 triliun.
6. 2019 : September 2019 kerugian mencapai Rp 13,7 triliun. November 2019 perseroan mengalami negative equity hingga Rp 27,2 triliun.
7. 2021 : Jadi beban negara, PM Rp 20 triliun.

#MELAWANLUPA

JIWASRAYA RUGI BELUM KEMBALI, PMN SUDAH DIRAIH

FPKS Menolak pencairan dana PMN untuk Jiwasraya



2002

Perusahaan mengalami guncangan, tetapi masih mampu mencetak laba pada 2006 sehingga luput dari perhatian.

2014

Menjadi sponsor klub sepak bola dunia (Manchester City).

2016

Peringatan potensi gagal bayar dalam transaksi investasi dengan PT Hanson Internasional.

Jiwasraya tidak optimal mengawasi portofolio reksadana.

2017

Mengalami kekurangan pencadangan hingga **Rp7,7 triliun**. Sementara itu, Jiwasraya menyebutkan keuntungan sekitar Rp360 miliar.

2018

Kerugian (audited) Jiwasraya mencapai **Rp15,3 triliun**.

2019

September 2019 kerugian mencapai **Rp13,7 triliun**.

November 2019 perseroan mengalami *negative equity* hingga **Rp27,2 triliun**.

2021

Jadi beban negara, PMN **Rp20 triliun**.

19 Februari 2021 | Pangan | Komisi IV

Pengelolaan Pangan Indonesia Kalah
Dengan Negara-Negara Afrika

Fraksi PKS Minta Pemerintah Fokus Perbaiki Indeks Ketahanan Pangan

Menurut Food Sustainability Index, Indonesia menduduki peringkat 60 dari 67 negara dalam hal keberlanjutan pangan.

Peringkat negara di Afrika :

27 : Ethiopia

31 : Zimbabwe

32 : Zambia

37 : Senegal

Skor Indonesia berada di angka 59,10 (kategori nutrisi dan kesehatan) dimana angka tersebut tergolong SANGAT RENDAH

Dalam Indeks Keamanan Pangan (di kualitas & keselamatan pangan) Indonesia peringkat : 62 (SKOR TERENDAH) dibawah Botswana (57) dan Ghana (59).

Sedangkan dalam Indeks Kelaparan Global skor Indonesia : 19,1 tidak berbeda jauh dengan Namibia (19,1), Kamerun (19,1) dan Gabon (18,2).

- Menurut Food Sustainability Index, **Indonesia menduduki** peringkat **60** dari **67** negara dalam hal keberlanjutan pangan.

PENGELOLAAN PANGAN **INDONESIA KALAH** DENGAN NEGARA-NEGARA AFRIKA

“ **Fraksi PKS Minta** Pemerintah Fokus Perbaiki Indeks Ketahanan Pangan ”



- Peringkat negara di Afrika :

27	Ethiopia
31	Zimbabwe
32	Zambia
37	Senegal

- Skor Indonesia :

59,10

(kategori nutrisi dan kesehatan)

SANGAT RENDAH

- Dalam **Indeks Keamanan Pangan** (di kualitas & keselamatan pangan) Indonesia peringkat :

62 (SKOR TERENDAH)

Dibawah Botswana (57) dan Ghana (59).

- Dalam **Indeks Kelaparan Global** skor Indonesia :

19,1

tidak berbeda jauh dengan Namibia (19,1), Kamerun (19,1) dan Gabon (18,2).

15 Maret 2021 | Pangan | Komisi IV

Data Stok Beras Aman Tidak Perlu Impor!

PKS : Impor Beras Lagi. Bukti Pemerintah Lebih Peduli Kepada Petani Asing. Sekalipun Petani Indonesia Jeblok dan Merugi.

Pemerintah berencana mengimpor 1 juta ton beras dalam waktu dekat. Impor ini dinilai kontradiktif dimana Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras akan naik hingga bulan April 2021. Perkiraan BPS Produksi Beras Januari – April 2021 sebesar 14,54 juta ton (naik 26,84% dari 2020). Sedangkan stok Beras Nasional per akhir Desember 2020 sebesar 7.389.575 ton.

Produksi gabah kering giling (GKG) per Januari – April 2021

sebesar 25,37 juta ton (naik 26,68% dari 2020). Menurut Perkiraan KEMENTAN bahwa produksi beras secara nasional s.d Mei 2021 sebesar 17.5 juta ton.

Stok beras s.d Mei 2021 sebesar 24.9 juta ton. Sedangkan kebutuhan besar s.d Mei 2021 12,33 juta ton. Maka akan ada surplus beras sebesar 12,6 juta ton.

USDA Foreign Agricultural Services memperkirakan produksi beras RI pada 2021 akan mencapai 35,5 juta ton.

DATA STOK BERAS AMAN TIDAK PERLU IMPOR !



PKS: Impor Beras Lagi. Bukti Pemerintah Lebih Peduli Kepada Petani Asing. Sekalipun Petani Indonesia Jeblok dan Merugi.



H. Johan Rosihan, S.T.
Anggota Komisi IV DPR RI

Pemerintah berencana mengimpor **1 juta ton beras** dalam waktu dekat. Impor ini dinilai kontradiktif dimana Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan **produksi beras akan naik hingga bulan April 2021.**

Perkiraan BPS Produksi Beras Januari-April 2021
14,54 juta Ton
(naik 26,84% dari 2020)

Produksi gabah kering giling (GKG) per Januari-April 2021
25,37 juta Ton
(naik 26,68% dari 2020)

Stok Beras Nasional per akhir Desember 2020
7.389.575 Ton

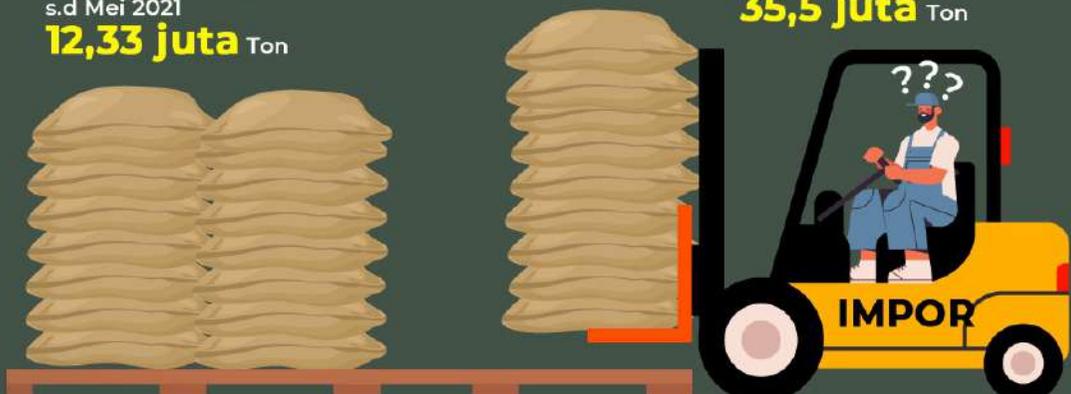
Menurut Perkiraan KEMANTAN bahwa produksi beras secara nasional s.d Mei 2021
17.5 juta Ton

Stok Beras s.d Mei 2021
24.9 juta Ton

Maka akan ada surplus beras sebesar
12,6 juta Ton

USDA Foreign Agricultural Services memperkirakan produksi beras RI pada 2021 akan mencapai
35,5 juta Ton

Kebutuhan Beras s.d Mei 2021
12,33 juta Ton



28 Maret 2021 | Pangan | Komisi IV

Apakah Benar Pemerintah Tidak Impor Beras Tiga Tahun Terakhir?

Data impor beras 2017 s.d 2019 menurut

Badan Pusat Statistik (BPS)

2017 : 305.274,6 ton

2018 : 2.253.824,5 ton

2019 : 444.508,7 ton

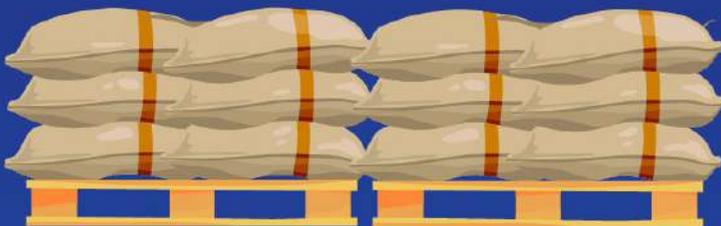
Pada tahun 2020, pemerintah memang tidak membuka impor beras besar-besaran. Hanya saja, pada Januari 2021 publik diramaikan dengan banjirnya beras impor khusus asal Vietnam.

APAKAH BENAR PEMERINTAH TIDAK IMPOR BERAS TIGA TAHUN TERAKHIR?

■ Data impor beras 2017 s.d 2019 menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

- 2017 : **305.274,6** Ton
- 2018 : **2.253.824,5** Ton
- 2019 : **444.508,7** Ton

Pada tahun 2020, pemerintah memang tidak membuka impor beras besar-besaran. Hanya saja, pada Januari 2021 publik diramaikan dengan banjirnya beras impor khusus asal Vietnam.



18 Januari 2021 | Transportasi | Komisi V

Tarif 7 Ruas Tol di Trans Jawa Resmi Naik

PKS : Batalkan Kenaikan Tarif Tol Karena SPM Belum Memenuhi Syarat dan Membebani Dunia Usaha.

Berikut merupakan 7 ruas tol di Trans Jawa yang Resmi Naik :

o Wilayah 1 (Ruas JORR Seksi W1, W2 Utara, W2 Selatan, S, E (Penjaringan – Rorotan) dan Akses Tanjung Priok)

Gol I : Rp 15.000,-
menjadi Rp 16.000,-
Gol II : Rp 22.500,-
menjadi Rp 23.500,-
Gol III : Rp 22.500,-
menjadi Rp 23.500,-
Gol IV : Rp 30.000,-
menjadi Rp 31.500,-
Gol V : Rp 30.000,-
menjadi Rp 31.500,-

o Wilayah 2 (Ruas Pondok Aren – Ulujami (Segmen Bintaro Viaduct – Pondok Ranji)

Gol I : Rp 3.000,-
menjadi Rp 3.000,-
Gol II : Rp 4.500,-
menjadi Rp 4.500,-
Gol III : Rp 4.500,-
menjadi Rp 4.500,-

Gol IV : Rp 6.000,-
menjadi Rp 6.500,-

Gol V : Rp 6.000,-
menjadi Rp 6.500,-

o Wilayah 3 (Tarif Tol Palimanan – Kanci)

Gol I : Rp 12.000,-
menjadi Rp 12.500,-
Gol II : Rp 15.000,-
menjadi Rp 18.000,-
Gol III : Rp 21.000,-
menjadi Rp 18.000,-
Gol IV : Rp 27.000,-
menjadi Rp 30.000,-
Gol V : Rp 32.000,-
menjadi Rp 30.000,-

o Wilayah 4

(Tol Semarang Seksi A,B,C)

Gol I : Rp 5.000,-
menjadi Rp 5.500,-
Gol II : Rp 7.500,-
menjadi Rp 8.000,-
Gol III : Rp 7.500,-
menjadi Rp 8.000,-
Gol IV : Rp 10.000,-
menjadi Rp 10.500,-
Gol V : Rp 10.000,-
menjadi Rp 10.500,-

Tarif 7 Ruas Tol di Trans Jawa Resmi Naik

PKS : Batalkan kenaikan
tarif tol karena SPM* belum
memenuhi syarat dan
membebani dunia usaha

WILAYAH 1

Ruas JORR Seksi W1, W2 Utara,
W2 Selatan, S, E (Penjaringan-Rorotan)
dan Akses Tanjung Priok

GOL I	Rp 15.000,-	➔	Rp 16.000,-
GOL II	Rp 22.500,-	➔	Rp 23.500,-
GOL III	Rp 22.500,-	➔	Rp 23.500,-
Gol IV	Rp 30.000,-	➔	Rp 31.500,-
Gol V	Rp 30.000,-	➔	Rp 31.500,-

WILAYAH 2

Ruas Pondok Aren-Ulujami
(Segmen Bintaro Viaduct-
Pondok Ranji)

GOL I	Rp 3.000,-	➔	Rp 3.000,-
GOL II	Rp 4.500,-	➔	Rp 4.500,-
GOL III	Rp 4.500,-	➔	Rp 4.500,-
Gol IV	Rp 6.000,-	➔	Rp 6.500,-
Gol V	Rp 6.000,-	➔	Rp 6.500,-

WILAYAH 3

Tarif Tol Palimanan-Kanci

GOL I	Rp 12.000,-	➔	Rp 12.500,-
GOL II	Rp 15.000,-	➔	Rp 18.000,-
GOL III	Rp 21.000,-	➔	Rp 18.000,-
Gol IV	Rp 27.000,-	➔	Rp 30.000,-
Gol V	Rp 32.000,-	➔	Rp 30.000,-

WILAYAH 4

Tol Semarang Seksi A,B,C

GOL I	Rp 5.000,-	➔	Rp 5.500,-
GOL II	Rp 7.500,-	➔	Rp 8.000,-
GOL III	Rp 7.500,-	➔	Rp 8.000,-
Gol IV	Rp 10.000,-	➔	Rp 10.500,-
Gol V	Rp 10.000,-	➔	Rp 10.500,-



18 Januari 2021 | Transportasi | Komisi V

Tarif 7 Ruas Tol di Trans Jawa Resmi Naik

PKS : Batalkan Kenaikan Tarif Tol Karena SPM Belum Memenuhi Syarat dan Membebani Dunia Usaha.

o Wilayah 5.A Tol Surabaya-Gempol (Sistem Terbuka (Dupak-Waru))

Gol I : Rp 3.000,-
menjadi Rp 5.000,-
Gol II : Rp 4.500,-
menjadi Rp 8.000,-
Gol III : Rp 6.000,-
menjadi Rp 8.000,-
Gol IV : Rp 7.500,-
menjadi Rp 10.500,-
Gol V : Rp 9.000,-
menjadi Rp 10.500,-

o Wilayah 5.C Tol Surabaya-Gempol (Sistem Terbuka (Kejapanan-Gempol))

Gol I : Rp 3.000,-
menjadi Rp 3.000,-
Gol II : Rp 4.500,-
menjadi Rp 5.000,-
Gol III : Rp 4.500,-
menjadi Rp 5.000,-
Gol IV : Rp 6.000,-
menjadi Rp 6.500,-
Gol V : Rp 6.000,-
menjadi Rp 6.500,-

o Wilayah 5.B Tol Surabaya-Gempol (Sistem Tertutup (Waru-Porong))

Gol I : Rp 4.500,-
menjadi Rp 9.000,-
Gol II : Rp 6.000,-
menjadi Rp 14.000,-
Gol III : Rp 9.500,-
menjadi Rp 14.000,-
Gol IV : Rp 12.000,-
menjadi Rp 18.500,-
Gol V : Rp 14.000,-
menjadi Rp 18.500,-

Tarif 7 Ruas Tol di Trans Jawa Resmi Naik

PKS : Batalkan kenaikan
tarif tol karena SPM* belum
memenuhi syarat dan
membebani dunia usaha

WILAYAH 5.A Tol Surabaya-Gempol

Sistem Terbuka (Dupak-Waru)

GOL I	Rp 3.000,-	➔	Rp 5.000,-
GOL II	Rp 4.500,-	➔	Rp 8.000,-
GOL III	Rp 6.000,-	➔	Rp 8.000,-
Gol IV	Rp 7.500,-	➔	Rp 10.500,-
Gol V	Rp 9.000,-	➔	Rp 10.500,-

WILAYAH 5.B Tol Surabaya-Gempol

Sistem Tertutup (Waru-Porong)

GOL I	Rp 4.500,-	➔	Rp 9.000,-
GOL II	Rp 6.000,-	➔	Rp 14.000,-
GOL III	Rp 9.500,-	➔	Rp 14.000,-
Gol IV	Rp 12.000,-	➔	Rp 18.500,-
Gol V	Rp 14.000,-	➔	Rp 18.500,-

WILAYAH 5.C Tol Surabaya-Gempol

Sistem Terbuka (Kejapanan-Gempol)

GOL I	Rp 3.000,-	➔	Rp 3.000,-
GOL II	Rp 4.500,-	➔	Rp 5.000,-
GOL III	Rp 4.500,-	➔	Rp 5.000,-
Gol IV	Rp 6.000,-	➔	Rp 6.500,-
Gol V	Rp 6.000,-	➔	Rp 6.500,-



14 Januari 2021 | Transportasi | Komisi V

Kecelakaan yang berulang membuat penerbangan komersil lesu

PKS Desak Pemerintah Memperkuat Pengawasan Terhadap Badan Usaha Angkutan Udara

Berikut merupakan data kecelakaan dari beberapa maskapai penerbangan :

1. Garuda Indonesia : Pada 26 September 1997 mengalami kecelakaan di Buah Nabar, Sumatera Utara dimana terdapat 234 Korban Jiwa yang terdiri dari 222 penumpang dan 12 awak.
2. Silkair : Pada 19 Desember 1997 mengalami kecelakaan di Sungai Musi, Palembang dimana terdapat 104 Korban Jiwa yang terdiri dari 97 penumpang dan 7 awak.
3. Mandala Airlines : Pada 25 September 2005 mengalami kecelakaan di Bandara Polonia, Medan dimana terdapat 141 Korban Jiwa yang terdiri dari 100 penumpang dan 41 warga di sekitar tempat terjadi kecelakaan dan 17 orang selamat. Lalu pada 24 Juli 1992 mengalami kecelakaan di Gunung Lalaboy, Ambon dimana terdapat 70 Korban Jiwa.
4. Adam Air : Pada 1 Januari 2007 mengalami kecelakaan di Perairan Majene, Selat Makasar dimana terdapat 102 Korban Jiwa yang terdiri dari 102 Korban Jiwa yang terdiri dari 96 penumpang dan 6 awak.
5. Air Asia : Pada 28 Desember 2014 mengalami kecelakaan di Laut Jawa dimana terdapat 162 Korban Jiwa yang terdiri dari 155 penumpang dan 7 awak.
6. Lion Air : Pada 30 November 2004 mengalami kecelakaan di Bandara Adi Sumarmo, Surakarta dimana terdapat 26 orang tewas dan 142 orang mengalami luka-luka. Lalu pada 29 Oktober 2018 mengalami kecelakaan di Tanjung Pakis Karawang, Jawa Barat dimana terdapat 189 Korban Jiwa.
7. Sriwijaya Air : Pada 9 Januari 2021 mengalami kecelakaan di sekitar Pulau Laki, Kepulauan Seribu dimana jumlah korbannya belum diketahui.

Kecelakaan yang berulang membuat penerbangan komersil lesu

PKS Desak Pemerintah Memperkuat Pengawasan Terhadap Badan Usaha Angkutan Udara



1 GARUDA INDONESIA

- 26 September 1997
- **234 Korban Jiwa** (222 penumpang dan 12 awak)
- Buah Nabar, Sumatera Utara



2 SILKAIR

- 19 Desember 1997
- **104 Korban Jiwa**, (97 penumpang dan 7 awak)
- Sungai Musi, Palembang



3 MANDALA AIRLINES

- 25 September 2005
- **141 Korban Jiwa** (100 penumpang dan 41 warga di sekitar tempat terjadi kecelakaan) dan 17 selamat
- Bandara Polonia, Medan
- 24 Juli 1992
- **70 Korban Jiwa**
- Gunung Lalaboy, Ambon



4 ADAM AIR

- 1 Januari 2007
- **102 Korban Jiwa** (96 penumpang dan 6 awak)
- Perairan Majene, Selat Makasar



5 AIR ASIA

- 28 Desember 2014
- **162 Korban Jiwa** (155 penumpang dan 7 awak)
- Laut Jawa



6 LION AIR

- 29 Oktober 2018
- **189 Korban Jiwa**
- Tanjung Pakis Karawang, Jawa Barat
- 30 November 2004
- **26 Tewas**, 142 luka-luka
- Bandara Adi Sumarmo, Surakarta



7 SRIWIJAYA AIR SJ 182

- 9 Januari 2021
- **Korban** : Belum diketahui
- di sekitar Pulau Laki, Kepulauan Seribu

• Image : Beberapa Sumber

3 Januari 2022 | Transportasi | Komisi V

Harga Kedelai Meroket, 5 Ribu UKM Mogok

Harga Tahu Tempe Naik Mulai Senin Solusi PKS : Bedayakan Petani Lokal!

Produsen tahu tempe mogok produksi pada 1-3 Januari 2021 akibat harga kedelai naik. Kenaikan harga kedelai akibat dari meredanya ketegangan perang dagang antara AS dan Cina. Harga kedelai naik dari Rp 7.200 menjadi Rp 9.200 per kilogram.

Harga tahu tempe mulai naik pada Senin, 4 Januari 2021. Ketua Gakoptindo Syarifudin memperkirakan harga tempe dan tahu di pasar bakal naik hingga 20 persen untuk menutup lonjakan biaya produksi.

HARGA KEDELAI MEROKET 5 RIBU UKM MOGOK

Harga Tahu Tempe Naik Mulai Senin

Produsen tahu tempe mogok produksi **1-3 Januari 2021** akibat harga kedelai naik

Kenaikan harga kedelai akibat dari meredanya ketegangan perang dagang antara **AS** dan **Cina**

Harga kedelai naik dari **Rp 7.200** menjadi **Rp 9.200** per kilogram

Harga tahu tempe mulai naik **Senin, 4 Januari 2021**

Ketua Gakoptindo Syarifudin memperkirakan **harga tempe** dan **tahu** di pasar bakal **naik** hingga **20 persen** untuk menutup lonjakan biaya produksi

Solusi PKS :
berdayakan petani lokal !



11 November 2021 | Isu Hutang Garuda

Utang Menumpuk, Jangan Biarkan Garuda Terpuruk

Utang Menumpuk, Jangan Biarkan Garuda Terpuruk

PKS Desak Usut Tuntas Yang Terlibat Merugikan dan Mempailitkan Garuda !!

Kewajiban Garuda (termasuk hutang) per 30 September 2021 sebesar US\$9.756 juta atau setara dengan Rp140 triliun.

Utang tersebut terus meningkat US\$ 100-150 juta atau Rp 1,5-2 triliun setiap bulannya karena bunga dari penundaan pembayaran utang.

Ekuitas Negatif (kewajiban lebih besar daripada aset) sebesar US\$2,8 miliar atau setara dengan Rp40 triliun.

Situasi pandemi yang telah menimpa Indonesia selama lebih dari setahun merupakan salah satu faktor pembengkakan utang yang

tidak mampu dibayar tersebut. Faktor lainnya adalah tindak koruptif antara oknum manajemen lama Garuda dengan beberapa lessor-nya

Ada Apa dengan Garuda?

Garuda memiliki rasio biaya sewa terhadap pendapatan yang paling tinggi di dunia, yakni 24,7% atau 4x lipat lebih tinggi dari rata-rata global

Hal tersebut terjadi karena berbagai tindakan moral hazard di dalam tubuh BUMN tersebut:

- Penggelembungan jumlah pesawat yang disewa, yakni 142 unit dari kebutuhan riil 41 unit
- Penggelembungan harga sewa \$1,4 juta per bulan dari harga wajar \$750 ribu per bulan
- Pemborosan keuangan untuk membiayai gaya hidup direksi dan komisaris

UTANG MENUMPUK GARUDA TERPURUK

PKS Usul Bentuk Pansus ! Usut Tuntas Pihak Yang Merugikan Garuda

- Utang Garuda per 30 September 2021:

Rp140 Triliun

- Utang meningkat sebesar

Rp 1,5-2 Triliun
setiap bulannya

- Ekuitas Negatif
(kewajiban lebih
besar daripada aset)

Rp40 Triliun

Penyebab pembengkakan utang

- Tindak koruptif oknum manajemen lama Garuda
- Pandemi Covid-19



Ada Apa dengan Garuda?

! Rasio biaya sewa terhadap pendapatan
24,7% atau **4x** lipat

- lebih tinggi dari rata-rata global

- **Pengelembungan jumlah pesawat yang disewa**, yakni 142 unit dari kebutuhan riil 41 unit
- **Pengelembungan harga sewa** \$1,4 juta/bulan per pesawat dari harga wajar \$750 ribu/bulan per pesawat.
- **Pemborosan keuangan** untuk membiayai gaya hidup direksi dan komisaris

4 opsi pemerintah dalam mengatasi krisis yang menimpa Garuda

- ✓ Memberikan pinjaman atau suntikan modal
- ✓ Menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi perusahaan
- ✓ Restrukturisasi Garuda dan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru
- ✓ Melikuidasi Garuda

20 Desember 2021 | Isu Kenaikan TDL | Komisi VII

PKS Tolak Kenaikan Tarif Dasar Listrik

Karena daya beli masih rendah dan Rakyat lagi susah

Pemerintah mewacanakan penyesuaian tarif dasar listrik pada awal 2022 berdasarkan kesepakatan antara Kementerian ESDM dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Penyesuaian tersebut ditujukan bagi 13 golongan pelanggan listrik non-subsidi.

TDL untuk pelanggan rumah tangga di Indonesia adalah 10 sen (USD/kwh). Jika dibandingkan dengan TDL rumah tangga di negara-negara tetangga, TDL di Indonesia tergolong tinggi
TDL Cina = 8,6 sen (USD/kwh)
TDL Malaysia = 5,19 sen (USD/kwh)
TDL Vietnam = 8,2 sen (USD/kwh)

Faktor yang mempengaruhi kenaikan TDL:

- Kenaikan harga jual batu bara di pasar internasional sempat mencapai USD 200/ton
- Nilai tukar rupiah terhadap dolar
- Tingkat inflasi

Kenaikan TDL dapat memicu inflasi dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional

PKS TOLAK KENAIKAN TARIF DASAR LISTRIK

karena daya beli masih rendah
dan Rakyat lagi susah

■ Pemerintah mewacanakan penyesuaian tarif dasar listrik pada **awal 2022** berdasarkan kesepakatan antara Kementerian ESDM dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

■ Penyesuaian tersebut ditujukan bagi **13 golongan** pelanggan listrik **non-subsidi**.



Faktor yang mempengaruhi kenaikan TDL:

- 1** Kenaikan harga jual batu bara di pasar internasional sempat mencapai **USD 200/ton**.
- 2** Nilai tukar rupiah terhadap dolar
- 3** Tingkat **inflasi**



Kenaikan TDL dapat memicu inflasi dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.



TDL Indonesia tergolong tinggi



10 sen (USD)/kwh



8,6 sen (USD)/kwh



8,2 sen (USD)/kwh



5,19 sen (USD)/kwh



28 Mei 2022 | Transportasi | Komisi V

Kasus Kecelakaan Terus Terjadi

PKS: Percepat Penutupan Perlindungan Sebidang Liar!

Belakangan, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kereta api dan kendaraan di perbatasan sebidang sering terjadi. Hal ini akibat jumlah perlintasan tak dijaga dan ilegal masih cukup banyak.

Jumlah perbatasan sebidang Jawa-Sumatera (berdasar data PT. KAI)

Tahun 2019

Resmi dan dijaga: 1.239 titik

Resmi dan tidak dijaga: 2.046 titik

Liar: 1.431 titik

Tahun 2020

Resmi dan dijaga: 1.286 titik

Resmi dan tidak dijaga: 1.962 titik

Liar/ilegal: 1.862 titik

Tahun 2021 (semester I)

Resmi dan dijaga: 1.302 titik

Resmi dan tidak dijaga: 3.121 titik

Liar/ilegal: 628 titik

Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, perlintasan kereta api seharusnya tidak boleh lagi sebidang dengan jalan raya.

Jumlah kerusakan lokomotif karena tabrakan

Tahun 2020: 208 kerusakan

Tahun 2021: 213 kerusakan

Tahun 2022 (hingga Maret): 36 kerusakan

Kemenhub menargetkan setidaknya 280 titik perlintasan liar dapat ditutup tahun 2022 ini.

"Kami mendorong agar percepatan penutupan perlintasan sebidang liar ini menjadi prioritas Kemenhub dan ditambah anggarannya, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat." - H. Suryadi Jaya Purnama, S.T. (Anggota Komisi V DPR RI FPKS)

Kasus Kecelakaan Terus Terjadi, PKS: Percepat Penutupan Perlindungan Sebidang Liar!

Belakangan, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kereta api dan kendaraan di perbatasan sebidang sering terjadi. Hal ini akibat jumlah perlintasan tak dijaga dan ilegal masih cukup banyak.



2019
1.239 titik Resmi dan dijaga
2.046 titik Resmi dan tidak dijaga
1.431 liar/ilegal



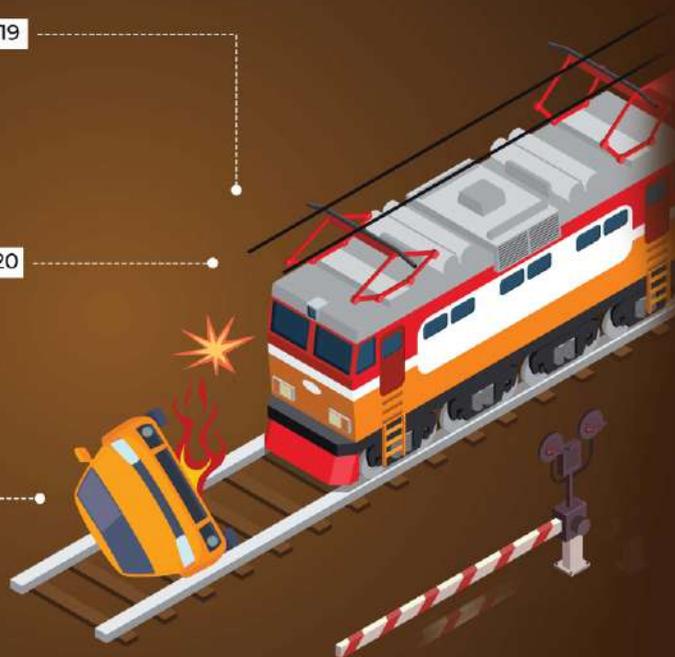
2020
1.286 titik Resmi dan dijaga
1.962 titik Resmi dan tidak dijaga
1.862 liar/ilegal



2021 (semester I)
1.302 titik Resmi dan dijaga
3.121 titik Resmi dan tidak dijaga
628 liar/ilegal



Kerusakan lokomotif karena tabrakan
208 kerusakan (2020)
213 kerusakan (2021)
36 kerusakan (s.d Maret 2022)



Kami mendorong agar percepatan penutupan perlintasan sebidang liar ini menjadi prioritas Kemenhub dan ditambah anggarannya, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat

H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
Anggota Komisi V DPR RI PKS



15 September 2022 | Kenaikan Harga BBM | Komisi VII

Fraksi PKS Minta Kenaikan BBM Dibatalkan, Harga Minyak Dunia Tren Terus Turun

Brent Crude sekarang berada di USD 90.82 per barel. Dalam 5 hari terakhir sudah turun 1,51%. Dalam 1 bulan mengalami penurunan 8,69% dan dalam 3 bulan sudah turun 26,15%

WTI Crude sekarang berada di USD 85,00 per barel. Dalam 5 hari terakhir sudah turun 2,58%. Dalam 1 bulan mengalami penurunan 7,49% dan dalam 3 bulan sudah turun 29,45%

(sumber: marketwatch.com, 9 September 2022, pukul 16.55)

Minyak mentah terus mengalami penurunan selama dua pekan terakhir ini terutama akibat turunnya permintaan yang disebabkan oleh pengetatan moneter Bank Sentral Eropa dan Amerika dalam rangka menekan angka inflasi. Penurunan permintaan minyak juga berasal dari Cina yang masih melakukan pembatasan mobilitas akibat wabah Covid. Cina merupakan negara pengimpor utama minyak mentah dunia.

PKS MINTA KENAIKAN BBM DIBATALKAN, HARGA MINYAK DUNIA TREN TERUS TURUN

Sementara asumsi APBN 2022 revisi,
ICP sebesar \$100/barel. Masih lebih tinggi.

Pergerakan
Harga Minyak

■ Brent Crude
\$90.82/barel

■ WTI Crude
\$85.00/barel

Penurunan
Harga Minyak

9 September 2022, pukul 16.55 WIB



	Brent Crude	WTI Crude
5 Hari Terakhir	1,51% ↓	2,58% ↓
1 Bulan Terakhir	8,69% ↓	7,49% ↓
3 Bulan Terakhir	26,15% ↓	29,45% ↓

Kenapa Harga Minyak Dunia Turun ?

- Permintaan minyak dunia menurun
- Pengetatan moneter Bank Sentral Eropa dan Amerika dalam menekan inflasi
- Pembatasan mobilitas akibat wabah Covid-19 di Cina yang merupakan pengimpor utama minyak mentah dunia

8 September 2022 | Kenaikan Harga BBM | Fraksi PKS

PKS Konsisten Tolak Kenaikan Harga BBM di Rapat Dewan

"Masyarakat kita belum selesai dari krisis akibat pandemi covid-19. Namun, sudah muncul berita baru yang tak sedap, yakni Pemerintah akan menaikkan harga BBM." (**Rafli Kande-** Anggota Komisi VI FPKS)

"Kalau harga BBM bersubsidi dinaikkan, ini dapat dipastikan inflasi sektor makanan akan meroket. Tentu saja, ini akan menggerus daya beli masyarakat, dan tingkat kemiskinan akan semakin meningkat" (**Mulyanto** Anggota Komisi VII FPKS)

2. Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 | 30 Agustus 2022

"Kenaikan harga BBM, lalu dikompensasi dengan pemberian bansos kepada sekian juta rakyat, tidak akan

memperbaiki daya beli masyarakat, tidak akan memperbaiki rumah tangga Indonesia" (**Johan Rosihan** - Anggota Komisi IV FPKS)

"Dengan menaikkan harga BBM, Pemerintah justru berkontribusi menambah jumlah penduduk miskin baru dari kalangan nelayan" (**Saadiah Uluputty** - Anggota Komisi IV FPKS)

3. Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 6 September 2022

"Dengan ini, kami menyatakan bahwa F-PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat". (**Mulyanto** Anggota Komisi VII FPKS)

PKS Konsisten Tolak Kenaikan Harga BBM di Rapat Dewan

1 Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 23 Agustus 2022



Masyarakat kita belum selesai dari krisis akibat pandemi covid-19. Namun, sudah muncul berita baru yang tak sedap, yakni Pemerintah akan menaikkan harga BBM.

Rafli Kande - Anggota Komisi VI FPKS



Kalau harga BBM bersubsidi dinaikkan, ini dapat dipastikan inflasi sektor makanan akan meroket. Tentu saja, ini akan menggerus daya beli masyarakat, dan tingkat kemiskinan akan semakin meningkat

Mulyanto - Anggota Komisi VII FPKS

2 Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 30 Agustus 2022



Kenaikan harga BBM, lalu dikompensasi dengan pemberian bansos kepada sekian juta rakyat, tidak akan memperbaiki daya beli masyarakat, tidak akan memperbaiki rumah tangga Indonesia

Johan Rosihan - Anggota Komisi IV FPKS



Dengan menaikkan harga BBM, Pemerintah justru berkontribusi menambah jumlah penduduk miskin baru dari kalangan nelayan

Saadiah Uluputty - Anggota Komisi IV FPKS

3 Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 6 September 2022



Dengan ini, kami menyatakan bahwa F-PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat

Mulyanto - Anggota Komisi VII FPKS



29 Agustus 2022 | Kenaikan Harga BBM | Banggar

Inflasi Berpotensi Melonjak Tajam, PKS: Hentikan Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Bakar Minyak (BBM) untuk BBM jenis Pertalite dan Solar Subsidi.

Kenaikan harga BBM akan berdampak pada inflasi.

Inflasi kuartal II 2022
4,94% (yoy, Juli 2022)
Tertinggi sejak Oktober 2015

Dampak:
Harga kebutuhan pokok dan harga komoditas lain naik, daya beli masyarakat turun.

Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional dengan porsi 51,47 persen. Jika inflasi

meningkat tajam, disertai dengan pelemahan faktor pertumbuhan ekonomi nasional, maka berpotensi menimbulkan stagflasi.

Inflasi bahan makanan
10,32% (yoy, Juli 2022).

"Saya menolak kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM saat ini akan berdampak pada bertambahnya orang miskin dan memburuknya situasi ekonomi akibat inflasi yang tidak terkendali". (Dr. Hermanto, S.E., M.M Anggota Komisi IV DPR RI FPKS)

INFLASI BERPOTENSI MELONJAK TAJAM, PKS: HENTIKAN RENCANA KENAIKAN HARGA BBM BERSUBSIDI

Pemerintah saat ini sedang membahas mengenai

kenaikan harga

Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk BBM jenis **Pertalite** dan **Solar** Subsidi.

Kenaikan harga BBM akan berdampak pada inflasi.

Dampak:

Harga **kebutuhan pokok** dan **harga komoditas lain naik**, daya beli masyarakat turun.



“
Saya menolak kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM saat ini akan berdampak pada bertambahnya orang miskin dan memburuknya situasi ekonomi akibat inflasi yang tidak terkendali

Dr. Hermanto, S.E., M.M.
Anggota Komisi IV DPR RI PKS

Inflasi kuartal II 2022
4,94%
(yoy, Juli 2022)

Tertinggi sejak Oktober 2015

■ Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional dengan porsi 51,47 persen. Jika inflasi meningkat tajam, disertai dengan pelemahan faktor pertumbuhan ekonomi nasional, maka berpotensi menimbulkan stagflasi.

■ Inflasi bahan makanan

10,32%

(yoy, Juli 2022)



4 Maret 2022 | Energi | Komisi VII

Harga LPG Non-Subsidi Naik

PKS: Tolak Kenaikan Harga LPG Non-subsidi

Harga LPG non subsidi kembali mengalami kenaikan harga per Minggu (27/02/2022). Hal ini menyesuaikan harga Contract Price Aramco (CPA) yang terus mengalami peningkatan.

Harga kenaikan LPG non-subsidi :
Desember/2022: 11.500/Kg
Januari/2022: Rp13.500/Kg
Februari/2022: Rp15.500/Kg

"Kalau kita diamankan saja bukan tidak mungkin ini akan melebar pada kenaikan harga-harga produk lainnya. Kami khawatir, kalau besok- besok, Pemerintah juga akan menaikkan harga BBM dan LPG bersubsidi termasuk listrik PLN." Dr. H. Mulyanto, M.Eng (Anggota Komisi VII DPR RI FPKS)

**Harga LPG Non-Subsidi Naik
Menjadi Rp 15.500/kg**

PKS: TOLAK KENAIKAN HARGA LPG NON-SUBSIDI

- Harga LPG non subsidi kembali mengalami kenaikan harga per Minggu (27/02/2022). Hal ini menyesuaikan harga Contract Price Aramco (CPA) yang terus mengalami peningkatan.
- Harga Contract Price Aramco (CPA) mencapai **US\$ 775** per metrik ton.



Rp15.500/Kg

Februari 2022

Rp13.500/Kg

Desember 2021

Rp11.500/Kg

November 2021

“Kalau kita diamkan saja bukan tidak mungkin ini akan melebar pada kenaikan harga-harga produk lainnya. Kami khawatir, kalau besok-besok, Pemerintah juga akan menaikkan harga BBM dan LPG bersubsidi termasuk listrik PLN.”

Dr. H. Mulyanto, M.Eng
(Anggota Komisi VII DPR RI FPKS)



16 Februari 2022 | Energi | Komisi VII

Harga BBM Non-Subsidi Mahal

PKS: Jangan Naikkan Harga BBM Saat Beban Hidup Rakyat Masih Berat

PT Pertamina melakukan penyesuaian harga tiga produk BBM non-subsidi per Sabtu (12/2/2022).

Jenis BBM yang mengalami kenaikan harga :

- Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite Rp 1.500 s.d Rp 2.650
- Harga per liter Peralite Tetap Rp 7.650 s.d Rp 8.000
- Harga per liter Pertamax tetap Rp 9.000 s.d Rp 9.400

Dibandingkan dengan Malaysia, harga BBM Indonesia tergolong mahal dengan nilai oktan (RON) yang lebih rendah atau setara.

Komparasi Harga BBM

- Malaysia: Rp 7.051 (RON 95) Rp 10.735 (RON 97)
- Indonesia: Rp 8.000 (RON 90) Rp 13.500 (RON 98)

Apa yang menyebabkan Malaysia bisa menjual BBM dengan harga murah?

- Pemerintah Malaysia langsung memberikan subsidi pada produk bensin dengan kualitas dan nilai oktan lebih tinggi, yakni RON 95.

Anggaran subsidi energi dari dua negara:

- Malaysia: 2,6% dari APBN
- Indonesia: 2,43% dari APBN

Rata-rata impor minyak tiap tahun (2010-2019)

- Malaysia: 213.970 barel/hari
- Indonesia: 334.790 barel/hari

Harga BBM Non-Subsidi Mahal, PKS: JANGAN NAIKAN HARGA BBM SAAT BEBAN HIDUP RAKYAT MASIH BERAT

- PT Pertamina melakukan penyesuaian harga tiga produk BBM non-subsidi per Sabtu (12/2/2022).

 **Kenaikan Harga**
Pertamax Turbo,
Pertamina Dex,
Dexlite
Rp 1.500 s.d
Rp 2.650


Harga per liter
Pertalite Tetap
Rp 7.650 s.d
Rp 8.000


Harga per liter
Pertamax Tetap
Rp 9.000 s.d
Rp 9.400



Dibandingkan dengan Malaysia, harga BBM Indonesia tergolong mahal dengan nilai oktan (RON) yang lebih rendah atau setara.

Komparasi Harga BBM

 **Rp 7.051** (RON 95)
Rp 10.735 (RON 97)
 **Rp 8.000** (RON 90)
Rp 13.500 (RON 98)

- Apa yang menyebabkan Malaysia bisa menjual BBM dengan harga murah?

Pemerintah Malaysia langsung memberikan subsidi pada produk bensin dengan kualitas dan nilai oktan lebih tinggi, yakni RON 95.

- Anggaran subsidi energi dari dua negara:

 **2,6%** dari APBN
 **2,43%** dari APBN

Rata-rata impor minyak tiap tahun (2010-2019)

 **213.970** barel/hari
 **334.790** barel/hari

11 November 2021 | Energi | Komisi VII

Kilang Terbakar, Impor Meroket
dan Defisit Dagang Migas Membengkak

PKS mendesak Pemerintah agar menaruh perhatian serius terhadap permasalahan Migas di Indonesia.

Lifting Migas Merosot:

2016: 2,107 juta barel minyak ekuivalen per hari (MBOEPD)
2017: 1,945 juta barel minyak ekuivalen per hari (MBOEPD)
2018: 1,917 juta barel minyak ekuivalen per hari (MBOEPD)
2019: 1,784 juta barel minyak ekuivalen per hari (MBOEPD)
2020: 1,689 juta barel minyak ekuivalen per hari (MBOEPD)
(Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)

Impor MIGAS Melonjak:

Maret 2021 dibandingkan Maret 2020 (YoY): melonjak 41,87%
Mei 2021 dibandingkan Mei 2020 (YoY): melonjak 213,61%
(Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)

KILANG MINYAK YANG
TERBAKAR:

1. 16 Februari 2014: Kilang minyak Pertamina Dumai
2. 5 Oktober 2016: Kilang minyak Pertamina Cilacap
3. 15 Agustus 2019: Kilang minyak Pertamina Balikpapan
4. 29 Maret 2021: Kilang minyak Pertamina Balongan
5. 11 Juni 2021 : Kilang minyak Pertamina Cilacap

KILANG TERBAKAR, IMPOR MEROKET DAN DEFISIT DAGANG MIGAS MEMBENGKAK

PKS mendesak Pemerintah agar menaruh perhatian serius terhadap permasalahan Migas di Indonesia

■ **Lifting MIGAS Merosot**
(Juta barel minyak ekuivalen per hari)



■ **Impor MIGAS melonjak**



MAR 2020 : MAR 2021
41,87% ↑

MEI 2020 : MEI 2021
213,61% ↑

■ **Kilang Minyak Pertamina (KMP) Yang Terbakar** (sumber: kompas.com)



- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 🔥 16 Februari 2014
KMP Dumai | 🔥 29 Maret 2021
KMP Balongan |
| 🔥 5 Oktober 2016
KMP Cilacap | 🔥 11 Juni 2021
KMP Cilacap |
| 🔥 15 Agustus 2019
KMP Balikpapan | |

■ **Defisit transaksi MIGAS Mei 2021 terhadap Mei 2020 (y-on-y) naik > 1000 %.**

20 Desember 2021 | Ristek | Komisi VII

PKS Tuntut pemerintah membangun iklim riset berkelanjutan

Eijkman resmi terintegrasi ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada September 2021

Berganti nama menjadi Pusat Riset Biologi Molekuler (PRBM) Eijkman

Sebagian besar Ilmuwan handal diberhentikan tanpa pesangon.

Mayoritas Ilmuwan yang diberhentikan sudah bekerja selama bertahun-tahun di Lembaga Eijkman

Perhatian Pemerintah terhadap riset dan pengembangan manusia masih sangat minim.

Pemberhentian Ilmuwan Eijkman berpotensi menghambat progres riset vaksin Merah Putih, yang seharusnya dapat menjadi kebanggaan rakyat Indonesia sebagai produk vaksin buatan dalam negeri.

**Ratusan Ilmuwan Eijkman Diberhentikan,
Riset Vaksin Merah Putih Terancam Mandek**

PKS MENUNTUT PEMERINTAH MEMBANGUN IKLIM RISET BERKELANJUTAN

**dengan Cara Memberdayakan Seluruh SDM
Unggul dan Menambah Anggaran Riset**

- Eijkman resmi terintegrasi ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada September 2021.
- Berganti nama menjadi Pusat Riset Biologi Molekuler (PRBM) Eijkman.
- Mayoritas ilmuwan yang diberhentikan **sudah bekerja selama bertahun-tahun** di Lembaga Eijkman.
- Perhatian pemerintah terhadap riset dan pengembangan manusia masih sangat minim.



Sebagian besar ilmuwan handal **diberhentikan tanpa pesangon.**

- **Pemberhentian** ilmuwan Eijkman berpotensi **menghambat progres riset vaksin Merah Putih**, yang seharusnya dapat menjadi kebanggaan rakyat Indonesia sebagai produk vaksin buatan dalam negeri.



12 April 2021 | Ristek | Komisi VII

Indonesia Jauh Tertinggal Di Indeks Inovasi Global 2020

PKS: Stop Eksperimentasi Kelembagaan Ristek, Pemerintah harus secara serius agar mengembangkan ristek menjadi motor penggerak pembangunan.

Indeks Inovasi Global (GI) 2020 mencatat Indonesia peringkat 85 dari 131 Negara sejak 2018.

Peringkat di ASIAN :

- o 7. Indonesia
- o 8. Kamboja
- o 9. Laos
- o 10. Myanmar

Sementara itu, di Kawasan Asia Tenggara, Timur, Oceania, Indonesia menduduki peringkat 14 dari 17 negara.

Indeks Inovasi Global (GI) 2020 mengukur tingkat inovasi sebuah negara dalam 7 poin yakni, institusi, SDM dan riset, infrastruktur riset, kecanggihan berusaha, kecanggihan pasar, output IPTEK output kreatifitas.

Dari ketujuh poin tersebut peringkat Indonesia tertinggal jauh dalam hal institusi (111), kecanggihan berusaha (114), dan SDM riset (92).

INDONESIA JAUH TERTINGGAL DI INDEKS INOVASI GLOBAL 2020

PKS: Stop Eksperimentasi Kelembagaan Ristek, Pemerintah harusnya secara serius agar mengembangkan ristek menjadi motor penggerak pembangunan.

■ Indeks Inovasi Global (GII) 2020 mencatat Indonesia



Peringkat
85 dari **131** Negara
sejak 2018

■ Indeks Inovasi Global (GII) 2020 mengukur tingkat inovasi sebuah negara dalam 7 poin yakni, institusi, SDM dan riset, infrastruktur riset, kecanggihan berusaha, kecanggihan pasar, output IPTEK output kreatifitas.

■ Peringkat di **ASEAN**.

-  7. Indonesia
-  8. Kamboja
-  9. Laos
-  10. Myanmar

■ Sementara itu, di kawasan Asia Tenggara, Timur dan Oceania, Indonesia menduduki peringkat **14** dari **17** negara.



■ Dari ketujuh poin tersebut peringkat Indonesia tertinggal jauh dalam hal institusi (**111**), kecanggihan berusaha (**114**) dan SDM riset (**92**).

2

Polhukam

(Politik, Hukum, dan
Hak Asasi Manusia)

2 November 2021 | Isu Natuna | Komisi I

Natuna Memanas, Indonesia Harus Tegas

PKS menuntut ketegasan Pemerintah atas kedaulatan wilayah perairan dan sumber dayanya di Laut Natuna Utara!!

Kapal riset Hai Yang Di Zhi 10 yang berbendera Tiongkok terpantau sudah beraktivitas di Laut Natuna Utara sejak Agustus lalu. Berdasarkan pantauan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), kapal tersebut diduga melakukan aktivitas pemetaan sumber daya non-hayati di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Situasi dan Kontestasi di Laut Natuna:

1. Laut Natuna merupakan salah satu wilayah kontestasi Tiongkok dalam menegakkan klaim historis nine dash line-nya atas Laut Cina Selatan (LCS).
2. Tiongkok dikenal asertif dalam aktivitasnya di LCS. Cina beberapa kali mengirimkan kapal coast guard ke Laut Natuna Utara.
3. Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mempertahankan yurisdiksi melalui penegakan hukum di Laut Natuna sebagai salah satu wilayah ZEE-nya.
4. Aktivitas riset ilmiah kelautan kapal Tiongkok tidak sesuai dengan kebebasan pelayaran (freedom of navigation) dalam Pasal 58 (1) jo. Pasal 87 UNCLOS dan melanggar kewajiban due regards negara bendera yang tercantum dalam Pasal 58 (3) UNCLOS.

NATUNA MEMANAS, INDONESIA HARUS TEGAS



PKS menuntut ketegasan Pemerintah atas kedaulatan wilayah perairan dan sumber dayanya di Laut Natuna Utara

- Kapal riset Hai Yang Di Zhi 10 berbendera Tiongkok terpantau sudah **beraktivitas** di Laut Natuna Utara sejak **Agustus** lalu.
- Laut Natuna salah satu wilayah kontestasi Tiongkok dalam menegakkan klaim historis *nine dash line*-nya atas Laut Cina Selatan (LCS)
- Tiongkok dikenal asertif dalam aktivitasnya di LCS.
- **Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mempertahankan yurisdiksi** melalui penegakan hukum di Laut Natuna sebagai salah satu wilayah ZEE-nya
- Aktivitas riset ilmiah kelautan kapal Tiongkok **tidak sesuai dengan kebebasan pelayaran** dalam Pasal 58 (1) jo. Pasal 87 UNCLOS dan melanggar kewajiban *due regards* negara bendera yang tercantum dalam Pasal 58 (3) UNCLOS
- Berdasarkan pantauan Indonesia **Ocean Justice Initiative (IOJI)**, kapal tersebut diduga melakukan aktivitas pemetaan sumber daya non-hayati di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.



24 Mei 2021 | Perlindungan Data Pribadi | Komisi I

Era Digitalisasi, Data Pribadi Harus Dilindungi

● PKS mengkritisi mengapa pemerintah tidak segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi.

● Dengan maraknya digitalisasi dan globalisasi, masyarakat dengan mudah memberikan data pribadinya kepada platform daring maupun luring. Hal ini menimbulkan banyaknya kasus kebocoran data pribadi. Di satu sisi, masyarakat harus lebih berhati-hati mengenai pemberian data pribadi. Di sisi lain, Negara juga harus segera melegalkan regulasi perlindungan data pribadi.

● Perjalanan RUU PDP:

1.Persidangan II Tahun 2020-2021: DPR menargetkan menyelesaikan pembahasan RUU PDP.

2.Persidangan III Tahun 2020-2021: DPR memperpanjang pembahasan RUU PDP.

3.RUU PDP memasuki prolegnas prioritas 2021.

● Kasus kebocoran data 2020-2021:

1.BPJS Kesehatan ; 279 juta data ke forum online 'RapidForums'

2.Tokopedia: 91 juta data pengguna dijual di situs gelap.

3.RedDoorz: 5,8 juta data pengguna RedDoorz dijual di RapidForums

4.Cermati: 2,9 juta diretas dan dijual secara bebas melalui forum hacker.

5.Bhinneka.com: 1,2 juta data pelanggan dijual.

6.Kreditplus: data pribadi milik 890.000 nasabah Kreditplus diduga bocor.

7.ShopBack: sempat menemukan akses ilegal ke sistem yang memuat data pengguna.

Era Digitalisasi, Data Pribadi Harus Dilindungi

PKS mengkritisi mengapa pemerintah tidak segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi.

- ! Maraknya digitalisasi dan globalisasi, masyarakat dengan mudah memberikan data pribadinya kepada platform daring maupun luring. Hal ini menimbulkan banyaknya kasus kebocoran data pribadi. Di satu sisi, masyarakat harus lebih berhati-hati mengenai pemberian data pribadi. Di sisi lain, negara juga harus segera melegalkan regulasi perlindungan data pribadi.

Perjalanan RUU PDP

- Persidangan II Tahun 2020-2021: DPR menargetkan menyelesaikan pembahasan RUU PDP.
- Persidangan III Tahun 2020-2021: DPR memperpanjang pembahasan RUU PDP.
- RUU PDP memasuki prolegnas prioritas 2021.

Kasus kebocoran data pribadi 2020-2021



- ✓ BPJS Kesehatan : **279 juta** (data dijual ke forum online 'RapidForums')
- ✓ Tokopedia : **91 juta** (data dijual disitus gelap)
- ✓ RedDoorz : **5,8 juta** (data dijual)
- ✓ Cermati : **2,9 juta** (data dijual bebas)
- ✓ Bhinneka.com : **1,2 juta** (data dijual)
- ✓ Kreditplus : **890ribu** (data bocor)
- ✓ ShopBack : sempat menemukan akses ilegal ke sistem yang memuat data pengguna



11 November 2022 | Penyiaran | Komisi I

Desak Pemerintah Terapkan Kebijakan Aso Secara Nasional

FPKS: STB Bagi Warga Miskin Harus Segera Terdistribusi dan tepat Sasaran

Kebijakan menghentikan siaran TV Digital atau analog switch-off (ASO) yang dilakukan Pemerintah pada tanggal 2 November 2022 lalu merupakan amanat dari Pasal 60A UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kemenkominfo mengklaim ASO telah berlaku di 222 kabupaten/kota, termasuk Jabodetabek, dan penerapannya akan diperluas secara bertahap di 514 titik yang ditargetkan. Artinya belum berlaku secara nasional.

Dalam proses peralihannya, Kemenkominfo beserta lembaga penyiaran swasta sepakat akan membagikan 5,5 juta unit set top box (STB) kepada masyarakat miskin.

Masalah Seputar Kebijakan ASO:
1. Realisasi pembagian alat

penangkap siaran digital kepada masyarakat miskin masih sangat rendah, baru sekitar 20 persen.

2. Sebagian masyarakat miskin tak masuk data penerima STB dari Kemenkominfo sehingga tidak siap dengan kebijakan ASO.

4. Penolakan dari para pemain lama industri penyiaran yang dirugikan secara bisnis.

Target Pembagian STB
Kemenkominfo: 1.204.784 unit (realisasi 896.899 unit / 74,4%)
Lembaga Penyiaran Swasta (LPS): 4.330.860 unit (realisasi 212.825 unit / 4,91%)
Total: 5.535.644 unit (realisasi 1.109.724 unit atau 20,04%)

Realisasi pembagian STB oleh LPS masih sangat rendah. Seperti enggan untuk mensukseskan kebijakan ASO.

Desak Pemerintah Terapkan Kebijakan ASO Secara Nasional,

F-PKS: STB BAGI WARGA MISKIN HARUS SEGERA TERDISTRIBUSI DAN TEPAT SASARAN!

● Kebijakan menghentikan siaran TV Analog Switch-Off (ASO) yang dilakukan Pemerintah pada tanggal 2 November 2022 merupakan amanat dari Pasal 60A UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

● Target pembagian STB



Kemenkominfo:
1.204.784 unit
Realisasi
896.899 unit

● Target Total Pembagian STB

5.535.644 unit

Realisasi

1.109.724 unit → **20,04%**



Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)
4.330.860 unit
Realisasi
212.825 unit

Masalah Seputar Kebijakan ASO

1 Minimnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah terkait pembagian STB gratis.

2 Sebagian masyarakat miskin tak masuk data penerima STB dari Kemenkominfo sehingga tidak siap dengan kebijakan ASO.

3 Realisasi pembagian alat penangkap siaran digital kepada masyarakat miskin masih sangat rendah, baru sekitar 20 persen.

15 Agustus 2022 | Perlindungan Data Pribadi | Komisi I

Hal yang Tidak Boleh Sembarang
Disebar di Media Sosial

PKS Ajak Masyarakat Lindungi Data Pribadi

Data pribadi yang harus dilindungi :

- Tiket Perjalanan/ Boarding Pass
- Dokumen Penting Ijazah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dll
- Dokumen Keuangan Slip Gaji, Nomor Rekening, Nomor Kartu Kredit, Nomor Kartu ATM
- KTP & SIM yang berisi identitas diri
- Nama Ibu Kandung yang biasanya dipakai untuk membuat nomor rekening dan ponsel
- Dokumen Rahasia Perusahaan
- Selfie dengan KTP
- Foto Tanda Tangan

Hal yang Tidak Boleh Sembarang Disebar di Media Sosial

PKS AJAK MASYARAKAT LINDUNGI DATA PRIBADI



Tiket Perjalanan/
Boarding Pass



Dokumen Penting
Ijazah, Kartu Keluarga,
Akta Kelahiran, dll



Dokumen Keuangan
Slip Gaji, No Rekening,
Nomor Kartu Kredit,
Nomor Kartu ATM



KTP & SIM
yang berisi
identitas diri



Nama Ibu Kandung
yang biasanya dipakai
untuk membuat nomor
rekening dan ponsel



Dokumen Rahasia
Perusahaan



Selfie dengan
KTP



Foto Tanda Tangan



15 September 2022 | Keamanan Data Pribadi | Komisi I

Kebocoran Data Pribadi Terus Terjadi

Pemerintah Harus Perkuat Sistem Keamanan Siber

Isu keamanan data kembali mencuat setelah ramai kabar dugaan kebocoran data institusi pemerintah dalam beberapa pekan terakhir.

Menurut BSSN, kerentanan sistem keamanan siber pemerintah berakar pada persoalan sumber daya manusia, peraturan tata kelola, dan teknologi yang tidak optimal. Sekalipun kerentanan dari tiga aspek ini terus diberitahukan secara berkala ke setiap penyelenggara sistem elektronik, tidak ada upaya serius untuk menindaklanjutinya.

Merujuk Laporan Tahunan Monitoring Keamanan Siber Tahun 2021 yang dikeluarkan BSSN, terjadi 1,6 miliar anomali trafik sepanjang 2021.

Sejumlah Kasus Dugaan Kebocoran Data di Indonesia Terbaru:

Agustus 2022

17 juta pelanggan PLN

26 juta data pelanggan Indihome

1,3 miliar data penduduk yang berasal dari registrasi kartu SIM

September 2022

105 juta data penduduk dari

Komisi Pemilihan Umum

Data pribadi Menkominfo

Data catatan surat Presiden

Joko Widodo

102 juta data warga RI di

Kemensos

Negara harus hadir tidak hanya secara fisik, tetapi juga hingga ruang maya. Jangan sampai kinerja Pemerintah justru menimbulkan keraguan terhadap kemampuan Indonesia untuk mengatasi serangan siber, bahkan menjadi bahan olok-olokan hacker.

Kebocoran Data Pribadi Terus Terjadi, PKS: Pemerintah Harus Perkuat Sistem Keamanan Siber

- Isu keamanan data kembali mencuat setelah ramai kabar dugaan kebocoran data institusi pemerintah dalam beberapa pekan terakhir.



Penyebab lemahnya sistem keamanan siber :

- Sumber daya manusia yang tidak kompeten
- Peraturan tata kelola yang tidak efektif
- Teknologi yang tidak optimal



Sejumlah Kasus Terbaru Dugaan Kebocoran Data di Indonesia :

Agustus 2022

17 juta pelanggan PLN
26 juta data pelanggan Indihome
1,3 miliar data penduduk dari registrasi kartu SIM

September 2022

105 juta data penduduk dari KPU
Data pribadi **Menkominfo**
Data catatan surat **Presiden RI**
102 juta data warga RI di Kemensos



H. Sukamta, Ph.D.

Anggota Komisi I DPR RI FPKS

“**Segera lakukan audit security** semua penyimpanan data pemerintah. Itu yang paling penting mendesak. Data-data pribadi warga yang bocor ini sangat berharga, kalau jatuh kepada pelaku kejahatan siber tentu akan sangat mengancam warga masyarakat. Penipuan online (daring) yang semakin sering terjadi, tentu terkait dengan data-data pribadi warga masyarakat yang bocor”

9 September 2021 | APBN 2020 |

Apresiasi langkah Kominfo putus akses konten LGBT di YT Kids

From This | Selasa, 14 Sep 2021
Video Aku Bukan Homo Muncul di iklan Konten Anak Youtube

Sebuah video berisi informasi tentang LGBT berjudul "Andai Aku Homo" muncul sebagai iklan yang terselip di sela-sela konten video musik untuk anak-anak di Youtube Kids.

Response | Selasa, 14 September 2021

1) "Pemerintah harus sigap segera bertindak menegakkan hukum. Kementerian Kominfo juga harus selalu sigap untuk screening dan blokir konten-konten serupa di internet." - Dr. H. Sukamta (Anggota Komisi I DPR RI FPKS)

2) Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf menanggapi hal tersebut dalam videonya "Bahaya Penyusupan LGBT ke Dunia anak-anak Indonesia"

3) Dukung Sikap Tegas Waketum MUI: "Video LGBT di Konten Anak, Agar YouTube Segera MenTake Down". Karena Video seperti itu tak sesuai dengan Negara BerkeTuhanan YME (sila 1 Pancasila), yang UUDnya nyatakan tujuan Pendidikannya antara lain untuk tingkatan iman, taqwa akhlak mulia." -Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A. (Anggota Komisi VIII DPR RI FPKS)

To This | Rabu, 15 Sep 2021
Kominfo Putus Akses Konten LGBT yang muncul di iklan YouTube Kids.

Almuzzammil Yusuf di akun Twitternya @Muzzammi Yusuf Alhamdulillah Kominfo cepat menangani masalah ini. Apresiasi!

PKS Apresiasi Langkah Kominfo Putus Akses Konten LGBT Di Youtube Kids

■ **From This** | Selasa, 14 Sep 2021



Sebuah video berisi informasi tentang LGBT berjudul "Andai Aku Homo" muncul sebagai iklan yang terselip di sela-sela konten video musik untuk anak-anak di *Youtube Kids*.

■ **Response** | Selasa, 14 Sep 2021



Pemerintah harus sigap segera bertindak menegakkan hukum. Kementerian Kominfo juga harus selalu sigap untuk screening dan blokir konten-konten serupa di internet.

Dr. H. Sukamta
Anggota Komisi I DPR RI FPKS

■ **To This** | Rabu, 15 Sep 2021



■ **Response** | Selasa 14 Sep 2021



Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Almuzammil Yusuf menanggapi hal tersebut dalam videonya "Bahaya Penyusupan LGBT ke Dunia anak-anak Indonesia"

■ **Response** | Selasa 14 Sep 2021



Dukung Sikap Tegas Waketum MUI: "Video LGBT di Konten Anak, Agar YouTube Segera MenTake Down". Karena Video seperti itu tak sesuai dengan Negara BerkeTuhanan YME(sila 1 Pancasila), yang UUDnya nyatakan tujuan Pendidikannya antara lain untuk tingkatan iman, taqwa akhlak mulia.

Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI FPKS

■ **To This** | Rabu, 15 Sep 2021



21 September 2022 | Demokrasi | Komisi II

Demokrasi Indonesia Makin Memburuk, PKS: Pemerintah Perlu Evaluasi Diri!

The Economist Intelligence Unit (EIU) masih mengategorikan Indonesia sebagai negara "demokrasi cacat/flawed democracy".

Survei Litbang Kompas terbaru, disebut bahwa mayoritas responden menilai kualitas demokrasi di Indonesia sepanjang 2022 lebih buruk ketimbang 2021.

Survei dilakukan terhadap 504 responden dari 34 provinsi Indonesia selama periode 6-9 September 2022.

37,7% responden survei menjawab kualitas demokrasi lebih buruk;

13,9% persen responden menjawab sama buruknya;
23,2% persen responden menjawab sama baiknya;
20,3% persen responden menjawab semakin baik;
4,9% persen responden menjawab tidak tahu.

Responden paling banyak menilai penghambat demokrasi di Indonesia yaitu:

7,0% Hak Asasi Manusia
21,5% Ketidaksetaraan Hukum
21,8% Keterpurukan Ekonomi
43,2% Korupsi

Demokrasi Indonesia Makin Memburuk, PKS: Pemerintah Perlu Evaluasi Diri!

- Survei terbaru Litbang Kompas (6-9 September 2022) terhadap 504 responden dari 34 provinsi tentang kualitas demokrasi di Indonesia :



- The Economist Intelligence Unit (EIU) masih mengategorikan Indonesia sebagai negara "demokrasi cacat/ flawed democracy".

- Responden paling banyak menilai penghambat demokrasi di Indonesia yaitu;



4 Juli 2022 | Pemilu 2024 | Komisi II

Demi Cegah Polarisasi dan Jamin Kedaulatan Rakyat, PKS: Kami Akan Gugat Presidential Threshold!

Apa itu PT 20%?

- Ambang batas perolehan suara pemilu yang harus diperoleh parpol sebagai syarat mengajukan calon presiden.
- Diatur dalam pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- Untuk mengajukan capres parpol atau koalisi parpol harus memiliki kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Mengapa PKS Gugat PT 20%?

- Membatasi lahirnya pemimpin nasional berkualitas

- Berpotensi memecah belah masyarakat Indonesia, seperti pada Pilpres 2019
- Upayakan terciptanya angka ideal untuk ambang batas pencalonan presiden

" PKS telah mendalami berbagai uji materi terhadap Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Setidaknya ada 22 putusan yang terkait JR pasal tersebut yang sudah dialami, hal ini membuat kami semakin percaya diri untuk maju ke MK " (Habib Aboe Bakar Al-Habsyi/Sekretaris Jenderal PKS)

Demi Cegah Polarisasi dan Jamin Kedaulatan Rakyat, PKS: Kami Akan Gugat Presidential Threshold !

Apa itu PT 20%?

▶ Ambang batas perolehan suara pemilu yang harus diperoleh parpol sebagai syarat mengajukan calon presiden

▶ Diatur dalam pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

▶ Untuk mengajukan capres parpol atau koalisi parpol harus memiliki kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya



Mengapa PKS Gugat PT 20%?

- ▶ **Membatasi** lahirnya pemimpin nasional berkualitas
- ▶ **Berpotensi memecah belah** masyarakat Indonesia, seperti pada Pilpres 2019
- ▶ **Upayakan terciptanya angka ideal** untuk ambang batas pencalonan presiden



“ PKS telah mendalami berbagai uji materi terhadap Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Setidaknya ada 22 putusan yang terkait JR pasal tersebut yang sudah didalami, hal ini membuat kami semakin percaya diri untuk maju ke MK

Habib Aboe Bakar Al-Habsyi
Sekretaris Jenderal PKS



28 Juni 2022 | Demokrasi | Komisi II

Mayoritas Negara Dunia Tetap Selenggarakan Pemilu Ditengah Pandemi Covid-19

PKS: Tolak Tunda Pemilu karena Inkonstitusional, Anti Demokrasi, dan Rampas Hak Rakyat!

Sejumlah pihak yang berada di lingkungan Pemerintah menjadikan pandemi covid-19 dan keterpurukan ekonomi yang disebabkan olehnya sebagai alasan untuk menunda Pemilu 2024.

Padahal, mayoritas negara dan wilayah lokal (teritori) di seluruh dunia tetap melangsungkan Pemilu ditengah pandemi.

Analisis International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) sepanjang Februari 2020 hingga Februari 2022 menunjukkan data sebagai berikut: 160 negara dan wilayah telah memutuskan untuk mengadakan pemilihan nasional atau sub-nasional. 130 di antaranya telah mengadakan

pemilihan nasional atau referendum.

Eropa: 44 negara

Timur Tengah: 7 negara

Afrika: 36 negara

Amerika: 36 negara

Asia: 37 negara

Pemilihan Nasional: 130 negara

Pemilihan Lokal/Wilayah/

Teritorial: 30 negara

Fraksi PKS menilai bahwa alasan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi sangat tidak relevan untuk menunda pemilu.

Mayoritas Negara Dunia Tetap Selenggarakan Pemilu Ditengah Pandemi Covid-19

PKS: TOLAK TUNDA PEMILU KARENA INKONSTITUSIONAL, ANTI DEMOKRASI, DAN RAMPAS HAK RAKYAT!

- Menurut Analisis International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) sepanjang Februari 2020 hingga Februari 2022 **160 negara** memutuskan menyelenggarakan pemilu.



Alasan PKS Menolak Penundaan Pemilu

- Inkonstitusional**
Pasal 22E UUD 1945 mengatur pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali.
- Khianati Demokrasi**
Pembatasan masa jabatan presiden merupakan hasil perjuangan reformasi dan upaya menjaga demokrasi
- Hak Rakyat Dirampas** kepentingan oligarki yang ingin melanggengkan kekuasaan
- Pintu Masuk Otoritarianisme**
Rezim otoriter di dunia selalu mencari cara agar berkuasa selamanya

11 Mei 2022 | Tata Negara | Komisi II

Perintah MK Masih diabaikan

PKS: Segera Bentuk Aturan Teknis Penunjukan Pejabat Kepala Daerah

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), gelombang pertama pengisian pejabat kepala daerah akan dimulai Mei 2022 yang mencakup 5 provinsi, 6 kota, dan 37 kabupaten.

Secara akumulatif, jumlah pejabat kepala daerah di tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tahun 2022: 101 daerah

Tahun 2023: 171 daerah

Dalam pertimbangan putusan uji materi terhadap pasal yang mengatur pejabat kepala daerah di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, MK memerintahkan dan mengingatkan Pemerintah untuk:

1. menerbitkan peraturan pelaksana terkait pengisian

2. melakukan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah menjelang pilkada serentak 2024 secara demokratis.

Namun, perintah Mahkamah Konstitusi tersebut masih diabaikan. Hal ini bisa menyebabkan terkikisnya legitimasi pejabat kepala daerah, karena selain tidak dipilih langsung oleh rakyat, prosedur penunjukannya tidak sesuai amanat MK.

“Mahkamah Konstitusi sudah meminta pemerintah pusat agar membuat aturan detail dan transparan tentang pengangkatan pejabat kepala daerah ini karena jumlahnya yang masif dan waktunya yang panjang. Ayo pemerintah segera buat aturan teknis itu,” - Mardani Ali Sera-

Perintah MK Masih Diabaikan, PKS: Segera Bentuk Aturan Teknis Penunjukan Pejabat Kepala Daerah!

■ Data Kementerian Dalam Negeri, gelombang pertama pengisian penjabat kepala daerah akan dimulai Mei 2022.

■ Mencakup **5** provinsi,
6 kota, dan **37** kabupaten



■ Secara akumulatif, jumlah penjabat kepala daerah:



2022 : **101** daerah

2023 : **171** daerah



Mahkamah Konstitusi sudah meminta pemerintah pusat agar membuat aturan detail dan transparan tentang pengangkatan penjabat kepala daerah ini karena jumlahnya yang masif dan waktunya yang panjang. Ayo pemerintah segera buat aturan teknis itu

Dr. H. Mardani, M.Eng
(Anggota Komisi II DPR RI FPKS)

■ Panduan Pengisian Jabatan Kepala Daerah berdasarkan Putusan MK Perkara Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Perkara Nomor 15/PUU-XX/2022 tentang Pilkada:

1 Menerbitkan peraturan pelaksana terkait pengisian penjabat kepala daerah.

2 Melakukan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah menjelang pilkada serentak 2024 secara transparan, akuntabel dan tidak ada kepentingan politik.

■ Namun, **perintah Mahkamah Konstitusi tersebut masih diabaikan**. Hal ini bisa menyebabkan terkikisnya legitimasi penjabat kepala daerah, karena selain tidak dipilih langsung oleh rakyat, prosedur penunjukannya tidak sesuai amanat MK.



10 Mei 2021 | Hukum | Komisi III

Hari Anti-Narkoba Internasional

PKS meminta Negara untuk mengoptimalkan kinerja pemberantasan narkoba yang berorientasi rehabilitasi dan revitalisasi.

Negeri banjir narkoba selama bertahun-tahun, di mana narkoba ini merupakan fenomena yang menimbulkan banyak masalah lain, termasuk merusak generasi muda bangsa.

Per 6 Mei, ada 136.397 narapidana kasus narkoba yang tersebar di seluruh lapas. Tercatat 24.878 orang ditangkap dari 19.229 kasus di Indonesia.

Selama 6 bulan (Januari-Juni 2021),

Polri menyita berupa:

1. Ganja 2,14 ton
2. Sabu 6,64 ton
3. Tembakau gorila 34 ton
4. Ekstasi 239.277 butir.

BNN menyita berupa:

1. Ganja : 0,5 ton
2. Sabu : 1,8 ton
3. Ekstasi : 183.089 butir

Prevalensi pengguna narkotika di Indonesia 1.8% (3.41 juta jiwa pengguna aktif)

Dampak Jangka Panjang Penggunaan Narkoba :

- 13,1% Gangguan kejiwaan
- 3,0% TBC
- 3,0% Kebocoran katup jantung
- 1,5% Sirosis hati
- 6,8% Penyakit seksual menular
- 5,8% Penyakit Hepatitis C
- 2,7% Penyakit AIDS
- 0,8% Penyakit Stroke

26 Juni 2021

HARI ANTI NARKOBA INTERNASIONAL

PKS meminta negara untuk mengoptimalkan kinerja pemberantasan narkoba yang berorientasi rehabilitasi dan revitalisasi.

- Negeri banjir narkoba selama bertahun-tahun, di mana narkoba ini merupakan fenomena yang menimbulkan banyak masalah lain, termasuk merusak generasi muda bangsa.



- Per 6 Mei 2021, ada **136.397 narapidana** kasus narkoba yang tersebar di seluruh lapas.

- **24.878** orang ditangkap dari **19.229 kasus**.

- Perkiraan Barang Sitaan Januari s.d Juni 2021

POLRI

- Ganja **2,14 ton**
- Sabu **6,64 ton**
- Gorila **34 ton**
- Ekstasi **239.277 butir**

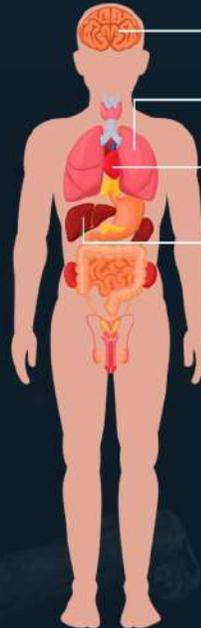
BNN

- Ganja **0,5 ton**
- Sabu **1.87 ton**
- Ekstasi **183.089 butir**



Prevalensi pengguna narkotika di Indonesia **1.8%**
3,41 JUTA jiwa pengguna aktif

- Dampak Jangka Panjang Penggunaan Narkoba



- **13,1 %** Gangguan Kejiwaan
- **3,0 %** TBC
- **3,0 %** Kebocoran Katup Jantung
- **1,5 %** Sirosis Hati

Penyakit

- **6,8 %** Penyakit Seksual Menular
- **5,8 %** Penyakit Hepatitis C
- **2,7 %** Penyakit AIDS
- **0,8 %** Penyakit Stroke



26 Juni 2021 | Hukum | Komisi III

4 Peristiwa Sinyal Dari Nahkoda Bangsa

Coba kita cermati 4 kejadian yang berurutan ini yang baru saja terjadi : (1) masalah pertanyaan yang diajukan kepada pegawai KPK, (2) Data Bansos, (3) Peleburan BRIN, dan (4) TKA masuk saat Pelarangan Mudik "Menandakan sedang ada masalah pada kepemimpinan Bangsa ini"

1. Saat lembaga anti rasuah dikerdilkan dengan pertanyaan wawasan kebangsaan yang tidak RELEVAN mulai dari pertanyaan islamnya, islam apa? Subuhnya pakai qunut atau tidak, bersedia lepas jilbab atau tidak? memperlihatkan lembaga ini mulai diamputasi.

Wawasan kebangsaan seharusnya bertumpu pada nilai akademis dan integritas, akademis dimaksudkan untuk tetap on the track pada pemberantasan korupsi, integritas pada mentalitas petugas dalam bertindak.

2. Belum lagi dengan persoalan data bansos yang ganda "bukanlah hanya sekedar bagian dari human error" penegak hukum wajib mendalaminya, sebab angka 21

juta data ganda itu sistemik dan rawan diselewengkan, pengusutan adalah kunci agar kasus ini terang benderang.

3. Terkait peleburan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan menyatukan LIPI, BPPT, dan BATAN ke dalam BRIN melanggar UU, sebab ada beberapa LPNK yang dibentuk secara khusus oleh UU seperti Batan dan Lapan.

4. Keputusan yang double standard terkait persoalan MUDIK DILARANG, WARGA ASING bebas terbang adalah kebijakan yang sangat keliru. Kalau mudik membawa potensi bahaya penyebaran covid maka pendatang luar negeri lebih bahaya lagi bisa membawa varian covid baru ke dalam negeri.

Anggota Komisi I DPR RI FPKS mengatakan bahwa keseluruhan rangkaian peristiwa ini hanya contoh kecil saja yang baru segar terjadi yang menunjukkan seberapa Kualitas Nahkoda Kapal Bangsa ini. Laa haula walaa quwwata illa billah.

4 PERISTIWA

SINYAL DARI NAHKODA BANGSA

- Coba kita cermati 4 kejadian yang berurutan ini yang baru saja terjadi (1) masalah pertanyaan yang diajukan kepada pegawai KPK, (2) Data Bansos, (3) Peleburan BRIN, dan (4) TKA masuk saat PELARANGAN MUDIK

"Menandakan sedang ada masalah pada kepemimpinan Bangsa ini"

- 1 Saat lembaga anti rasuah dikerdilkan dengan pertanyaan wawasan kebangsaan yang tidak RELEVAN mulai dari pertanyaan islamnya, islam apa? Subuhnya pakai qunut atau tidak, bersedia lepas jilbab atau tidak? **memperlihatkan lembaga ini mulai diamputasi.**

Wawasan kebangsaan seharusnya bertumpu pada nilai akademis dan integritas, akademis dimaksudkan untuk tetap *on the track* pada pemberantasan korupsi, integritas pada mentalitas petugas dalam bertindak.

- 2 **Belum lagi dengan persoalan data bansos yang ganda** "bukanlah hanya sekedar bagian dari human error" penegak hukum wajib mendalaminya, sebab angka 21 juta data ganda itu sistemik dan rawan diselewengkan, pengusutan adalah kunci agar kasus ini terang benderang.

- 3 **Terkait peleburan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan menyatukan LIPI, BPPT, dan BATAN ke dalam BRIN melanggar UU**, sebab ada beberapa LPNK yg dibentuk secara khusus oleh UU seperti Batan dan Lapan.

- 4 Keputusan yang double standard terkait persoalan **MUDIK DILARANG, WARGA ASING bebas terbang** adalah kebijakan yang sangat keliru. Kalau mudik membawa potensi bahaya penyebaran covid maka pendatang luar negeri lebih bahaya lagi bisa membawa varian covid baru ke dalam negeri.

- “ Keseluruhan rangkaian peristiwa ini hanya contoh kecil saja yang baru segar terjadi yang menunjukkan **seberapa Kualitas Nahkoda Kapal Bangsa ini**. Laa haula walaa quwwata illa billah”



Dr. H. Almuzammil Yusuf, M.Si.

Anggota Komisi I DPR RI FPKS

11 September 2021 | Hukum | Komisi III

Masalah Lapas Sudah Lama dan Tidak Ada Perbaikan

PKS Minta Presiden Mengevaluasi Kinerja Menteri Hukum dan HAM

Berikut merupakan beberapa permasalahan lapas dalam beberapa tahun :

- o 6 November 2015 terjadi kerusuhan LP Kelas IIA Banda Aceh di Lambaro. Narapidana kesal karena beberapa hari tidak mendapatkan air untuk mandi.
- o 17 Desember 2015 terjadi keributan antar narapidana Lapas Kerobokan, Denpasar. Empat narapidana tewas.
- o 25 Maret 2016 terjadi pembakaran oleh narapidana di Rutan Malabero, Bengkulu. Lima orang tewas & ratusan napi lainnya dievakuasi.
- o 23 April 2016 terjadi kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas IIA Banceuy, Bandung, Napi mengamuk & membakar penjara karena ada napi yang meninggal dunia.
- o 5 Mei 2017 terjadi lebih dari

400 tahanan kabur di Rumah Tahanan Kelas IIB Sianglang Bungkok, Pekanbaru. Rutan kapasitas 361 diisi 1.870 orang.

- o 7 November 2017 terjadi bentrokan kelompok John Kei dengan narapidana kasus terorisme di Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
- o 14 September 2018 terjadi Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak di Lapas Sukamiskin. Tempat para terpidana kasus korupsi lebih luas & mewah ketimbang tahanan lainnya.
- o 16 Mei 2019 terjadi keributan di LP Narkoba Kab. Langkat, Sumatera Utara.

MASALAH LAPAS SUDAH LAMA DAN TIDAK ADA PERBAIKAN

PKS Minta Presiden Mengevaluasi Kinerja Menteri Hukum dan HAM

6 Nov 2015
Kerusuhan LP Kelas IIA Banda Aceh di Lambaro. Narapidana kesal karena beberapa hari tidak mendapatkan air untuk mandi.

17 Des 2015
Keributan antar narapidana Lapas Kerobokan, Denpasar. Empat narapidana tewas.

25 Mar 2016
Pembakaran oleh narapidana di Rutan Malabero, Bengkulu. Lima orang tewas & ratusan napi lainnya dievakuasi.

23 April 2016
Kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas IIA Banceuy, Bandung. Napi mengamuk & membakar penjara karena ada napi yang meninggal dunia.

5 Mei 2017
Lebih dari 400 tahanan kabur di Rumah Tahanan Kelas IIB Sianglang Bungkok, Pekanbaru. Rutan kapasitas 361 diisi 1.870 orang.

7 Nov 2017
Bentrokan kelompok John Kei dengan narapidana kasus terorisme di Lapas Kelas IIA Permisian Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

14 Sep 2018
Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak di Lapas Sukamiskin. Tempat para terpidana kasus korupsi lebih luas & mewah ketimbang tahanan lainnya.

16 Mei 2019
Kericuhan di LP Narkoba Kab. Langkat, Sumatera Utara

29 Sep 2019
Dari 102 tahanan, 46 orang kabur di Lapas Perempuan Kelas III Palu, Sulawesi Selatan.

11 April 2020
Kerusuhan di Lapas Tuminting, Manado Sulawesi Utara.

13 Juli 2020
Pemalakan & jual beli narkoba lazim dilakukan di Rutan Salemba, Jakarta

14 Sep 2020
Terpidana Narkoba WNA Cai Changpan kabur dari Lapas Kelas 1 Tangerang lewat gorong-gorong dengan cara menggali lubang di bawah tempat tidurnya.

8 Sep 2021
Lapas Tangerang Kelas 1 Kebakaran 44 orang narapidana tewas.

13 September 2021 | Demokrasi | Komisi II

Mural Dibatasi Degradasi Demokrasi? PKS : Benahi Moral, Bukan Mural!

- o “Dibungkam” Mural di bawah Jembatan Kleringan Kewek, Danurejan, Kota Yogyakarta dihapus Satpol PP.
- o “Tuhan Aku Lapar” Mural di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Dihapus aparat akhir Juli 2021.
- o “Dipaksa Sehat Di Negara Yang Sakit” Mural di Jl. Diponegoro, Pasuruan, Jawa Timur. Dihapus aparat awal Agustus 2021.
- o “Wabah Sesungguhnya Adalah Kelaparan” Mural di Jl. Wahidin Sudiro Husodo, Ciledug, Tangerang.
- o “404 : Not Found” Mural di Batuceper, kota Tangerang dihapus aparat awal Agustus 2021. Mural mirip wajah Presiden ini dianggap menghina lambang negara.
- o “Yang Bisa Dipercaya Dari TV Cuma Adzan” Mural di Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- o Mural Mirip Jokowi Matanya Ditutup Maske, Mural di Jl. Prabu Dimutur, Kota Bandung dihapus oleh empat orang pria.
- o “Orang Miskin Dilarang Sakit #RIP Pemerintah” Mural di tembok kokoh di pojok perempatan Jl. Sutan Syahrir kawasan Pasar Legi, Solo, dihapus aparat.
- o “Jokowi Gagal!! Cuma Di Era Ini Koruptor Happy Selfi” Mural di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.

MURAL DIBATASI DEGRADASI DEMOKRASI?

| PKS : Benahi Moral, Bukan Mural |

"DIBUNGKAM"

Mural di bawah Jembatan Kleringan Kewek, Danurejan, Kota Yogyakarta dihapus Satpol PP.

"404: NOT FOUND"

Mural di Batuceper, kota Tangerang dihapus aparat awal Agustus 2021. Mural mirip wajah Presiden ini dianggap menghina lambang negara.

MURAL MIRIP JOKOWI MATANYA DITUTUP MASKER

Mural di Jl. Prabu Dimuntur, Kota Bandung dihapus oleh empat orang pria.

"TUHAN AKU LAPAR"

Mural di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Dihapus aparat akhir Juli 2021.

"YANG BISA DIPERCAYA DARI TV CUMA ADZAN"

Mural di Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

ORANG MISKIN DILARANG SAKIT #RIP PEMERINTAH'

Mural di tembok tokoh di pojok perempatan Jl. Sutan Syahrir kawasan Pasar Legi, Solo, dihapus aparat.

"DIPAKSA SEHAT DI NEGARA YANG SAKIT"

Mural di Jl. Diponegoro, Pasuruan, Jawa Timur. Dihapus aparat awal Agustus 2021.

"WABAH SESUNGGUHNYA ADALAH KELAPARAN"

Mural di Jl. Wahidin Sudiro Husodo, Ciledug, Tangerang.

"JOKOWI GAGAL!! CUMA DI ERA INI KORUPTOR HAPPY SELF!

Mural di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.



16 Mei 2021 | Internasional | Komisi I

Serangan Israel Lukai Kemanusiaan Palestina PKS Mendorong Pemerintah Memberi Bantuan Kemanusiaan Untuk Palestina

Beberapa bentuk bantuan Indonesia terhadap Palestina :

1. Turut andil dalam forum Internasional : Pada 30 September 2015 Indonesia mendukung pengibaran bendera Palestina di markas PBB sebagai bentuk pengakuan Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat. Pemerintah Indonesia juga selalu mengajak negara-negara anggota PBB, OKI, GNB, dan ASEAN untuk terus ingat dan memberikan perhatian pada peristiwa yang terjadi di Palestina.
2. Kerjasama Bilateral : Indonesiaterus melakukan agenda Capacity Building untuk Palestina yang sesuai dengan kebutuhan Palestina. Antara lain pada periode 2008-2015, memprakarsai lebih dari 135 program capacity building yang diikuti 1.364 warga Palestina.
3. Bantuan dari LSM : Banyak LSM di Indonesia yang fokus terhadap Palestina, seperti KNRP, AmanPalestina, Mer-C dll. Dan salah satu aksi nyatanya adalah LSM Mer-C yang andil dalam pendirian RS Indonesia di Gaza dengan luas 10.000 meter persegi.

SERANGAN ISRAEL LUKAI KEMANUSIAAN PALESTINA

**PKS Mendorong Pemerintah Memberi
Bantuan Kemanusiaan Untuk Palestina**

Beberapa bentuk bantuan Indonesia terhadap Palestina

Turut andil dalam forum Internasional

Pada 30 September 2015 Indonesia mendukung pengibaran bendera Palestina di markas PBB sebagai bentuk pengakuan Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat. Pemerintah Indonesia juga selalu mengajak negara-negara anggota PBB, OKI, GNB, dan ASEAN untuk terus ingat dan memberikan perhatian pada peristiwa yang terjadi di Palestina.



Kerjasama bilateral

Indonesia terus melakukan agenda Capacity Building untuk Palestina yang sesuai dengan kebutuhan Palestina. Antara lain pada periode 2008-2015, memprakarsai lebih dari 135 program capacity building yang diikuti 1.364 warga Palestina.

Bantuan dari LSM

Banyak LSM di Indonesia yang fokus terhadap Palestina, seperti, KNRP, AmanPalestina, Mer-C dll. Dan salah satu aksi nyatanya adalah LSM MER-C yang andil dalam pendirian RS Indonesia di Gaza dengan luas 10.000 meter persegi.



9 Maret 2021 | Prolegnas | Baleg

RUU PROLEGNAS Prioritas 2021

o 19 RUU : Usul Inisiatif DPR yang terdiri dari 8 RUU Usulan Komisi, 7 RUU Usulan Badan Legislatif, dan 4 RUU Usulan Anggota

o 2 RUU : Usul Inisiatif DPD

o 10 RUU : Usul Inisiatif Pemerintah

o 2 RUU : Usul Inisiatif DPR/Pemerintah

Jika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tetap diusulkan harus memperhatikan norma agama dan nilai budaya bangsa sebagaimana tertuang dalam Sila Pertama Pancasila serta Pasal 29 dan 31 Ayat (3) UU NRI Tahun 1945.

Sikap PKS : Apabila hanya mengatur tugas dan fungsi Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), tidak perlu diatur dalam bentuk Undang-Undang.

RUU PROLEGNAS PRIORITAS 2021

19 RUU

Usul Inisiatif DPR

8 RUU Usulan Komisi

7 RUU Usulan Badan Legislasi

4 RUU Usulan Anggota

2 RUU

Usul Inisiatif DPD

10 RUU

Usul Inisiatif
Pemerintah

2 RUU

Usul Inisiatif DPR/
Pemerintah



Sikap PKS :

Apabila hanya mengatur tugas dan fungsi organisasi **Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)**, tidak perlu diatur dalam bentuk Undang-Undang.

Jika **RUU Penghapusan Kekerasan Seksual** tetap diusulkan harus memperhatikan norma agama dan nilai budaya bangsa sebagaimana tertuang dalam Sila Pertama Pancasila serta Pasal 29 dan 31 ayat (3) UU NRI Tahun 1945.

4 Maret 2021 | Indeks

Indonesia Tidak Sedang Baik-Baik Saja

Beragam Indikator Pencapaian Turun
PKS Minta Pemerintah Bekerja
Fokus dan Terukur

- o Kasus Covid-19 Tertinggi di Asia (Worldometers.info)
- o Indeks Demokrasi Turun (The Economist Intelligence Unit, 2020)
- o Pengelolaan Pangan Kalah Dengan Negara Afrika (Global Hunger Index, 2020, Food Sustainability Index, 2020, & Food Security Index, 2020)
- o Penduduk Miskin Indonesia Naik (Badan Pusat Statistik)
- o Utang Nambah (International Debt Statistics dari World Bank, 2021)
- o Tingkat Kesopanan Netizen Paling Buruk di Asia (Microsoft: Digital Civility Index, 2020)
- o Indeks Kemajuan Sosial Stagnan (Social Progress Index, 2020)
- o Kerusakan Hutan Meningkatkan (Koalisi Indonesia Memantau dan Berbagai Sumber).

INDONESIA TIDAK SEDANG BAIK-BAIK SAJA BERAGAM INDIKATOR PENCAPAIAN TURUN

PKS MINTA PEMERINTAH BERKERJA FOKUS DAN TERUKUR



21 April 2021 | Momentum

Tahukah kamu?

Bahwa Proklamasi Kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia (17/8/1945) Bertepatan Dengan 9 Ramadhan 1364 H

Menjelang persiapan menuju kemerdekaan, Soekarno kerap meminta rekomendasi dari beberapa Ulama juga kepada Habib Ali bin Abdurrahman al Habsyi Kwitang. Menurut Prof. Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya Api Sejarah Jilid 2. Tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1364 H.

Menurut Kesaksian Mr. Achmad Soebardjo, "Pukul 03.00 pagi waktu sahur Ramadhan, teks Proklamasi didiktekan oleh Bung Hatta, dan ditulis dengan tangan Bung Karno", jelas Prof Mansur.

Hari ini 9 Ramadhan 1442 H "Tahniah dan Selamat untuk Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dirgahayu Bangsa dan Negara Indonesia. Allahu Akbar Merdeka!"

Tahukah Kamu?

BAHWA PROKLAMASI KEMERDEKAAN BANGSA DAN NEGARA INDONESIA (17/8/1945)

**BERTEPATAN DENGAN
9 RAMADHAN 1364 H**

Menjelang persiapan menuju kemerdekaan, **Soekarno** kerap meminta rekomendasi dari beberapa Ulama juga kepada Habib Ali bin Abdurrahman al Habsyi Kwitang.

Menurut Prof. Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya Api Sejarah Jilid 2. Tanggal **17 Agustus 1945** bertepatan dengan tanggal **9 Ramadhan 1364 H**



1945		1442 H			
AGUSTUS		RAMADHAN 1364 H			
ABAD 17	5	12	19	26	
SENIN 18	6	13	20	27	
SELASA 19	7	14	21	28	
RABU 20	8	15	22	29	
KAMIS 21	9	16	23	30	
JUMAT 22	10	17	24	31	
SABTU 23	11	18	25		

Menurut kesaksian Mr. Achmad Soebardjo, "**Pukul 03.00 pagi waktu sahur Ramadhan, teks Proklamasi didiktekan oleh Bung Hatta, dan ditulis dengan tangan Bung Karno**", jelas Prof Mansur.

Hari ini 9 Ramadhan 1442 H

“Tahniah dan Selamat untuk
Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia.
Dirgahayu Bangsa dan Negara Indonesia.
Allahu Akbar Merdeka!”

24 Februari 2021 | Hukum | Komisi III

Korupsi Indonesia Meningkat, Lebih Parah dari Timor Leste

Berantas Korupsi, PKS Minta Pemerintah Terapkan Good Governance

Corruption Perception Index mengukur tingkat korupsi di suatu negara berdasarkan persepsi para ilmuwan dan pebisnis. Transparency International mencatat bahwa Indonesia mengalami perlambatan dalam pemberantasan korupsi dan lemahnya komitmen pemerintah dalam reformasi birokrasi.

Pada tahun 2019 Indonesia menduduki peringkat 85 dari 180 negara. Sedangkan pada tahun 2020 Indonesia menduduki peringkat 102 dari 180.

Skor Negara di tahun 2020 :

Indonesia 37

Ethiopia 38

Timor Leste 40

Malaysia 51

(semakin rendah skor, semakin korup suatu negara)

KORUPSI INDONESIA MENINGKAT, LEBIH PARAH DARI TIMOR LESTE

BERANTAS KORUPSI, PKS MINTA PEMERINTAH TERAPKAN GOOD GOVERNANCE

Corruption Perception Index mengukur tingkat korupsi di suatu negara berdasarkan persepsi para ilmuwan dan pebisnis. Transparency International mencatat bahwa Indonesia mengalami perlambatan dalam pemberantasan korupsi dan lemahnya komitmen pemerintah dalam reformasi birokrasi.

► 2019

Indonesia menduduki peringkat **85** dari 180 negara

► 2020

Indonesia menduduki peringkat **102** dari 180 negara

► Skor Negara di tahun 2020

 Indonesia.....	37
 Ethiopia.....	38
 Timor Leste.....	40
 Malaysia.....	51

• Semakin rendah skor, semakin korup suatu negara.



4 Maret 2021 | Informasi | Komisi I

Netizen Indonesia Paling
Enggak Sopan Di Asia

PKS Mengajak Semua Pihak Hadirkan Literasi Internet Sehat

Microsoft baru saja merilis Digital Civility Index 2020 yang mengukur tingkat kesopanan dalam interaksi dunia maya. Hasilnya, Indonesia menduduki peringkat 29 dari 32 negara yang di survey oleh Microsoft.

Skor Indonesia (skala 0-100)
Tahun 2019 : 67
Tahun 2020 : 76
(Semakin tinggi skornya,
semakin kurang sopan
negaranya.

Skor negara-negara Asia lainnya
:
Malaysia 63
Filipina 66
Vietnam 72

Digital Civility Index mencatat :
47% Netizen Indonesia terlibat
dalam bullying
19% Menjadi korban bullying

Hal ini seiring dengan
berkeliarannya buzzer di dunia
maya. Sementara itu, risiko
online terbesar saat ini menjadi
netizen Indonesia adalah hoax
dan scam, ujaran kebencian dan
diskriminasi.

NETIZEN INDONESIA PALING ENGGAK SOPAN DI ASIA

PKS Mengajak Semua Pihak Hadirkan Literasi Internet Sehat

Microsoft baru saja merilis **Digital Civility Index 2020** yang mengukur tingkat kesopanan dalam interaksi dunia maya. Hasilnya, Indonesia menduduki peringkat 29 dari 32 negara yang disurvei oleh Microsoft.

Skor Indonesia (skala 0-100)

2019  67

2020  **76** 

Semakin **tinggi** skornya, semakin **kurang sopan** negaranya

Skor negara-negara Asia lainnya

 Malaysia 63

 Filipina 66

 Vietnam 72

Digital Civility Index mencatat

47% Netizen Indonesia terlibat dalam bullying

19% Menjadi korban bullying

- Hal ini seiring dengan berkeliarannya buzzer di dunia maya.
- Sementara itu, risiko online terbesar saat menjadi netizen Indonesia adalah hoax dan scam, ujaran kebencian dan diskriminasi.



18 Maret 2021 | Pilkada | Komisi II

Mengapa PKS Tetap Memperjuangkan PILKADA 2022 dan 2023?

o Sistem Pelaksanaan :

Kelebihan : Lebih ringan & fokus karena tidak berbarengan dengan Pemilu Serentak 2024

Kekurangan : “Pemaksaan” Pemilu & Pilkada Serentak 2024 berpotensi menimbulkan

korban jiwa yang lebih besar dari Pemilu Serentak 2019 (894 Meninggal, 5.175 petugas dirawat di RS).

o Sisi Demokrasi :

Kekurangan : “Pemaksaan” Pilkada Serentak 2024, menyebabkan ada 272 pejabat Kepala Daerah (24 prov, 57 Kot, 191 Kab) yang melaksanakan tugas secara definitive tapi bukan dipilih langsung masyarakat. Kondisi ini berpotensi membuat oligarki kekuasaan oleh Pemerintah.

o Sisi Pemilihan :

Kelebihan : Informasi yang didapat calon Pemilih terkait kapasitas & kapabilitas Calon Kepala Daerah akan lebih memadai.

Kekurangan : “Pemaksaan” Pemilu & Pilkada Serentak 2024 berpotensi membuat preferensi calon pemilih lebih banyak menjadi transaksional dan emosional.

o Sisi Anggaran :

Kekurangan : Pemilu dan Pilkada Serentak lebih boros anggaran :

- Pemilu 2014 (belum serentak): 24,8 Triliun
- Pemilu 2019 (serentak): 25,12 triliun
- Pemilu dan Pilkada 2024 (serentak): 112,5 T (86,3 T APBN + 26,2 T APBD)

MENGAPA **PKS** TETAP MEMPERJUANGKAN PILKADA 2022 dan 2023

Sistem Pelaksanaan

- + Lebih ringan & fokus karena tidak bebarengan dengan Pemilu Serentak 2024.
- "Pemaksaan" Pemilu & Pilkada Serentak 2024 berpotensi menimbulkan korban jiwa yang lebih besar dari Pemilu Serentak 2019 (894 Meninggal, 5.175 petugas dirawat di RS).

Sisi Demokrasi

- "Pemaksaan" Pilkada Serentak 2024, menyebabkan ada 272 pejabat Kepala Daerah (24 prov, 57 Kot, 191 kab) yang melaksanakan tugas secara definitif tapi bukan dipilih langsung masyarakat. Kondisi ini berpotensi membuat oligarki kekuasaan oleh Pemerintah.

Sisi Pemilihan

- + Informasi yang didapat calon Pemilih terkait kapasitas & kapabilitas Calon Kepala Daerah akan lebih memadai.
- "Pemaksaan" Pemilu & Pilkada Serentak 2024 berpotensi membuat preferensi calon pemilih lebih banyak menjadi transaksional dan emosional.

Sisi Anggaran

- Pemilu dan Pilkada Serentak lebih boros anggaran :
 - Pemilu 2014 (belum serentak): 24,8 Triliun
 - Pemilu 2019 (serentak): 25,12 triliun
 - Pemilu dan Pilkada 2024 (serentak): 112,5 T (86,3 T APBN + 26,2 T APBD)



PILKADA
2022-2023

26 Maret 2021 | Demokrasi | Komisi II

Presiden Tiga Periode & Lahirnya Negara Kekuasaan

Anggota komisi I DPR RI FPKS, Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si mengatakan bahwa menolak gagasan Presiden 3 Periode itu amanat reformasi yang merupakan buah pembelajaran Anak Bangsa terhadap pengalaman sejarah Indonesia masa lalu. Sehingga diabadikan dalam normal Konstitusi kita. Sehingga tidak perlu dikaitkan dengan pencalonan Jokowi atau juga mungkin pencalonan SBY sebagai Capres 2024.

“Jadi orang-orang yang setback ke gagasan Presiden 3 periode itu adalah orang-orang yang tidak belajar dari sejarah Indonesia. Dan cenderung ingin menghidupkan kultus politik kepemimpinan Nasional. Ini bahaya. Kultus itu akan mengarah matinya Demokrasi & rusaknya konsep negara hukum. Yang akan lahir adalah negara kekuasaan bukan negara hukum. Bukan lagi rule of law tapi law of ruler”.

Pak SBY pada masanya sangat tegas untuk menolak Capres 3 Periode. Pak Jokowi juga begitu pada statement pribadinya. Ibu Megawati juga menolak dengan tegas mengenai isu jabatan presiden tiga periode. (www.wartaekonomi.co.id)

PRESIDEN TIGA PERIODE & LAHIRNYA NEGARA KEKUASAAN

“ Menolak gagasan Presiden 3 Periode Itu amanat reformasi yang merupakan buah pembelajaran Anak Bangsa terhadap pengalaman sejarah Indonesia masa lalu. Sehingga diabadikan dalam norma Konstitusi kita.

“ Sehingga tidak perlu dikaitkan dengan pencalonan JOKOWI atau juga mungkin pencalonan SBY sebagai Capres 2024.

“ Pak SBY pada masanya sangat tegas untuk menolak Capres 3 Periode. Pak Jokowi juga begitu pada statement pribadinya. Ibu Megawati juga menolak dengan tegas mengenai isu jabatan presiden tiga periode.
(www.wartaekonomi.co.id)

“ Jadi orang-orang yang *setback* ke gagasan Presiden 3 Periode itu adalah orang-orang yang tidak belajar dari sejarah Indonesia. Dan cenderung ingin menghidupkan kultus politik kepemimpinan Nasional. **Ini bahaya. Kultus itu akan mengarah matinya Demokrasi & rusaknya konsep negara hukum.** Yang akan lahir adalah negara kekuasaan bukan negara hukum. Bukan lagi *rule of law* tapi ***law of ruler.***

Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si
Anggota Komisi I DPR RI FPKS



28 April 2021 | Keamanan | Komisi I

Kapal RI Layak Pakai Kurang Dari 30 Persen

Anggota Komisi I DPR dari FPKS, Sukamta mengatakan jumlah kapal milik Indonesia yang layak pakai kurang dari 30 persen. Pernyataan itu ia ungkapkan merujuk pada hasil temuan evaluasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) panitia kerja (panja) Komisi I DPR RI. Ia juga mengatakan bahwa untuk belanja alutsista itu harus dengan sebuah kebijakan untuk menambah anggaran bukan diambilkan dari porsi yang ada. Kalau selama ini kan cukup enggak cukup pokoknya sekian silahkan dibagi-bagi sendiri.

Anggaran pengadaan alutsista dari Kemenhan di tahun 2021 sebesar 9,6 Triliun, Sedangkan Anggaran modernisasi dan pemeliharaan sebesar 8 Triliun.

Berdasarkan laporan Global Fire Power tahun 2020, armada Angkatan laut Indonesia terdiri dari :

- 7 Fregat
- 24 Korvet
- 5 Kapal Selam
- 10 Penyapu Ranjau
- 156 Kapal Patrol

KAPAL RI LAYAK PAKAI KURANG DARI 30 PERSEN

- Anggota Komisi I DPR dari FPKS, Sukamta mengatakan jumlah kapal milik Indonesia yang layak pakai kurang dari 30 persen. Pernyataan itu ia ungkapkan merujuk pada hasil temuan evaluasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) panitia kerja (panja) Komisi I DPR RI.



“Untuk belanja alutsista itu harus dengan sebuah kebijakan untuk menambah anggaran bukan diambilkan dari porsi yang ada. Kalau selama ini kan cukup enggak cukup pokoknya sekian sliakan dibagi-bagi sendiri

H. Sukamta, Ph.D.
Anggota Komisi I DPR RI FPKS

Anggaran pengadaan alutsista dari Kemenhan di tahun 2021

9,6 Trilyun

Anggaran modernisasi dan pemeliharaan

8 Trilyun

- Berdasarkan laporan Global Fire Power tahun 2020, armada Angkatan laut Indonesia terdiri dari



7 Fregat



24 Korvet



5 Kapal Selam



10 Penyapu Ranjau



156 Kapal Patrol

29 April 2021 | Prolegnas | Baleg

Raja Kapal Selam ASEAN
Ternyata Bukan Indonesia

PKS Dorong Pemerintah Mengembangkan Alutsista

Indonesia memang satu-satunya negara di ASEAN yang mampu membangun kapal selam, tapi bukanlah yang terbanyak memiliki kapal selam.

o Vietnam : Memiliki 8 Kapal Selam sekaligus mengoperasikan Zarmada terbesar di kawasan ASEAN. 2 unit Kapal Selam Yugo Class dari Korea Utara. 6 unit Kapal Selam Kilo Class dari Rusia.

o Malaysia : Memiliki 2 Kapal Selam sekaligus mengoperasikan kapal selam Scorpene Class dari DCNS Prancis.

o Singapura : Memiliki 4 Kapal Selam. Challenger dan Archer Class, namun kabarnya akan diganti dengan empat kapal selam tipe 218SG buatan Jerman.

o Myanmar : Memiliki 1 Kapal Selam.

o Thailand : -

o Filipina : -

o Indonesia : Memiliki 5 Kapal Selam. 2 unit U-209/1300, KRI Cakra (401), KRI Nanggala (402)*
*(Pada Minggu (25/4/2021), KRI Nanggala-402 dinyatakan berstatus subsunk (tenggelam)). 3 unit Jenis Diesel Electric Submarine U209/1400 Chang Bogo (Korsel) & Kapal Selam Alugoro dibuat di Indonesia melalui PT PAL Indonesia.

RAJA KAPAL SELAM ASEAN TERNYATA BUKAN INDONESIA

PKS mendorong Pemerintah Mengembangkan Alutsista.

- Indonesia memang satu-satunya negara di ASEAN yang mampu membangun kapal selam, tapi bukanlah yang terbanyak memiliki kapal selam.

VIETNAM

8 Kapal Selam

mengoperasikan armada terbesar di kawasan ASEAN

2 Unit
Kapal Selam Yugo Class dari Korea Utara

6 Unit
Kapal Selam Kilo Class dari Rusia

MALAYSIA

2 Kapal Selam

mengoperasikan kapal selam Scorpene Class dari DCNS Prancis

SINGAPURA

4 Kapal Selam

Challenger dan Archer Class, Namun kabarnya akan diganti dengan empat kapal selam tipe 218SG buatan Jerman.

MYANMAR

1 Kapal Selam

THAILAND

-

FILIPHINA

-

INDONESIA 5 Kapal Selam

2 Unit

U-209/1300
KRI Cakra (401)
KRI Nanggala (402)*

*(Pada Minggu (25/4/2021), KRI Nanggala-402 dinyatakan berstatus subsunk (tenggelam).

3 Unit

Jenis Diesel Electric Submarine U209/1400 Chang Bogo (Korsel) & Kapal Selam Alugoro dibuat di Indonesia melalui PT PAL Indonesia



11 Maret 2021 | Prolegnas | Baleg

Daftar 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021

o 19 RUU Inisiatif DPR :

1. RUU tentang Perubahan atas UU NO.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. RUU tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. RUU tentang Perubahan atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
4. RUU tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
5. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.
6. RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
7. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
8. RUU tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
9. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
10. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kep. Riau, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat.
11. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Banjarmasin, dan Manado.
12. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kep. Riau, Bali, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat,
13. RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
14. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
15. RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
16. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.
17. RUU tentang Praktik Psikologi
18. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
19. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.

DAFTAR 33 RUU PROLEGNAS PRIORITAS 2021



19 RUU Usul Inisiatif DPR

-  RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
-  RUU tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
-  RUU tentang Perubahan atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
-  RUU tentang Perubahan atas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
-  RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.
-  RUU tentang Perubahan atas UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
-  RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
-  RUU tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
-  RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
-  RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kep. Riau, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat.

-  RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Banjarmasin, dan Manado
 -  RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kep. Riau, Bali, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat.
 -  RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
 -  RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
 -  RUU tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 -  RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.
 -  RUU tentang Praktik Psikologi.
 -  RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.
 -  RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.
- ## 10 RUU Usul Inisiatif Pemerintah
-  RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
 -  RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.

-  RUU tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
 -  RUU tentang Perubahan atas UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
 -  RUU tentang Perubahan atas UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 -  RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: RUU tentang Perubahan atas UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah).
 -  RUU tentang Ibukota Negara.
 -  RUU tentang Hukum Acara Perdata.
 -  RUU tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: RUU tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular)
 -  RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- ## 2 RUU Usul Inisiatif DPR/Pemerintah
-  RUU tentang Perubahan atas UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
 -  RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- ## 2 RUU Usul Inisiatif DPD
-  RUU tentang Daerah Kepulauan.
 -  RUU tentang Badan Usaha Milik Desa

28 Januari 2022 | Keamanan | Komisi I

Puluhan Anggota TNI-Polri
Berguguran Akibat Aksi Teror di Papua

PKS : Negara Harus Menghentikan Semua Kekerasan

dan Selesaikan Persoalan
Papua Secara Komprehensif

Sebanyak 40 personel TNI-Polri dinyatakan gugur sepanjang tahun 2019 sampai dengan Januari 2022 karena terlibat kontak tembak dengan kelompok teroris Papua.

2019 : 23 penembakan, 10 anggota TNI/POLRI gugur.
2020 : 49 penembakan, 11 anggota TNI/POLRI gugur.
2021 : 92 penembakan, 15 anggota TNI/POLRI gugur.
Januari s.d Maret 2022 : 3 penembakan, 5 prajurit TNI gugur.

Solusi :

- Pendekatan politik kesetaraan dengan menempatkan posisi rakyat Papua sebagai subjek bukan objek.
- Pemerintah juga harus melakukan pendekatan humanis dengan perbaikan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan serta reideologisasi kecintaan kepada NKRI.
- Bangun Komunikasi dengan tokoh-tokoh Papua.
- Tindakan tegas dalam pendekatan pertahanan keamanan.

Puluhan Anggota TNI-Polri Berguguran Akibat Aksi Teror di Papua

PKS: NEGARA HARUS MENGHENTIKAN SEMUA KEKERASAN DAN SELESAIKAN PERSOALAN PAPUA SECARA KOMPREHENSIF



2019	23 penembakan 10 anggota TNI/ POLRI gugur
2020	49 penembakan 11 anggota TNI/ POLRI gugur
2021	92 penembakan 15 anggota TNI/ POLRI gugur
Januari s.d Maret 2022	3 penembakan 5 prajurit TNI gugur



Sebanyak **40 personel TNI-Polri dinyatakan gugur** sepanjang tahun 2019 sampai dengan Januari 2022 karena terlibat kontak tembak dengan kelompok teroris Papua.

Solusi :

- 1 Pendekatan politik kesetaraan dengan menempatkan posisi rakyat Papua sebagai subjek bukan objek.
- 2 Pemerintah juga harus melakukan pendekatan humanis dengan perbaikan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan serta reideologisasi kecintaan kepada NKRI.
- 3 Bangun komunikasi dengan tokoh-tokoh Papua
- 4 Tindakan tegas dalam pendekatan pertahanan keamanan.



14 September 2021 | Demokrasi | Komisi II

Mural Dihapus, Poster Ditangkap
Apakah Ini Di Indonesia?

PKS : Pemerintah Anti Kritik, Citra Demokrasi Tercoreng

Mahasiswa UNS ditangkap polisi gara-gara membentangkan poster bertuliskan aspirasi untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi ke UNS pada Senin (13/9).

Peternak ayam di Blitar ditangkap aparat saat bentangkan poster pada Rabu (8/9). Momen tersebut terjadi ketika rombongan Presiden Jokowi baru saja keluar dari halaman makam Presiden Soekarno.

Anggota Komisi II DPR RI FPKS, Mardani Ali Sera menilai penangkapan oleh aparat itu sangat berlebihan, karena mahasiswa hanya menyuarakan aspirasi dari banyak pihak. Penangkapan ini justru kian tercoreng.

Berikut merupakan contoh poster tersebut:

“TUNTASKAN PELANGGARAN
HAM DI MASA LALU”

“PAK, TOLONG BENAHI KPK”

“PAK, TOLONG DUKUNG
PETANI LOKAL”

“PAK JOKOWI BANTU
PETERNAK BELI JAGUNG
DENGAN HARGA WAJAR”

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti kritik tersebut sangat berguna untuk dapat meningkatkan pelayanan publik yang nantinya dapat dinikmati masyarakat.

MURAL DIHAPUS, POSTER DITANGKAP APAKAH INI DI INDONESIA?

PKS : Pemerintah Anti Kritik, Citra Demokrasi Tercoreng

- **Mahasiswa UNS ditangkap polisi** gara-gara membentangkan poster bertuliskan aspirasi untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi ke UNS pada Senin (13/9).
- **Anggota Komisi II DPR RI FPKS Mardani Ali Sera** menilai penangkapan oleh aparat itu sangat berlebihan, karena mahasiswa hanya menyuarakan aspirasi dari banyak pihak.
- Penangkapan ini justru kian membuat citra negara demokrasi kian tercoreng



PAK JOKOWI
BANTU PETERNAK
BELI JAGUNG
DENGAN HARGA
WAJAR

- **Peternak ayam di Blitar ditangkap aparat** saat bentangkan poster Rabu (8/9).
- Momen tersebut terjadi ketika rombongan Presiden Jokowi baru saja keluar dari halaman makam Presiden Soekarno.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

menyoroti kritik tersebut sangat berguna untuk dapat meningkatkan pelayanan publik yang nantinya dapat dinikmati masyarakat.

3

Kesra
(Kesejahteraan Rakyat)

10 Mei 2021 | Haji | Komisi VIII

Arab Saudi Bolehkan Ibadah Haji Tahun 2021

Riwayat perjuangan Fraksi PKS mengadvokasi kepastian haji tahun 2021 :

● 7 April 2021

Usulkan tarif untuk tanggulangi kenaikan biaya haji di masa pandemi.

● 25 April 2021

DPR Komisi VII pastikan kenaikan biaya haji tidak signifikan.

● 3 Mei 2021

Bukhori Yusuf desak pemerintah lobi Arab Saudi untuk kepastian haji.

● 10 Mei 2021

Haji dibolehkan, Bukhori Yusuf minta pemerintah segera pastikan izin dan kuota Jemaah.

ARAB SAUDI BOLEHKAN IBADAH HAJI TAHUN 2021

Riwayat Perjuangan Fraksi PKS dalam
mengadvokasi kepastian haji tahun 2021



7 April 2021

Usulkan alternatif untuk tanggulangi kenaikan biaya haji di masa pandemi.



25 April 2021

DPR Komisi VIII pastikan kenaikan biaya haji tidak signifikan.



3 Mei 2021

Fraksi PKS DPR RI desak pemerintah lobi Arab Saudi untuk kepastian haji.



10 Mei 2021

Haji dibolehkan, Fraksi PKS DPR RI minta Pemerintah segera Pastikan izin dan kuota jemaah

22 November 2022 | Fraksi PKS DPR RI

Lagi!!! Aleg PKS Potong Gaji Untuk Rakyat

1. Fraksi PKS DPR potong gaji bulan maret untuk APD bantuan pahlawan medis. (24/03/2020)
2. Anggota FPKS bagikan hand saitizer dan siap potong gaji untuk bantu tenaga medis covid-19. (24/03/2020)
3. Aleg PKS siap dipotong gaji untuk APD dan sarankan rapid test dialihkan yang lebih prioritas. (24/03/2020)
4. APD tenaga medis minim, Politis PKS siap dipotong gaji. (25/03/2020)
5. Bantu tenaga medis, HNW ajak DPR hingga DPRD potong gaji. (27/03/2020)
6. Fraksi PKS kembali potong gaji anggota bulan April untuk bantuan rakyat terdampak corona. (01/04/2020)
7. Potong gaji anggota dewan, Afifudin bagikan beras untuk warga terdampak covid-19. (12/04/2020)
8. Fraksi PKS kembali potong gaji untuk bantuan korban bencana. (18/01/2021)
9. Bantu korban banjir bandang dan longsor di flores Timur dan Bima Fraksi PKS kembali potong gaji anggota. (05/04/2021)
10. Fraksi PKS kembali potong gaji anggota bulan Agustus untuk bantuan social covid-19. (07/08/2021)

Bantu Korban Gempa Cianjur

Anggota PKS Kembali Potong Gaji

■ Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini kembali menginstruksikan ALEG PKS pusat hingga daerah untuk memotong gaji guna membantu korban bencana gempa bumi Cianjur-Jawa Barat.

■ Sebelumnya Fraksi PKS juga melakukan aksi potong gaji :

1 ALEG PKS Potong Gaji Untuk APD Bantu Pahlawan Medis
24/03/2020

2 Anggota FPKS Bagikan Hand Sanitizer dan Siap Potong Gaji untuk Bantu Tenaga Medis Covid-19
24/03/2020

3 ALEG PKS Siap Dipotong Gaji untuk APD dan Sarankan Rapid Test Dialihkan yang Lebih Prioritas
24/03/2020

4 APD Tenaga Medis Minim, Politisi PKS Siap Dipotong Gaji
25/03/2020

5 Bantu Tenaga Medis, HNW Ajak DPR hingga DPRD Potong Gaji
27/03/2020

6 Fraksi PKS Kembali Potong Gaji Anggota Bulan April Untuk Bantu Rakyat Terdampak Corona
01/04/2020

7 Potong Gaji Anggota Dewan, Alifudin Bagikan Beras untuk Warga Terdampak Covid 19
12/04/2020

8 Fraksi PKS Kembali Potong Gaji Untuk Bantu Korban Bencana
18/01/2021

9 Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Flores Timur dan Bima Fraksi PKS Kembali Potong Gaji Anggota
05/04/2021

10 Fraksi PKS Kembali Potong Gaji Anggotanya Bulan Agustus untuk Bantuan Sosial Covid-19
07/08/2021

11 Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini Instruksikan ALEG PKS Potong Gaji Bantu Korban Gempa Cianjur
22/11/2022

“Fraksi PKS menyampaikan duka cita mendalam seraya berdoa agar Allah meringankan korban gempa di Cianjur. Dan sebagai bentuk empati dan kepedulian, Fraksi PKS menghimpun dana bantuan dari potongan gaji anggota bulan ini



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

5 September 2021 | Statistik

Indonesia Dilanda Badai Pengangguran & Kemiskinan Ekstrem

PKS mendesak pemerintah ciptakan lapangan kerja dan dukungan UKM

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat presentase penduduk miskin ekstrem mencapai 4,8% dari total penduduk miskin nasional di level 10,14%. Serta peningkatan tingkat pengangguran pada penduduk yang berusia 20-24 tahun dan 25-29 tahun berdasarkan data Februari 2021.

Berdasarkan Usia

o Pada usia 20-24 tahun 17,66%

(meningkat 3,36%)

o Pada usia 25-29 tahun 4,94% meningkat 2,26%)

Berdasarkan Pendidikan

o Dari lulusan SMA 8,55% (2.305.093 Jiwa) (meningkat 1,86%)

o Dari lulusan SMK 11,45% (2.089.137 Jiwa) (meningkat 3,03%)

Jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi terdapat di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

INDONESIA DILANDA BADAI PENGANGGURAN & KEMISKINAN EKSTREM

**PKS Mendesak Pemerintah Ciptakan
Lapangan Kerja dan Dukung UKM**

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat **persentase penduduk miskin ekstrem mencapai 4,8%** dari total penduduk miskin nasional di level 10,14%. Serta peningkatan tingkat pengangguran pada penduduk yang berusia 20-24 tahun dan 25-29 tahun berdasarkan data Februari 2021.

Berdasarkan Usia

Pada usia
20-24 tahun

17,66%

(meningkat 3,36%)

Pada usia
25-29 tahun

4,94%

(meningkat 2,26%)

■ Jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi terdapat di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Berdasarkan Pendidikan

Dari Lulusan SMA

8,55%

(2.305.093 jiwa)
(meningkat 1,86%)

Dari Lulusan SMK

11,45%

(2.089.137 jiwa)
(meningkat 3,03%)



23 November 2021 | Pendidikan | Komisi X

Kebijakan Nadiem Yang Tak Pernah Sepi Kontroversi

PKS mendesak Nadiem fokus ke tujuan utama Pendidikan.

Ada apa dengan Kemendikbudristek?

Juli 2020

Mundurinya PGRI, NU, PP Muhammadiyah, dan Majelis dikedasmen dari Program Organisasi Penggerak (POP).

September 2020

Hilangnya beberapa mata pelajaran dalam rencana penyederhanaan kurikulum untuk TA 2021/2022

o Agama ke Budi Pekerti

o Sejarah ke IPS

o Penyederhanaan mapel IPA

Februari 2021

Menerbitkan SKB Tiga Menteri.

Melarang pemda untuk menerbitkan peraturan yang mewajibkan atau melarang penggunaan atribut agama pada seragam sekolah negeri.

April 2021

Tidak adanya frasa “Agama” dalam peta jalan Pendidikan 2035, hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib perguruan tinggi,

kamus sejarah Indonesia

beberapa tokoh nasional seperti KH Hasyim Ashari

September 2021

Pembubaran BSNP dan digantikan oleh Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan yang berada di bawah Kemendikbudristek.

November 2021

Permendikbud 30/2021 tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tidak mencantumkan nilai moral, kesusilaan, dan ketakwaan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

KEBIJAKAN NADIEM YANG TAK PERNAH SEPI KONTROVERSI

PKS Mendesak Nadiem Fokus ke Tujuan Utama Pendidikan

Ada apa dengan Kemendikbudristek?

Juli 2020

Mundurinya PGRI, NU, PP Muhammadiyah, dan Majelis Dikdasmen dari Program Organisasi Penggerak (POP)

September 2020

Hilangnya beberapa mata pelajaran dalam rencana penyederhanaan kurikulum untuk TA 2021/2022

- Agama ke Budi Pekerti
- Sejarah ke IPS
- Penyederhanaan mapel IPA

Februari 2021

Menerbitkan SKB Tiga Menteri. Melarang Pemda untuk menerbitkan peraturan yang mewajibkan ataupun melarang penggunaan atribut agama pada seragam sekolah negeri

April 2021

Tidak adanya frasa "Agama" dalam Peta Jalan Pendidikan 2035

Hilangnya Pancasila dan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib perguruan tinggi

Kamus Sejarah Indonesia tidak memasukkan nama beberapa tokoh nasional seperti KH. Hasyim Ashari

September 2021

Pembubaran BSNP dan digantikan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan yang berada di bawah Kemendikbudristek.

November 2021

Permendikbud 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tidak mencantumkan nilai moral, kesusilaan, dan ketakwaan.

“



Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

1 Januari 2021 | Kesehatan | Komisi IX

Hadiah Awal Tahun Dari Pemerintah

Pemerintah Kembali menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan. Mulai 1 Januari 2021, ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 3.

Besaran iuran BPJS Kesehatan Juli-desember

- o Kelas 1 : Rp 150.000
- o Kelas 2 : Rp 100.000
- o Kelas 3 : Rp 25.500 (Rp 42.000 dikurangi subsidi pemerintah Rp 16.500)

Besaran iuran BPJS Kesehatan 1 Januari 2021

- o Kelas 1 : Rp 150.000
- o Kelas 2 : Rp 100.000
- o Kelas 3 : Rp 35.000 (Rp 42.000 dikurangi subsidi pemerintah Rp 7.000)

HADIAH AWAL TAHUN DARI PEMERINTAH

Pemerintah kembali menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan.
Mulai 1 Januari 2021, ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan
untuk peserta kelas 3.



Besaran iuran BPJS Kesehatan Juli-Desember 2020

Kelas 1
Rp 150.000

Kelas 2
Rp 100.000

Kelas 3
Rp 25.500
Rp 42.000 dikurangi subsidi
Pemerintah Rp 16.500

Besaran iuran BPJS Kesehatan 1 Januari 2021

Kelas 1
Rp 150.000

Kelas 2
Rp 100.000

Kelas 3
Rp 35.000
Rp 42.000 dikurangi subsidi
Pemerintah Rp 7.000

22 Maret 2021 | Demokrasi | Komisi II

Indonesia Lebih Religius Dibandingkan Negara Lain

Fraksi PKS tengaskan agama menjadi bagian integral dari visi Pendidikan nasional.

Pew Research Center merilis hasil survei tentang keyakinan pada tuhan sebagai pembentukan nilai dan moral yang baik di negara-negara Asia Pasifik

Indonesia menempati posisi tertinggi (96% : 2%); yang meyakini dan yang tidak meyakini.

Perbandingan dengan negara lain :

NEGARA	MEYAKINI	TIDAK MEYAKINI
Indonesia	96%	2%
Filipina	96%	4%
Jepang	39%	56%
Korea Selatan	45%	53%
India	79%	18%
Australia	19%	79%

Catatan: sisa prosentase yang tidak terhitung adalah responden di negara tersebut yang menolak memberikan jawaban

Karenanya PKS MENOLAK tidak disebutnya frasa Agama dalam peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035.

INDONESIA LEBIH RELIGIUS DIBANDINGKAN NEGARA LAIN

Fraksi **PKS** Tegaskan Agama Menjadi
Bagian Integral Dari Visi Pendidikan Nasional.

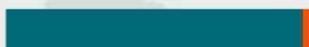
■ Pew Research Center merilis hasil survei tentang keyakinan pada Tuhan sebagai pembentuk nilai dan moral yang baik di negara-negara Asia Pasifik

■ Indonesia menempati posisi tertinggi (96% : 2%); yang meyakini dan yang tidak meyakini.

Perbandingan dengan negara lain



Indonesia



96% : 2%



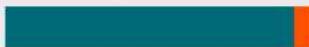
Korea Selatan



45% : 53%



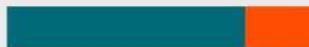
Filipina



96% : 4%



India



79% : 18%



Jepang



39% : 56%



Australia



19% : 79%

■ Meyakini ■ Tidak Meyakini

Catatan: sisa prosentase yang tidak terhitung adalah responden di negara tersebut yang menolak memberikan jawaban.



Karenanya **PKS MENOLAK** tidak disebutnya frasa Agama dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035.

7 Januari 2021 | Kesehatan | Komisi IX

Catatan FPKS Proses/pelaksanaan Vaksinasi

Buka data vaksin dan skrining calon penerima,
Siapkan infrastruktur, strategi, delivery, dan penyimpanan
SDM terlatih dan perlindungan nakes vaksinator
Tata Kelola kejadian ikutan pasca imunisasi

Pengelolaan limbah vaksin
Vaksinasi berkeadilan (wilayah 3T, penduduk di luar 18-59/tidak memenuhi syarat Sinovac)

CATATAN FPKS

PROSES/PELAKSANAAN VAKSINASI



Buka data vaksin, verifikasi dan skrining calon penerima,



Siapkan infrastruktur, strategi delivery, dan penyimpanan



SDM terlatih dan perlindungan nakes vaksinator



Tata kelola Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)



Pengelolaan limbah vaksin



Vaksinasi berkeadilan (wilayah 3T, penduduk di luar 18-59/ tidak memenuhi syarat sinovac)

22 Februari 2021 | Kebencanaan | Komisi VIII

PKS Ajak Masyarakat Siaga Bencana

Tas Siaga Bencana (TSB) merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman.

Isi Tas Siaga Bencana (TSB) :

- o Makanan ringan tahan lama (Mie instan, biskuit, abon, coklat, dsb)
- o Perlengkapan mandi (Sabun, sikat gigi, odol, handuk, dsb)
- o Masker (Untuk menyaring udara kotor/tercemar)
- o Air minum (Minimal untuk persediaan 3 hari)
- o Kotak P3K (Berisi obat-obatan untuk pribadi dan obat umum lainnya)
- o Uang cash (Siapkan secukupnya minimal untuk pembekalan darurat selama 3 hari)
- o Hand sanitizer (Untuk membersihkan tangan dari

bakteri)

- o Surat-surat penting (Surat tanah, BPKB, ijazah, akte kelahiran, dsb)
- o Alat bantu penerangan (Senter, headlamp, lilin, korek api, dsb)
- o Peluit (Alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat)
- o Pakaian (Minimal untuk persediaan 3 hari)
- o Radia/ponsel (Untuk mencari informasi)
No Telp Penting
- o Polisi : 110
- o Ambulans : 118 & 119
- o Pemadam Kebakaran : 113 & 1131
- o Badan Search and Rescue (SAR) Nasional : 115
- o Posko Bencana Alam : 129
- o Penerangan : 108
- o Signal Telp. Seluler & Satelit : 112
- o PLN : 123

PKS AJAK MASYARAKAT SIAGA BENCANA

Tas Siaga Bencana (TSB) merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman.



No Telp Penting

110.....Polisi

118 & 119.....Ambulans

113 & 1131...Pemadam Kebakaran

115.....Badan Search

and Rescue (SAR) Nasional

129.....Posko Bencana Alam

108....Penerangan

112.....Signal Telp. Seluler & Satelit

123.....PLN

7 Mei 2021 | Pendidikan | Komisi X

Kualitas Pendidikan Indonesia Masih Rendah

PKS minta pemerintah serius tingkatkan pemerataan Pendidikan

Pada pembukaan UUD 1945 negara mempunyai amanat untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pasal 31 UUD 1945 ayat 4 disebutkan Negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional.

Anggaran Pendidikan cukup tinggi Rp 549,5 Triliyun (20% dari APBN Indonesia)

Namun, kualitas Pendidikan di Indonesia masih rendah.

Dalam survei kualitas Pendidikan yang dikeluarkan oleh PISA, Indonesia menempati peringkat 72 dari 77 negara di dunia

20% anggaran Pendidikan sesuai amanat UUD dan UU Sisdiknas belum sepenuhnya difokuskan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Pendidikan kita.

Hal ini membuktikan bahwa banyaknya anggaran belum dimaksimalkan oleh pemerintah dengan meningkatkan daya saing para siswa di Indonesia.

KUALITAS PENDIDIKAN INDONESIA MASIH RENDAH

PKS Minta Pemerintah **Serius** Tingkatkan Pemerataan Pendidikan

- Pada pembukaan UUD 1945 **negara mempunyai amanat** untuk "**mencerdaskan kehidupan bangsa**". Pasal 31 UUD 1945 ayat 4 disebutkan **Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen** dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

- Namun, **kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah.**



- Dalam survei kualitas pendidikan yang dikeluarkan oleh PISA, Indonesia menempati peringkat



72

dari 77 negara di dunia



- Anggaran pendidikan cukup tinggi



Rp549,5 Trilyun
(20% dari APBN Indonesia)

- 20% anggaran pendidikan sesuai amanat UUD dan UU Sisdiknas **belum sepenuhnya** difokuskan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan kita.
- Hal ini membuktikan bahwa **banyaknya anggaran belum dimaksimalkan oleh pemerintah** dengan meningkatkan daya saing para siswa di Indonesia.

15 Januari 2021 | Perlindungan Sosial | Komisi VIII

PKS Kritisi Realisasi Anggaran Perlindungan Sosial, Agar Ditingkatkan!

Anggaran Perlindungan Sosial

2018 : Rp. 162,56 Triliun

2019 : Rp. 110 Triliun

2020 : Rp. 128,9 Triliun

2021 : Rp. 110 Triliun

Sumber: Kemenkeu.go.id

(Kementerian Keuangan RI)

Dengan demikian, anggaran perlindungan sosial dari tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan sejumlah Rp. 52,56 Triliun.

Adapun tahun 2019-2020 anggaran mengalami peningkatan sejumlah Rp. 18,9 Triliun.

Namun, di tahun 2021 anggaran mengalami penurunan kembali sejumlah 18.9 Triliun.

Anggaran Kesehatan

2018 : Rp. 111 Triliu

2019 : Rp. 113,6 Triliu

2020 : Rp. 212,5 Triliu

2021 : Rp. 169,7 Trilu

Dengan demikian, anggaran Kesehatan dari tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan sejumlah Rp. 2,6 Triliun. Tahun 2019-2020 anggaran mengalami peningkatan sejumlah Rp. 98,9 Triliun. Namun, tahun anggaran mengalami penurunan di tahun 2021 sejumlah Rp. 42,8 Triliun.

Sumber: Kemenkes.go.id

(Kementerian Kesehatan RI)

PKS KRITISI REALISASI ANGGARAN PERLINDUNGAN SOSIAL, AGAR DITINGKATKAN!



Image : FB/Ruwaidah Anwar

Anggaran Perlindungan Sosial (Rp Triliyun)

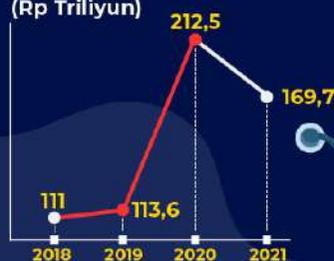


■ Alokasi Anggaran Perlindungan Sosial per Tahun :

- ↑ 2016-2017 : Rp **14,5 Triliun**
- ↑ 2017-2018 : Rp **78,2 Triliun**
- ↑ 2018-2019 : Rp **25,2 Triliun**
- ↑ 2019-2020 : Rp **115,9 Triliun**
- ↓ 2020-2021 : Rp **75,7 Triliun**

Sumber : Kemenkeu.go.id

Anggaran Kesehatan (Rp Triliyun)



■ Alokasi Anggaran Kesehatan per Tahun :

- ↑ 2018-2019 : Rp **2,6 Triliun**
- ↑ 2019-2020 : Rp **98,9 Triliun**
- ↓ 2020-2021 : Rp **42,8 Triliun**

Sumber : Kemkes.go.id



13 Januari 2021 | Energi | Komisi VII

Penurunan Alokasi Subsidi BBM

PKS desak subsidi energi bagi
rakyat kecil

o Anggaran Subsidi LPG 3 Kg

(Rp Triliyun)

o 2018 : 58,1

o 2019 : 58

o 2020 : 50,6

o 2021 : 37,8

o Penurunan Subsidi LPG 3
Kg/tahun

o 2018-2019 : Rp 100 Milyar

o 2019-2020 : 7,4 Triliyun

o 2020-2021 : 12,8 Triliyun

o Anggaran Subsidi Solar

(Rp/Liter)

o 2018 : 500, 2000 (juni)

o 2019 : 2000

o 2020 : 1000

o 2021 : 500

o Alokasi Anggaran subsidi Tiap
Tahun (Rp/Liter)

o 2018-2018 (Juni) : Rp 1.500,-

o 2018 (Juni)-2019 : TETAP

o 2019-2020 ; Rp 1.000,-

o 2020-2021 : Rp 500,-

66. PKS kritisi realisasi anggaran
perlindungan social, agar
ditingkatkan!

o Anggaran perlindungan social

(Rp Triliyun)

o 2016 : 261,2

o 2017 : 275,7

o 2018 : 353,9

o 2019 : 379,1

o Outlook 2020 ; 495,0

o RAPBN 2021 : 419,3

Alokasi anggaran perlindungan
social per tahun:

o 2016-2017 : Rp 14,5 Triliun

o 2017-2018 : Rp 78,2 Triliun

o 2018-2019 : 25,2 Triliun

o 2019-2020 : 115,9 Triliun

o 2020-2021 : 75,7 Triliun

o Anggaran Kesehatan (Triliyun):

o 2018 : 111

o 2019 : 113,6

o 2020 : 212,5

o 2021 : 169,7

Alokasi anggaran Kesehatan
per tahun:

o 2018-2019 : Rp 2,6 Triliun

o 2019-2020 : Rp 98,9 Triliun

o 2020-2021 : RP 42,8 Triliun

Penurunan Alokasi Subsidi BBM

PKS Desak Subsidi Energi Bagi Rakyat Kecil

Anggaran Subsidi LPG 3 Kg
(Rp Triliyun)



- Merujuk pada realisasi anggaran
- Merujuk pada pagu APBN

Penurunan Subsidi LPG 3 Kg/Tahun

- 2018-2019 : Rp **100 Milyar**
- 2019-2020 : Rp **7,4 Triliyun**
- 2020-2021 : Rp **12,8 Triliyun**

Sumber : Laporan APBN 2020

Alokasi Anggaran Subsidi Solar Tiap Tahun (Rp/Liter) :

- 2018-2018 (Juni) : Rp **1.500,-**
- 2018 (Juni)-2019 : **TETAP**
- 2019-2020 : Rp **1.000,-**
- 2020-2021 : Rp **500,-**

Sumber : Migas.esdm.go.id

Anggaran Subsidi Solar
(Rp/Liter)



17 Maret 2021 | Kesehatan | Komisi IX

Indonesia Urutan 85 dari 98 Negara dalam Penanganan Covid-19

Setahun pandemic covid-19 di Indonesia
PKS: Pemerintas bingung, rakyat jadi korban
Lowy Institute, Lembaga Think Thank Australia, mengumpulkan banyak data untuk menghasilkan informasi interaktif baru yang menilai penanganan terhadap corona virus, Jumat (29/1/2021)

Para peneliti melacak angka kasus COVID-19 di setiap negara, serta kematian yang terkonfirmasi dan tingkat pengujian.

Data menunjukkan negara-negara kecil biasanya menangani COVID-19 lebih efektif daripada negara-negara besar.

Berikut urutan Negaranya:

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Selandia Baru | 85. Indonesia |
| 2. Vietnam | 86. india |
| 3. Taiwan | 94. Amerika Serikat |
| 4. Thailand | 98. Brazil |
| 5. Siprus | |
| 6. Rwanda | |
| 7. Islandia | |
| 8. Australia | |
| 9. Latvia | |
| 10. Sri Lanka | |

Note: Tidak termasuk China dengan alasan kurangnya data pengujian yang tersedia untuk umum

INDONESIA URUTAN 85 DARI 98 NEGARA DALAM PENANGANAN COVID-19

Setahun Pandemi Covid-19 di Indonesia,
PKS: Pemerintah Bingung, Rakyat Jadi Korban.

Lowy Institute, lembaga Think Tank Australia, mengumpulkan banyak data untuk menghasilkan informasi interaktif baru yang menilai penanganan terhadap virus Corona, Jumat (29/1/2021).

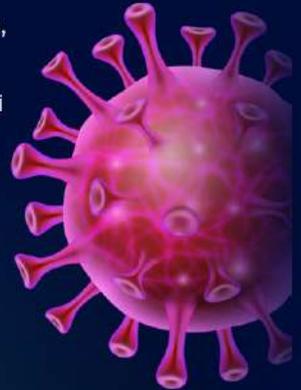
Para peneliti melacak angka kasus COVID-19 di setiap negara, serta kematian yang terkonfirmasi dan tingkat pengujian.

Data menunjukkan negara-negara kecil biasanya menangani COVID-19 lebih efektif daripada negara-negara besar.

Berikut Urutan Negaranya :

1	 Selandia Baru	85	 Indonesia
2	 Vietnam	86	 India
3	 Taiwan	94	 Amerika Serikat
4	 Thailand	98	 Brazil
5	 Siprus		
6	 Rwanda		
7	 Islandia		
8	 Australia		
9	 Latvia		
10	 Sri Lanka		

Note :
Tidak termasuk China dengan alasan kurangnya data pengujian yang tersedia untuk umum.



14 Februari 2021 | Kesehatan | Komisi IX

F-PKS Sukses. Perjuangkan Aspirasi Nakes

Tidak jadi ada potongan untuk insentif NAKES. Untuk mu Dokter & Perawat, perjuangan PKS

NAKES	Insentif NAKES 2020	Dipotong 50%	Tanpa potongan
Dokter Spesialis	15 Juta	7,5 Juta	15 Juta
Dokter Umum & Gigi	10 Juta	5 Juta	10 Juta
Bidan & Perawat	7,5 Juta	3 Juta	7,5 Juta
Teanaga Kesehatan Lainya	5 Juta	2,5 Juta	5 Juta

Perjuangan F-PKS Komisi IX dengan MENKES : jangan ada potongan!, kalua bisa ditambah! Dirjen anggaran Kemenkeu; tidak jadi ada potongan.

F-PKS Sukses. Perjuangkan Aspirasi Nakes.

Tidak jadi ada potongan untuk insentif NAKES.
Untuk mu DOKTER & PERAWAT, perjuangan FPKS!

	Insentif NAKES 2020	MENKEU dipotong 50%	Perjuangan F-PKS di Komisi IX dengan MENKES : Jangan ada potongan!, kalau bisa ditambah!	Dirjen anggaran kemenkeu; tidak jadi ada pemotongan
Dokter Spesialis	15 Juta	7,5 Juta	15 Juta	15 Juta
Dokter Umum & Gigi	10 Juta	5 Juta	10 Juta	10 Juta
Bidan & Perawat	7,5 Juta	3,75 Juta	7,5 Juta	7,5 Juta
Tenaga Kesehatan Lainnya	5 Juta	2,5 Juta	5 Juta	5 Juta



7 Januari 2021 | Kesehatan | Komisi IX

Catatan FPKS Untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Independensi BPOM dalam
me-review uji klinis
Publikasi hasil uji klinis secara
transparan, jujur, dan akuntabel
Vaksin memenuhi syarat, safety,
efficacy, dan quality
Sertifikat halal MUI
Menjungjung tinggi
keselamatan rakyat

Selain strategi diplomasi dalam
mendapatkan vaksin,
pemerintah harus mendukung
pengembangan Vaksin Merah
Putih sebagai bentuk
kemandirian bangsa

CATATAN FPKS UNTUK PENGADAAN VAKSIN COVID-19

- Independensi BPOM dalam me-review uji klinis
- Publikasi hasil uji klinis secara transparan, jujur, dan akuntabel
- Vaksin memenuhi syarat safety, efficacy, dan quality
- Sertifikat halal MUI
- Menjunjung tinggi keselamatan rakyat
- Selain strategi diplomasi dalam mendapatkan vaksin, Pemerintah harus mendukung pengembangan Vaksin Merah Putih sebagai bentuk kemandirian bangsa



25 Maret 2021 | Aspirasi dan Advokasi

PKS Sejak Awal Usulkan dan Perjuangkan, Alhamdulillah 27.303 Guru agama Masuk Rekrutmen PPPK

8 Maret 2021

Tuntut keadilan HNW minta guru agama dimasukan dalam program rekrutmen satu juta guru PPPK.

13 Maret 2021

HNW: janji Mendikbud memasukan guru agama dalam rekrutmen PPPK harus dikawal Kemenag

15 Maret 2021

Dihadapan Mentri Agama saat Raker dengan Komisi VIII, Bukhori Yusuf mendesak Mentri Agama perjuangkan guru agama dalam rekrutmen PPPK 2021.

19 Maret 2021

Advokasi berhasil, sebanyak 27.303 formasi agama masuk dalam rekrutmen PPPK

PKS Sejak Awal Usulkan dan Perjuangkan, Alhamdulillah 27.303 Guru Agama Masuk Rekrutmen PPPK

8 Maret 2021

Tuntut keadilan, HNW minta Guru Agama dimasukkan dalam program rekrutmen satu juta guru PPPK

13 Maret 2021

HNW: Janji Mendikbud Memasukkan Guru Agama dalam Rekrutmen PPPK Harus Dikawal Kemenag

15 Maret 2021

Dihadapan Menteri Agama saat Raker dengan Komisi VIII, Bukhori Yusuf mendesak Menteri Agama perjuangkan guru agama dalam rekrutmen PPPK 2021.

19 Maret 2021

Advokasi berhasil. Sebanyak 27.303 formasi guru agama masuk dalam rekrutmen PPPK



6 April 2022 | RUU TPKS | Baleg

PKS Konsisten Memperjuangkan RUU TPKS

yang Merlarang Perzinaan dan Penyimpangan seksual

Tindak pidana perzinaan sesuai dengan RKUHP yang sudah mengakomodasi ruang lingkup perzinaan secara komprehensif, yaitu yang dilakukan oleh:

- Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya.
- Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suami.
- Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan

dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan.

- Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
- Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

PKS Konsisten Memperjuangkan RUU TPKS yang Melarang Perzinaan dan Penyimpangan Seksual

Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya

Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya

Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan

Tindak Pidana Perzinaan sesuai dengan RKUHP yang sudah mengakomodasi ruang lingkup Perzinaan secara komprehensif, yaitu yang dilakukan oleh:



Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau

Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

12 Juli 2021 | Kesehatan | Komisi IX

Salip India, Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tertinggi di Asia

COVID FACTS	INDONESIA	INDIA
Total kasus	1.078.314	10.753.351
Kasus baru	+12.001	+6.260
Kematian	29.998	154.407
Kematian baru	+270	+95
Sembuh	873.221	10.428.253
Kasus/1000 populasi	3.918	7.748
Kematian/1000 populasi	109	111
Total test	9.238.689	196.588.372
Total test/1000 populasi	33.570	141.644
Populasi	275.206.268	1.387.901.130

Fraksi PKS minta pemerintah secara transparan memperbaiki sistem Kesehatan, komunikasi dan partisipasi public.

Salip India, Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tertinggi di Asia



“ **Fraksi PKS** minta pemerintah secara transparan memperbaiki sistem kesehatan, komunikasi dan partisipasi publik. ”

Source : worldmeters.info, Last updated: January 31, 2021, 23:29 GMT

27 Januari 2021 | Kesehatan | Komisi IX

Memprihatinkan! Indonesia Negara Pertama di ASEAN dengan kasus Corona Tembus 1 Juta.

PKS meminta pemerintah serius atasi Covid-19.

NEGARA	KASUS	MENINGGAL
1. Indonesia	1.012.350	28.468 jiwa
2. Filipina	516.166	10.386 jiwa
3. Malaysia	186.849	689 jiwa
4. Myanmar	137.957	3.069 jiwa
5. Singapura	59.366	29 jiwa
6. Thailand	14.646	75 jiwa
7. Vietnam	1.549	35 jiwa
8. Kamboja	460	-
9. Brunei	175	3 jiwa
10. Laos	44	-

Dari data yang dirilis Satgas Gugus Covid-19 pada Selasa (9/26/21), Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mencatatkan total kasus infeksi virus corona mencapai 1 juta.

MEMPRIHATINKAN! Indonesia Negara Pertama di ASEAN dengan Kasus Corona Tembus 1 Juta.

PKS Meminta Pemerintah Lebih
Serius Atasi Covid-19.



■ Dari data yang dirilis Satgas Gugus Covid-19 pada Selasa (26/1), **Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara** yang mencatatkan total kasus infeksi virus corona mencapai 1 juta.

“Mari kita berdoa semoga Allah SWT menjaga dan melindungi bangsa Indonesia tercinta dari segala marabahaya.”

25 Maret 2021 | Kesehatan | Komisi IX

Pengelolaan sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya

Fraksi PKS mendorong pemerintah melakukan transformasi pengelolaan limbah B3 pada fasilitas layanan Kesehatan.

Selama pandemic covid-19 limbah B3 dari fasyankes meningkat 30%

Kapasitas pengelolaan limbah B3 fasilitas layanan Kesehatan 470.650 kg/hari

Limbah B3 fasilitas layanan Kesehatan 920.224 kg/hari
Gap pengelolaan B3 =
Timbulan-kapasitas fasilitas layanan Kesehatan 449.574 kg/hari

Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya dari Fasilitas Layanan Kesehatan dan Tempat Isolasi Mandiri Pasien (OTG) TIDAK TERTANGANI

Fraksi PKS mendorong Pemerintah melakukan Transformasi Pengelolaan Limbah B3 pada Fasilitas Layanan Kesehatan.

Selama Pandemi Covid-19 Limbah B3 dari fasyankes meningkat

30%

Limbah B3 Fasilitas Layanan Kesehatan

920.224 kg/hari

Kapasitas Pengolahan Limbah B3 Fasilitas Layanan Kesehatan

470.650 kg/hari

Gap Pengolahan B3 = Timbulan-Kapasitas Fasilitas Layanan Kesehatan

449.574 kg/hari



3 Januari 2021 | Kesehatan | Komisi IX

Ditengah Covid BPJS Tetap Naik

Pemerintah tetap menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2021 untuk peserta kelas 3. Dari yang semula 25.500 menjadi 35.000 di tengah masyarakat terdampak Covid-19. 29,12 juta orang penduduk usia kerja terdampak Covid-19

- o 2,56 juta orang menjadi pengangguran.
- o 0,76 juta orang bukan angkatan kerja.
- o 1,77 juta orang sementara tidak bekerja.
- o 24,03 Juta Orang bekerja dengan pengurangan jam kerja. Dari total penduduk usia kerja sebanyak 203,97 juta orang persentase penduduk usia kerja yang terdampak covid-19 sebesar 14,28% sedangkan angkatan kerja yang terdampak sebesar 20,51%

DI TENGAH COVID BPJS TETAP NAIK

Pemerintah tetap menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan mulai **1 Januari 2021** untuk **peserta kelas 3**.

Dari yang semula **Rp 25.500** menjadi **Rp 35.000** di tengah masyarakat masih terdampak Covid-19.

29,12 Juta Orang Penduduk Usia Kerja Terdampak Covid-19



2,56 Juta Orang
menjadi pengangguran



0,76 Juta Orang
bukan angkatan kerja



1,77 Juta Orang
sementara tidak bekerja



24,03 Juta Orang
bekerja dengan pengurangan
jam kerja

“Dari total penduduk usia kerja sebanyak **203,97 juta orang** persentase penduduk usia kerja yang terdampak covid-19 sebesar **14,28%**, sedangkan angkatan kerja yang terdampak sebesar **20,51%**”

Rp 35.000

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



13 September 2021 | Olahraga | Komisi X

Ironi Ditengah Pandemi Dua Mentri Tuai Sensasi

PKS meminta lebih prioritaskan anggaran untuk masyarakat yang terdampak Covid-19

Sosialisasi pembatalan haji 2021, kemenag habiskan dana Rp. 21,7 Miliar. Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf menganggap nilai anggaran itu terbilang fantastik untuk sebuah kegiatan sosialisasi pembatalan haji.

Mentri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi, Nadiem Makarim merencanakan alokasi anggaran 6,5 Miliar untuk

renovasi ruang kerjanya. Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Mustafa Kamal meminta Mendikbudristek untuk menunda renovasi tersebut, sebab menurutnya agenda itu bukan prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa pandemi covid-19.

Anggaran senilai RP.76 Miliar untuk program prioritas kebijakan Kemenag juga menimbulkan pertanyaan karena tidak mencantumkan penjelasan rinci ihwal peruntukannya.

IRONI DI TENGAH PANDEMI DUA MENTERI TUAI SENSASI

PKS Minta Pemerintah Lebih Prioritaskan Anggaran Untuk Masyarakat Yang Terdampak Covid-19

- Sosialisasi pembatalan haji 2021, Kemenag habiskan dana

Rp21,7 Miliar

- **Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf** menganggap nilai anggaran itu terbilang fantastis untuk sebuah kegiatan sosialisasi pembatalan haji.

- Anggaran senilai

Rp76 Miliar

untuk program prioritas kebijakan Kemenag juga menimbulkan pertanyaan karena tidak mencantumkan penjelasan rinci ihwal peruntukannya.

- Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi, **Nadiem Makarim** merencanakan alokasi anggaran

Rp6,5 Miliar

untuk renovasi ruang kerjanya.

- **Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Mustafa Kamal**

meminta Mendikbudristek untuk menunda renovasi tersebut, sebab menurutnya agenda itu bukan prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa pandemi Covid-19.



Yaqut Cholil Qoumas



Nadiem Makarim

28 Agustus 2021 | Olahraga | Komisi X

Ni Nengah Widiasih Atlet Paralimpiade Peraih Medali Perak Pertama

PKS berterima kasih kepada NI Nengah Widiasih yang telah mengharumkan nama Indonesia pada ajang Paralimpiade Tokyo 2020.

o NI Nengah Widiasih raih medali perak di Paralimpiade Tokyo 2020.

o Turun dikelas 41 kg putri pada cabang olahraga para angkat berat. Dengan total angkatan 98 kg.

o Kelahiran : Karangasem, Bali
12 Desember 1992

o Debut:

- Paralimpiade London 2012

- Paralimpiade RIO 2016

dengan raihan medali perunggu.

o Pada Paralimpiade Tokyo 2020:

- Sebanyak 23 atlet Indonesia memulai perjuangannya.

- Kontingan Indonesia memiliki target untuk meraih lima medali di Paralimpiade 2020; satu medali emas dan satu medali perak dari cabang bulu tangkis, tiga medali perunggu dari cabang atletik, tenis meja, dan angkat berat.

NI NENGAH WIDIASIH

ATLET PARALIMPIADE PERAIH MEDALI PERAK PERTAMA

PKS berterima kasih kepada Ni Nengah Widiasih yang telah mengharumkan nama Indonesia pada ajang Paralimpiade Tokyo 2020.

■ **Ni Nengah Widiasih** meraih **medali perak** di Paralimpiade Tokyo 2020.

■ **Turun di kelas 41 kg putri** pada cabang olahraga para angkat berat. Dengan **total angkatan 98 kg**.

Kelahiran:

Karangasem, Bali
12 Desember 1992

Debut:

- Paralimpiade London 2012
- Paralimpiade Rio 2016
dengan raih **medali perunggu**.

Pada Paralimpiade Tokyo 2020:

- Sebanyak **23 atlet Indonesia** memulai perjuangannya.
- **Kontingen Indonesia** memiliki **target** untuk **meraih lima medali di Paralimpiade 2020** ; satu medali emas dan satu medali perak dari cabang bulu tangkis, tiga medali perunggu dari cabang atletik, tenis meja, dan angkat berat.



30 Agustus 2021 | Olahraga | Komisi X

David Jacobs dan Supto Yogo Purnomo Berhasil Menambah Koleksi Medali Indonesia

PKS berterima kasih pada atlet Paralimpiade Tokyo 2020 yang telah berjuang mengharumkan nama Indonesia.

Setelah peraihan medali perak oleh Ni Nengah widiasih, atlet paralimpiade Kembali meraih 2 medali perunggu dan membuat Indonesia berada pada posisi ke-38 klasemen Paralimpiade Tokyo 2020 hingga pukul 14.00 kemarin.

Supto Yogo Purnomo (Kelas T37 cabang atletik 100 meter putra)

- o Lima medali emas pada pekan paralimpiade Nasional 2016

- o Dua medali emas pada Asian para Games 2017

- o Dua medali emas pada Asian Games 2018

- o Dua medali perak pada Asian Youth Para Games 2017

- o Satu medali emas pada word Para Atletik 2018

- o Satu medali perunggu pada Paralimpiade Tokyo 2020

David Jacobs (kelas 10 cabang tenis meja)

- o Emas di SEATTA Games Singapura 2001

- o Perunggu di Paralimpiade London 2012

- o Perunggu di Paralimpiade Tokyo 2020

DAVID JACOBS DAN SAPTO YOGO PURNOMO BERHASIL MENAMBAH KOLEKSI MEDALI INDONESIA

PKS Berterima kasih pada atlet Paralimpiade Tokyo 2020 yang telah berjuang mengharumkan nama Indonesia

- Setelah peraih medali perak oleh Ni Nengah Widiasih, atlet paralimpiade kembali meraih 2 medali perunggu dan membuat Indonesia berada pada posisi ke-38 klasemen Paralimpiade Tokyo 2020 hingga pukul 14.00 kemarin.



Sapto Yogo Purnomo

kelas T37 cabang atletik
100 meter putra

- Lima medali emas pada Pekan Paralimpiade Nasional 2016
- Dua medali emas pada Asean Para Games 2017
- Dua medali emas pada Asian Para Games 2018
- Dua medali perak pada Asian Youth Para Games 2017
- Satu medali emas pada World Para Atletik 2018
- Satu medali perunggu pada Paralimpiade Tokyo 2020



David Jacobs

kelas 10 cabang
tenis meja

- Emas di SEATTA Games Singapura 2001
- Perunggu di Paralimpiade London 2012
- Perunggu di Paralimpiade Tokyo 2020



3 September 2021 | Ristek | Komisi VII

PKS Tolak Vaksin Berbayar dan Komersial

From this : (12 Juli 2021)

· Wakil ketua F-PKS DPR RI Mulyanto menegaskan, pihaknya menolak rencana pemerintah soal vaksin berbayar yang ditawarkan kimia Farma. Menurut dia, dalam kondisi darurat pemerintah seharusnya dapat menyediakan layanan gratis kepada semua masyarakat. Bukan malah menambah beban masyarakat.

From this : (17 Juli 2021)

Anggota Komisi VII DPR RI FPKS Dr. H. Mulyanto, M.Eng mengatakan “Secara prinsip vaksinasi adalah tanggung-jawab pemerintah tidak boleh lepas dari tanggung-jawab tersebut,”

· “Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) akhirnya membatalkan program vaksinasi berbayar untuk kalangan individu. Keputusan tersebut diambil keputusan Jokowi disampaikan langsung oleh Sekretariat Kabinet Ramono Anung do Istana Kepresidenan, dalam sebuah video yang diunggah Youtube secretariat Presiden, seperti dikutip Sabtu (17/17/2021)

PKS TOLAK VAKSIN BERBAYAR DAN KOMERSIAL

FROM THIS : (12 Juli 2021)

Wakil Ketua F-PKS DPR RI Mulyanto menegaskan, pihaknya **menolak rencana pemerintah soal vaksin berbayar** yang ditawarkan Kimia Farma. Menurut dia, dalam kondisi darurat pemerintah seharusnya dapat menyediakan layanan gratis kepada semua masyarakat. Bukan malah menambah beban masyarakat.



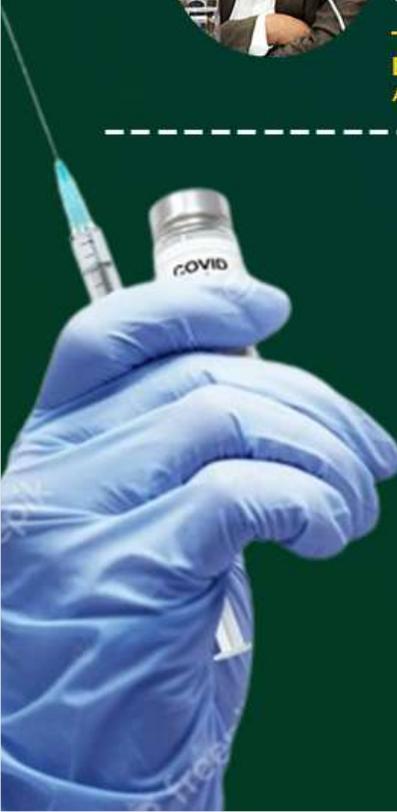
"Secara prinsip **vaksinasi adalah tanggung-jawab pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia** dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pemerintah tidak boleh lepas dari tanggung-jawab tersebut."

Dr. H. Mulyanto, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI FPKS



TO THIS : (17 Juli 2021)

■ **"Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membatalkan program vaksinasi berbayar untuk kalangan individu.** Keputusan tersebut diambil Keputusan Jokowi disampaikan langsung oleh Sekretaris Kabinet ramono Anung di Istana Kepresidenan, dalam sebuah video yang diunggah Youtube Sekretariat Presiden, seperti dikutip Sabtu (17/7/2021).



14 Mei 2021 | Kesehatan | Komisi IX

Mudik Dilarang, 413 WNA China Tiba Di Indonesia

PKS: Masyarakat sedang sensitif, pemerintah harus peka!

Di tengah berlakunya larangan mudik, ratusan WNA asal China masuk ke Indonesia. Mereka tiba di tanah air dalam tiga kloter.

Kloter pertama :

4 Mei 2021 85 orang

Kloter kedua :

6 Mei 2021 171 orang

Kloter ketiga :

8 Mei 2021 157 orang

Mereka menumpang pesawat China southern Airlines CZ387 dari Guangzhou dan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu (8/5/2021).

Dua Positif covid-19

Dua dari 85 WNA China yang masuk Indonesia positif Covid-19. Kedua WNA China tersebut tetap boleh melakukan

perjalanannya dengan syarat telah menyelesaikan isolasi 14 hari di hotel Bandengan, Jakarta Utara. Sementara 83 WNA China lainnya menjalani isolasi mandiri 5x24 jam menjalani isolasi mandiri 5x24 jam di sejumlah hotel yang terbesar di Jakarta.

Aturannya

o WNA yang tiba di Indonesia wajib memenuhi ketentuan yang tertuang dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru.

o Sesuai skema perjanjian bilateral Travel Corridor Arrangement (TCA)

o Dapat pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga.

MUDIK DILARANG, 413 WNA CHINA TIBA DI INDONESIA

PKS: Masyarakat Sedang Sensitif,
Pemerintah Harus Peka!



- Di tengah berlakunya larangan mudik, ratusan WNA asal China masuk ke Indonesia. Mereka tiba di tanah air dalam tiga kloter.

Kloter pertama: 4 Mei 2021

85 orang

Kloter kedua: 6 Mei 2021

171 orang

Kloter ketiga: 8 Mei 2021

157 orang

Mereka menumpang pesawat China Southern Airlines CZ387 dari Guangzhou dan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu (8/5/2021).

■ Dua Positif Covid-19

Dua dari 85 WNA China yang masuk Indonesia positif Covid-19. Kedua WNA China tersebut tetap boleh melakukan perjalanannya dengan syarat telah menyelesaikan isolasi 14 hari di Hotel Bandengan, Jakarta Utara.

Sementara 83 WNA China lainnya menjalani isolasi mandiri 5x24 jam di sejumlah hotel yang tersebar di Jakarta.

■ Aturannya

- WNA yang tiba di Indonesia wajib memenuhi ketentuan yang tertuang dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru.
- Sesuai skema perjanjian bilateral Travel Corridor Arrangement (TCA).
- Dapat pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga.

28 April 2021 | Pendidikan | Komisi X

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Stagnan dan Ketimpangan Semakin Lebar

49. PKS minta pemerintah serius meningkatkan kualitas SDM dengan mempersempit kesenjangan pembangunan manusia hingga tingkat daerah.

Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 71,94 atau tumbuh 0,03 persen (meningkatkan 0,02 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

- o 2016 : 70.90 (+0.16)
- o 2017 : 71.06 (+0.14)
- o 2019 : 71.34 (+0.14)
- o 2020 : 71.47 (+0.13)

Dalam 5 tahun hanya naik (2 poin)

Ada ketimpangan IPM yang besar antara provinsi-provinsi di Indonesia.

- o 22 Provinsi : 70-79 (tinggi)
- o 11 Provinsi : <70 (sedang)
- o DKI Jakarta >80 (sangat tinggi)
- o 2020 : 807.77
- o 2019 : 80.76
- o 2018 : 80.47

IPM mengukur kualitas masyarakat dengan tiga indikator: Usia Harapan Hidup (UHH), lama dan rata-rata mengenyam bangku sekolah, serta jumlah pengeluaran per kapita. Z

INDEKS

PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA STAGNAN DAN KETIMPANGAN SEMAKIN LEBAR

PKS Minta Pemerintah **Serius Meningkatkan Kualitas SDM dengan mempersempit kesenjangan pembangunan manusia hingga tingkat daerah.**

- ▶ Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 71,94 atau tumbuh 0,03 persen (meningkat 0,02 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

- ▶ Ada ketimpangan IPM yang besar antara provinsi-provinsi di Indonesia.



- ▶ Dalam 5 Tahun hanya naik (2 poin)



22 Provinsi
70-79 (tinggi)

11 Provinsi
<70 (sedang)



DKI Jakarta
>80 (sangat tinggi)

- 2020 → 80.77
- 2019 → 80.76
- 2018 → 80.47

- ▶ IPM mengukur kualitas hidup masyarakat dengan tiga indikator: Usia Harapan Hidup (UHH), lama dan rata-rata mengenyam bangku sekolah, serta jumlah pengeluaran per kapita.

22 April 2021 | Pendidikan | Komisi X

Minat Baca Indonesia Masih Rendah

PKS minta pemerintah meningkatkan akses baca yang mudah dan murah.

Angka buta aksara Indonesia makin berkurang dari waktu ke waktu. Akan tetapi, keberhasilan tersebut tidak sejalan dengan tumbuhnya budaya membaca yang membuat tingkat literasi masyarakat Indonesia masih dalam kategori rendah.

Kemendikbud menyusun Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca). Kategori indeks Alibaca dibagi menjadi lima kategori

Sangat tinggi 80,01-100 -
Tinggi 60,10-80,00 -
Sedang 40,01-60,00 9 Provinsi
Rendah 20,01-40,00 24 Provinsi
Sangat Rendah 0-20,00 1 Provinsi

Rata-rata Indeks Alibaca Nasional : 37,32% (rendah)
Penyebab rendahnya minat

dan kebiasaan membaca:

1. Kurangnya akses baca dan daya beli masyarakat, terutama untuk masyarakat Indonesia yang berada di daerah terpencil.
2. Tantangan multisectoral di Indonesia bagian timur, salah satunya karena kesenjangan Pendidikan dan kemampuan dasar. Empat provinsi yang memiliki tingkat literasi terendah : Papua, Sulawesi Barat, NTT & NTB.
3. Perkembangan buku digital dan kurangnya produksi buku berkualitas, karena belum berkembangnya penerbit di daerah, insentif bagi penerbit buku yang kurang adil, dan wajib pajak serta rendahnya royalti bagi penulis.

MINAT BACA INDONESIA MASIH RENDAH

PKS Minta Pemerintah Meningkatkan Akses Baca yang Mudah dan Murah.

- Angka buta aksara Indonesia makin berkurang dari waktu ke waktu. Akan tetapi, keberhasilan tersebut tidak sejalan dengan tumbuhnya budaya membaca yang membuat tingkat literasi masyarakat Indonesia masih dalam kategori rendah.
- Kemendikbud menyusun Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca). Kategori Indeks Alibaca dibagi menjadi lima kategori

Sangat Tinggi	80,01-100	-
Tinggi	60,10-80,00	-
Sedang	40,01-60,00	9 provinsi
Rendah	20,01-40,00	24 provinsi
Sangat Rendah	0-20,00	1 provinsi

Rata-rata Indeks Alibaca Nasional :
37,32 % (Rendah)

- Penyebab rendahnya minat dan kebiasaan membaca :



1 **Kurangnya akses dan daya beli masyarakat,** terutama untuk masyarakat Indonesia yang berada di daerah terpencil.



2 **Tantangan multisektoral** di Indonesia bagian timur, salah satunya karena kesenjangan pendidikan dan kemampuan dasar. Empat provinsi yang memiliki tingkat literasi terendah : Papua, Sulawesi Barat, NTT & NTB.



3 **Perkembangan buku digital dan kurangnya produksi buku berkualitas,** karena belum berkembangnya penerbit di daerah, insentif bagi penerbit buku yang kurang adil, dan wajib pajak serta rendahnya royalti bagi penulis



24 Juni 2022 | Kesehatan | Komisi IX

24 Juni Selamat Hari Bidan Nasional

PKS mengajak masyarakat untuk mengapresiasi jasa bidan Sejarah

Diperingati setiap tanggal 24 Juni, dimulai dari 24 Juni 1951 yaitu konferensi bidan pertama di Jakarta dan pembentukan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Tugas Bidan itu kompleks

o Membantu Ibu lhamil dalam proses persalinan.

o Memantau kehamilan calon ibu.

o Memantau Kesehatan janin, kebugaran Ibu, serta kondisi Kesehatan psikis pasien.

Angka kematian Ibu hamil masih tinggi

o 2010 : 228

o 2011 : 221

o 2012 : 214

o 2013 : 207

o 2014 : 199

o 2015 : 192

o 2016 : 184

o 2017 : 177

2010-2017 angka kematian Ibu di Indonesia mengalami penurunan, tetapi di tahun 2017 masih jauh dari target SDGS 2030 (targetnya hanya 70 kematian per 100 ribu kelahiran).

24 Juni 2021

SELAMAT HARI BIDAN NASIONAL

PKS mengajak masyarakat untuk mengapresiasi jasa bidan.

Sejarah

- Diperingati setiap tanggal 24 Juni, dimulai dari 24 Juni 1951 yaitu konferensi bidan pertama di Jakarta dan pembentukan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

! Angka Kematian Ibu Hamil Masih Tinggi

- 2010 : **228**
- 2011 : **221**
- 2012 : **214**
- 2013 : **207**
- 2016 : **199**
- 2015 : **192**
- 2016 : **184**
- 2017 : **177**

2010-2017 angka kematian ibu di Indonesia mengalami penurunan, tetapi di tahun 2017 masih jauh dari target SDGS 2030 (targetnya hanya 70 kematian per 100 ribu kelahiran).

Tugas Bidan Itu Kompleks

- Membantu Ibu hamil dalam proses persalinan.
- Memantau kehamilan calon Ibu.
- Memantau kesehatan janin, kebugaran Ibu, serta kondisi kesehatan psikis pasien.



9 Juni 2022 | Pendidikan | Komisi X

Penurunan Rangking PTN Di Indonesia

PKS meminta pemerintah untuk menaikkan kualitas Pendidikan dan perguruan tinggi di Indonesia sesuai dengan kenaikan APBN.

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Indonesia mengalami penurunan peringkat dunia dan saat ini masih tertinggal dari perguruan tinggi (PT) tetangga. Padahal, APBN untuk perguruan tinggi semakin meningkat.

APBN Pendidikan : (Triliyun)

- 2018 : 444,131

- 2019 : 492,5

- 2020 : 549,5

- 2021 : 550

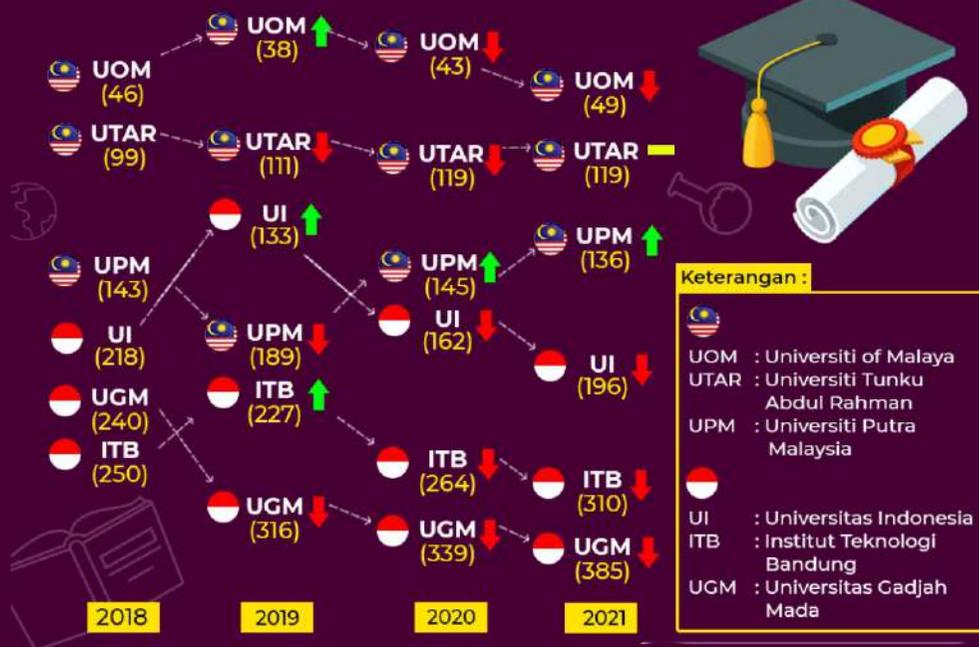
PENURUNAN RANKING PTN DI INDONESIA

PKS meminta pemerintah untuk menaikkan kualitas pendidikan dan perguruan tinggi di Indonesia sesuai dengan kenaikan APBN.

■ Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Indonesia mengalami penurunan peringkat dunia dan saat ini masih tertinggal dari Perguruan Tinggi (PT) tetangga. Padahal, APBN untuk perguruan tinggi semakin meningkat.

■ Pembanding dengan Universitas Tetangga versi Times Higher Education 2021 Kategori Asia University Ranking

APBN Pendidikan: (Trilyun)



7 Juni 2021 | Kesehatan | Komisi IX

Saudi Belum Memutuskan Soal Kuota Haji Untuk Jamaah Dari Luar Saudi

PKS : Pemerintah harus memaksimalkan usaha dan peluang, perjuangkan hak umat untuk berangkat haji 2021. Saat ini hanya 11 negara yang diperbolehkan masuk Saudi Arabia untuk keperluan Tourismw dan Kerja, Yaitu:

1. Amerika Serikat
2. Inggris
3. Jepang
4. Prancis
5. Portugal
6. Jerman
7. Irlandia
8. Italia
9. Uni Emirat Arab
10. Swedia
11. Swiss

SAUDI BELUM MEMUTUSKAN SOAL KUOTA HAJI UNTUK JAMAAH DARI LUAR SAUDI

**PKS : Pemerintah Harus Memaksimalkan
Usaha dan Peluang, Perjuangkan Hak Umat
Untuk Berangkat Haji 2021.**

Saat ini hanya 11 negara yang diperbolehkan masuk
Saudi Arabia untuk keperluan Tourisme dan Kerja, yaitu:



Amerika
Serikat



Prancis



Irlandia



Swedia



Inggris



Portugal



Italia



Swiss



Jepang



Jerman



Uni Emirat
Arab



13 Juli 2021 | Kesehatan | Komisi IX

Lonjakan Kasus, WNI Dilarang Masuk Ke Negara Lain

PKS Meminta pemerintah untuk mempercepat vaksinasi dan tegas dalam menangani lonjakan kasus covid-19.

Indonesia mencatat rekor kematian harian Covid-19 tertinggi di dunia dengan 1.007 jiwa pada Minggu (11/7).

Tingginya angka kasus Covid-19 di Indonesia membuat 6 negara menutup gerbang untuk WNI

Negara yang menutup gerbang untuk Indonesia

Arab Saudi (3 Februari 2021)

UEA (11 Juli 2021)

Oman (9 Juli 2021)

Singapura (12 Juli 2021)

Hong Kong (23 Juni 2021)

Taiwan (4 Desember 2020)

Lonjakan kasus (per 11 Juli 2021)

Kasus aktif : 378.590

Kasus baru :38.391

Kematian per hari : 1007 jiwa

Total meninggal : 66.464 jiwa

Total yang sudah divaksin

Tahap 1: 36.340.962 orang

Tahap 2: 15.053.366 orang

LONJAKAN KASUS, WNI DILARANG MASUK KE NEGARA LAIN

PKS Meminta Pemerintah untuk
Mempercepat Vaksinasi dan Tegas
dalam Menangani Lonjakan
Kasus Covid-19.

- Indonesia mencatat rekor kematian harian Covid-19 tertinggi di dunia dengan 1.007 jiwa pada Minggu (11/7).

Tingginya angka kasus Covid-19 di Indonesia membuat 6 negara menutup gerbang untuk WNI.



- Negara yang menutup gerbang untuk Indonesia

 **Arab Saudi**
3 Februari 2021

 **Singapura**
12 Juli 2021

 **UEA**
11 Juli 2021

 **Hong Kong**
23 Juni 2021

 **Oman**
9 Juli 2021

 **Taiwan**
4 Desember 2020



- Lonjakan Kasus (per 11 Juli 2021)

Kasus Aktif **378.590** Kasus Baru **38.391**

Kematian per Hari **1007** jiwa Total Meninggal **66.464** jiwa

- Total yang sudah divaksin

Tahap 1 **36.340.962** orang

Tahap 2 **15.053.366** orang



23 Juli 2021 | Momentum

23 Juli Hari Anak Nasional

PKS: Mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan perhatian pada permasalahan anak

Hari Anak Nasional dapat menjadi refleksi menyeluruh untuk menyelesaikan berbagai persoalan anak Indonesia. Terbesar anak adalah Kesehatan dan kekerasan

DATA KESEHATAN: (satgas covid dan unicef) 12,6% Anak di Indonesia positif covid-19, 45,4 juta kekurangan nutrisi, 149,2 juta mengalami stunting, 38,9 juta mengalami kegemukan.

DATA KEKERASAN : (periode 1 Januari-9 Juni 2021) 3.314 kasus, 3.683 korban

Jenis kekerasan : Seksual, fisik, Emosional

Berdasarkan data BPS, anak-anak adalah mereka yang berumur kurang dari 16 tahun.

23 Juli

HARI ANAK NASIONAL

PKS: Mendorong Pemerintah untuk mengoptimalkan perhatiannya pada permasalahan anak

- Hari Anak Nasional dapat menjadi refleksi menyeluruh untuk menyelesaikan berbagai persoalan anak Indonesia. Mengingat masa pandemi saat ini, salah satu permasalahan terbesar anak adalah kesehatan dan kekerasan

- **DATA KESEHATAN:**
(satgas covid dan unicef)



12,6 %

Anak di Indonesia Positif Covid-19



45,4 JUTA

Kekurangan Nutrisi



149,2 JUTA

Mengalami Stunting



38,9 JUTA

Mengalami Kegemukan

- **DATA KEKERASAN**
(Periode 1 Januari - 9 Juni 2021)

3.314 kasus

3.683 korban

- **Jenis Kekerasan**

Seksual

Fisik

Emo-
sional

- Berdasarkan data BPS, anak-anak adalah mereka yang berumur kurang dari 16 tahun.



25 Juli 2021 | Olahraga

Eko Yuli Irawan Tambah Medali Indonesia Di Olimpiade Tokyo 2020

PKS mengucapkan selamat kepada Eko Yuli yang telah meraih medali perak di Olimpiade Tokyo 2021 Lifter Indonesia Eko Yuli merebut medali perak Olimpiade Tokyo 2020 di kelas 61 kilogram (kg) Minggu (25/7/2021).

Lifter berusia 32 tahun itu berhasil meraih angkatan snatch terbaik dengan beban 137 kg dan clean & jerk terbaik 165 kg.

Total angkatan 302 kg. Atlet Indonesia pertama yang

berhasil meraih empat medali di ajang Olimpiade.

Prestasi sebelumnya di Olimpiade

Olimpiade Beijing 2008 turun di kelas 56 kg total angkatan 288 kg medali perunggu

Olimpiade London 2012 turun di kelas 62 kg total angkatan 312 kg medali perak.

Peraih medali cabang olahraga angkat besi kelas 61 kilogram (kg).

Li Fabin (China) emas (313 kg)
Eko Yuli (Indonesia) perak (302 kg)

Igor Son (Kazakhstan) perunggu (294)

EKO YULI IRAWAN

TAMBAH MEDALI INDONESIA DI OLIMPIADE TOKYO 2020!

PKS Mengucapkan Selamat Kepada
Eko Yuli yang Telah Meraih Medali Perak
di Olimpiade Tokyo 2021!

■ Lifter Indonesia **Eko Yuli** merebut **medali perak** Olimpiade Tokyo 2020 di kelas 61 kilogram (kg) Minggu (25/7/2021).

■ Lifter **berusia 32 tahun** itu berhasil meraih angkatan **snatch** terbaik dengan beban **137 kg** dan **clean & jerk** terbaik **165 kg**.

■ Total angkatan **302 kg**.

■ **Atlet Indonesia pertama** yang berhasil meraih **empat medali** di ajang **Olimpiade**

Prestasi sebelumnya di Olimpiade

- **Olimpiade Beijing 2008**
Turun di kelas 56 kg
Total angkatan 288 kg
Medali Perunggu
- **Olimpiade London 2012**
Turun di kelas 62 kg
Total angkatan 317 kg
Medali Perunggu
- **Olimpiade Rio 2016**
Turun di kelas 62 kg
Total angkatan 312 kg
Medali Perak

Peraih medali cabang olahraga angkat besi kelas 61 kilogram (kg).

	Li Fabin (China) Emas (313 kg)	
	Eko Yuli (Indonesia) Perak (302 kg)	
	Igor Son (Kazakhstan) Perunggu (294 kg)	



28 Juli 2021 | Olahraga

Rahmat Erwin Raih Medali Perunggu Olimpiade Tokyo 2020

PKS mengucapkan selamat kepada Rahmat Erwin yang telah meraih medali perunggu di Olimpiade Tokyo 2020!

Lifter Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah, sukses meraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020. Rabu (28/7/2021).

Turun di kelas 73 kg clean & jerk seberat 190 kg. total angkatan 342 kg.

Keberhasil meraih medali perunggu sekaligus membuat Rahmat sukses menuntaskan mimpi sang ayah, Erwin Abdullah.

saya masih ingat terus kata-kata bapak, “Mat, kamu mau rasain yang pernah bapak rasain di Olimpiade. Soalnya, bapak belum sempat bertanding” “kini saya tak Cuma melakukannya di Olimpiade Tokyo 2020, tetapi juga pulang membawa medali” ucap Rahmat Erwin Abdullah.

Prestasi lain

- SEA Games 2019 meraih Medali Emas

Peraih medali cabang olahraga angkat besi kelas 73 kilogram (kg).

Shi Zhiong (China) emas (342 kg)

Mayora Perina (Venezuela) perak (246 kg)

Rahmat Erwin (Indonesia) Perunggu (342 kg)

RAHMAT ERWIN

RAIH MEDALI PERUNGGU OLIMPIADE TOKYO 2020!



PKS Mengucapkan Selamat Kepada Rahmat Erwin yang Telah Meraih Medali Perunggu di Olimpiade Tokyo 2020!

- Lifter Indonesia, **Rahmat Erwin Abdullah**, sukses meraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020. Rabu (28/7/2021)

- Turun di kelas 73 kg
Angkatan snatch 152 kg
Clean & jerk seberat 190 kg.
Total angkatan 342 kg.

- Keberhasil meraih medali perunggu sekaligus membuat **Rahmat sukses menuntaskan mimpi sang ayah**, Erwin Abdullah.

Prestasi Lain

- **SEA Games 2019** meraih **Medali Emas**

“ Saya masih ingat terus kata-kata bapak, “Mat, kamu mau rasain yang pernah bapak rasain di Olimpiade. Soalnya, bapak belum sempat bertanding”

“Kini, saya tak cuma melakukannya di Olimpiade Tokyo 2020, tetapi juga **pulang membawa medali**” ucap Rahmat Erwin Abdullah.



Peraih medali cabang olahraga angkat besi kelas 73 kilogram (kg).



Shi Zhiyong (China)
Emas (364 kg)



Mayora Pernia (Venezuela)
Perak (346 kg)



Rahmat Erwin (Indonesia)
Perunggu (342 kg)



28 Juli 2021 | Kesehatan | Komisi IX

Kasus Covid-19 Terus Melonjak Empat Negara Ini Tarik Warganya Dari Indonesia

PKS meminta pemerintah untuk menekan lonjakan kasus Covid 19

Taiwan

Melansir focus Taiwan, 14 Juli 2021, sebuah pesawat sewaan rencananya membawa para pengusaha Taiwan dan ekspatriat pulang dari Indonesia pada 28 Juli 2021. Kamar dagang Taiwan di Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Surabaya dan Jawa Timur menyarankan anggota senior mereka kembali ke Taiwan.

Jepang

Pesawat All Nippon Airways membawa sekitar 50 ekspatriat Jepang dan anggota keluarganya meninggalkan Indonesia di tengah gelombang varian Delta pada 14 Juli 2021.

Arab Saudi

Dikutip dari Arab news, Kementrian Pertahanan Arab Saudi telah berhasil

memindahkan seorang warga negaranya dari Jakarta ke Riyadh. Arab Saudi juga melarang warganya berpergian ke Indonesia secara langsung atau tidak langsung.

Vietnam

Melansir laman kedutaan besar Vietnam di Indonesia, mereka sedang melakukan pendataan untuk mengangkut warganya dari Indonesia dikarenakan lonjakan kasus Covid-19.

Sudah hamper 2 tahun, kasus covid-19 di Indonesia belum juga membaik. Justru dengan adanya varian baru yang masuk ke Indonesia, membuat kasusnya kian melonjak.

Data kasus Covid-19 di Indonesia per 25 Juli 2021
Kasus baru = +38.679
Total kasus = 3,17 Juta

KASUS COVID-19 TERUS MELONJAK EMPAT NEGARA INI TARIK WARGANYA DARI INDONESIA

**PKS meminta Pemerintah Untuk
menekan lonjakan Kasus Covid 19**

Taiwan

Melansir Focus Taiwan, 14 Juli 2021, sebuah pesawat sewaan rencananya membawa para pengusaha Taiwan dan ekspatriat pulang dari Indonesia pada 28 Juli 2021. Kamar dagang Taiwan di Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Surabaya dan Jawa Timur menyarankan anggota senior mereka kembali ke Taiwan.

Jepang

Pesawat All Nippon Airways membawa sekitar 50 ekspatriat Jepang dan anggota keluarganya meninggalkan Indonesia di tengah gelombang varian Delta pada 14 Juli 2021.

Arab Saudi

Dikutip dari Arab News, Kementerian Pertahanan Saudi telah berhasil memindahkan seorang warga negaranya dari Jakarta ke Riyadh. Arab Saudi juga melarang warganya bepergian ke Indonesia secara langsung atau tidak langsung.

Vietnam

Melansir laman Keduataan Besar Vietnam di Indonesia, mereka sedang melakukan pendataan untuk mengangkut warganya dari Indonesia dikarenakan lonjakan kasus Covid-19.



● **Sudah hampir 2 tahun, kasus Covid-19 di Indonesia belum juga membaik.** Justru dengan adanya varian baru yang masuk ke Indonesia, membuat kasusnya kian melonjak.

● **Data kasus Covid-19 di Indonesia per 25 Juli 2021**

Kasus Baru	Total Kasus
+38.679	3,17 Juta

24 Juli 2021 | Olahraga

Windy Cantika Sumbang Medali Pertama Indonesia Di Olimpiade Tokyo 2020

PKS mengucapkan selamat kepada Windy Cantika Aisah yang telah mengharumkan bangsa Indonesia

Windy Cantika Aisah menjadi atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih medali di Olimpiade Tokyo 2020.

Lifter berusia 19 tahun itu mengawali penampilan dengan mencoba mengangkat beban seberat 84 kilogram saat snatch

Windi Cantika Aisah berhak mendapat medali perunggu setelah menepati peringkat ketiga dengan total angkatan 194 kg Sabtu (24/7/2021).

Peraih medali cabang olahraga angkat besi kelas 49 putri.

Hou Zhihui emas (210 kg)
Chanu Mirabai perak (202 kg)
Windy Cantika A perunggu (193 kg)

WINDY CANTIKA

SUMBANG MEDALI PERTAMA INDONESIA DI OLIMPIADE TOKYO 2020!

PKS Mengucapkan Selamat Kepada Windy Cantika Aisah yang Telah Mengharumkan Bangsa Indonesia

■ Windy Cantika Aisah menjadi **atlet Indonesia pertama** yang berhasil meraih medali di Olimpiade Tokyo 2020.

■ Lifter **berusia 19 tahun** itu mengawali penampilan dengan mencoba mengangkat beban seberat **84 kilogram saat snatch**

■ **Windy Cantika Aisah** berhak mendapatkan medali perunggu setelah menempati peringkat ketiga dengan **total angkatan 194 kg** Sabtu (24/7/2021).

Peraih medali cabang olahraga angkat besi kelas 49 putri.



Hou Zhihui
Emas (210 kg)



Chanu Mirabai
Perak (202 kg)



Windy Cantika A
Perunggu (194 kg)



2 Agustus 2021 | Olahraga

Greysia-Apriyani Raih Medali Emas Olimpiade Tokyo 2020

PKS Mengucapkan selamat kepada Greysia dan Apriyani yang telah meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020

Ganda putri Indonesia Greysia Polli/Apriyani Rahayu rebut medali emas Olimpiade Tokyo 2020

Ini merupakan pertama kalinya dalam sepanjang sejarah tampil di Olimpiade, pebulu tangkis Indonesia meraih medali emas /Olimpiade di nomor ganda putri

Bermain di Musashino Forest Sport Plaza, Senin (1/8/2021), Greysia Polli/Apriyani Rahayu menang dengan skor 21-19 & 21-15

Menang dua Gim langsung dengan skor

Greysia Polli/
Apriyani Rahayu = 21-21

Chen Qingchen/
Jia Yifan = 19-15

GREYSIA-APRIYANI RAIH MEDALI EMAS OLIMPIADE TOKYO 2020!

PKS Mengucapkan Selamat Kepada Greysia dan Apriyani yang Telah Meraih Medali Emas di Olimpiade Tokyo 2020!

■ Ganda Putri Indonesia Greysia Polii/ Apriyani Rahayu rebut **medali emas** Olimpiade Tokyo 2020.

■ Bermain di Musashino Forest Sports Plaza, Senin (2/8/2021), **Greysia Polii/ Apriyani Rahayu** menang dengan skor 21-19 & 21-15.

■ Ini merupakan **pertama kalinya sepanjang sejarah** tampil di Olimpiade, pebulu tangkis Indonesia meraih medali emas Olimpiade di nomor ganda putri.

Apriyani Rahayu

Greysia Polii



Menang dua Gim langsung dengan skor



**Greysia Polii/
Apriyani Rahayu**

21 21



**Chen Qingchen/
Jia Yifan**

19 15



12 Juli 2021 | Isu Ketenagakerjaan | Komisi IX

Pekerjaan di Indonesia Masih Berproduktivitas Rendah

PKS Meminta Pemerintah untuk Mendorong Pertumbuhan Produktivitas Pekerja yang Lebih Menyeluruh.

Penyerapan tenaga kerja tertinggi selama dua dekade adalah 67,5% pemuda dan orang dewasa dalam angkatan kerja dan pengangguran turun ke level terendah di 5,2% terjadi pada tahun 2019.

Sayangnya, meskipun lapangan pekerjaan dibuka sangat banyak, Indonesia tidak dapat menciptakan pekerjaan kelas menengah dengan gaji sekitar 3,8 juta/bulan.

Faktor :

- Tenaga kerja belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan yang diperlukan untuk mengambil pekerjaan baru.
- Belum ada peningkatan kreativitas pengambil kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja kelas menengah.

1. Di Indonesia, 2/3 dari pekerjaannya merupakan pekerjaan berkualitas rendah, seperti di sektor pertanian atau jasa berkualitas rendah (low quality)

2. Di antara 85 juta orang yang berpenghasilan, hanya 13 juta yang memperoleh pendapatan yang cukup untuk keluarga dengan 4 orang.

3. Di antara 85 juta orang yang berpenghasilan, hanya 3,5 juta pekerja yang dapat menikmati manfaat sosial penuh

PEKERJAAN DI INDONESIA MASIH BERPRODUKTIVITAS RENDAH

PKS Meminta Pemerintah untuk Mendorong Pertumbuhan Produktivitas Pekerja yang Lebih Menyeluruh.



- Penyerapan tenaga kerja tertinggi selama dua dekade adalah **67,5%** pemuda dan orang dewasa dalam angkatan kerja dan pengangguran turun ke level terendah di **5,2%** terjadi pada tahun 2019.
- Meskipun lapangan pekerjaan dibuka sangat banyak, **Indonesia tidak dapat menciptakan pekerjaan kelas menengah** dengan gaji sekitar **3,8 juta/bulan**.

Faktor:

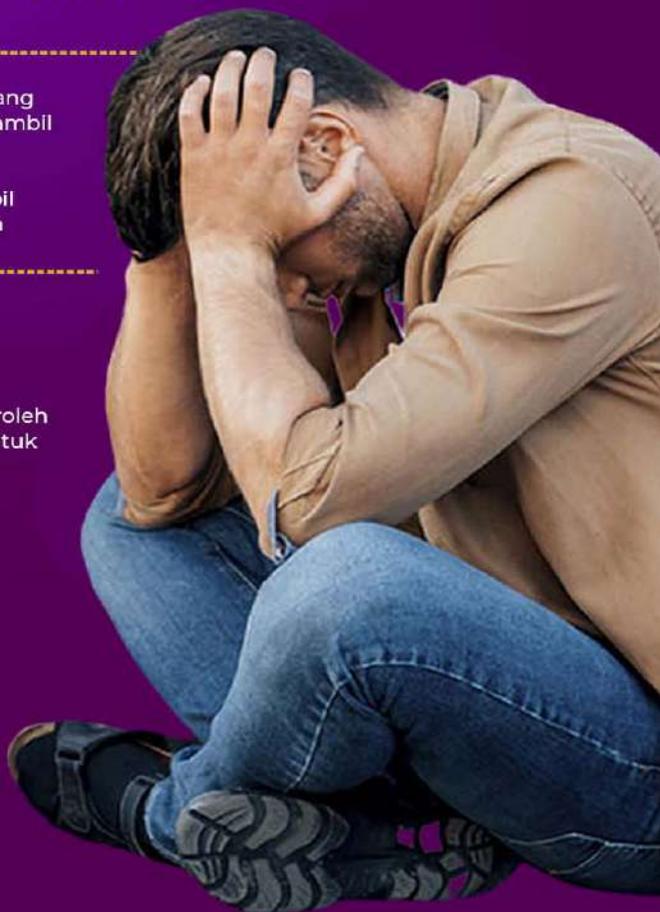
- Tenaga kerja belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan yang diperlukan untuk mengambil pekerjaan baru
- Belum ada peningkatan kreativitas pengambil kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja kelas menengah.



2/3 merupakan pekerjaan berkualitas rendah

Dari **85 JUTA ORANG** berpenghasilan

- hanya **13 juta** yang memperoleh pendapatan yang cukup untuk keluarga dengan 4 orang.
- hanya **3,5 juta** pekerja yang dapat menikmati manfaat sosial penuh.



1 Mei 2022 | Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Komisi IX

Perjuangan Fraksi PKS bersama Buruh dan Elemen Masyarakat Lain untuk Tolak Permenaker Jaminan Hari Tua No.2 Tahun 2022 Berhasil!

Pemerintah Merevisi, JHT Bisa Dicairkan Tanpa Menunggu Usia 56 Tahun. Alhamdulillah.

12 Februari 2022

Anggota Komisi IX DPR RI FPKS, Netty Prasetyani meminta pemerintah agar mengkaji ulang, bahkan mencabut Permenaker No.2 Tahun 2022.

24 Februari 2022

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, memutuskan akan merevisi Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang dana jaminan hari tua (JHT).

21 Februari 2022

Presiden Jokowi memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Keduanya dipanggil terkait dengan polemik JHT yang baru bisa cair di usia 56 tahun.

28 April 2022

Pemerintah resmi merevisi aturan mengenai JHT dengan menerbitkan Permenaker No 4 Tahun 2022. Melalui aturan baru tersebut, dana JHT bisa dicairkan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan tanpa menunggu usia 56 tahun.

Perjuangan Fraksi PKS bersama Buruh dan Elemen Masyarakat Lain untuk **Tolak Permenaker Jaminan Hari Tua No.2 Tahun 2022 BERHASIL!** Pemerintah Merevisi, JHT Bisa Dicairkan Tanpa Menunggu Usia 56 Tahun. Alhamdulillah.

12 Februari 2022

Anggota Komisi IX DPR RI FPKS, **Netty Prasetiyani** meminta pemerintah agar mengkaji ulang, bahkan mencabut Permenaker No.2 Tahun 2022.

24 Februari 2022

Menteri Tenaga Kerja **Ida Fauziah**, memutuskan akan merevisi Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang dana jaminan hari tua (JHT).

28 April 2022

Pemerintah resmi merevisi aturan mengenai JHT dengan menerbitkan Permenaker No 4 Tahun 2022. Melalui aturan baru tersebut, dana JHT bisa dicairkan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan **tanpa** menunggu usia 56 tahun.

21 Februari 2022

Presiden Jokowi memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian **Airlangga Hartarto** dan Menteri Ketenagakerjaan **Ida Fauziah**. Keduanya dipanggil terkait dengan polemik JHT yang baru bisa cair di usia 56 tahun.



14 Februari 2022 | Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Komisi IX

PHK dipermudah, JHT dipersulit PKS: Cabut Permenaker JHT Hak Milik Pekerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari tua (PHD) yang disahkan pada 4 Februari 2022 lalu, bahwa manfaat pembayaran JHT baru bisa dicairkan saat peserta BPIS Ketenagakerjaan berusia 56 tahun.

Padahal di peraturan sebelumnya di Permenaker No.19 Tahun 2015, bahwa manfaat JHT dapat diambil setelah masa tunggu 1 bulan pasca terbitnya surat keterangan pengunduran diri atau PHK dari perusahaan.

Per 7 Agustus 2021 : 538.305 orang telah terkena PHK.

Kemnaker memproyeksikan hingga akhir tahun 2021 894.579 orang bisa terkena PHK.

Klaim BPIS Ketenagakerlaar melonjak signifikan akibat Covid-19. Peningkatan ini seiring banyaknya PHK dan angka kematian selama pandemi.

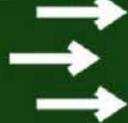
Total Klaim HT berdasar tahun
2021 : Rp 42,89 trillun
2020 : Rp 36,45 triliun
2019 : Rp 29,70 triliun
2018 : Rp 27,6 trillun

PHK dipermudah, JHT dipersulit

PKS: CABUT PERMENAKER, JHT HAK MILIK PEKERJA

- Berdasarkan **Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 2 Tahun 2022** tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang disahkan pada 4 Februari 2022 lalu, bahwa manfaat **pembayaran JHT baru bisa dicairkan saat peserta BPJS Ketenagakerjaan berusia 56 tahun.**

- Padahal **di peraturan sebelumnya** di Permenaker No.19 Tahun 2015, bahwa **manfaat JHT dapat diambil setelah masa tunggu 1 bulan** pasca terbitnya surat keterangan pengunduran diri atau PHK dari perusahaan.



- Per 7 Agustus 2021 **538.305** orang telah terkena PHK
- Kemnaker memproyeksikan hingga akhir tahun 2021 **894.579** orang bisa terkena PHK

- Klaim BPJS Ketenagakerjaan melonjak signifikan akibat Covid-19. Peningkatan ini seiring banyaknya PHK dan angka kematian selama pandemi.

Total klaim JHT berdasar tahun

2021 : Rp 42,89 triliun
2020 : Rp 36,45 triliun
2019 : Rp 29,70 triliun
2018 : Rp 27,6 triliun



16 Juli 2021 | Kesehatan | Komisi IX

Stok Alat Penunjang Kesehatan Krisis
Negara Lain Bantu Indonesi

PKS berterimakasih atas bantuan internasional dalam menangani Covid-19 di Indonesia.

Melonjaknya kasus Covid-19,
membuat beberapa negara
mengulurkan tangan untuk
Indonesia.

1. Australia

- 1.000 ventilator
- 700 konsentrator oksigen
- 170 oksigen
- 40.000 alat tes Covid-19 rapid antigen
- 2,5 juta dosis vaksin AstraZeneca

2. Amerika Serikat

- 4 juta dosis vaksin Moderna

3. Jepang

- 998.400 dosis vaksin AstraZeneca

4. Singapura

- 256 tabung oksigen
- 200 ventilator
- Sarung tangan & APD
- Tutup kepala dan alat kesehatan lainnya

5. Uni Emirat Arab

- 500 ribu vaksin Sinopharm dan berencana mengirim 250 ribu dosis lagi

STOK ALAT PENUNJANG KESEHATAN KRISIS NEGARA LAIN BANTU INDONESIA

PKS berterimakasih atas bantuan internasional dalam menangani Covid-19 di Indonesia.

■ Melonjaknya kasus Covid-19, membuat beberapa negara mengulurkan tangan untuk Indonesia.

Australia

- 1.000 ventilator
- 700 konsentrator oksigen
- 170 oksigen
- 40.000 alat tes Covid-19 rapid antigen
- 2,5 juta dosis vaksin AstraZeneca

Amerika Serikat

- 4 juta dosis vaksin Moderna

Jepang

- 998.400 dosis vaksin AstraZeneca

Singapura

- 256 tabung oksigen
- 200 ventilator
- Sarung tangan & APD
- Tutup kepala dan alat kesehatan lainnya

Uni Emirat Arab

- 500 ribu vaksin Sinopharm dan berencana mengirim 250 ribu dosis lagi



13 Agustus 2021 | Pandemi Covid 19

Suara PKS untuk Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Selain memberikan kontribusi untuk rakyat, FPKS juga menyuarkan gagasan-gagasannya ke Pemerintah.

1. Meluncurkan buku putih penanganan COVID-19 di Indonesia
2. Meminta rapid test covid-19 khusus anggota DPR dibatalkan
3. Meminta Pemerintah membuat kebijakan pro tenaga kesehatan
4. Meminta Pemerintah untuk mengundur pemindahan Ibukota
5. Meminta Pemerintah agar APBN berfokus pada penanganan Covid-19
6. Meminta penutupan pintu penerbangan internasional bagi WNA dan TKA pada masa PPKM
7. Mendukung DPR dijadikan Gedung darurat
8. Mendukung dan mendorong kegiatan vaksinasi
9. Menolak PMN bagi BUMN jika tidak terkait pelayanan masyarakat
10. Menolak UU Cipta Kerja
11. Menolak isoman di hotel untuk anggota DPR RI
12. Menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 atau Perpu Covid-19 menjadi Undang-undang

KONTRIBUSI PKS DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Apa saja yang sudah dilakukan PKS untuk membantu percepatan penanganan Covid-19?

Di tengah situasi pandemi saat ini, PKS memandang perlu adanya aksi nyata, berkolaborasi dan bersinergi bersama-sama untuk menangani Covid-19.

Kontribusi PKS untuk rakyat:



Memberikan bantuan paket 741.410 berupa bingkisan sembako dan donasi.



Menyumbang masker N95, masker kain, masker medis, hazmat, hand sanitizer dan disinfektan untuk tenaga medis.



Melakukan penyemprotan disinfektan di ratusan tempat ibadah.



Menyukseskan vaksinasi sebagai upaya perlindungan dan pembentukan kekebalan kolektif.



Melakukan pemotongan gaji anggota di bulan Maret, April 2020, dan Agustus 2021 untuk membantu rakyat yang terdampak Covid-19 serta bencana banjir di NTT, NTB, Kalimantan Selatan dan gempa di Sulawesi Barat. **Di awal Pandemi PKS salurkan bantuan senilai Rp 68,9 Miliar** untuk Penanganan Covid-19.

POW!



Menyalurkan paket isoman untuk ribuan warga yang disalurkan diberbagai wilayah Indonesia.



Membagikan tabung oksigen dan uang operasional kepada Tim Satgas Covid-19.



Menyiapkan mobil Ambulance dan tim satgas untuk penanganan kasus Covid-19.

7 Agustus 2021 | Pandemi Covid 19

Indonesia Tembus 100 Ribu Kematian, Pertama di ASEAN & Kedua di Asia

PKS Desak Pemerintah Serius
Menekan Angka Kematian

Kasus kematian Covid-19 di Indonesia pada Jum'at (6/8/2021) menembus 104.256 kasus. Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan kasus kematian di atas 100.000 di Asia Tenggara.

Data kasus kematian di Asia Tenggara :

1. Indonesia : 104.256
2. Filipina : 28.427
3. Myanmar : 10.988
4. Malaysia : 10.019
5. Thailand : 5.854
6. Vietnam : 2113
7. Kamboja : 1.521
8. Singapura : 41
9. Timor Leste : 26
10. Laos : 7
11. Brunei : 3

Dalam lingkup Asia, Indonesia menjadi negara tertinggi kedua kasus kematian akibat Covid-19.

1. India.....426.785 kasus
2. Indonesia..... 104.256 kasus
3. Iran..... 92.628 kasus

Indonesia Tembus 100 Ribu Kematian Pertama di ASEAN & Kedua di Asia

PKS Desak Pemerintah Serius Menekan Angka Kematian

- Kasus kematian Covid-19 di Indonesia pada Jum'at (6/8/2021).

104.256 kasus

- Satu-satunya negara dengan kasus kematian di atas 100.000 di Asia Tenggara.

- Data kasus kematian di Asia Tenggara:

1.  **Indonesia : 104.256**
2.  Filipina : 28.427
3.  Myanmar : 10.988
4.  Malaysia : 10.019
5.  Thailand : 5.854
6.  Vietnam : 2113
7.  Kamboja : 1.521
8.  Singapura : 41
9.  Timor Leste : 26
10.  Laos : 7
11.  Brunei : 3

- Dalam lingkup Asia, Indonesia menjadi negara tertinggi kedua kasus kematian akibat Covid-19.

	India.....	426.785 kasus
	Indonesia.....	104.256 kasus
	Iran.....	92.628 kasus



7 Januari 2021 | Pandemi Covid 19

Pemerintah Datangkan BARS
Sinovac Tahap II SINOVAC

PKS: Jangan Jadi Tekanan Dalam Umumkan Hasil Uji Klinisnya

- 1) Kedatangan 3 juta dosis vaksin Sinovac dan pemesanan vaksin AstraZeneca & Novavax tidak boleh menjadi tekanan pada BPOM dalam proses review atas hasil uji klinis tahap ketiga. BPOM harus tetap bekerja secara independen dan transparan
- 2) Pemerintah harus mengumumkan 2 hasil uji klinis vaksin secara transparan, akuntabel dan penuh kejujuran. Jangan ada yang ditutupi apapun hasil uji klinis tersebut.
- 3) Pemerintah harus memiliki kebijakan 3 lobi dan intervensi yang kuat di dunia internasional agar Indonesia diperhitungkan dan kebutuhan vaksin kita terpenuhi.
- 4) Pemerintah harus memastikan kualitas, tingkat efikasi dan kehalalan vaksin. Karena kita mendatangkan vaksin bukan dengan prinsip sekadar memenuhi kuota, tapi untuk memastikan imunitas rakyat terhadap virus Covid-19, apalagi sekarang sudah muncul mutasi baru virus Corona.
- 5) Vaksinasi harus dilakukan setelah semua prosedur dipenuhi, baik dari aspek produk vaksin itu sendiri maupun kebutuhan pendukungnya. Pemerintah tidak boleh tergesa-gesa yang justru dapat berdampak buruk di kemudian harinya. Kita tidak ingin ada KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) yang tidak diperhitungkan sebelumnya.

Pemerintah Datangkan Sinovac Tahap II

Netty : Jangan Jadi Tekanan Dalam Umumkan Hasil Uji Klinisnya

- 1** Kedatangan 3 juta dosis vaksin Sinovac dan pemesanan vaksin AstraZeneca & Novavax tidak boleh menjadi tekanan pada BPOM dalam proses review atas hasil uji klinis tahap ketiga. BPOM harus tetap bekerja secara independen dan transparan.
- 2** Pemerintah harus mengumumkan hasil uji klinis vaksin secara transparan, akuntabel dan penuh kejujuran. Jangan ada yang ditutupi apapun hasil uji klinis tersebut.
- 3** Pemerintah harus memiliki kebijakan lobi dan intervensi yang kuat di dunia internasional agar Indonesia diperhitungkan dan kebutuhan vaksin kita terpenuhi.
- 4** Pemerintah harus memastikan kualitas, tingkat efikasi dan kehalalan vaksin. Karena kita mendatangkan vaksin bukan dengan prinsip sekedar memenuhi kuota, tapi untuk memastikan imunitas rakyat terhadap virus Covid-19, apalagi sekarang sudah muncul mutasi baru virus Corona.
- 5** Vaksinasi harus dilakukan setelah semua prosedur dipenuhi, baik dari aspek produk vaksin itu sendiri maupun kebutuhan pendukungnya. Pemerintah tidak boleh tergesa-gesa yang justru dapat berdampak buruk di kemudian harinya. Kita tidak ingin ada KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) yang tidak diperhitungkan sebelumnya.



Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si.
Anggota Komisi IX DPR RI



22 Januari 2022 | Ketahanan Keluarga | Komisi VIII

Prihatin Dengan Semakin Maraknya Perzinaan & Gaya Hidup Seks Bebas Di Indonesia

PKS Dorong Pengokohan Institusi Keluarga dan Pendidikan Berbasis Iman dan Taqwa Serta Akhlak Mulia

TAHUN 2020

Jumlah Kasus Kekerasan Seksual dalam Ranah KDRT/Relasi Personal mencapai 1983 kasus

Pelaku

- Pacar : 1074 kasus
- Mantan Pacar : 263 kasus

Pelaporan terhadap pacar sebagai pelaku kekerasan seksual telah menempati selama 3 tahun terakhir.

- Tahun 2018 : 1670 kasus (total kasus : 2988)
- Tahun 2019 : 1310 kasus (total kasus : 2807)
- Tahun 2020 : 1074 kasus (total kasus : 1983)

PKS menilai langkah preventif terbaik untuk menghapus kasus kekerasan seksual di ranah private non-penikahan adalah dengan mengokohkan institusi keluarga, khususnya memaksimalkan peran orang tua dalam mangawasi pergaulan anak-anak mereka. Selain itu, pendidikan berbais agama yang mengutamakan ajaran moral, karakter, dan budi pukerti, harus ditanamkan sejak dini kepada anak dan remaja, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah.

PRIHATIN DENGAN SEMAKIN MARAKNYA PERZINAAN & GAYA HIDUP SEKS BEBAS DI INDONESIA

PKS DORONG PENGOKOHAN INSTITUSI KELUARGA DAN PENDIDIKAN BERBASIS IMAN DAN TAQWA SERTA AKHLAK MULIA*

TAHUN 2020

Jumlah kasus kekerasan seksual dalam Ranah KDRT/Relasi Personal mencapai

1983 kasus

PELAKU

Pacar
1074 kasus

Mantan pacar
263 kasus

Pelaporan terhadap pacar sebagai pelaku kekerasan seksual telah menempati posisi terbanyak secara konsisten selama 3 tahun terakhir.

Tahun	2018	2019	2020
Kasus	1670	1320	1074
Total Kasus	2988	2807	1983



“PKS menilai, langkah preventif terbaik untuk menghapus kasus kekerasan seksual di ranah privat non-pernikahan adalah dengan mengokohkan institusi keluarga, khususnya memaksimalkan peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak-anak mereka. Selain itu, pendidikan berbasis agama yang mengutamakan ajaran moral, karakter, dan budi pekerti, harus ditanamkan sejak dini kepada anak dan remaja, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah.”

11 Agustus 2021 | Pandemi Covid 19

Suara PKS untuk Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Selain memberikan kontribusi untuk rakyat, FPKS juga menyuarakan gagasan-gagasannya ke Pemerintah

1. Meluncurkan buku putih penanganan COVID-19 di Indonesia
2. Meminta rapid test covid-19 khusus anggota DPR dibatalkan
3. Meminta Pemerintah membuat kebijakan pro tenaga kesehatan
4. Meminta Pemerintah untuk mengundur pemindahan Ibukota
5. Meminta Pemerintah agar APBN berfokus pada penanganan Covid-19
6. ⊖ Meminta penutupan pintu penerbangan internasional bagi

- WNA dan TKA pada masa PPKM
7. Mendukung DPR dijadikan Gedung darurat
 8. Mendukung dan mendorong kegiatan vaksinasi
 9. Menolak PMN bagi BUMN jika tidak terkait pelayanan masyarakat
 10. Menolak UU Cipta Kerja
 11. Menolak isoman di hotel untuk anggota DPR RI
 12. Menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 atau Perpu Covid-19 menjadi Undang-undang

SUARA PKS UNTUK PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Selain memberikan kontribusi untuk rakyat, FPKS juga menyuarakan gagasan-gagasannya ke Pemerintah.



Meluncurkan buku putih penanganan Covid-19 di Indonesia



Mendukung Gedung DPR dijadikan Gedung Darurat



Menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 atau Perpu Covid-19 menjadi Undang-undang



Meminta rapid test covid-19 khusus anggota DPR dibatalkan



Mendukung dan mendorong kegiatan vaksinasi



Meminta Pemerintah membuat kebijakan pro tenaga kesehatan



Menolak PMN bagi BUMN jika tidak terkait pelayanan masyarakat



Mendesak agar besaran bansos memadai, tidak telat cair, dan tepat sasaran



Meminta Pemerintah untuk mengundur pemindahan Ibukota



Menolak UU Cipta Kerja



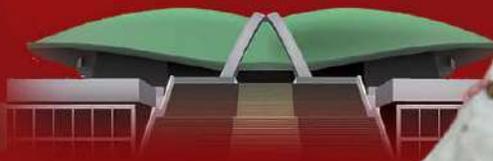
Meminta Pemerintah agar APBN berfokus pada penanganan Covid-19



Menolak isoman di hotel untuk anggota DPR R



Meminta penutupan pintu penerbangan internasional bagi WNA dan TKA pada masa PPKM



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

8 Juli 2021 | Pandemi Covid-19

Panduan Aman Saat Isolasi Mandiri

Lonjakan kasus harian Covid-19 menyebabkan sejumlah rumah sakit kewalahan. Ketersediaan ruang isolasi di sejumlah tempat pelayanan pasien Covid-19 seperti Wisma Atlet, Jakarta semakin menipis. Kapan harus melakukan isolasi mandiri di rumah dan bagaimana cara melakukannya bagi pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19?

Kapan harus isoman?

1. Saat dinyatakan positif covid-19
2. Saat kontak erat dengan pasien positif covid-19, meskipun setelah itu melakukan test dan hasilnya negatif
3. Setelah berpergian ke zona merah

Adapun protokol isolasi mandiri (ISOMAN) untuk seseorang yang dinyatakan positif Covid-19 adalah sebagai berikut :

1. Tidur terpisah dengan anggota keluarga yang lain
2. Pilih kamar yang memiliki jendela langsung ke luar
3. Selalu gunakan masker di dalam rumah
4. Periksa saturasi oksigen berkala jika kurang dari 94 persen lapor ke petugas medis
5. Toilet terpisah, jika tidak memungkinkan beri jeda waktu penggunaan 30-60 menit
6. Tidak makan bersama dengan anggota keluarga yang lain
7. Cek suhu 2x sehari (siang & malam), laporkan jika diatas $> 38^{\circ}\text{C}$
8. Mengonsumsi vitamin C & D, makan makanan yang bergizi, olahraga dan istirahat yang cukup

PANDUAN AMAN SAAT ISOLASI MANDIRI

Kapan harus isoman?

Saat dinyatakan positif covid-19

Saat kontak erat dengan pasien positif covid-19, meskipun setelah itu melakukan test dan hasilnya negatif

Setelah berpergian ke zona merah



Adapun protokol isolasi mandiri (ISOMAN) untuk seseorang yang dinyatakan positif Covid-19 adalah sebagai berikut :



Tidur terpisah dengan anggota keluarga yang lain



Pilih kamar yang memiliki jendela langsung ke luar



Selalu gunakan masker di dalam rumah



Periksa saturasi oksigen berkala, jika < 94% lapor ke petugas medis



Toilet terpisah, jika tidak memungkinkan beri jeda waktu penggunaan 30-60 menit



Tidak makan bersama dengan anggota keluarga yang lain



Cek suhu tubuh 2x sehari (siang & malam, laporkan jika diatas > 37,5°C



Mengonsumsi Vitamin C & D, makan makanan bergizi, olahraga & istirahat yang cukup

16 November 2022 | Kesehatan | Komisi IX

Peringati Hari Kesehatan Nasional, Fraksi PKS: Negara Wajib Menghargai Jasa Pahlawan Kesehatan!

Covid-19. Para tenaga medis dan kesehatan yang gugur telah menunjukkan semangat rela berkorban dan menjunjung nilai kebenaran serta kepedulian. Tenaga medis dan kesehatan adalah pahlawan kita semua.

Data Lapor Covid-19, ada 2.087 tenaga medis dan kesehatan yang meninggal per 15 November 2022.

Dokter: 751 orang.
Perawat: 670 orang
Bidan: 398 orang
Ahli Teknologi Laboratorium Medis: 51 orang
Apoteker: 48 orang
Sokter gigi: 46 orang
Petugas rekam radiologi: 12 orang
Terapis gigi: 8 orang
Sanitarian: 7 orang
Tenaga Farmasi: 5 orang

Petugas Ambulan: 4 orang
Elektromedik: 3 orang
Epidemiolog: 2 orang
Entomolog Kesehatan: 1 orang
Fisikawan Medik: 1 orang
Tenaga kesehatan lain: 80 orang

Kehilangan tenaga medis dan kesehatan dalam jumlah yang cukup besar berpotensi semakin melebarkan disparitas rasio jumlah tenaga medis dan kesehatan di Indonesia.

Pemerintah perlu memberi penghargaan kepada tenaga medis dan kesehatan yang gugur di medan perjuangan, sekaligus memastikan hak-hak para tenaga medis dan kesehatan yang masih terus berbakti bagi bangsa.

Peringati Hari Kesehatan Nasional, F-PKS: NEGARA WAJIB MENGHARGAI JASA PAHLAWAN KESEHATAN!

Ribuan tenaga medis dan kesehatan gugur saat bertugas melawan pandemi Covid-19.

Data per
16 Nov 2022

2.087

tenaga medis dan kesehatan yang meninggal



Para tenaga medis dan kesehatan yang gugur telah menunjukkan semangat rela berkorban dan menjunjung nilai kebenaran serta kepedulian.

751
Dokter

48
Apoteker

7
Sanitarian

2
Epidemiolog

670
Perawat

46
Dokter Gigi

8
Terapi Gigi

3
Elektromedik

398
Bidan

5
Tenaga Farmasi

1
Entomolog Kesehatan

1
Fisikawan Medik

51
Ahli Teknologi Lab. Medis

12
Petugas rekam radiologi

4
Petugas Ambulan

80
Tenaga kesehatan lain

Pemerintah perlu memberi penghargaan kepada tenaga medis dan kesehatan yang gugur di medan perjuangan, sekaligus memastikan hak-hak para tenaga medis dan kesehatan yang masih terus berbakti bagi bangsa.

27 Desember 2022 | Kesehatan | Komisi IX

Mayoritas Rakyat Indonesia Tak Bisa Akses Makanan Bergizi,

PKS: Catatan Merah bagi Pemerintah!

Beberapa waktu lalu, Harian Kompas merilis laporan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia diketahui tidak bisa mengakses kebutuhan makanan bergizi seimbang atau makanan sehat. Hal ini terjadi karena harga pangan yang relatif mahal.

Menurut hitungan Kompas, uang yang perlu dikeluarkan setiap orang untuk membeli makanan bergizi seimbang di Indonesia adalah Rp 22.126 per hari atau Rp 663.791 per bulan.

Standar komposisi gizi yang diacu Kompas adalah Healthy Diet Basket, yang juga digunakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO).

Dengan biaya sebesar itu, ada 68 persen atau 183,7 juta orang Indonesia yang pengeluarannya tergolong terlalu kecil untuk dapat memenuhi

angka tersebut. Bank Dunia menetapkan pengeluaran untuk bahan pangan maksimal mengambil 52 persen saja dari pengeluaran total keluarga.

Berikut 5 daerah dengan persentase tertinggi penduduk yang tidak bisa mengakses makanan bergizi dikutip dari laporan Harian Kompas:

- NTT 78 persen
- Maluku Utara 70 persen
- Sulawesi Barat 69 persen
- Maluku 68 persen
- Sulawesi Tenggara 64 persen

Penduduk Indonesia yang tidak mampu membeli makanan bergizi (hasil analisis Food and Agriculture Organization)

2017: 70,7 persen
2018: 68,9 persen
2019: 67,3 persen
2021: 69,1 persen

Mayoritas Rakyat Indonesia Tak Bisa Akses Makanan Bergizi,

PKS: CATATAN MERAH BAGI PEMERINTAH!

Mayoritas masyarakat Indonesia diketahui tidak bisa mengakses kebutuhan makanan bergizi atau makanan sehat.

Uang yang perlu dikeluarkan setiap orang untuk membeli makanan bergizi di Indonesia

Rp 22.126 per hari

atau **Rp 663.791** per bulan.

183,7 juta orang Indonesia yang pengeluaran bulananannya tergolong terlalu kecil untuk dapat memenuhi angka tersebut.

Daerah dengan persentase tertinggi penduduk yang tidak bisa mengakses makanan bergizi



Penduduk Indonesia yang tidak mampu membeli makanan bergizi :



3 November 2022 | Pendidikan | Komisi X

Angka Putus Sekolah Masih Tinggi, Fraksi PKS: PR Kemendikbudristek Sangat Banyak!

Pendidikan seharusnya dapat diakses oleh setiap warga negara dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Sayangnya, realitas yang ada menunjukkan bahwa Angka Putus Sekolah di Indonesia masih tergolong tinggi.

2020: 13.879 siswa
2021: 10.022 siswa

SMK

2018: 25.357 siswa
2019: 32.395 siswa
2020: 13.951 siswa
2021: 12.063 siswa

Angka Putus Sekolah di Indonesia (Sumber: Kemendikbudristek, 2022)

SD

2018: 33.268 siswa
2019: 59.443 siswa
2020: 44.516 siswa
2021: 38.176 siswa

SMP

2018: 28.651 siswa
2019: 38.464 siswa
2020: 11.378 siswa
2021: 15.042 siswa

SMA

2018: 15.853 siswa
2019: 26.864 siswa

Penurunan Angka Putus Sekolah sejak tahun 2017 cenderung stagnan. Bahkan untuk tingkat Sekolah Dasar terjadi kenaikan tajam di tahun 2019.

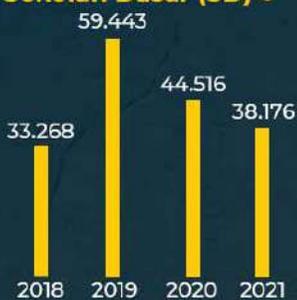
Angka Tidak Sekolah pada tahun 2019 menyentuh 4,3 Juta anak (BPS). Angka Tidak Sekolah = Anak Tidak Pernah Bersekolah + Anak Putus Sekolah.

Rata-rata lama sekolah anak-anak dari keluarga/rumah tangga pendapatan terbawah hanya sebesar 7,16 tahun (2021) dan 7,02 tahun (2020) (setara dengan kelas 7 SMP/Sederajat).

Angka Putus Sekolah Masih Tinggi, FRAKSI PKS: PR KEMENDIKBUDRISTEK SANGAT BANYAK!

Angka Siswa/i Putus Sekolah di Indonesia tergolong tinggi

Sekolah Dasar (SD)



Sekolah Menengah Pertama (SMP)



Sekolah Menengah Atas (SMA)



Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)



Angka Tidak Sekolah pada tahun 2019

4,3 Juta anak

Anak Tidak Pernah Bersekolah

✦ Anak Putus Sekolah.



22 Oktober 2022 | Olahraga | Komisi X

Kritik Fun Football PSSI bersama Presiden FIFA, Aleg PKS: Tidak Peka Atas Musibah yang Terjadi!

Tegal (21/10) --- Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menyatakan kritik publik yang deras atas digelarinya 'fun football' (pertandingan sepakbola ceria) yang diikuti petinggi PSSI dan presiden FIFA Selasa (18/20) menunjukkan ketidakpekaan terhadap tragedi kemanusiaan luar biasa di Stadion Kanjuruhan, Malang.

Para petinggi PSSI bersama Presiden FIFA bersuka cita dalam ajang Fun Football. Hal ini menunjukkan ketidakpekaan terhadap tragedi luar biasa di Stadion Kanjuruhan, Mlang, Jawa Timur.

Terlebih, tragedi Kanjuruhan bisa dikategorikan sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah

sepakbola dunia. Sebanyak total 133 orang meninggal dunia atas tragedi itu, 44 diantaranya anak-anak dan balita. Satu (1) orang meninggal dunia Selasa (18/10) kemarin setelah 17 hari dirawat intensif di ICU RSUD Saiful Anwar. Tiga orang masih berada di ICU di RS yang sama dengan kondisi yang masih belum stabil.

“Saya melihatnya memang tidak pantas ‘merayakan’ tragedi ini dengan cara seperti itu, di tengah kuburan para korban yang belum kering, dan beberapa korban yang masih berjuang untuk hidupnya di RS,” Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM (Wakil Ketua Komisi X DPR RI FPKS)



Kritik Fun Football PSSI bersama Presiden FIFA

Aleg PKS: Tidak Peka Atas Musibah yang Terjadi!

- Para petinggi PSSI bersama Presiden FIFA bersuka cita dalam ajang 'fun football'.
- Menunjukkan ketidakpekaan terhadap tragedi kemanusiaan luar biasa di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

- Rakyat masih berduka atas tragedi Kanjuruhan

- Korban : **133** meninggal dunia
44 diantaranya anak-anak dan ballita



575 luka-luka

- Menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah sepakbola dunia.

“ Saya melihatnya memang **tidak pantas** ‘merayakan’ tragedi ini dengan cara seperti itu, **di tengah kuburan para korban yang belum kering**, dan beberapa korban yang masih berjuang untuk hidupnya di Rumah Sakit.

Dr. H. Abdul Fikri
Faqih, MM

Wakil Ketua Komisi X
dari Fraksi PKS



4

Keuangan

4 Oktober 2022 | APBN

PKS Mendesak Pemerintah Serius Menurunkan Angka Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023

Rancangan Undang-Undang Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) telah disahkan, dalam pandangannya Fraksi PKS DPR RI menerima dengan memberi 27 catatan (Minderheidsnota) !

Angka pengangguran masih tinggi

8,40 juta jiwa atau 5,83% per Februari 2022.

Angka pengangguran sebelum covid-19 sebesar 6,88 juta jiwa atau 4,99% pada Februari 2020.

Pengangguran berusia muda di Asia Tenggara:

- Brunei Darussalam 23,4%
- Indonesia 16%
- Malaysia 15,6%
- Timor Leste 13,8%
- Filipina 7,3%
- Vietnam 7,2%
- Thailand 17,0%
- Myanmar 6,4%
- Laos 3,3%
- Kamboja 1,8%

PKS Mendesak Pemerintah Serius Menurunkan Angka Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023

- Rancangan Undang-Undang Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) telah disahkan, dalam pandangannya Fraksi PKS DPR RI menerima dengan memberi 27 catatan (Minderheidsnota)!



- Angka pengangguran masih tinggi **8,40 juta jiwa** atau **5,83%** per Februari 2022.

- Angka pengangguran sebelum covid-19 sebesar **6,88 juta jiwa** atau **4,99%** pada Februari 2020.

- Pengangguran berusia muda di Asia Tenggara



20 Februari 2021 | Data Statistik | Komisi XI

Kenaikan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Dalam Jangka Waktu yang Singkat

Tercatat bahwa dalam kurun waktu satu tahun dari 2019-2020, Indonesia mengalami kenaikan penduduk miskin sebesar 10,19%. Pada September 2019, angka kemiskinan di Indonesia sempat mengalami penurunan dari total 24,14 juta orang menjadi 24,79 juta orang (turun 9,22%), namun pada bulan Maret tahun 2020 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 26,42 juta (naik 9,78%). Kenaikan jumlah penduduk miskin ini terus mengalami kenaikan seiring berjalannya waktu, hal ini dibuktikan dari terjadinya peningkatan pada bulan September 2020 sejumlah 27,55 juta orang atau naik sebesar 10,19% dari bulan Maret 2020.

Kelompok kemiskinan dibagi ke dalam dua bagian, yaitu kelompok perkotaan dan kelompok pedesaan. Kedua

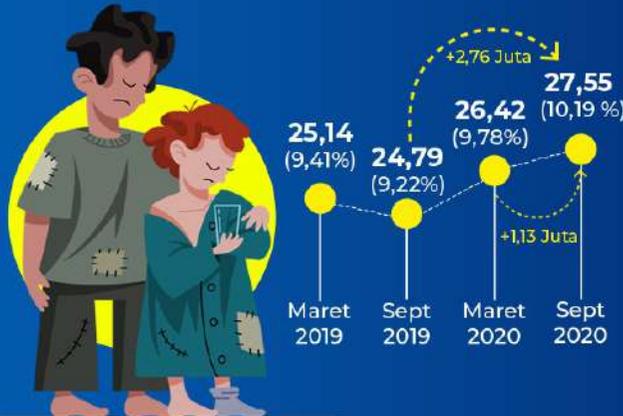
kelompok kemiskinan tersebut dalam jangka waktu satu tahun dari September 2019 – September 2020 selalu mengalami kenaikan. Kenaikan penduduk miskin pada Maret – September 2020 di Perkotaan naik 876,5 ribu dan Pedesaan naik 249,1 ribu.

Dari data terakhir yang diperoleh pada September 2020 tercatat garis kemiskinan sebesar Rp458.947,-/kapita/bulan dengan komposisi untuk kebutuhan makanan sebesar Rp339.004 dan untuk keperluan non-makanan sebesar Rp119.934. Rata-rata pada bulan September 2020 rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,83 orang anggota. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar Rp2.216.714/rumah tangga miskin/bulan.

PENDUDUK MISKIN INDONESIA NAIK

PKS Minta Pemerintah Antisipasi Ledakan Angka Kemiskinan

- Kenaikan persentase & jumlah (juta orang) penduduk miskin di Indonesia



- Kelompok kemiskinan dibagi dua :

- Perkotaan
- Pedesaan



- Kenaikan penduduk miskin pada Maret-Sept 2020 di Perkotaan naik **876,5 ribu** & Pedesaan naik **249,1 ribu**

FRAPSI
KEMISKINAN DI INDONESIA

- Garis Kemiskinan pada September 2020 tercatat sebesar **Rp458.947,-/ kapita/bulan** dengan komposisi :



- Pada September 2020, rumah tangga miskin di Indonesia rata-rata memiliki 4,83 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, **besarnya garis kemiskinan** per rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar **Rp 2.216.714,-/rumah tangga miskin/bulan**.



26 Februari 2021 | Data Statistik | Komisi XI

Indeks Kemajuan Sosial Indonesia Sangat Stagnan!

Indeks kemajuan sosial Indonesia selama lima tahun terakhir sama sekali tidak mengalami perkembangan yang memuaskan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2017-2020 indeks kemajuan sosial Indonesia hanya berada pada peringkat ke 83-85 di dunia dalam kemajuan sosial menurut data yang dirilis oleh Social Progress Imperative tahun 2020. Skor indeks kemajuan sosial Indonesia (skor 69,49) di kawasan Asia Tenggara berada di bawah negara tetangga lainnya, seperti Malaysia (skor 76,96) dan Thailand (skor 70,72).

Stagnannya indeks Kemajuan sosial di Indonesia menurut Social Progress Imperative dipengaruhi oleh ketidaksetaraan kondisi ekonomi dan gender, akses kepada pendidikan tinggi, dan korupsi. Dalam indeks kemajuan sosial, diukur terkait dengan keberhasilan suatu negara dalam mengatasi masalah sosial di luar masalah-masalah ekonomi.

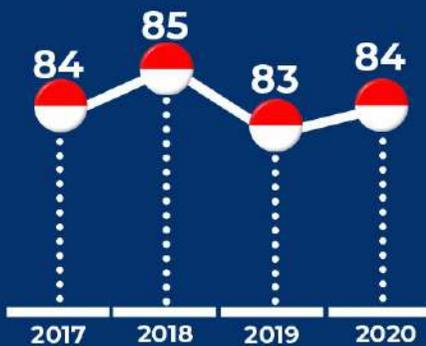
PKS KECEWA INDEKS KEMAJUAN SOSIAL INDONESIA STAGNAN

Sila ke 5 Pancasila Tegas

"Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia"

Indonesia menduduki peringkat ke 84 dalam kemajuan sosial. Hal ini berdasarkan Indeks Kemajuan Sosial yang dirilis Social Progress Imperative tahun 2020.

► Peringkat Kemajuan Sosial Indonesia



► Social Progress Imperative juga mencatat bahwa **kemajuan sosial di Indonesia masih terhalang oleh ketidaksetaraan ekonomi dan gender, akses pendidikan tinggi, dan korupsi.**

Indeks Kemajuan Sosial mengukur keberhasilan suatu negara dalam mengatasi masalah sosial di luar masalah-masalah ekonomi.

► Skor Indonesia **DI BAWAH** NEGARA LAIN

 Malaysia.....	76,96
 Thailand.....	70,72
 Indonesia.....	69,49

• Grafis : Aditya Angga
• Sumber : Social Progress Index, 2020



23 Februari 2021 | Lingkungan | Komisi IV

PKS : Pemerintah Harus Tegas Terhadap Perusahaan Perusak Hutan Papua!

Terjadi kehancuran hutan dari tahun 2001-2019 seluas 663.443 hektare di Provinsi Papua. Pada tahun 2019 terjadi penambahan seluas 38.355 hektare hutan yang dihancurkan. Kehancuran hutan tersebut sebagian besar dilakukan guna mengalihkan fungsi dari hutan tersebut menjadi lahan-lahan produktif yang dapat menguntungkan bagi beberapa pihak, alih fungsi lahan tersebut dapat berupa kebun sawit, tambang, hutan tanaman industri, maupun

pembalakan. Jika perusakan hutan digambarkan seperti lapangan sepak bola yang berukuran panjang 105 m x 68 m , setiap tahunnya ada seluas 35.000 lapangan sepak bola baru yang dibuat menggantikan hutan dan 134 kali lapangan sepak bola per harinya.

PKS DESAK PEMERINTAH TEGAS TERHADAP PERUSAHAAN PERUSAK HUTAN PAPUA



Alih fungsi

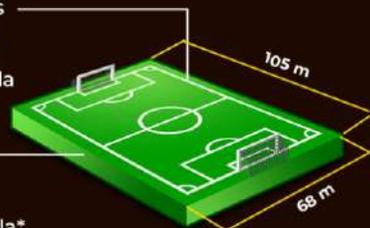
• Kebun Sawit • Tambang • Hutan Tanaman Industri • Pembalakan

■ Tahun **2001 - 2019**
terjadi kehancuran
hutan seluas
663.443 hektare

■ Tahun **2019**
penambahan mencapai
38.355 hektare

■ Setiap tahun seluas
35.000
lapangan sepak bola

■ Per hari
134x
lapangan sepak bola*



*Luas = 7140 m²

• Grafis: Aditya Angga

• Sumber: Koalisi Indonesia Memantau dan berbagai sumber

PKS TV DPR RI

Fraksi PKS DPR RI

fraksipksdprri

@fpksdprri

fraksi.pks.id

24 Maret 2021 | Lingkungan | Komisi IV

Tindak Pihak yang Melakukan Pembakaran Hutan dan Lahan!

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dari tahun ke tahun selalu terjadi dengan jumlah luas lahan yang terbakar sangatlah luas. Fraksi PKS mencatat, selama periode kepemimpinan Presiden Jokowi dari 2015-2020, terjadi paling tidak sekitar 5.645.022 Hektare lahan yang terbakar.

Pada tahun 2015, sekitar 2,6 juta Hektare lahan hutan terbakar, pada 2016 sekitar 436,4 ribu Hektare terbakar, 2017 terdapat 165, 4 ribu hektare, tahun 2018 ada 510,6 ribu Hektare lahan yang terbakar, tahun 2019 sekitar 1,65 juta Hektare lahan terbakar, dan pada tahun 2020, sekitar 270 ribu hektare terbakar.

Terdapat lima daerah di Indonesia yang mengalami kebakaran hutan dan lahan yang sangat luas pada tahun 2020, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 114.719 Hektare, Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 29.157 Hektare, Provinsi Papua seluas 28.277 Hektare, Provinsi Kepulauan Riau seluas 8.805 Hektare, dan terakhir ada Provinsi Sumatera Utara seluas 3.744 Hektare.

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Fraksi PKS Minta Pemerintah Menindak Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Kebakaran Hutan.

- Setiap tahunnya Kebakaran Hutan dan Lahan masih terus terjadi dengan luas kebakaran yang tidak sedikit. Fraksi PKS mencatat, selama periode kepemimpinan Presiden Jokowi (2015-2020), paling tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas 5.645.022 Hektare.



■ 5 Besar Kebakaran Hutan & Lahan 2020



*Dalam hektare (ha)

21 Februari 2022 | Pangan | Komisi IV

Harga kebutuhan naik, Rakyat Makin Sulit

- PKS menilai berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah sangat menyulitkan masyarakat. Beberapa contoh kebijakan tersebut, yaitu:

a. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas 3 yang semula Rp25.500 menjadi Rp35.000

b. Kenaikan tarif tol golongan satu Jakarta-Surabaya dari Rp691.500 menjadi Rp722.000

c. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 menjadi landasan kenaikan PNPB sektor perikanan

Saat pandemi hasil penangkapan ikan menurun 30%

Harga ikan di pasar tradisional turun 20%-30%

Impor ikan semakin melemahkan daya saing nelayan lokal

d. Kenaikan PPN 10% menjadi 11% di tahun 2022 dan 12% di tahun 2025

e. Kenaikan bea materai dari Rp3.000 dan Rp6.000 menjadi Rp10.000

HARGA KEBUTUHAN NAIK RAKYAT MAKIN SULIT

PKS Menilai Berbagai Kebijakan
Pemerintah Malah Menyulitkan Masyarakat



**Iuran BPJS Kesehatan
(kelas 3)**

Yang semula
Rp25.500
menjadi

Rp35.000



**Kenaikan
PPN 10%**
menjadi :

11% (2022)

12% (2025)



Bea Materai

dari **Rp3.000**
dan **Rp6.000**
menjadi

Rp10.000



Tarif TOL Naik

Tarif Tol Gol 1
Jakarta-Surabaya,
dari **Rp691.500**
menjadi

Rp722.000



**PP Nomor 85 Tahun 2021
menjadi landasan kenaikan
PNBP sektor perikanan**

- Saat pandemi hasil penangkapan ikan menurun 30%
- Harga ikan di pasar tradisional turun 20%-30%
- Impor ikan semakin melemahkan daya saing nelayan lokal



7 September 2021 | Ekonomi | Komisi XI

Utang RI Tembus 6000 Triliyun!

PKS mendesak pemerintah untuk serius dalam mengelola utang negara yang sudah sangat besar. Kinerja pemerintah dalam pengelolaan utang dan diperparah pada masa Covid-19 menurut Fraksi PKS sudah sangat buruk. Total utang Indonesia sepanjang 2020 sebesar Rp6.080,08 triliun atau 39,4% terhadap PDB. Kenaikan utang sepanjang tahun 2020 yaitu Rp1.293,5 triliun atau naik sekitar 27,02% dari tahun 2019. Dengan begitu,

beban bunga pun meningkat menjadi Rp317,89 triliun atau naik 14,67% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp277,23 triliun.

Tren penambahan utang dan kenaikan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan Penerimaan Negara inilah yang memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang.

TELAAH APBN

UTANG RI TEMBUS 6000 TRILIUN

PKS Mendesak Pemerintah Serius Dalam Pengelolaan Utang Negara

- Fraksi PKS berpendapat buruknya kinerja Pemerintah dalam pengelolaan utang dan diperparah pada masa pandemi Covid-19.

- ↑ Total utang sepanjang tahun 2020

Rp6.080,08 triliun

39,4% terhadap PDB.

- ↑ Kenaikan utang sepanjang tahun 2020

Rp1.293,5 triliun

naik 27,02% dari tahun 2019

- ↑ Beban bunga meningkat

Rp317,89 triliun

naik 14,67% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp277,23 triliun.

- Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan Penerimaan Negara yang memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang.



14 Juli 2021 | Ekonomi | Komisi XI

Turun Kelas! Indonesia Menjadi Negara Berpenghasilan Menengah Kebawah

- Frkasi PKS menyarankan agar pemerintah harus memprioritaskan UMKM untuk meningkatkan kembali perekonomian. Bank Dunia melaporkan bahwa Indonesia kembali masuk dalam negara Lower Middle Income alias negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Klasifikasi GNI per kapita untuk negara (2020), yaitu:

- a. Low Income di level USD 1.046
- b. Lower Middle Income di level USD 1.046-USD 4.095
- c. Upper Middle Income di level USD 4.095- USD 12.695
- d. High Income di level lebih dari USD 12.695

Terdapat empat klasifikasi GNI untuk menetapkan peringkat negara, yaitu:

- a. Perumbuhan ekonomi
 - b. Inflasi
 - c. Nilai tukar
 - d. Pertumbuhan penduduk
- GNI per kapita Indonesia tahun 2020 turun menjadi USD 3.870 (Lower Middle Income)

TURUN KELAS!

INDONESIA NEGARA BERPENGHASILAN MENENGAH BAWAH

PKS : Pemerintah Harus Memprioritaskan UMKM untuk Meningkatkan Kembali Perekonomian

Bank Dunia melaporkan Indonesia kembali masuk dalam negara *lower middle income* alias negara dengan penghasilan menengah ke bawah.



Klasifikasi GNI untuk ■ menetapkan peringkat negara.

Pertumbuhan ekonomi

Inflasi

Nilai tukar

Pertumbuhan penduduk

- Klasifikasi GNI per kapita untuk negara (tahun 2020)
- **Low Income** di level **USD 1.046**
- **Lower Middle Income** di level **USD 1.046-USD 4.095**
- **Upper Middle Income** di level **USD 4.095-USD12.695**
- **High Income** di level **lebih dari USD 12.695**

■ GNI per kapita Indonesia tahun 2020 turun menjadi **USD3.870.** (Lower Middle Income)

15 Februari 2022 | Ekonomi | Komisi XI

PKS Ingatkan Utang Indonesia Sudah Dalam Level Membahayakan!

Menurut International Debts Statistics yang dirilis World Bank pada tahun 2021, Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara pengutang luar negeri bersama dengan Turki, Brazil, India, dan Mexico. Indonesia berada di posisi ke-7, total utang luar negeri Indonesia pada tahun 2018 sebesar Rp5.496 Triliun menjadi Rp5.589 Triliun atau USD 402.084 pada tahun 2019 atau naik sebesar 1,6%, dengan total bunga yang harus dibayar sebesar Rp167 Triliun pada tahun 2019. Berikut daftar negara-negara yang menjadi pengutang terbesar di dunia. Yaitu:

1. China (USD 2.114.163)
2. Brazil (USD 569.398)
3. India (USD 560.035)
4. Rusia (USD 490.726)
5. Meksiko (USD 469.729)
6. Turki (USD 440.783)
7. Indonesia (USD 402.084)
8. Argentina (USD 279.306)
9. Afrika Selatan (USD 188.102)
10. Thailand (USD 180.230)

PKS Ingatkan Utang Indonesia Sudah Level Membahayakan

Menurut International Debts Statistics yang dirilis World Bank (2021), **Indonesia masuk dalam 10 besar** negara pengutang luar negeri bersama dengan Turki, Brazil, India dan Mexico.



7 INDONESIA

Total Utang Luar Negeri 2018

Rp. 5496 Triliun

Naik 1,6%

Total Utang Luar Negeri 2019

Rp. 5589 Triliun
(US \$ 402.084)

Total bunga yang harus dibayarkan

Rp. 167 Triliun
pada 2019

10 besar negara pengutang luar negeri lainnya:



• NB : Total utang ini terdiri dari utang pemerintah, bank sentral dan swasta.

• Data Utang Tahun 2019

7 Mei 2022 | Ekonomi | Komisi XI

Utang Luar Negeri Meningkat!

PKS meminta kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembelanjaan negara secara efektif dan bertanggung jawab. Peningkatan utang yang terus dilakukan oleh Indonesia akan berdampak kepada dependensi negara yang pada akhirnya menyebabkan perekonomian akan memihak kepada para kreditor dan secara tidak

langsung hal ini berdampak juga kepada rakyat. Kreditor utang terbesar Indonesia, yaitu Jepang sebesar 12,091 juta USD, Jerman sebesar 4,024 juta USD, dan Perancis sebesar 2,703 juta USD. Dari rentan tahun 2015-2017, utang Indonesia sudah bertambah sebesar Rp1000 triliun dan ini pun masih bertambah lagi. Pada Juni 2020, tercatat utang Indonesia sebesar Rp5.264,1 triliun, dan pada Januari 2021 utang Indonesia naik menjadi Rp6.233,14 triliun.

GAWAT, UTANG LUAR NEGERI INDONESIA SEMAKIN MENINGKAT

PKS meminta pemerintah untuk melakukan pembelanjaan negara secara efektif dan bertanggung jawab.

- **Peningkatan hutang yang terus dilakukan pemerintah** akan berkorelasi dengan dependensi negara. Pada akhirnya, perekonomian akan memihak pada kreditor dan secara tidak langsung hal ini juga akan berdampak pada rakyat.

■ Kreditor Utang Indonesia

 Jepang
12,091 juta
USD

 Jerman
4,024 juta
USD

 Perancis
2,703 juta
USD



- Pada tahun 2015-2017 utang Pemerintah sudah bertambah

 **Rp1000**
Triliyun

- Utang Indonesia **BERTAMBAH LAGI**

Januari 2021
 **Rp6.233,14**
Triliyun

Juni 2020
 **Rp5.264,1**
Triliyun

10 Oktober 2022 | Inflasi | Komisi XI

Inflasi Meningkatkan Pasca Kenaikan Harga BBM, Fraksi PKS: Pemerintah Harus Stabilkan Perekonomian

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir inflasi dari komponen energi melonjak naik tiga kali lipat pada September 2022 akibat harga BBM naik. Kepala BPS Margo Yuwono menyebut inflasi komponen energi pada Agustus hanya 5,48 persen. Namun, pada September menjadi 16,48 persen.

Rincian:
Inflasi pada September 2022 tercatat di angka 5,95% (yoy)
Pada September 2022 terjadi inflasi sebesar 1,17 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,87
Inflasi pangan berkejolak di September tercatat 9,02 persen (yoy), meningkat dari (Agustus 8,93%)

Inflasi harga diatur Pemerintah: 13,28 persen, meningkat dari (Agustus 6,84 persen).

Ancaman 2023:

- stagflasi
- Ancaman krisis pangan dan energi
- Ketidakstabilan pasar keuangan

Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk mengantisipasi dampak resesi dunia terhadap ekonomi nasional. Tahun 2023, sinyal resesi dunia semakin nyata seperti masalah stagflasi, kenaikan suku bunga acuan bank sentral, krisis energi hingga krisis utang.

Inflasi Meningkat Pasca Kenaikan Harga BBM,

PKS: Pemerintah Harus Stabilkan Perekonomian

✓ Badan Pusat Statistik (BPS) melansir inflasi dari komponen energi melonjak naik tiga kali lipat pada September 2022 akibat harga BBM naik.

✓ Kepala BPS Margo Yuwono menyebut inflasi komponen energi pada Agustus hanya 5,48 persen. Namun, pada September menjadi 16,48 persen.



⚡ Inflasi September 2022
↓ ↓ **5,95** persen (yoy)

Inflasi sebesar **1,17** persen (mtm) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,87

Inflasi pangan bergejolak **9,02** persen (yoy), meningkat dari (Agustus 8,93%)

Inflasi harga diatur Pemerintah: **13,28** persen (yoy), meningkat dari (Agustus **6,84** persen)

Ancaman 2023

- Stagflasi
- Ancaman krisis pangan dan energi
- Ketidakstabilan pasar keuangan



Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk mengantisipasi dampak resesi dunia terhadap ekonomi nasional. Tahun 2023, **sinyal resesi dunia semakin nyata** seperti masalah stagflasi, kenaikan suku bunga acuan bank sentral, krisis energi hingga krisis utang.

29 Oktober 2021 | Isu Pinjol | Komisi XI

Jebakan Pinjol Ilegal

PKS mendesak pemerintah untuk tegas menyelesaikan masalah pinjaman online (pinjol) dari hulunya

Maraknya kasus pinjaman online (pinjol) menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Sejak 2019 hingga Oktober 2021, terdapat setidaknya 19.711 aduan terkait pinjol yang dilayangkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Para korban membayar utang yang tidak kunjung lunas karena bunga yang begitu tinggi, diteror debt collector, bahkan hingga mengakhiri hidupnya karena terlilit utang.

Sejak 2018, OJK telah memblokir 3.516 aplikasi/website pemberi pinjaman online (pinjol) ilegal. Pada 2021, OJK menetapkan 168 entitas penyedia layanan pinjol yang diduga melakukan kejahatan atau ilegal

Fenomena pinjol ilegal ini muncul dan mengeksploitasi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana dalam waktu cepat.

Entitas pinjol ilegal kerap menggunakan tindakan penagihan yang tidak beretika

1. Pencairan dana tanpa persetujuan
2. Ancaman penyebaran data pribadi
3. Melakukan teror dan intimidasi kepada seluruh kontak peminjam
4. Menggunakan kata kasar dan pelecehan seksual

Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam mengurangi konsumsi yang tidak perlu serta meningkatkan literasi terkait keuangan digital agar tidak terjebak perangkap pinjol

JEBAKAN PINJOL ILEGAL

PKS mendesak pemerintah untuk tegas menyelesaikan masalah pinjaman online (pinjol) dari hulunya

- Maraknya kasus pinjaman online (**pinjol**) **ilegal** menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

■ **19.711** aduan sejak 2019 s.d Oktober 2021

■ Sejak 2018, OJK blokir **3.516** aplikasi/website pinjol ilegal

- Fenomena pinjol ilegal ini muncul dan mengeksploitasi kebutuhan masyarakat yang **membutuhkan pinjaman dana dalam waktu cepat**.



- Bunga yang begitu tinggi
- Diteror debt collector
- Mengakhiri hidup karena terlilit utang

Penagihan tidak beretika Pinjol Ilegal

-  Pencairan dana tanpa persetujuan
-  Ancaman penyebaran data pribadi
-  Melakukan teror dan intimidasi kepada seluruh kontak peminjam
-  Menggunakan kata kasar dan pelecehan seksual

2 Oktober 2021 | RUU KUP | Komisi XI

Tarif PPN dalam RUU KUP Naik, Masyarakat Kian Tercekik

PKS menolak rencana kenaikan tarif PPN yang menyulitkan rakyat dan melemahkan perekonomian nasional.

Alasan PKS MENOLAK kenaikan PPN :

- Kenalkan tarif PPN dari 10% menjadi 11-12% akan kontraproduktif dengan rencana pemulihan ekonomi nasional.

- Kenalkan tarif PPN akan mengakibatkan kenaikan harga yang melemahkan daya beli masyarakat.

Padahal, sumber PPN terbesar berasal dari PPN dalam negeri berupa konsumsi masyarakat.

TARIF PPN DALAM RUU KUP NAIK, **MASYARAKAT KIAN TERCEKIK**

PKS menolak rencana kenaikan tarif PPN yang menyulitkan rakyat dan melemahkan perekonomian nasional.

Alasan PKS MENOLAK kenaikan PPN

- Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11-12% akan **kontraproduktif dengan rencana pemulihan ekonomi nasional.**
- Kenaikan tarif PPN akan mengakibatkan kenaikan harga yang **melemahkan daya beli masyarakat.**

Padahal, sumber PPN terbesar berasal dari PPN dalam negeri berupa konsumsi masyarakat.



11 Oktober 2022 | Kemiskinan | Komisi XI

Prihatin Indonesia Peringkat
73 Negara Termiskin di Dunia

PKS : Pemerintah Harus Serius Entaskan Kemiskinan

Dalam laporan 'East Asia and The Pacific Economic Update October 2022', Bank Dunia (World Bank) mengubah batas garis kemiskinan baru-baru ini. Basis perhitungan terbaru mengacu pada paritas daya beli (PPP) 2017.

Dalam basis perhitungan terbaru

Garis kemiskinan ekstrem: US\$2,15 per kapita per hari, atau Rp984.360 per kapita per bulan (kurs Rp15.216)

Batas untuk kelas penghasilan menengah ke bawah (lower-middle income class): US\$3,65 per kapita per hari, atau Rp1.666.152 per bulan.

Jika menggunakan standar terbaru Bank Dunia, 13 juta warga Indonesia yang tadinya

masuk golongan menengah bawah berubah status menjadi golongan miskin, yakni dari yang awalnya berjumlah sekitar 54 juta jiwa menjadi 67 juta jiwa.

Sementara itu, garis kemiskinan yang digunakan BPS per Maret 2022 tercatat hanya di angka Rp505.469,00 per kapita per bulan. Sangatlah rendah dibanding ketentuan Bank Dunia. Merujuk BPS pula, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta jiwa.

Indonesia masuk 100 besar negara miskin. World Population Review Indonesia urutan ke 73 negara termiskin di dunia.

Prihatin, Indonesia Peringkat 73 Negara Termiskin di Dunia

PKS : Pemerintah Harus Serius Entaskan Kemiskinan

- Bank Dunia (World Bank) mengubah batas garis kemiskinan baru-baru ini. Basis perhitungan terbaru mengacu pada paritas daya beli (PPP) 2017 (update Oktober 2022).
- Batas untuk kelas penghasilan menengah ke bawah **Rp1.666.152** /kapita/bulan



Ketentuan garis kemiskinan ekstrem:

Rp505.469
/kapita/bulan

BPS

Rp984.360
/kapita/bulan

Bank Dunia

! Garis kemiskinan yang digunakan BPS **sangat rendah** dibanding ketentuan Bank Dunia.

- **67 juta** warga Indonesia masuk golongan miskin, berdasarkan standar baru Bank Dunia



Naik 13 Juta

... golongan menengah ke bawah berubah status menjadi golongan miskin

- Indonesia masuk **100** besar negara miskin di Dunia.
- World Population Review: Indonesia urutan ke-**73** negara termiskin di dunia



9 September 2021 | APBN 2020 |

Pemerintah Belum Mampu Penuhi Target APBN Tahun 2020!

PKS Mendesak Pemerintah Serius Dalam Targetkan Pengelolaan APBN

Fraksi PKS berpendapat bahwa pemerintah masih belum mampu mencapai target-target yang ditetapkan pada APBN Tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ditargetkan 5,3% dan terealisasi minus 2,07%.

Konsekuensi dari kegagalan tersebut adalah memburuknya kesejahteraan masyarakat.

Terdapat beberapa indikator yang dapat menunjukkan penurunan kesejahteraan rakyat, antara lain:

(i) lonjakan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan;

(ii) penurunan posisi Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah. Indonesia semakin sulit keluar dari jebakan middle income yang menyebabkan ekonomi tidak bertransformasi ke negara maju;

(iii) pendapatan per kapita Indonesia turun dari Rp59,1 juta per penduduk (US\$4.174,5 per penduduk) pada 2019 menjadi Rp56,9 juta per penduduk (US\$3.911,7 per penduduk) pada 2020.

PEMERINTAH BELUM MAMPU PENUHI TARGET APBN TAHUN 2020

PKS Mendesak Pemerintah Serius Dalam Targetkan Pengelolaan APBN

- Fraksi PKS berpendapat bahwa pemerintah masih belum mampu mencapai target-target yang ditetapkan pada APBN Tahun 2020.

- Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 :
Target Realisasi

5,3% → -2,07%

- Konsekuensi dari kegagalan tersebut adalah memburuknya kesejahteraan masyarakat.

- ↓ Lonjakan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan

- ↓ Penurunan posisi Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah (*middle income*)

- ↓ Pendapatan per kapita Indonesia turun dari Rp59,1 juta per penduduk (US\$4.174,5 per penduduk) pada 2019 menjadi Rp56,9 juta per penduduk (US\$3.911,7 per penduduk) pada 2020.



1 November 2022 | Komisi XI

Daya Beli Anjlok, Pemerintah harus Kendalikan Inflasi

Tingginya inflasi pangan makin mengancam daya beli masyarakat.

Harga-harga pangan naik cukup tajam pada akhir Oktober 2022 dibandingkan Oktober tahun lalu, kenaikan seperti beras naik 5%, daging sapi 7,5%, telur sebesar 23%, minyak goreng naik 10,7%, cabai rawit 23,3% dan pangan lainnya terpantau naik.

"Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun dari sebelumnya 124,7 menjadi 117,2, artinya terjadi penurunan signifikan pada keyakinan konsumen, situasi ini tidak baik karena kita akan menghadapi tantangan lebih berat tahun depan terkait ketidakpastian ekonomi global," - H. Ecky Awal Mucharam (Anggota Komisi XI DPR RI FPKS)

Daya Beli Masyarakat
Makin Anjlok

Pemerintah Harus Kendalikan Inflasi

Tingginya inflasi pangan makin
mengancam daya beli masyarakat.

Harga pangan naik dalam satu tahun



Sejak awal tahun rupiah
sudah melemah sebanyak

8,87%



“Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun dari sebelumnya 124,7 menjadi 117,2, artinya terjadi penurunan signifikan pada keyakinan konsumen, situasi ini tidak baik karena kita akan menghadapi tantangan lebih berat tahun depan terkait ketidakpastian ekonomi global

H. Ecky Awal Mucharam
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

13 Oktober 2022 | Komisi XI

Bunga Utang Makin Tinggi, PKS: Pemerintah Harus Hati-hati!

Tingginya pembiayaan utang akan meningkatkan beban belanja APBN di masa mendatang. Sebagai informasi, dalam periode tahun 2018–2022, pembayaran bunga utang meningkat dari Rp257,9 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp403,9 triliun (outlook tahun 2022) dan anggaran pembayaran bunga utang tahun 2023 sebesar Rp441,4 triliun atau mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 9,3 persen dari outlook tahun 2022.

Artinya bahwa sebagian besar pembiayaan utang dialamatkan untuk pembayaran bunga utang (belum termasuk pembayaran cicilan pokok utang).

Utang Indonesia dari Tahun ke Tahun
 2017: Rp3.995 triliun
 2018: Rp4.418 triliun

2019: Rp4.786 triliun
 2020: Rp6.074 triliun
 2021: Rp6.908 triliun
 Agustus 2022: Rp7.236,6 triliun

Anggaran Bunga Utang di APBN dari Tahun ke Tahun
 2017: Rp216,6 Triliun
 2018: Rp257,9 T
 2019: Rp275,5 T
 2020: Rp314,1 T
 2021: Rp343,5 T
 2022: Rp403,9 T
 RAPBN 2023: 441,4 T

Alih-alih menyukseskan program peningkatan kualitas belanja (spending better), pembiayaan utang cenderung memperketat ruang gerak fiskal (fiscal space) ke depannya. Karena pada faktanya penambahan utang tersebut penggunaannya didominasi untuk hal yang tidak produktif, yaitu pembayaran bunga utang.

Bunga Utang Makin Tinggi, PKS : Pemerintah Harus Hati-Hati!

Bunga Utang RI Meningkat



Anggaran pembayaran bunga utang tahun 2023 naik **9,3 persen** dari outlook tahun 2022, menjadi **Rp441,4 Triliun**

Utang Indonesia



2 April 2022 | Wabah PMK | Komisi V

Bukan Pertumbuhan Ekonomi yang Meroket, Melainkan Hutang Negara

PKS Minta Pemerintah Serius Tuntaskan Janji Kurangi Utang Negara

Utang pemerintah di era Presiden Jokowi terus mengalami kenaikan. Bahkan dalam kurun waktu 2014 hingga 2019, pemerintah sudah mencetak utang baru sebesar Rp 4.016 triliun

Per akhir Februari 2022, posisi utang Pemerintah berada di angka Rp 7.014 triliun dengan rasio utang Pemerintah terhadap PDB sebesar 40,17 %

Bukan Pertumbuhan Ekonomi yang Meroket,
Melainkan Hutang Negara

PKS Minta Pemerintah Serius Tuntaskan Janji Kurangi Utang Negara

- Utang pemerintah di era Presiden Jokowi terus mengalami kenaikan. Bahkan dalam kurun waktu 2014 hingga 2019, pemerintah sudah mencetak utang baru sebesar

Rp 4.016 triliun

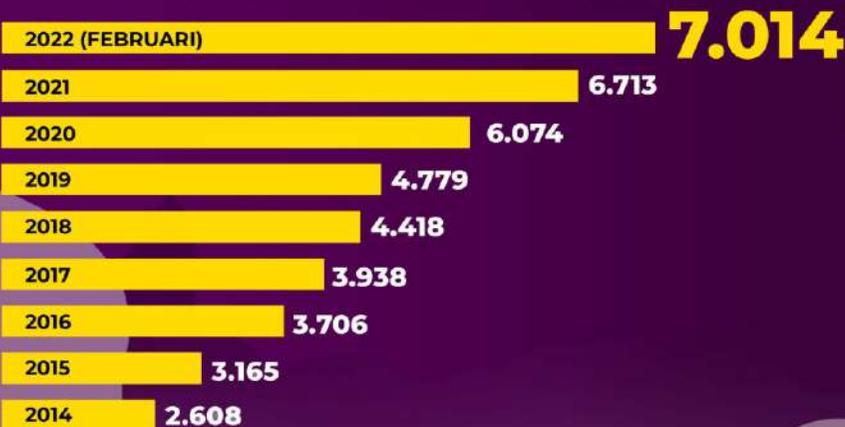
- Per akhir Februari 2022, posisi utang Pemerintah berada di angka

Rp 7.014 triliun

dengan rasio utang Pemerintah terhadap PDB sebesar

40,17 %

- Rincian utang pemerintah (dalam triliun rupiah)



5

Legislasi

10 Desember 2021 | Pansus IKN

56 Anggota Pansus IKN langgar Aturan DPR I/2020

Jumlah 56 anggota pansus RUU IKN langgar peraturan DPR I/2020.

Fraksi PKS menyoroti pembentukan panitia khusus RUU Ibukota Negara.

Pasal 104 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib menyatakan jumlah pansus ditetapkan oleh rapat paripurna DPR paling banyak 30 orang anggota dan 3 wakil ketua.

Sementara, dalam rapat Paripurna Selasa, 7 Desember 2021 lalu DPR menyepakati jumlah anggota pansus RUU IKN sebanyak 56 orang dan 5 wakil ketua.

Jumlah 56 Anggota Pansus RUU IKN Langgar Peraturan DPR 1/2020

F-PKS menyoroti pembentukan Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara

- Pasal 104 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib menyatakan jumlah maksimal pansus RUU IKN

30 anggota pansus & **3** wakil ketua

- Sementara, dalam rapat Paripurna Selasa, 7 Desember 2021 lalu DPR menyepakati

56 anggota pansus & **5** wakil ketua



“

Jumlah ini melebihi ketentuan yang telah diatur pada Pasal 104 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib

H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
Anggota Komisi V DPR RI F-PKS



24 November 2021 | RUU HKPD | Baleg

RUU HKPD Belum Tuntaskan
Kesenjangan Kemandirian Fiskal Daerah

PKS Menolak RUU HKPD Karena Mengamputasi Kewenangan Daerah

Catatan BPK menunjukkan :

- 443 Pemerintah Daerah belum masuk kategorimandiri dari sisi fiskal [80,7% dari 503 PEMDA)

- 468 Pemerintah Daerah sejak 2013 tidak mengalami perubahan kategori kemandirian fiskal.

- Hasil pembahasan RUU HKPD belum berhasil memberikan formula yang lebih baik dan adil bagi daerah seperti pada DBH sumberdaya alam.

- Pasal 115 ayat 4 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan yang bersumber dari dana reboisasi dimana daerah provinsi penghasil hanya menerima 40 persen

Kelapa Sawit menjadi Sektor yang penting baik terhadap output, penyerapan tenaga kerja hingga isu lingkungan

- Luas perkebunan 14 juta hektare

- Produksi CPO 50 juta ton

Sebagai produsen terbesar di dunia, Indonesia gagal memberikan kesejahteraan bagi daerah panghasil. Provinsi provinsi panghasil kelapa sawit memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dan kemiskinan nasional seperti Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, Aceh ,dan Bengkulu.

RUU HKPD

Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Belum Tuntaskan Kesenjangan Kemandirian Fiskal Daerah

PKS Menolak RUU HKPD Karena Mengamputasi Kewenangan Daerah

- Catatan BPK menunjukkan

443 Pemerintah Daerah

belum masuk kategori mandiri dari sisi fiskal (80,7% dari 503 PEMDA)

- **468** Pemerintah Daerah

sejak 2013 tidak mengalami perubahan kategori kemandirian fiskal.

- Hasil pembahasan RUU HKPD belum berhasil memberikan formula yang lebih baik dan adil bagi daerah seperti pada DBH sumberdaya alam.

- Pasal 115 ayat 4 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan yang bersumber dari dana reboisasi di mana daerah provinsi penghasil hanya menerima 40 persen



Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.
Anggota Komisi XI DPR RI FPKS

- Kelapa sawit menjadi sektor yang penting baik terhadap output, penyerapan tenaga kerja hingga isu lingkungan



Luas perkebunan
14 juta hektare



Produksi CPO
50 juta ton

- Sebagai produsen terbesar di dunia, Indonesia gagal memberikan kesejahteraan bagi daerah penghasil. Provinsi-provinsi penghasil kelapa sawit memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari kemiskinan nasional seperti Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, Aceh, dan Bengkulu

13 April 2022 | RUU TPKS } Baleg

Usulan PKS terkait RUU TPKS

Fraksi PKS sangat prihatin dengan semakin maraknya tindakan perzinaan dan gaya hidup seks bebas di kalangan remaja Indonesia.

Menurut survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Kesehatan pada Oktober 2013, menemukan sebanyak 63 % remaja sudah pernah melakukan hubungan seksual dalam hubungan yang belum sah.

Sementara itu, menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 mengungkapkan bahwa sekitar 2 % remaja wanita dan 8 % remaja pria usia 15-24 tahun mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan 11 % di antaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.

Menurut studi kualitatif yang dilakukan oleh Pusat Kesehatan Reproduksi Fakultas Kedokteran UGM (2017), sebagian besar remaja perempuan muda belum menikah yang mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) akan memilih untuk melakukan aborsi.

Fenomena penyimpangan seksual pun semakin mengkhawatirkan bahkan menyebabkan risiko penularan HIV/AIDS. Berdasarkan Data Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Tahun 2019 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus HIV/AIDS yang mengalami puncak pada tahun 2019. Data UNAIDS 2019 menunjukkan bahwa penyebab risiko penularan tertinggi HIV/AIDS ini berasal dari laki-laki seks dengan laki-laki (homoseksual).

Sangat prihatin dengan semakin **maraknya perzinaan** dan **gaya hidup seks bebas** serta fenomena **penyimpangan seksual** yang semakin mengkhawatirkan.

PKS mengusulkan **memasukan norma larangan perzinaan** dalam RUU TPKS dengan perluasan delik zina Pasal 284 KUHP **serta larangan penyimpangan seksual** dan segala bentuk kampanyenya.

Data seks bebas dan penyimpangan seksual :

Survey KPAI & Kemenkes
(Oktober 2013)

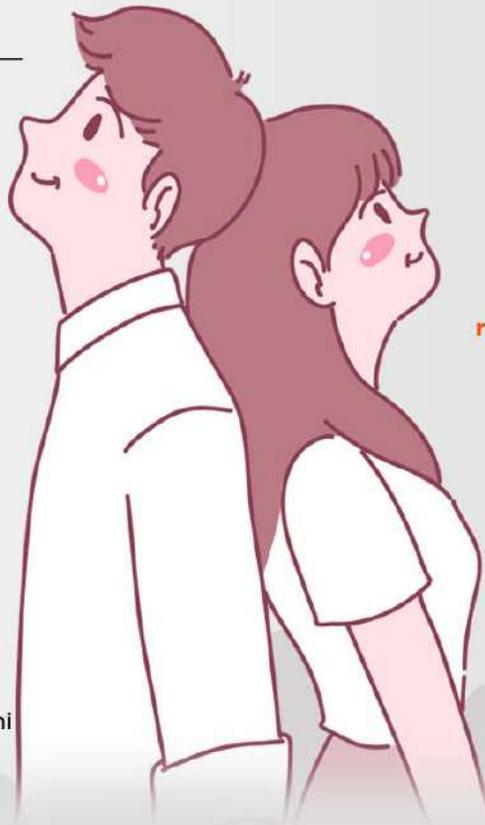
63 % remaja

sudah pernah melakukan hubungan seksual dalam hubungan yang belum sah.

Survei Demografi
(2017)

2 % remaja wanita
8 % remaja pria

usia 15-24 tahun mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.



Survei FK UGM
(2017)

sebagian besar remaja perempuan muda belum menikah yang mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD) akan memilih untuk melakukan aborsi.



17 April 2022 | UU PPP | Baleg

Revisi UU PPP Dikebut,

Fraksi PKS: Tak Sejalan dengan Perintah MK terkait Partisipasi Bermakna dari Masyarakat

Proses Pembentukan Revisi UU PPP

- Rabu, 2 Februari 2022 | Rapat Pleno Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011.
- Kamis, 3 Februari 2022 | Rapat Panja Penyusunan RUU PPP
- Senin, 7 Februari 2022 | Disetujui sebagai RUU Usul Inisiatif DPR

(Tahap Penyusunan hanya 4Z-5 hari)

- Kamis, 7 April 2022 | Tahap Pembahasan dimulai
- Rabu, 13 April 2022 | Persetujuan Tingkat I, RUU ini disetujui oleh 8 dari 9 fraksi di DPR. Hanya Fraksi PKS yang menolak.

(Tahap Pembahasan hanya 6-7 hari)

Tinggal diketok dalam Paripurna untuk Persetujuan Tingkat II. "Konsultasi Publik" dalam proses pengkajian (bukan penyusunan/pembahasan), hanya melibatkan pihak-pihak yang mendukung.

"Seharusnya, DPR dapat menjalankan fungsi legislasi dengan lebih cermat dan hati-hati karena menyangkut keberlakuan UU dalam waktu yang panjang dan berdampak bagi masyarakat luas. Jangan sampai revisi ini dilakukan hanya semata-mata dimaksudkan untuk memberikan payung hukum terhadap UU Cipta Kerja" - Hj. Ledia Hanifa A, S.Si.,M.Psi.T (Anggota Komisi X DPR RI FPKS)

Revisi UU PPP Dikebut, PKS: Tak Sejalan dengan Perintah MK terkait Partisipasi Bermakna dari Masyarakat

**2 Februari
2022**

Rapat Pleno Penyusunan
RUU tentang Perubahan
Kedua atas UU No. 12
Tahun 2011.

**3 Februari
2022**

Rapat Panja
Penyusunan
RUU PPP

**7 Februari
2022**

Disetujui sebagai
RUU Usul Inisiatif
DPR

13 April 2022

Persetujuan Tingkat I,
RUU ini disetujui oleh
8 dari 9 fraksi di DPR.
Hanya Fraksi PKS
yang menolak

7 April 2022

Tahap Pembahasan
dimulai



- "Konsultasi Publik" dalam proses pengkajian (bukan penyusunan/pembahasan), hanya melibatkan pihak-pihak yang mendukung.

“ Seharusnya, DPR dapat menjalankan fungsi legislasi dengan lebih cermat dan hati-hati karena menyangkut keberlakuan UU dalam waktu yang panjang dan berdampak bagi masyarakat luas. Jangan sampai revisi ini dilakukan hanya semata-mata dimaksudkan untuk memberikan payung hukum terhadap UU Cipta Kerja

**Hj. Ledia Hanifa A,
S.Si., M.Psi.T**
(Sekretaris FPKS DPR RI)



5 Oktober 2020 | UU Cipta Kerja | Baleg

Pelbagai Versi Naskah RUU Cipta Kerja

Setidaknya terdapat 5 (lima) versi draf RUU Cipta Kerja yang beredar di kalangan masyarakat setelah dibacakannya pandangan fraksi dalam rapat paripurna tanggal 5 Oktober 2020. Draft yang beredar pada tanggal 5 Oktober 2020 berjumlah 905 halaman, kemudian pada tanggal 9 Oktober terdapat draf lain yang beredar yaitu draf versi 1052 halaman, pada tanggal 12 Oktober giliran draf versi 1035 halaman yang beredar, pada malam hari di tanggal yang sama muncul draf versi 812 halaman, dan terakhir adalah draf 1187 halaman yang terbit pada tanggal 19 Oktober 2020.

Perbedaan jumlah halaman diakui karena ada perubahan ukuran pada formatting layout pada naskah RUU Cipta Kerja dengan mengubah ukuran A4 menjadi ukuran legal sehingga jumlah halaman yang sebelumnya berjumlah ribuan menjadi 812 halaman. Draft versi 812 halaman tersebut merupakan draf RUU

yang dikirimkan ke presiden oleh DPR sebagaimana dinyatakan oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin.

Anehnya pada tanggal 19 oktober terdapat draf baru dengan jumlah halaman yang berbeda beredar. Pada tanggal 19 tersebut MUI dan Muhammadiyah menerima draf RUU Cipta Kerja yang berjumlah 1187 halaman yang diserahkan langsung oleh Mensesneg di Istana Negara. Mensesneg menyatakan bahwa perubahan halaman tersebut merupakan hasil penyesuaian format dan pengecekan tulisan . Perbedaan jumlah yang signifikan ini menimbulkan tanda tanya bahwa apakah dengan penambahan jumlah halaman tersebut juga berekses pada perubahan substansi yang terdapat di dalam RUU Cipta Kerja. Padahal setiap Undang-undang yang sudah disahkan dalam sidang Paripurna seharusnya tidak boleh lagi mengalami perubahan substansi.

KRONOLOGIS

12 Feb 2020 **1**

Draft 1028 halaman diserahkan pemerintah untuk dibahas di Baleg DPR RI

14 April - 28 Sept **3**

Selama Pembahasan, **fraksi-fraksi menyerahkan DIM** sebagai bahan pembahasan

30 Sept **5**

Beberapa pasal perlu ada formulasi atas usulan-usulan Fraksi. **Panja membentuk Tim Perumus (Timmus) & Tim Sinkronisasi (Timsin)**

3 Okt **7**

Panja sepakat hasil dari poin 4 dan poin 6 yang menjadi **draf final ruu cipta kerja** untuk dibawa kembali ke Baleg

RUU CIPTA KERJA

2 14 April

Baleg DPR RI **bentuk panja cipta kerja** untuk pendalaman DIM

4 28 Sept

Dicapai kesepakatan **rapat panja** atas pertimbangan DIM Fraksi-fraksi

6 3 Okt

Dicapai kesepakatan **Timmus & Timsin** dan dibawa kembali ke Panja untuk disepakati

8 3 Okt

(Seharusnya) draf diserahkan ke baleg dengan naskah asli yang sudah final karena akan dimintai pandangan masing-masing fraksi atas draf tersebut

9 3 Okt

Karena poin 7 dan 8 disebut dalam 1 hari, maka F- PKS memakai draf berdasar poin 4 dan 6 sebagai bahan pandangan fraksi. Yang seharusnya menunggu final draf dari Baleg untuk memberikan pandangan (sesuai Tatib)

10 5 Okt

Pandangan fraksi dibawa ke bamus dan diagendakan langsung H+1 (hari kerja) untuk ditetapkan di paripurna, **padahal draf asli hingga paripurna belum dipegang oleh anggota panja apalagi anggota DPR**

1. Sejak akhir Februari 2020 penolakan RUU cipta kerja.

2. Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid sampaikan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja pada 24/2/2020. Narasumber eksternal hadir salah satunya Dr Irman Putra Sidin.

y

UPDATE VERSI DRAFT RUU CIPTAKER

Yang beredar di publik, Bukti UU Cipta Kerja **BERMASALAH**



6

Momentum

23 Mei 2021 | Kesejahteraan Veteran Indonesia | Momentum

Catatan Veteran Indonesia Pejuang kemerdekaan yang belum "sejahtera"

Tunjangan Veteran di berbagai negara :

Malaysia : Tunjangan Malaysia berjumlah sebesar RM 450.00 (1.400.000) bahkan bisa lebih apabila veteran tersebut sudah mempunyai anak yang sekolah dan kebutuhan lainnya

USA : Tunjangan veteran di Amerika sebesar \$407 (5.000.000) apabila veteran hidup sendiri dan bisa lebih berkali lipat jika berkeluarga.

Australia : Australia, memberikan tunjangan dalam bentuk uang dan juga fasilitas akses gratis pendidikan, kesehatan dan pinjaman di bank untuk para keluarga veteran

Indonesia : Tunjangan veteran di Indonesia masih terbilang rendah hanya sekitar 1.4 – 1.6 juta tanpa ada tambahan akses fasilitas gratis.

CATATAN VETERAN INDONESIA

Pejuang kemerdekaan yang belum “sejahtera”

**PKS : Pemerintah Harus Memperhatikan
Kesejahteraan Veteran Yang Telah Berjasa Besar**

Tunjangan Veteran di berbagai negara :

-  **Malaysia**
RM 450.00 (1.400.000)

Bahkan bisa lebih apabila veteran tersebut sudah mempunyai anak yang sekolah dan kebutuhan lainnya.

-  **Amerika Serikat**
\$407 (5.000.000)

Apabila veteran hidup sendiri dan bisa berkali lipat jika berkeluarga.

-  **Australia**
Uang+Fasilitas

Memberikan tunjangan dalam bentuk uang dan juga fasilitas akses gratis pendidikan, kesehatan dan pinjaman di bank untuk para keluarga veteran.



Indonesia
1.4 – 1.6 juta

tanpa ada tambahan akses fasilitas gratis



3 Desember 2021 | Hari Disabilitas Internasional

Hari Disabilitas Internasional

PKS Dorong Kebijakan Inklusif, Berpihak Pada Hak, dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas di Indonesia

Kebijakan-kebijakan inklusif yang diperjuangkan PKS:

- Mengingatkan Pemerintah agar memenuhihak-hak penyandang disabilitas dalam hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi sesuai amanat UU No 8/2016 pasal 11 tentang Penyandang Disabilitas.

- Memperjuangkan akses dan partisipasi serta pembinaan di bidang keolahragaan bagi pelaku olahraga penyandang disabilitas dalam revisi UU No 3/2005 tentang sistem keolahragaan nasional.

- Memperjuangkan afirmasi bagi guru disabilitas pada seleksi Guru PPPK.

- Memastikan aksesibilitas dalam pemanfaatan ruang jalan bagi para penyandang disabilitas dalam pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No.38/Tahun 2004 tentang Jalan.

- Mengingatkan pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Kab/kota dan Perguruan Tinggi.

- Mengingatkan Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran bagi pendidikan inklusif secara memadai.

- Mengingatkan Pemerintah untuk memenuhi 2 persen pegawainya penyandang disabilitas.

- Mengkritisi pra konsep peta jalan pendidikan 2020-2035 yang belum memasukkan layanan penyandang disabilitas.

3 Desember 2021

HARI DISABILITAS INTERNASIONAL

PKS Dorong Kebijakan Inklusif, Berpihak Pada Hak, dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas di Indonesia

Kebijakan-Kebijakan Inklusif yang Diperjuangkan PKS

Mengingatkan Pemerintah agar **memenuhi hak-hak penyandang disabilitas** dalam hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi sesuai amanat UU No 8/2016 pasal II tentang Penyandang Disabilitas.

Memperjuangkan **akses dan partisipasi serta pembinaan di bidang keolahragaan** bagi pelaku olahraga penyandang disabilitas dalam revisi UU No 3/2005 tentang sistem keolahragaan nasional.

Memperjuangkan **afirmasi bagi guru disabilitas** pada seleksi Guru PPPK.

Memastikan aksesibilitas dalam **pemanfaatan ruang jalan** bagi para penyandang disabilitas dalam pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No. 38/Tahun 2004 tentang Jalan.

Mengingatkan **pembentukan Unit Layanan Disabilitas** di Kab/kota dan Perguruan Tinggi.

Mengingatkan Pemerintah untuk **mengalokasikan anggaran bagi pendidikan inklusif** secara memadai.



Mengingatkan Pemerintah untuk **memenuhi 2 persen pegawainya penyandang disabilitas**.

Mengkritisi **pra konsep peta jalan pendidikan 2020-2035** yang belum memasukkan layanan penyandang disabilitas.

14 Juni 2021 | Momentum

Give Blood and keep the world beating”

Kebutuhan Darah Nasional Masih Kurang 500 Ribu Kantong.

PKS ajak masyarakat mendonorkan darah untuk membantu sesama.

Stok donor darah PMI saat ini 64.049 kantong darah.

Menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), jumlah kebutuhan minimal darah di Indonesia sekitar 5,1 juta kantong darah pertahun (2% jumlah penduduk Indonesia),

Sedangkan secara data, kebutuhan itu baru terpenuhi sekitar 92% atau sebanyak 4,6 juta kantong yang berasal dari Palang Merah Indonesia (PMI) dan sisanya dari donor darah sukarela. Artinya, kebutuhan darah nasional masih kurang sekitar 500 ribu kantong darah. Padahal, Setiap delapan detik, ada satu orang yang membutuhkan transfusi darah di Indonesia. Artinya dalam satu hari ada 10.800 orang yang membutuhkan transfuse darah. 7. Perburuan Hi | Berburu hiu jenis apapun untuk diambil siripnya dan kemudian dijual.

14 Juni Hari Donor Darah Sedunia
"Give blood and keep the world beating"

KEBUTUHAN DARAH NASIONAL MASIH KURANG 500 RIBU KANTONG

PKS Ajak Masyarakat Mendonorkan
Darah Untuk Membantu Sesama



- Stok darah PMI saat ini
64.049 kantong
- Standar WHO jumlah kebutuhan minimal darah di Indonesia per tahun
5.100.000 kantong
- Secara data, stok baru terpenuhi
4.600.000 kantong/tahun
- Sehingga masih kurang sekitar
500.000 kantong/tahun
- Kebutuhan kantong darah



Satu
Orang / 8 detik

10.800 orang/hari



2 Agustus 2021 | Momentum | Olimpiade Tokyo 2020

Anthony Ginting Raih Medali Perunggu Olimpiade Tokyo 2020!

PKS Mengucapkan Selamat Kepada Anthony Ginting yang Telah Meraih Medali Perunggu di Olimpiade Tokyo 2020!

Anthony Ginting berhasil meraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 usai mengalahkan pebulutangkis Guatemala, Kevin Cordon Senin (2/8/2021).

Anthony Ginting memenangi Gim pertama dengan skor 21-11 & Gim kedua dengan skor 21-13.

Anthony Ginting akhiri puasa medali Olimpiade 17 Tahun Tunggal Putra.

Terakhir tunggal putra mempersembahkan medali di Olimpiade 2004 lewat Taufik Hidayat dengan raihan emas dan Sony Dwi Kuncoro dengan raihan medali perunggu.

Anthony Ginting kini menjadi pebulutangkis tunggal putra ketujuh Indonesia yang pernah meraih medali di ajang Olimpiade.

ANTHONY GINTING

RAIH MEDALI PERUNGGU OLIMPIADE TOKYO 2020!

PKS Mengucapkan Selamat Kepada Anthony Ginting yang Telah Meraih Medali Perunggu di Olimpiade Tokyo 2020!

■ Anthony Ginting berhasil meraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 usai mengalahkan pebulutangkis Guatemala, Kevin Cordon Senin (2/8/2021).

■ Anthony Ginting memenangi **Gim pertama** dengan skor 21-11 & **Gim kedua** dengan skor 21-13.

■ Anthony Ginting **akhiri puasa medali** Olimpiade 17 Tahun Tunggal Putra.

■ Terakhir tunggal putra mempersembahkan medali di **Olimpiade 2004** lalu lewat Taufik Hidayat dengan raihan emas dan Sony Dwi Kuncoro dengan raihan medali perunggu.

■ Anthony Ginting kini menjadi **pebulutangkis tunggal putra ketujuh Indonesia** yang pernah meraih medali di ajang Olimpiade.



Menang dua Gim langsung dengan skor



Anthony Ginting
(Indonesia)

21 21



Kevin Cordon
(Guatemala)

11 13



7 Agustus 2021 | Momentum | Olimpiade Tokyo 2020

Daftar Atlet Indonesia Peraih Medali Di Olimpiade Tokyo 2020!

PKS Mengucapkan Selamat Kepada Atlet Indonesia yang Telah Meraih Medali di Olimpiade Tokyo 2020!

Kontingen Indonesia telah mengakhiri perjuangan mereka di Olimpiade Tokyo 2020 dengan raihan 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.

Daftar Atlet Indonesia peraih medali Olimpiade Tokyo 2020 :

1. Greysia Polii/Apriyani Rahayu (Emas)
Ganda putri Bulu tangkis
2. Eko Yuli Irawan (Perak)
Angkat besi 61 kg putra
3. Windy Cantika Aisah (Perunggu)
Angkat besi 49 kg putri
4. Rahmat Erwin Abdullah (Perunggu)
Angkat besi 73 kg putra
5. Anthony Sinisuka Ginting (Perunggu)
Bulu tangkis Tunggal putra

DAFTAR ATLET INDONESIA

PERAIH MEDALI DI OLIMPIADE TOKYO 2020!

PKS Mengucapkan Selamat Kepada Atlet Indonesia yang Telah Meraih Medali di Olimpiade Tokyo 2020!

- **Kontingen Indonesia** telah mengakhiri perjuangan mereka di Olimpiade Tokyo 2020 dengan raihan **1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.**



Greysia Polii/ Apriyani Rahayu

Ganda Putri Bulu Tangkis



Eko Yuli Irawan

Angkat Besi Putra Kelas 61 kg



Anthony Ginting

Tunggal Putra
Bulu Tangkis



Windi Cantika

Angkat Besi Putri
Kelas 49 kg



Rahmat Erwin

Angkat Besi Putra
Kelas 73 kg

4 September 2021 | Sikap PKS

PKS Mantap Beroposisi di tengah Konsolidasi partai Pendukung Pemerintah

Presiden Jokowi mengundang ketua-ketua umum partai politik pendukung pemerintah ke istana negara pekan lalu (25/8). Hal ini dibaca sebagai upaya konsolidasi partai koalisi pendukung Jokowi.

■ Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyatakan PKS tetap memilih untuk menjadi oposisi. Bahkan melihat dan mengevaluasi jalannya pemerintahan di bawah Presiden Jokowi 7 tahun terakhir, PKS mengatakan justru semakin mantap beroposisi.

Evaluasi Fraksi PKS Terhadap Pemerintahan Jokowi

■ Pemerintahan saat ini belum mampu mengatasi permasalahan struktural ekonomi.

■ Di bidang politik Indeks Demokrasi merosot ke posisi 64 dari 167 negara.

Di bidang pengembangan SDM dan daya saing bangsa, Indonesia di peringkat 107 dari 189 negara.

Di bidang ideologisasi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kita semua berharap komitmen kebangsaan makin kokoh dan tidak hanya lip service atau sloganistik.

Jazuli Juwaini :

“Jangan ragukan sikap oposisi PKS. Sejak awal kami sampaikan oposisi hadir untuk menjaga demokrasi, menghadirkan check and balances agar pemerintahan tetap on the track berpihak kepada kepentingan rakyat”.

DI TENGAH KONSOLIDASI PARTAI PENDUKUNG PEMERINTAH PKS JUSTRU SEMAKIN MANTAP BEROPOSISI

- Presiden Jokowi mengundang ketua-ketua umum partai politik pendukung pemerintah ke istana negara pekan lalu (25/8). Hal ini dibaca sebagai upaya konsolidasi partai koalisi pendukung Jokowi.
- Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyatakan PKS tetap memilih untuk menjadi oposisi. Bahkan melihat dan mengevaluasi jalannya pemerintahan di bawah Presiden Jokowi 7 tahun terakhir, PKS mengatakan Justru semakin mantap beroposisi.

Evaluasi Fraksi PKS Terhadap Pemerintahan Jokowi

- Pemerintahan saat ini belum mampu mengatasi permasalahan struktural ekonomi.
- Di bidang politik Indeks Demokrasi merosot ke posisi 64 dari 167 negara.
- Di bidang pengembangan SDM dan daya saing bangsa, Indonesia di peringkat 107 dari 189 negara.
- Di bidang ideologisasi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kita semua berharap komitmen kebangsaan makin kokoh dan tidak hanya lip service atau sloganistik.

“

Jangan ragukan sikap oposisi PKS. Sejak awal kami sampaikan oposisi hadir untuk menjaga demokrasi, menghadirkan *check and balances* agar pemerintahan tetap *on the track* berpihak kepada kepentingan rakyat.

Dr. Jazuli Juwaini, M.A

(Ketua Fraksi PKS DPR RI)



9 September 2021 | Aspirasi

Jalan Terjal Rakyat Sampaikan Aspirasi PKS Suarakan Penangkapan Peternak Suroto

From This | Selasa, 7 Sep 2021
Peternak di Blitar ditangkap
aparatus saat membentangkan poster
ke Presiden.

"PAK JOKOWI BANTU
PETERNAK BELI JAGUNG
DENGAN HARGA WAJAR"

Response | Rabu, 8 Sep 2021
Pria di Blitar Membentangkan Poster
ke Jokowi, Legislator

PKS: Peternak Minta Tolong,
Bukan Menghina!
"Ada peternak kita minta
dibantu, dia minta tolong ke
Presidennya dengan kalimat
sederhana dan penting. Dia
tidak menghina Presiden.
Kenapa ditangkap?" - Dr. H.
Mardani, M.Eng (Anggota
Komisi II DPR RI FPKS)

To This | Kamis, 16 September
2021

Suroto, peternak asal
Kabupaten Blitar, Jawa Timur,
akhirnya diundang ke Istana
Negara. Ia diundang bertemu
Presiden

Jokowi untuk membahas keluhan-
kesah yang sempat ia
sampaikan lewat poster yang
dibentangkannya saat Presiden
Joko Widodo melakukan
kunjungan kerja ke Blitar pada 7
September lalu.

JALAN TERJAL RAKYAT SAMPAIKAN ASPIRASI PKS SUARAKAN PENANGKAPAN PETERNAK SUROTO

■ **From This** | Selasa, 7 Sep 2021

Peternak di Blitar ditangkap aparat saat bentangkan poster ke Presiden.



Presiden Jokowi ke Suroto: Kalau Nggak Ada Kamu Saya Tidak Tahu Kondisi di Bawah

Kamis, 10 September 2021 | 07:43 WIB



■ **Response** | Rabu, 8 Sep 2021

Pria di Blitar Bentangkan Poster ke Jokowi, Legislator PKS: Peternak Minta Tolong, Bukan Menghina!

Mardani: All Sera heran dengan penangkapan pria itu. Sebab, tulisan pada poster yang dibawa oleh pria itu sama sekali tidak ada kalimat menghina Presiden.

Dhara Ardana Prabudi | Rabu, 08 September 2021 | 11:27 WIB



"Ada peternak kita minta dibantu, dia minta tolong ke Presidennya dengan kalimat sederhana dan penting. Dia tidak menghina Presiden. Kenapa ditangkap?"

Dr. H. Mardani, M.Eng
Anggota Komisi II DPR RI FPKS

Sumber : akurat.co

■ **To This** | Kamis, 16 Sep 2021

Suroto, peternak asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur, akhirnya diundang ke Istana Negara. Ia diundang bertemu Presiden Jokowi untuk membahas keluhan-kesah yang sempat ia sampaikan lewat poster yang dibentangkannya saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Blitar pada 7 September lalu.

1 Desember 2021 | Hari Aspirasi

Hari Aspirasi Fraksi PKS DPR RI Tahun 2021

Pada periode Oktober 2020-
Oktober 2021, Fraksi PKS DPR RI
telah menerima aspirasi dari
seluruh masyarakat di Indonesia
sebanyak 45 Aspirasi, yang
dilaksanakan secara virtual dan
tatap muka.

Dari 45 aspirasi yang masuk,
jenis aspirasi terbagi menjadi 3
kategori aspirasi, yaitu :

Aspirasi tentang regulasi atau
disebut legislasi sebanyak 19
kegiatan,

Aspirasi yang bersifat advokasi
atau penyelesaian satu kasus
masalah tertentu sebanyak 25
kegiatan dan

Aspirasi yang bersifat
kunjungan atau pembelajaran
politik berjumlah 1 kegiatan.

Hari Aspirasi FPKS DPR RI
dilakukan setiap Selasa dan
Jumat.

Kunjungi www.fraksi.pks.id

RESUME ASPIRASI FRAKSI PKS DPR RI

Oktober 2020-Oktober 2022

#PKSMelayaniRakyat

- Fraksi PKS DPR RI menerima aspirasi dari seluruh masyarakat di Indonesia pada periode Oktober 2020-Oktober 2022 sebanyak **86 aspirasi**.

- Aspirasi bersifat **virtual** dan **tatap muka**. Adapun aspirasi tatap muka dilaksanakan dengan jumlah terbatas dan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19.

25 26



Advokasi

19



Legislasi

Total OKT 2020 - OKT 2022

86 Aspirasi

■ OKT 2020 - OKT 2021

■ OKT 2021 - OKT 2022

1 4

Pembelajaran Politik



21 November 2022 | Dr. Salim Menyapa Indonesia

Ketua Majelis Syura PKS DR. Salim Terima Gelar Adat Dari Kesultanan Kadriah Kalimantan Barat

Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri memperoleh anugerah gelar adat dari Kesultanan Kadriah Pontianak yang diberikan langsung oleh Sultan Syarif Machmud Melvin Alkadrie melalui prosesi adat di Istana Kadriah, Senin, (21/11/2022).

1. Kepulauan Riau

Dato Wira Cahaya Buana, Dato Wira merupakan gelar tertinggi yang diberikan kepada tokoh nasional oleh LAM tingkat kabupaten/kota.

2. Lampung

Yang Mulia Datuan Satria Negara, Sebagai mandat untuk menjaga NKRI dengan dasar negaranya Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi.

3. Sulawesi Selatan

I Waliuddin Karaeng Manaba
Makna: sosok bangsawan tinggi

yang ramah, memasyarakat, peduli, peka, berpengetahuan luas dan senantiasa teguh dalam memperjuangkan kebenaran dan kebaikan.

4. Provinsi Riau,

Datuk Maulana Sukmajaya
Makna: orang yang dihormati karena memiliki tauladan dan panutan sebagai ulama berjiwa besar dalam memperkuat dan membela agama Allah, memiliki kesetiaan terhadap negeri dan masyarakat adat, dimanapun berpijak akan selalu amanah.

5. Kalimantan Barat

Mas Pangeran Abdi Wangsa,
Makna: tokoh yang menjadi pemimpin dan pelayan bagi masyarakatnya. Mempunyai keteladanan dan kepemimpinan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Ketua Majelis Syura PKS

DR. SALIM TERIMA GELAR ADAT DARI KESULTANAN KADRIAH KALIMANTAN BARAT

Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri memperoleh anugerah gelar adat dari Kesultanan Kadriah Pontianak yang diberikan langsung oleh Sultan Syarif Machmud Melvin Alkadrie melalui prosesi adat di Istana Kadriah, Senin, (21/11/2022).

1 Kepulauan Riau



Dato Wira Cahaya Buana

Dato Wira merupakan gelar tertinggi yang diberikan kepada tokoh nasional oleh LAM tingkat kabupaten/kota.

2 Lampung



Yang Mulia Datuan Satria Negara

Sebagai mandat untuk menjaga NKRI dengan dasar negaranya Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi.

3 Sulawesi Selatan



I Waliuddin Karaeng Manaba

Makna: sosok bangsawan tinggi yang ramah, memasyarakat, peduli, peka, berpengetahuan luas dan senantiasa teguh dalam memperjuangkan kebenaran dan kebaikan.

4 Provinsi Riau



Datuk Maulana Sukmajaya

Makna: orang yang dihormati karena memiliki tauladan dan panutan sebagai ulama berjiwa besar dalam memperkuat dan membela agama Allah, memiliki kesetiaan terhadap negeri dan masyarakat adat, dimanapun berpijak akan selalu amanah.

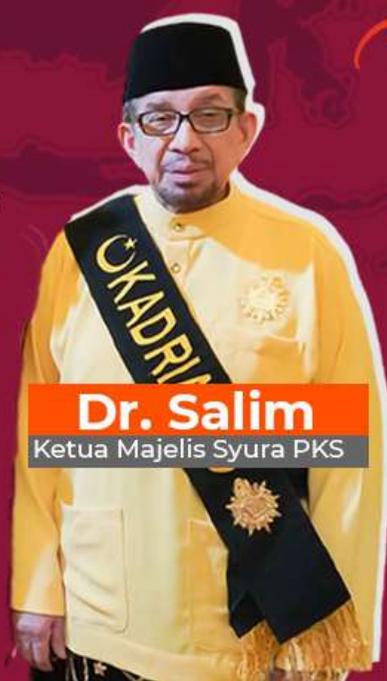
5

Kalimantan Barat

Mas Pangeran Abdi Wangsa

Makna: tokoh yang menjadi pemimpin dan pelayan bagi masyarakatnya.

Mempunyai keteladanan dan kepemimpinan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.



Dr. Salim

Ketua Majelis Syura PKS

25 November 2022 | Gempa Cianjur

DR. Salim Terjun Langsung Pimpin Pengarahan Bantuan PKS Untuk Korban Gempa Cianjur, Jawa Barat

Terdampak

1. 16 kecamatan (DAPIL 1,2 & 3)

- Kecamatan berat: 4
kecamatan

Cugenang, Cianjur Kota,
Warung Kondang dan
Gekbrong.

- Kecamatan sedang: 5
kecamatan

Pacet, Cipanas, sukaresmi,
cilaku, karang tengah.

- Kecamatan ringan: 7
kecamatan

Korban:

- Meninggal : 321 jiwa

- Masih dalam pencarian : 11 jiwa

Bangunan rusak akibat gempa:

- Rumah Rusak 62.628, terdiri:

1. 22.124 ringan

2. 13.070 sedang

3. 27.434 berat

- Fasilitas kesehatan : 14 unit

- Tempat ibadah: 160 unit

- Fasilitas pendidikan: 368 unit

- Kantor dan gedung: 16 unit

Bantuan yang dibutuhkan:

1. terpal/tenda

2. tim medis dan obat-obatan

3. makanan dan minuman

4. Popok

5. makanan bayi

6. perlengkapan perempuan.

Dr. Salim Terjun Langsung Pimpin Pengerahan Bantuan PKS untuk Korban Gempa Cianjur, Jawa Barat

- 16 kecamatan terdampak (151 Desa)
(DAPIL 1,2 & 3)
- Kecamatan Berat: **4 Kecamatan**
Cugenang, Cianjur Kota, Warung
Kondang Dan Gekbrong.
- Kecamatan Sedang: **5 Kecamatan**
Pacet, Cipanas, Sukaresmi, Cilaku,
Karang Tengah.
- Kecamatan Ringan: **7 Kecamatan**



321 jiwa meninggal

11 jiwa masih dalam pencarian



Bangunan rusak akibat gempa



Rumah rusak :
Ringan : **22.124 unit**
Sedang : **13.070 unit**
Berat : **27.434 unit**



Fasilitas pendidikan
368 unit



Fasilitas kesehatan
14 unit



Kantor dan Gedung
16 unit



Fasilitas ibadah
160 unit

Bantuan yang dibutuhkan

- Terpal/tenda
- Tim medis dan obat2an
- Makanan dan minuman
- Pampers, makanan bayi
- Perlengkapan perempuan



23 Maret 2022

Konsisten Jaga Budaya Bangsa

PKS Rutin Selenggarakan Pagelaran Wayang

1) DPP PKS - 28 Januari 2017

- Pagelaran Wayang
- Lakon : Semar Mbangun Kahyangan.
- Dalang : Ki Sri Kuncoro

2) DPP PKS - 6 Agustus 2017

- Pagelaran Wayang Golek
- Lakon: Ngamumule Jiwa Pahlawan
- Dalang: Ki Dalang Rahmat

3) FRAKSI PKS DPR RI - 15

- Februari 2018
- Pagelaran Wayang
 - Lakon: Babad Wanamarta, Puntadewa Ratu
 - Dalang: Ki Manteb Soedarsono

4) DPP PKS - 26 Oktober 2019

- Pagelaran Wayang
- Lakon: Wisanggeni Gugat
- Dalang: Ki Warseno Slank

5) DPW PKS Jawa Tengah - 26
Februari 2022

- Pagelaran Wayang Banyumasan
- Lakon: Bawor Mbangun Jiwo
- Dalang: Ki Slamet Rahardjo

6) DPD PKS Sragen - 20 Maret
2022

- Pagelaran Wayang
- Lakon: Lahirnya Brotoseno.
- Dalang: Ki Dalang Simon Darsono

7) Fraksi PKS DPR RI - 23 Maret
2022

- Pagelaran Wayang
- Lakon: Brajadentist Mbalelo
- Dalang: Ki Sudjiwo Tejo

KONSISTEN JAGA BUDAYA BANGSA

PKS RUTIN SELENGGARAKAN PAGELARAN WAYANG



Dr. Salim

Ketua Majelis Syuro PKS

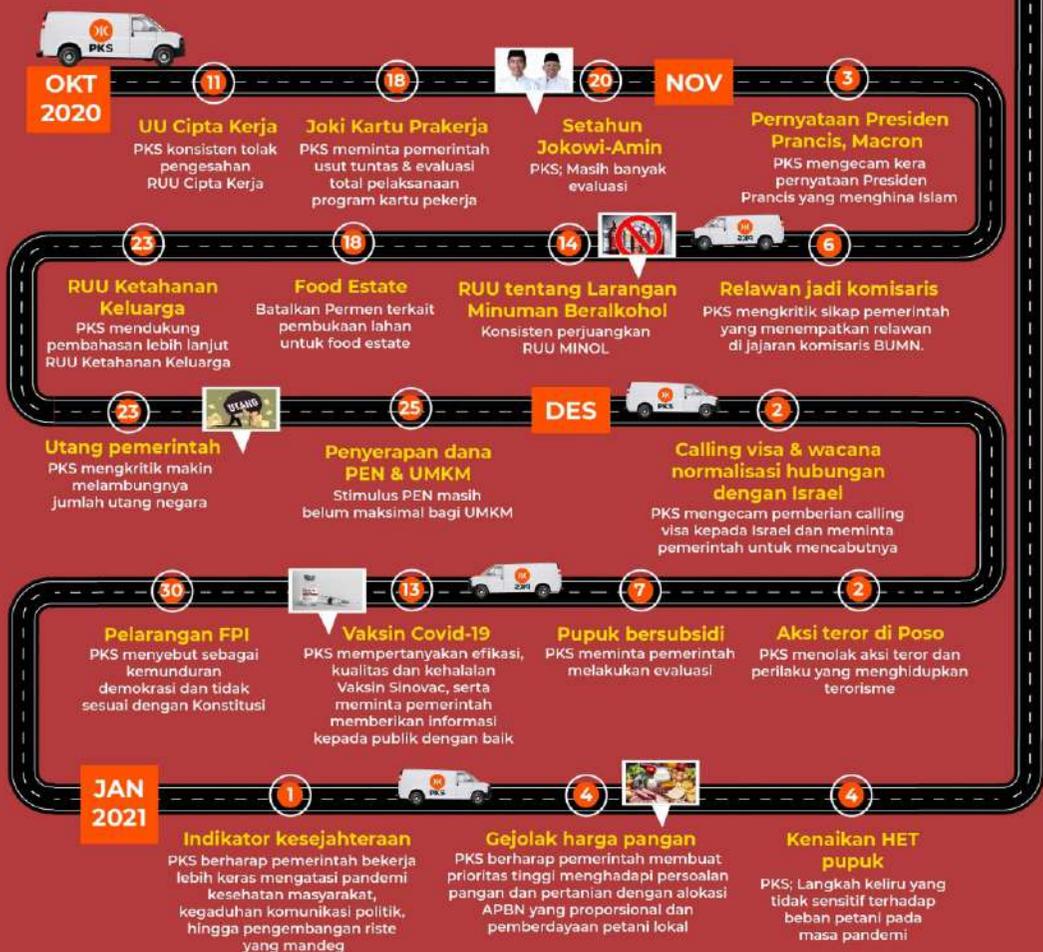


7

Kaledoiskop
Sikap Fraksi
PKS DPR RI

SIKAP FPKS DPR RI PERIODE 2020/2021

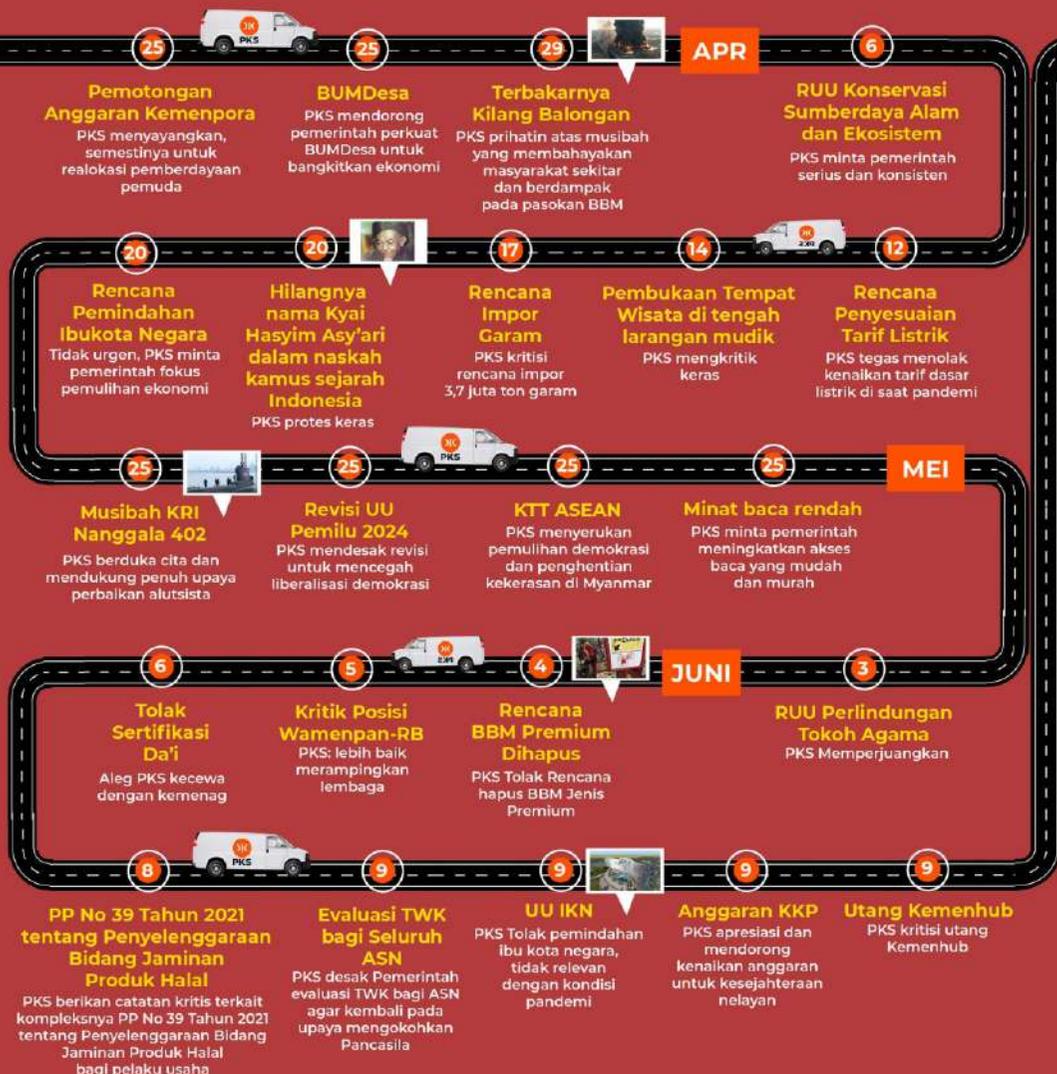
Selama satu periode (Oktober 2020-Oktober 2021) Fraksi PKS DPR RI telah menyikapi lebih dari 88 isu kerakyatan, 16 isu nasionalisme-kebangsaan, dan 9 isu keumatan.



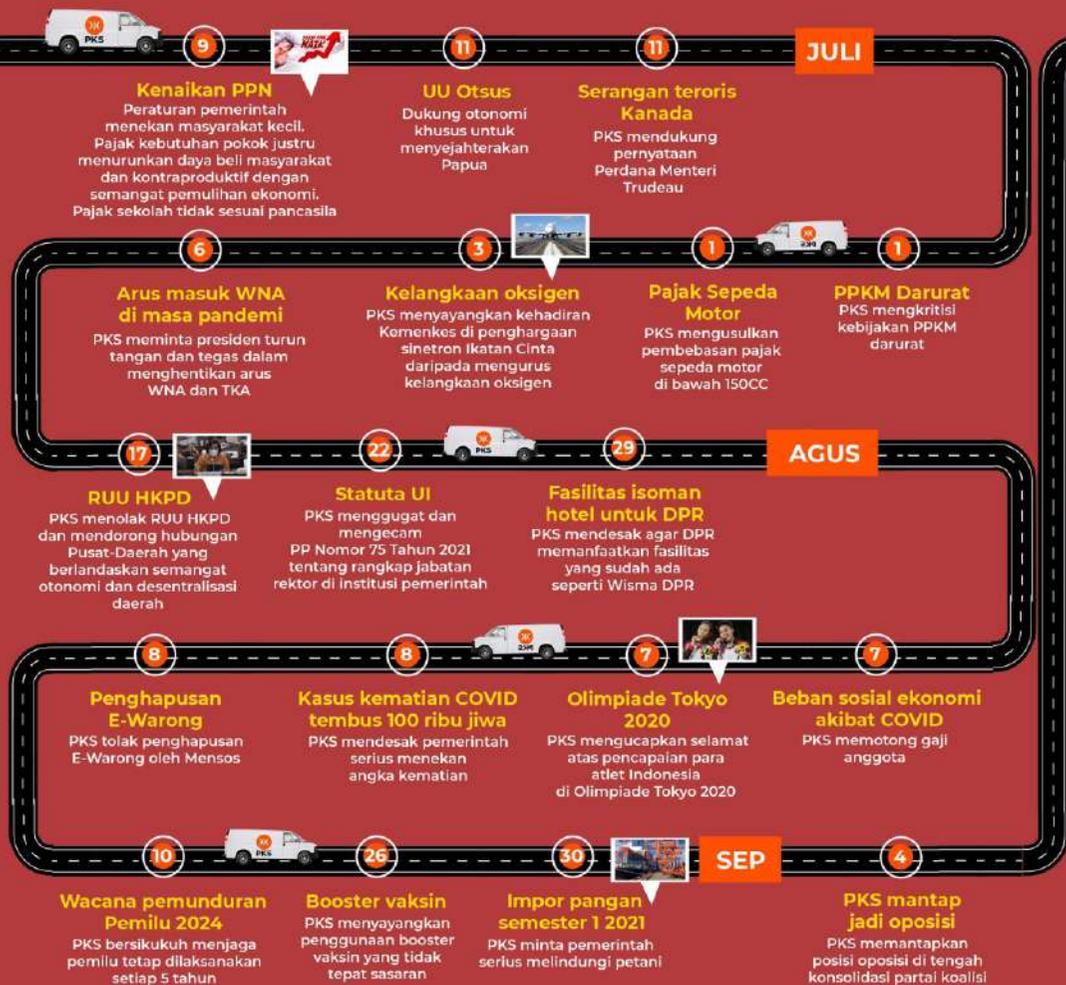
SIKAP FPKS DPR RI PERIODE 2020/2021



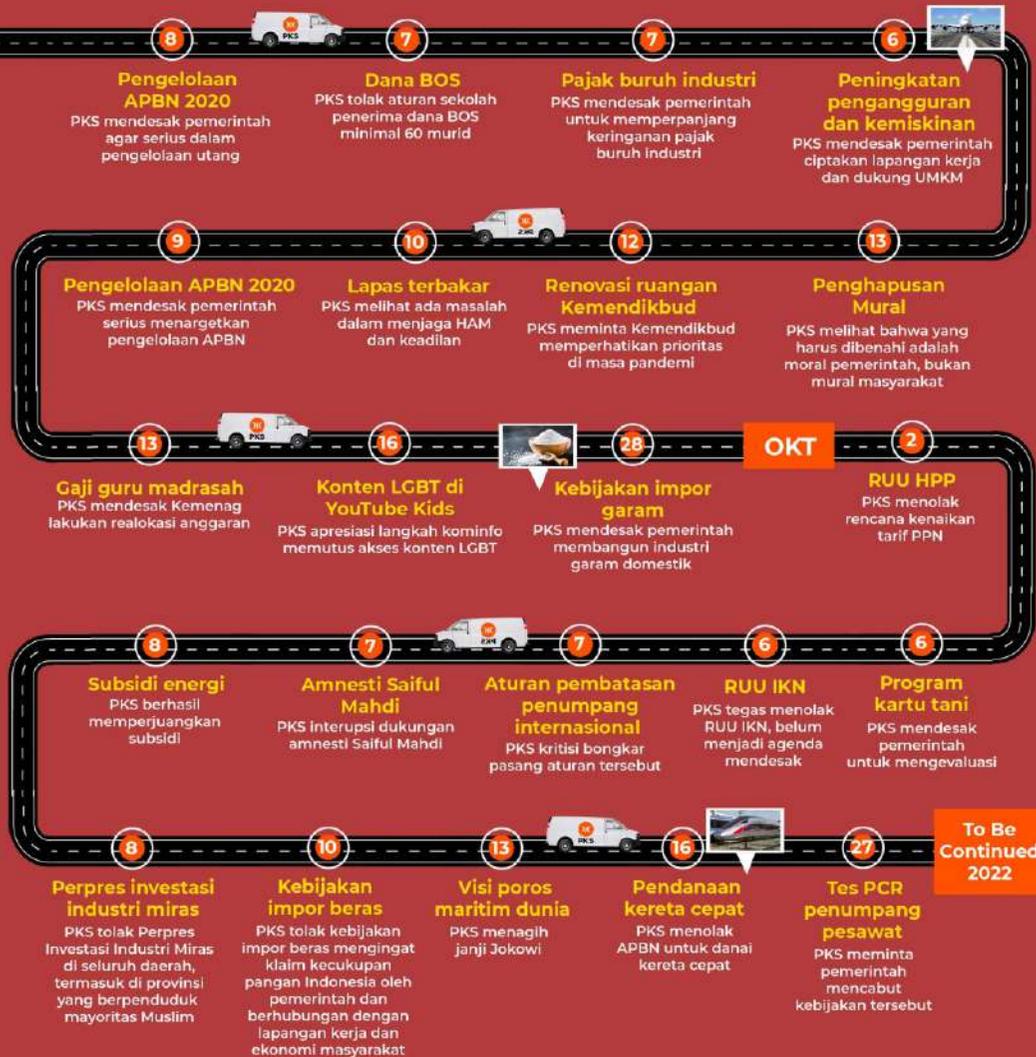
SIKAP FPKS DPR RI PERIODE 2020/2021



SIKAP FPKS DPR RI PERIODE 2020/2021



SIKAP FPKS DPR RI PERIODE 2020/2021



SIKAP FPKS DPR RI SEPANJANG 2021-2022*



* Selama satu periode (Oktober 2021-Oktober 2022) Fraksi PKS DPR RI telah menyikapi isu kerakyatan, isu nasionalisme-kebangsaan, dan isu keumatan.

SIKAP FPKS DPR RI SEPANJANG 2021-2022*



SIKAP FPKS DPR RI SEPANJANG 2021-2022*

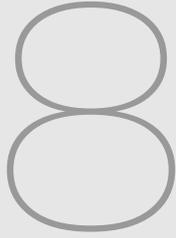


SIKAP FPKS DPR RI SEPANJANG 2021-2022*



SIKAP FPKS DPR RI SEPANJANG 2021-2022*





Yuk
Kenali
Aleg
Kamu!

KOMPOSISI

FRAKSI PKS DPR RI



50

Kursi DPR RI

Terdiri dari
41 Anggota Laki-laki
9 Anggota Perempuan

9 Pimpinan Fraksi

Ketua (1) Wakil Ketua (5)
Sekretaris (1)
Wakil Sekretaris (1)
Bendahara (1)

7 Pimpinan AKD (Alat Kelengkapan Dewan)

Komisi I, IX, X, BURT,
BAKN, BKSAP, MKD

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
Dr. H. Jazuli Juwaini, MA.
- Tempat, Tanggal Lahir
Bekasi, 2 Maret 1968
- Dapil
Banten II
(Kab. Serang, Kota Cilegon,
Kota Serang)



Pendidikan

- **S1** – Univ. Imam
Muhammad Ibnu Saud
Fakultas Syariah
- **S2** – Institut Ilmu Qur'an
Jakarta, Jurusan Tafsir Hadits
- **S3** – Univ. Negeri Jakarta
Program Manajemen SDM



Riwayat Pekerjaan

- **Ketua Fraksi PKS**
2014-2019, 2019-2024
- **Anggota DPR/MPR 4 Periode**
2004-2009, 2009-2014,
2014-2019, 2019-2024
- **Wakil Presiden Forum
Anggota Parlemen Muslim
Dunia (IFIP), 2018-2022**
- **Dosen Pasca Sarjana
Universitas Sahid Jakarta**

: Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

: @JazuliJuwaini

: @jazuli.juwaini

: jazulijuwaini.com



JAZULI JUWAINI



Penghargaan

- **Teropong Senayan Award 2019**, sebagai Anggota Parlemen Aspiratif, Ketua Fraksi Peduli Sosial, dan Ketua Fraksi Teraktif dalam Proses Legislasi.
- **Teropong Democracy Award 2020**, kategori Voice of Democracy dan Democracy Hope.
- **Penghargaan 13 TOKOH DPR BERDEDIKASI 2017**, dari Majalah Mens Obsession, Indonesia
- **Piagam The 6th Indonesian Political Watch Dari Univ. Kyoto di Jepang (2011)**, Atas Karya Buku Otonomi Sepenuh Hati.
- **Piagam Penghargaan dari Center for Southeast Asean Studies (CSEAS) Jepang 2021.**



Riwayat Organisasi

- **Ketua Dewan Pembina dan Pengasuh Pesantren Al-Ummah Ciputat**
- **Ketua Dewan Pembina dan Pengasuh Pesantren Insan Cita Serang**
- **Ketua Dewan Pemakmuran Masjid Indonesia, 1999-2004**
- **Ketua PB Mathla'ul Anwar Bidang Organisasi dan SDM, 2008-2013**
- **Ketua DPP PKS Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan, 2009-2014**
- **Anggota Majelis Wali Amanah PB Mathla'ul Anwar, 2013-2018**
- **Wakil Presiden The International Islamist Forum of Parliamentarians (IIFP), 2018-2022**
- **Presidium Ikatan Alumni Doktor Ilmu Manajemen (IKADIM-UNJ), 2021-2024**
- **Anggota Kehormatan Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI)**

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
**Hj. Ledia Hanifa Amallah,
S.Si., M.Psi.T.**
- Tempat, Tanggal Lahir
Jakarta, 30 April 1969
- Dapil
Jawa Barat I
(Kota Bandung & Cimahi)



Pendidikan

- **SMA Islam Al Azhar,**
Jakarta Selatan, 1984-1987
- **S1 Jurusan Kimia**
FMIPA UI, 1987-1993
- **S2 Psikologi Sosial**
Terapan Psikologi UI,
2000-2002



Keluarga

- Suami : **Dr. Bachtiar
Sunasto, MS**
- Anak : **4 orang Laki-Laki**



Riwayat Pekerjaan

- **Anggota DPR RI, 2009-2014**
- **Anggota DPR RI, 2014-2019**
- **Anggota DPR RI, 2019-2024**



Media Sosial

- **f** : **Ledia Hanifa Amallah**
- **t** : **@lediahanifa**
- **i** : **@ledia_hanifa**
- **y** : **Cerita Ledia**
- **g** : **lediahanifa.com**

LEDIA HANIFA



Riwayat Organisasi

- **Pramuka, 1982-1989**
- **Himpunan Mahasiswa**
Jurusan Kimia FMIPA UI, 1989
- **Retas Leadership Center, 1994-1996**
- **Indonesian Forum for Parliament on**
Population and Development, 2009-2014
- **Asian Forum for Parliament and**
Population and Development, 2009-2014
- **GOPAC, 2014-2019**
- **Ketua Dewan Pakar PP Wanita PUI,**
2015-2020
- **Yayasan Uswah Ummahat, 1996-sekarang**
- **Asian Women Parliamentarian Caucus,**
2016-sekarang
- **Anggota Dewan Pakar PP Wanita PUI,**
2020-sekarang
- **Anggota Dewan Pertimbangan**
Sailmah Pusat, 2020-sekarang

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
H. Suryadi Jaya Purnama, S.T
- Tempat, Tanggal Lahir
Lenek, 25 Februari 1974
- Dapil
Nusa Tenggara Barat II
(Pulau Lombok)



Pendidikan

- SMAN 1 Mataram
Lombok
- ST Teknik Sipil
Universitas Mataram



Keluarga

- Istri : **Nuryanti Tadjuddin, SE, ME.**
- Anak : **4 Laki-Laki**
: **1 Perempuan**



Riwayat Organisasi

- **Ketua KAMMI Daerah NTB**
- **Majelis Adat Sasak Paer Timuk**
- **Ketua Umum PTMSI NTB**
- **Ketua DPW PKS NTB**
- **Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Mataram**

SURYADI JAYA PURNAMA



Riwayat Pekerjaan

- **Direktur CV. JP Agro**
- **Komisaris PT. Rinjani Gumi Paer**
- **Komisaris CV. Tambora Gumi Paer**
- **Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB**
- **Anggota DPR-RI, 2019-2024**



Media Sosial

- **f : Suryadi Jaya Purnama**
- **t : Suryadi Jaya Purnama**
- **@suryadi.sjp**
- **SJP Channel A.452**

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
**Habib Aboe Bakar
Al Habsyi, SE.**
- Tempat, Tanggal Lahir
**Jakarta, 15 Oktober
1964**
- Dapil
Kalimantan Selatan I



Pendidikan

- **SMAN 7 Jakarta,**
1982-1985
- **STIE Bisnis Indonesia**
Jakarta, 2003-2007
- **King Saud University,**
Riyadh, Arab Saudi



Keluarga

- Istri : **Fitrita**
- Anak: **1 Laki-Laki**
3 Perempuan



Riwayat Organisasi

- **Pelajar Islam Indonesia,**
1980-1988
- **Ikatan Ketua Osis se-Jakarta,**
1982-1985
- **Pembina Paham Indonesia,**
2015-sekarang
- **Ketua DPP PKS Wilda**
Kalimantan Selatan
- **Anggota Munashorah DPP PKS**
- **Sekjen DPP PKS, 2020-2025**

HABIB ABOE BAKAR AL HABSYYI



Riwayat Pekerjaan

- **Direktur Yayasan Haji Ummul Quro**
- **Anggota DPR RI, 2004-sekarang**



Media Sosial

- **f** : **Aboe Bakar Al Habsyi**
- **globe** : **www.aboebakaralhabsyi.id**

- **twitter** : **@aboebakar15**
- **instagram** : **@habib_aboe**

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
H. Sukamta, Ph.D
- Dapil
DI Yogyakarta



Pendidikan

- **S1 Teknik Kimia,
Univ. Gajah Mada**
- **S3 Chemical
Engineering,
Salford University**



Riwayat Organisasi

- **Ketua DPW PKS DIY**
- **Sekretaris Bidang
Polhukam DPP PKS**
- **Ketua DPP PKS Bidang
Pembinaan dan
Pengembangan
Luar Negeri**



Media Sosial

- **f : Dr Sukamta**
- **t : @DrSukamta**
- **i : drsukamta**



SUKAMTA



Riwayat Pekerjaan

- **Anggota DPRD DIY**
- **Wakil Ketua Fraksi PKS
Bidang Polhukam,
2019 – sekarang**
- **Sekretaris Fraksi PKS DPR RI,
2014 – 2019**
- **Anggota Komisi I DPR RI,
2014 – sekarang**

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
**Dr. Hj. Netty Prasetyani,
S.S., M.Si.**
- Tempat, Tanggal Lahir
Jakarta, 15 Oktober 1969
- Dapil
Jawa Barat VIII



Pendidikan

- **SMAN 14 Jakarta**
- **S1 Bahasa Inggris
STBA LIA**
- **S2 Kajian Wanita
Program Pasca
Sarjana
Univ. Indonesia**
- **S3 Ilmu Pemerintahan
FISIP Univ. Padjadjaran**



Riwayat Organisasi

- **Ketua Tim Penggerak PKK, 2008-2018**
- **Ketua Dekranasda, 2008-2018**
- **Ketua P2TP2A Jawa Barat, 2010-2018**
- **Ketua Ikatan Bank Mata Jabar, 2009-2017**
- **Pembina Yayasan Bordir Jabar,
2010- sekarang**
- **Penasihat Dharma Wanita
Persatuan Provinsi Jabar, 2008-2018**



Keluarga

- Suami : **Ahmad Heryawan**
- Anak : **4 Laki-Laki
2 Perempuan**



Riwayat Pekerjaan

- **Kepala TKIT Darul Falah,
1998-2001**
- **Konsultan Pendidikan Perguruan
Madina, 2005-2007**
- **Dosen FISIP UNPAD,
2017-sekarang**
- **Anggota Komisi IX DPR RI,
2019-2024**



Media Sosial

- **f : Netty Prasetyani Heryawan**
- **t : @netty_heryawan**
- **@ netty_heryawan**
- **Netty Prasetyani Official**



NETTY PRASETIYANI

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
Dr. H. Mulyanto, M.Eng
- Tempat, Tanggal Lahir
Jakarta, 26 Mei 1963
- Dapil
Banten III
(Kab. Tangerang,
Kota Tangerang,
Kota Tangerang
Selatan)



Pendidikan

- **SMAN 10 Jakarta,**
1978 – 1981
- **S1 Fakultas MIPA,**
Jurusan Fisika,
Univ. Indonesia. 1981–1987
- **S2 Teknik Nuklir, Tokyo**
Institute of Technology.
1990–1992
- **S3 Teknik Nuklir, Tokyo**
Institute of Technology.
1992–1995



Riwayat Pekerjaan

- **Anggota DPR RI FPKS,** 2019-sekarang
- **Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia,**
Sebagai : Deputi Kelembagaan Iptek. 2013–2015
- **Perum Jasa Tirta I, Anggota Dewan Pengawas.** 2011–2015
- **Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia,**
Sebagai : Sekretaris Kementerian. 2010–2013
- **PT. Pertani,** Sebagai : Komisariss Utama. 2009–2011
- **Departemen Pertanian Republik Indonesia,**
Sebagai : Inspektur Jenderal. 2008–2010
- **Departemen Pertanian Republik Indonesia,**
Sebagai: SAM Sistem Informasi & Pengawasan. 2005–2008



MULYANTO

: Pak Mul

: @pakmul63

: @pakmul63

: Dr. Mulyanto M. Eng



Keluarga

- Istri : **Ritta Purbowati, SE.**
- Anak : **1 Laki-Laki**
2 Perempuan



Riwayat Organisasi

- **Ketua Center for Strategic Development Studies (CSDS),** 2015–2019
- **Anggota Forum 3 Pilar Kemitraan,** 2007–2010
- **Alumni Lemhanas RI,** Sebagai: PPSA XV. 2007–sekarang
- **Pendiri Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI),** 1998–sekarang
- **ISTECS (Institute for Science and Technology Studies),** Sebagai : Ketua. 1996–2004
- **Muslim Student Association Japan (MSA-J),** Sebagai : Central Executive Committee. 1994–1995
- **Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jepang – Pasifik,** Sebagai: Ketua Divisi Pembinaan Umat. 1994–1995.
- **Islamic Network (ISNET),** Sebagai: Anggota Majelis Syuro dan Ketua Komisi Tarbiyah. 1993–1995
- **Resimen Mahasiswa Universitas Indonesia,** Sebagai: Anggota. 1982–1983
- **Himpunan Mahasiswa Islam (HMI),** Anggota. 1981–1982

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
Drs. H. Adang Daradjatun
- Tempat, Tanggal Lahir
Bogor, 13 Mei 1949
- Dapil
DKI Jakarta III



Pendidikan

- **SMAN 1 Jakarta (Boedi Oetomo)**
- **SMAN 3 Bandung**
- **AKPOL**
- **PTIK**
- **SESPIM**
- **SESKO**



Media Sosial

- **f** : **Adang Daradjatun**
- **@** **adangdaradjatun_**
- **adangdaradjatun.id**



Riwayat Pekerjaan

- **Kabag Sosbud Direktorat Intelijen & Pengamanan Polda Metro Jaya, 1986.**
- **Kabag Sospol Direktorat Intelijen & Pengamanan Polri, 1987.**
- **Kabag Pengawasan Senjata Api & Bahan Peledak Direktorat Intelijen & Pengamanan Polri, 1989.**
- **Kepala Direktorat Intelijen & Pengamanan Polda Maluku, 1990.**
- **Wakil Kepala Subdirektorat Pengawasan Senjata Api & Bahan Peledak Direktorat Intelijen & Pengamanan Polri, 1992.**
- **Instruktur Utama (tenaga pendidik) di PTIK, 1993.**
- **Perwira Pembantu III / Perencanaan Program dan Anggaran Srena POLRI, 1994.**
- **Wakil Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri (1 April 1997) Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri (5 Juli 1997) Kapolda Jawa Barat, 2000**
- **Staf Ahli Kapolri, 2001**
- **Kababinkam, 2002**
- **Wakapolri, 2004.**
- **Anggota DPR RI, 2009-2014, 2014-2019, 2019-2024**



Keluarga

- Istri : **Nunun Nurbaeti**
- Anak : **3 Laki-Laki**
1 Perempuan



Riwayat Organisasi

- **Dewan Pembina PABSI (Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia)**
- **Ketua Umum PDDI (Perhimpunan Donor Darah Indonesia)**
- **Ketua Ikatan Remaja Kebayoran**
- **Ketua Badan Musyawarah Masyarakat Sunda**



ADANG DARADJATUN

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
**Dr. H. Abdul Kharis
Almasyhari, SE, MSi, AK, CA**
- Tempat, Tanggal Lahir
Purworejo, 25 Agustus 1968
- Dapil
Jawa Tengah V (Klaten,
Kab. Boyolali, Sukoharjo
& Kota Surakarta)



Pendidikan

- **SMAN 2 Purworejo**
- **S1 : Akuntansi,
Univ. Sebelas Maret**
- **S2 : Akuntansi,
Univ. Diponegoro**
- **S3 : Doktoral FEB
Univ. Sebelas Maret**



Riwayat Pekerjaan

- **Direktur Era Intermedia Group
(PT. Era Adicitra Intermedia)**
- **Dosen Fakultas Ekonomi UMS
(Univ. Muhammadiyah Surakarta)**
- **Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS**
- **Anggota DPR RI, 2019-2024**



Keluarga

- Istri : **dr. Retno Sintowati,
M.Si.**
- Anak : **5 Laki-Laki
2 Perempuan**



Riwayat Organisasi

- **OSIS SMAN 2 Purworejo,
Jawa Tengah**
- **Merpati Putih UNS**
- **BAPEMA UNS (Badan Pers
Mahasiswa UNS)**
- **BPPI UNS (Badan Pengkajian
Pengamalan Islam)**
- **Ketua IKAPI Jawa Tengah
(Ikatan Penerbit Indonesia)**
- **PERBAKIN Jawa Tengah**
- **PPS Betako Merpati Putih**
- **Ketua & Pendiri SRBC
(Solo Road Bike Community)**



Media Sosial

- **f** : Sahabat Kharis
- **t** : @AbdulKharisA
- **i** : @sahabatkharis
- **y** : Sahabat Kharis

ABDUL KHARIS

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
Dr. H. Almuzammil Yusuf, M.Si
- Tempat, Tanggal Lahir
Tanjung Karang, 06 Juni 1965
- Dapil
Lampung I



Pendidikan

- S1 : Ilmu Politik,
Universitas Indonesia
- S2 : Ilmu Komunikasi
Politik Univ. Sahid
- S3 : Ilmu Komunikasi
Politik Univ. Sahid
- International Relation,
(Second Certificate),
CAS-Islamabad, Pakistan
- Pendidikan Bahasa Inggris
di Sidney, Australia (1 Tahun)
- Pendidikan Bahasa Arab
di Kalro, Mesir (1 Tahun)



Riwayat Pekerjaan

- Anggota DPR/MPR RI, 2004-2009,
2009-2014, 2014-2019, 2019-2024
- Wakil Ketua Komisi III DPR-RI,
2005-2007, 2012-2014
- Wakil Ketua Baleg DPR-RI, 2007-2009
- Wakil Ketua Komisi II DPR, 2015-2017
- Wakil Ketua FPKS MPR RI,
2014-2019, 2019-2024
- Tim Sosialisasi 4 Pilar MPR RI,
2004-sekarang



ALMUZZAMMIL YUSUF



Riwayat Organisasi

- Ketua Deklarator PKS,
2001-2002
- Wakil Presiden PKS, 2002-2004
- Ketua Bid. Polhukam DPP PKS,
2020-2025
- Koordinator Kaukus Parlemen
Untuk Palestina, 2007-2014
- Striker Tim Sepakbola U16
DKI 1981 & Eksebis MBFA
Kyoto Jepang 1981
- Pembicara pada seminar
pembinaan keluarga, pemuda,
pelajar, mahasiswa dan
kajian politik



Media Sosial

- Facebook : Almuzammil Yusuf
- Twitter : @Muzzammil_Yusuf
- Instagram : @almuzzammil.yusuf
- YouTube : Al Muzzammil Yusuf
- Website : www.almuzzammiliyusuf.id



Keluarga

- Istri : Nurul Hidayati K
Ubaya, S.S., MBA
- Anak: 6 Orang
- Cucu: 3 Orang

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
H. Ahmad Syaikhu
- Tempat, Tanggal Lahir
Cirebon, 23 Januari 1965
- Dapil
Jawa Barat VII
(Kab. Purwakarta,
Karawang, Bekasi)



Pendidikan

- **Pondok Pesantren
Buntet Cirebon**
- **SMAN Sindang Laut
Cirebon, Jawa Tengah**
- **D3 - Sekolah Tinggi
Akuntansi Negara (STAN)**



Keluarga

- Istri : **Lilik Wakhidah**
- Anak: **3 Laki-Laki**
3 Perempuan



Riwayat Organisasi

- **Wakil Ketua DPW PKS
Jawa Barat, 2010-2015**
- **Ketua DPW PKS Jawa Barat,
2015-2018**
- **Ketua Wilda Banten, Jakarta,
Jawa Barat (Banjabar),
2019-2020**
- **Presiden PKS, 2020-2025**



Riwayat Pekerjaan

- **Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan, 1986-2004**
- **Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, 2004-2009**
- **Sekretaris Komisi C DPRD Prov. Jawa Barat,
2009-2012**
- **Wakil Walikota Bekasi, 2013-2018**
- **Anggota DPR RI, 2019 – sekarang**



Media Sosial

: **Ahmad Syaikhu**

: **@syaikhu_ahmad_**

: **Ahmad Syaikhu ASYIK**

: **<https://ahmadsyaikhu.com/>**

: **@syaikhu_ahmad**

: **@syaikhu_ahmad_**

AHMAD SYAIKHU

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng
- Tempat, Tanggal Lahir
Jakarta, 09 April 1968
- Dapil
DKI Jakarta I (Jakarta Timur)



Pendidikan

- **SMAN 1 Budi Utomo,**
Jakarta Pusat
- **S1 Teknik Mesin,**
Universitas Indonesia
- **S2 Master of Engineering,**
Universiti Teknologi Malaya
- **S3 Philosophiae Doctorate,**
Universiti Teknologi Malaya



Riwayat Organisasi

- **Wakil Sekretaris Jenderal PKS, 2005-2010**
- **Sekretaris Majelis Pertimbangan PKS, 2010-2011**
- **Majelis Syuro PKS, 2010-sekarang**
- **Ketua DPP PKS Bidang Humas, 2012-2015**
- **Wakil Sekretaris Jenderal PKS, 2015-2016**
- **Ketua DPP PKS Bidang Kepemudaan, 2016-2019**
- **Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi di**
Pilgub DKI Jakarta, 2017
- **Ketua DPP PKS Badan Pembinaan**
Kepemimpinan Daerah, 2019-2020
- **Ketua DPP PKS Bidang Teknologi, Industri,**
dan Lingkungan Hidup, 2020-sekarang



Keluarga

- Istri : **Siti Oniah**
- Anak : **4 Laki-Laki**
5 Perempuan



Riwayat Pekerjaan

- **Menjadi Da'i utusan DPP PKS**
ke Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, Maluku, Papua,
Malaysia, Singapura, Thailand,
dan Arab Saudi untuk
mensosialisasikan konsep
pembangunan umat madani,
2008
- **Staff Pengajar Universitas Mercu**
Buana, 1992 - Sekarang
- **Kepala Pusat Penelitian Univ.**
Mercu Buana, 2006-2007
- **Anggota Komisi II DPR RI,**
2019-2024

MARDANI ALI SERA



Media Sosial

- **f : Mardani Ali Sera**
- **t : @MardaniAliSera**
- **@mardaniallsera**
- **Y : Mardani Ali Sera**
- **mardaniallsera.id**

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
K.H. Aus Hidayat Nur
- Tempat, Tanggal Lahir
Garut, 20 Juli 1961
- Dapil
Kalimantan Timur



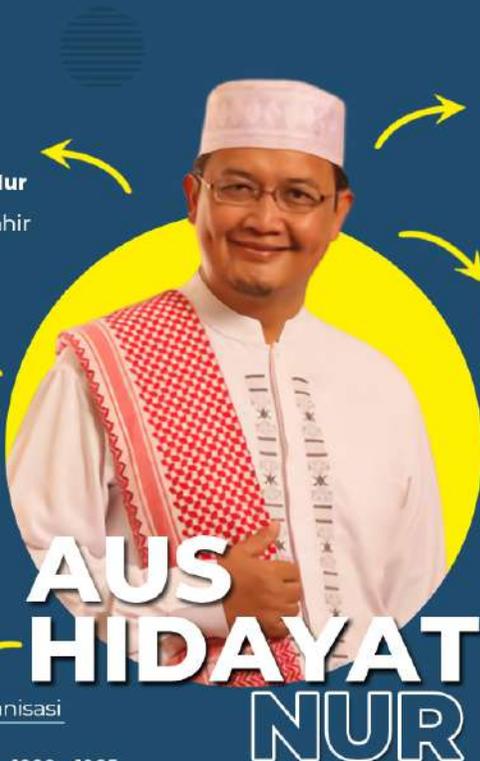
Pendidikan

- **SMAN 8 Jakarta,**
1980
- **D3- LIPIA Jakarta,**
1983
- **SI Univ. Indonesia,**
Sastra Arab



Riwayat Organisasi

- **HMI cabang Jakarta,** 1980 – 1985
- **Pendiril Partal Keadilan,** 1998
- **Ketua DPP PKS Wilda Banjabar dan
Kallimantan,** 2002 – 2005
- **Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan
Wilayah,** 2005 – 2010
- **Ketua DPP PKS Badan Penegak Disiplin
Organisasi -BPDO,** 2010 – 2012
- **Anggota MPP PKS,** 2013 – 2016
- **Wakil Ketua Bidang Kaderisasi
DPP PKS,** 2016 – 2018
- **Ketua DPP Wilda Sulawesi,**
2018 – 2020



Keluarga

- Istri : **Susanti**
- Anak : **2 Laki-Laki
4 Perempuan**



Riwayat Pekerjaan

- **Guru SMP Islam Bahagla,**
Jakarta, 1986 – 1990
- **Guru SMA Islam At Taqwa,**
Jakarta, 1990 – 1992
- **Dosen STAI Al Qudwah,**
Depok, 1995 – 2000
- **Anggota DPR RI Dapil Kaltim,**
2009 – 2014
- **Badan Legislati,** 2011 – 2014
- **Guru SMP Terbuka NF,**
Depok 2016 – 2018
- **Anggota DPR RI Dapil Kaltim,**
2018 – 2019
- **Badan Sosialisasi 4 Pilar
MPR RI,** 2018 – 2019



Media Sosial

- **f** : **KH. Aus Hidayat Nur**
- **t** : **@aus_kang**
- **i** : **@bubuhankangaus**

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
Drs. Chairul Anwar, Apt.
- Tempat, Tanggal Lahir
Pekanbaru , 13 Oktober 1963
- Dapil
Riau I (Kab. Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kep. Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai)



Pendidikan

- **SMAN 12 Jakarta**
1979 – 1982
- **S1 Farmasi, FMIPA Univ. Indonesia**
1982 – 1989
- **S2 Profesi Farmasi, Univ. Indonesia**
1989 – 1991



Riwayat Pekerjaan

- **DPR-RI : Anggota Komisi IX**, 2004 – 2011
- **DPR-RI : Anggota Komisi V dan Badan Legislati**, 2011 – 2016
- **DPR-RI : Anggota Komisi II dan Badan Anggaran**, 2016 – 2019
- **DPR-RI : Anggota Komisi VI dan Badan Anggaran**, 2019 – 2020
- **DPR-RI : Anggota Komisi II dan Badan Anggaran**, 2021 – sekarang



Keluarga

- Istri : **Meriwati, Apt**
- Anak : **7 Orang**
- Cucu : **4 Orang**



Riwayat Organisasi

- **Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Fakultas Farmasi** - Ketua Umum, 2018
- **Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)** - Sebagai: Wakil Ketua Umum, 2018
- **Badan Pememenangan Pemilu dan Pilkada DPP PKS**, Sebagai: Ketua DPP, 2015 – 2020
- **Wilayah Dakwah Sumatera DPP PKS**, Sebagai: Ketua DPP, 2005 – 2010
- **Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Utara DPP PKS**, Sebagai: Ketua DPP, 2000 – 2005



Media Sosial

- **f** : **Chairul Anwar**
- **@** : **@chairul.anwar.pks**

CHAIRUL ANWAR



BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
Teddy Setiadi, S.Sos
- Tempat, Tanggal Lahir
Bandung, 5 April 1970
- Dapil
Jawa Barat I
(Kota Bandung
Kota Cimahi)



Pendidikan

- **SMAN 5 Bandung**
- **SI: Fak. Ilmu Komunikasi**
Universitas Padjadjaran



Keluarga

- Istri : **DR. Enny Rohmawaty dr., M.Kes.**
- Anak : **3 Laki-Laki**
1 Perempuan



Riwayat Pekerjaan

- **Manajer Produksi Percetakan**
- **Kepala Kantor Sub Tim 3**
P2KP Kota & Kab. Tangerang
- **Dosen Politeknik Al Islam**
Bandung
- **Desen Politeknik Telkom**
Bandung
- **Anggota DPRD Kota Bandung**
Fraksi PKS
- **Anggota DPR RI Fraksi PKS**



Media Sosial

📷 : @kangteddy.setiadi



Riwayat Organisasi

- **Wakil Ketua DKM Nurul**
Khomsah SMAN 5 Bandung
- **Ketua Forum Mahasiswa Islam**
Fak. Ilmu Komunikasi Univ. Padjadjaran
- **Ketua Biro Kerohanian Islam Fikom Unpad**
- **Ketua Lembaga Dawah Kampus UNPAD**
- **Anggota PPD 1 Jabar**
- **Sekretaris LPM Poltek Al Islam Bandung**
- **Dewan Pembina Generasi Muda FKPPi**
Kota Bandung
- **Dewan Pembina Beat street Kota Bandung**
- **Ketua Dewan Pembina Yayasan**
Luqmanul Hakim
- **Wakil Sekum DPW PK Jabar**
- **Ketua Deputy Kepemudaan DPW PKS Jabar**
- **Ketua Daerah Dawah 2 DPW PKS Jabar**
- **Ketua Bidang Generasi Muda dan Profesi**
(GMPro) DPP PKS
- **Ketua Bidang Humas DPW PKS**

TEDDY SETIADI

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
Dr. H. R. Achmad Dimiyati
Natakusumah, SH, MH, M.Si.
- Dapil
Banten I
(Kab. Pandeglang
dan Kab. Lebak)



Pendidikan

- S1 : Ilmu Hukum,
Universitas Indonesia &
Esa Unggul Jakarta
- S2 : Ilmu Politik,
Universitas Indonesia
- S2 : Ilmu Hukum,
Universitas Pasundan
- S3 : Ilmu Hukum,
Universitas Padjajaran
- S3 : Ilmu Politik,
Universitas Indonesia
- Lemhanas



Riwayat Pekerjaan

- Bupati Kab. Pandeglang, 2000 – 2005
- Bupati Kab. Pandeglang, 2005 – 2009
- Dosen FISIP UNMA, 2006
- Dosen Pasca Sarjana Ilmu hukum UNMA, 2013
- Wakil Ketua baleg DPR RI, 2009 – 2014
- Komisi Hukum / KMS 3 DPR RI, 2009 – 2013
- Komisi Pemerintahan / KMS 2 DPR RI, 2013 – 2014
- Komisi Pertahanan, Kominfo, TNI/KMS 1 DPR RI, 2014 – 2018



Keluarga

- Istri : **Hj. Irna Narulita, SE., MM.**
- Anak : **1 Laki-Laki**
2 Perempuan



Riwayat Organisasi

- Ketua **KADIN Jabar**, 1995 – 2000
- Ketua **HIPMI Jabar**, 1995 – 2000
- Ketua **PERSIPAN**, 2000 – 2010



Media Sosial

IG : @dimiyatinatakusumah99

ACHMAD DIMYATI



BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si.
- Dapil - **Aceh II**
(Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Kota Lhokseumawe, dan Kota Langsa).



Riwayat Organisasi

- Ketua DPW Partai Keadilan Aceh
- Presidium KAHMI Aceh



Pendidikan

- **S1 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh**
- **S2 : Universitas Nasional, Jakarta**
- **S3 : Universitas Nasional, Jakarta**



Media Sosial

- **f** : Nasir Djamil
- **@** : @m.nasirdjamil

NASIR DJAMIL



Riwayat Pekerjaan & Karir Politik

- **Wartawan Harian Serambi Indonesia di Aceh, 1996-1999**
- **Anggota DPRD Aceh, 1999-2004**
- **Anggota DPR RI Dapil Aceh 1 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019,**
- **Anggota DPR RI Dapil Aceh 2, 2019-2024**



Karya Tulis

- **Anak Bukan Untuk Dihukum**
- **Bring Back Justice**
- **Mengusur "Taliban" dari Gedung Merah Putih (Kronika Pemberantasan Korupsi di Era Reformasi)**

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap **Saadiah Uluputty, ST.**
- Tempat, Tanggal Lahir **Negeri Lima, 7 April 1973**
- Dapil **Maluku**



Pendidikan

- **SMA Negeri Hila, Kaitetu - Maluku Tengah**
- **SI Teknik Kelautan, Insitut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)-Surabaya**



Keluarga

- Suami : **Abdullah Wahid**
- Anak : **3 Laki-Laki**
3 Perempuan



Riwayat Pekerjaan

- **Anggota FPKS DPR RI, 2019-2024**
- **Sekretaris FPKS MPR RI, 2019-2024**
- **Ketua Komisi D DPRD Provinsi Maluku, 2014-2019**
- **Sekretaris FPKS DPRD Provinsi Maluku, 2009-2014**
- **Direktur CV Puteri Liki-Liki Maluku, 2002-2009**



Riwayat Organisasi

- **Ketua Keputrian LDK Unpatti, 1997**
- **Ketua Kastrat KAMMI Daerah Maluku, 1998**
- **Ketua Kajian Strategi KAMMI Maluku, 1997-1999**
- **Ketua Kebijakan Publik KAMMI Maluku, 2020**
- **Ketua Bidang Perempuan DPW PKS Maluku, 2010**
- **Sekretaris Dewan Syariah Wilayah DPW PKS Maluku, 2015**
- **Bendahara DPD PKS Maluku Tengah, 2004**
- **Dewan Pakar Hena Hetu Maluku, 2016**
- **Pembina Hetu Upu Ana Maluku, 2016**

SAADIAH ULUPUTTY



Media Sosial

- **Saadiah Uluputty**
- **@Saadiah Uluputty**
- **@uluputtyaadiah**

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
H. Johan Rosihan, S.T.
- Tempat, Tanggal Lahir
Sumbawa, 29 Oktober 1972
- Dapil
Nusa Tenggara Barat I



Pendidikan

- **SMAN 1 Sumbawa Besar,**
Sumbawa-NTB, 1991
- **S1 Teknik Sipil Universitas**
Al Azhar Mataram, 2008



Keluarga

- Istri : **Wahidah**
- Anak : **1 Laki-Laki,**
4 Perempuan



Riwayat Pekerjaan

- **CV Shaffan Studio, 1996**
- **CV Horison Advertama, 2009**
- **PT. Lombok Global**
Ecotourism, 2015
- **Anggota DPR RI, 2019-2024**



Riwayat Organisasi

- **BPM Fak Teknik Universitas**
Al Azhar Mataram
- **HMI Cab. Mataram**
- **KAMMI Nusa Tenggara Barat**
- **Lembaga Pemantau Kebijakan**
Publik Nusa Tenggara Barat



Media Sosial

- fb : **Johan Rosihan**
- tw : **@Rosihanjohan**
- ig : **@johanrosihan**
- yt : **Johan Rosihan**

JOHAN ROSIHAN



BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
Dr. Hermanto, SE, MM.
- Tempat, Tanggal Lahir
Palembang, 1 Januari 1960
- Dapil
Sumatera Barat I



Pendidikan

- **S1 : Manajemen,**
Univ. Krisnadwipayana
- **S2 : Manajemen,**
STM IMMI Jakarta
- **S3 : Doktor Manajemen**
Bisnis, IPB

HERMANTO



Riwayat Pekerjaan

- **Ketua Pusat Studi Ekonomi UIKA Bogor, 1995-1997**
- **Pudek III FE Univ. Ibnu Khaldun, 1998-2001**
- **Sekretaris Lembaga Peneliti UIKA Bogor, 1990-2003**
- **Dosen FE Univ. Asy Syafilyah Jakarta, 1987-2004**
- **Dosen FE Univ. Krisnadwipayana, 1989-2009**
- **Dosen FE Univ. Ibnu Khaldun, 1985-2010**
- **Dosen FE Univ. Djuanda Bogor, 1995-2013.**
- **Staf Ahli Fraksi PKS DPR RI, 2005-2007**
- **Anggota DPR RI FPKS, 2009-2014, 2014-2019, 2019-2024**
- **Bendahara FPKS MPR RI, 2009-2014.**
- **Sekretaris FPKS MPR RI, 2014-2019**
- **Anggota Baleg DPR RI, 2014-2019**



Keluarga

- Istri : **Yusmiati**
- Anak : **6 Anak**



Riwayat Organisasi

- **Anggota Yisc Al Azhar Jakarta, 1980**
- **Ketua Karang Taruna Pademangan. Jakarta, 1982-1984**
- **HMI Cab. Jakarta dan Pengmas Jakarta, 1982-1984**
- **Ketua Umum HMI Badko Jawa Barat, Bogor, 1988-1991**
- **Pengurus PB HMI Jakarta, 1991-1992**
- **Gebu Minang Fungsionaris, Jakarta, 2006**
- **Ketua Himpunan Keluarga Tanjung. Jakarta, 2002**
- **Ketua BALEG DPP PKS, 2005-2010**
- **Pembina Organisasi Padang Pariaman DPP PKDP**
- **Dewan Pakar KAHMI Nasional, 2010**
- **Dewan Pakar KAHMI JAYA, 2017**
- **Ketua DPP PKS Bidang Wilda Sumatra bagian Utara, 2014-2017.**
- **Wasekjen DPP PKS, 2018-2020.**



Media Sosial

- **f : Dr.H, Hermanto, SE,MM**
- **@sidi.hermanto**



BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap **drh H. Slamet**
- Tempat, Tanggal Lahir **Rembang, 19 Mei 1971**
- Dapil **Jawa Barat IV** (Kabupaten dan Kota Sukabumi).



Riwayat Organisasi

- **Ketua KAMMI Daerah Bali, 1998-2003**
- **Ketua DPD PKS Kabupaten Sukabumi, 2006-2010**



Riwayat Pekerjaan

- **Anggota DPR RI FPKS, 2019-2024**
- **Kepala Unit JAPFA COMFEED GROUP, 2000-2010**



Keluarga

- Istri : **dr. Titin M. Andadari**
- Anak : **3 Laki-Laki**
1 Perempuan



Pendidikan

- **SDN Wonokerso, 1978-1984**
- **SMPN Sale, 1984-1987**
- **SMAN 2 Rembang, 1987-1990**
- **Universitas Udayana Bali, 1991-1998**

SLAMET



Media Sosial

f : **Drh. H. Slamet**

yt : **drh H. Slamet**

ig : **@drhslamet**



BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
**Dr. H. Andi Akmal Pasluddin,
S.P, M.M**
- Tempat, Tanggal Lahir
Bone, 30 Desember 1974
- Dapil
Sulawesi Selatan II
(Bone, Soppeng, Wajo,
Bulukumba, Sinjai, Maros,
Pangkep, Barru, Parepare)



Pendidikan

- **SDN NO.254 Ulubalang
Bone, 1981-1987**
- **SMPN Salomekko Bone,
1987-1990**
- **SMAN Kajuara Bone,
1990-1993**
- **S1 : Institut Pertanian Bogor,
2000**
- **S2 : Manajemen Universitas
Hasanudin, 2008**
- **S3 : Universitas Negeri
Makasar, 2015**



Riwayat Pekerjaan

- **Peneliti pada Hellen Keller Indonesia,
1998-1999**
- **Staf Bank Dunia Jakarta, 1999-2000**
- **Kepala Cabang PT. Asuransi Syariah
Mubarakah, 2001-2002**
- **Staff PT. PNM, 2002-2004**



Riwayat Organisasi

- **Ketua KAMMI Bogor, 1999**
- **Kabid Pemuda DPD PKS Bogor,
1998-1999**
- **Ketua PDD DPW PKS Sulsel,
2002-2004**
- **Ketua Bapilu DPW PKS Sulsel,
2007-2012**
- **Ketua Umum DPW PKS Sulsel,
2012-2014**
- **Ketua Departemen Organisasi
Wilda Sulawesi DPP PKS, 2015-2020**
- **Ketua Departemen Perencanaan
BPW Sulawesi DPP PKS, 2020-2025**



Media Sosial

- **f : Andi Akmal Pasluddin**
- **@andiakmalpasluddinofficial**
- **Andi Akmal Pasluddin**
- **www.andiakmalpasluddin.id**



ANDI AKMAL PASLUDDIN

- **Ketua Fraksi DPRD Prov. Sulsel, 2004-2009**
- **Wakil Ketua DPRD Prov. Sulsel, 2009-2014**
- **Anggota DPR RI, 2014-2019**
- **Anggota Komisi IV DPR RI, 2019-2024**
- **Anggota Badan Anggaran MPR RI, 2019-2024**

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
Ir. H. Sigit Sosiantomo
- Tempat, Tanggal Lahir
Surabaya, 28 Juni 1965
- Dapil
Jawa Timur I



Pendidikan

- **SMAN 5, Surabaya, 1984**
- **SI Teknik Arsitektur, ITS Surabaya, 1990**



Riwayat Organisasi

- **Ketua Wilda Jatim-Bali DPP PKS, 2005-2010**
- **Wakil Ketua Bidang Perencanaan DPP PKS, 2011-2015**
- **Ketua DPP PKS Wilayah Dakwah Jawa Timur-Jawa Tengah-Yogyakarta, 2015-2020**
- **Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKS, 2020-2025**



SIGIT SOSIANTOMO



Keluarga

- Istri : **Dina Heryani, drH**
- Anak : **3 Laki-Laki
4 Perempuan**



Riwayat Pekerjaan

- **Komisaris Utama PT. Insan Utama Surabaya, 2006**
- **Anggota Komisi VII DPR RI, 2009-2011**
- **Anggota Komisi V DPR RI 2011-2014 dan 2014-sekarang**



Media Sosial

- Facebook : **Sigit Sosiantomo**
- Instagram : **@SigitSosiantomo**
- Twitter : **@sigtsosiantom**
- Website : **sigtsosiantomo.com**

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
H. Syahrul Aidi Maazat, Lc, MA.
- Tempat, Tanggal Lahir
Kampar, 21 September 1977
- Dapil
Riau II (Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan Pelalawan).



Riwayat Organisasi

- Ketua BAZNAS Kab. Kampar
- Sekum DPD PKS Kab. Kampar
- Ketua IKMI Kab. Kampar
- Bendahara MUI Kab. Kampar



Riwayat Pekerjaan

- Dosen Ma'had Ali Al-Badr Bangkinang
- Dosen UIN Suska Riau
- Anggota DPRD Kab. Kampar
- Anggota DPR RI



Keluarga

- Istri : **Bitriyanti**
- Anak : **4 Laki-Laki**
2 Perempuan



Pendidikan

- **Ponpes Islamic Centre Al-Hidayah Kampar**
- **S1 Al-Azhar Kairo Mesir**
- **S2 Univ. Al-Albayt Jordan**



Media Sosial

- f : H. Syahrul Aidi, Lc.,MA t : @syahrulaidi_mz
i : @syahrulaidi y : Syahrul Aidi Maazat

SYAHRUL AIDI MAZAAT

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
KH. Toriq Hidayat, Lc, MA.
- Tempat, Tanggal Lahir
Tasikmalaya, 19 Januari 1955
- Dapil
Jawa Barat XI



Pendidikan

- SMA Islam Cintawana,
Tasikmalaya. 1970 – 1973
- ST Syariah - Univ. Imam
Muhamad Ibnu Suud
Riyadh, Saudi. 1981 – 1986



Riwayat Organisasi

- **Pelajar Islam Indonsela (PII),**
Anggota, 1970 – 1973
- **Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Riyadh,**
Arab Saudi, Ketua Bidang Kaderisasi, 1981 – 1986
- **Forum Silaturahmi Pengurus Pondok Pesantren (FSPP) Kab. Tasikmalaya,** Anggota Majelis
Pertimbangan, 1990 – 1995
- **Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Jawa Barat,**
Anggota, 2000 – 2004



Keluarga

- Istri : **Solihah**
- Anak : **3 Laki-Laki**
3 Perempuan



Riwayat Pekerjaan

- **Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Tasikmalaya,**
Sebagai: Bidang Kaderisasi.
2003 – 2007
- **DPRD Provinsi Jawa Barat,**
Sebagai: Anggota Fraksi PKS.
2004 – 2009
- **Anggota DPR RI FPKS,**
2014 – 2019, 2019 – 2024



Media Sosial

f : **KH. Toriq Hidayat, Lc**
i : **@toriqhidayatofficial**

TORIQ HIDAYAT

- **Dewan Syariah Wilayah PK Jawa Barat,**
Wakil Ketua, 2000-2005
- **Dewan Syariah Wilayah PKS Jawa Barat,**
Anggota, 2004 – 2009
- **Ikatan DAI Indonesia Kab. Tasikmalaya,**
Anggota, 2005-2010
- **Dewan Syariah Wilayah PKS Jawa Barat,**
Ketua Komisi Qodho, 2005-2010
- **Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Jawa Barat,**
Ketua Komisi Legislasi, 2010-2015
- **Dewan Syariah Pusat PKS Komisi Keumatan,**
Anggota, 2020-2025

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
Drs. H. Hamid Noor Yasin, M.M.
- Tempat, Tanggal Lahir
Pacitan, 27 Mei 1969
- Dapil
Jawa Tengah IV



Pendidikan

- MAN Pacitan
- S1 - Fisipol, Universitas
Darul Ulum Jombang
- S2 - Manajemen, STIE
AUB Surakarta



Riwayat Organisasi

- Sekum DPD PKS Kab. Wonogiri, 1999-2004
- Ketua Bidang Kebijakan Public DPD PKS
Kab. Wonogiri, 2004-2009
- Banleg DPW Jateng, 2009-2014
- Badan Pemenangan Pemilu DPP PKS
Wilda Jatijaya, 2015-2019
- BP3 DPP PKS, 2019 -2024
- Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren
AL-HUDA Wonogiri
- Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan
Islam Terpadu AL-HUDA Wonogiri



HAMID NOOR YASIN



Keluarga

- Istri : **Dra. Hj. Endang
Anggrahini**
- Anak : **4 Laki-Laki
1 Perempuan**



Riwayat Pekerjaan

- Anggota DPRD Kab. Wonogiri,
1999-2004
- Anggota DPRD Kab. Wonogiri,
2004-2009
- Anggota (Wakil Ketua) DPRD
Kab. Wonogiri, 2009-2014.
- Anggota DPR RI, 2014-2015
- Direktur CV Giriwana
Multidaya, 2015-2019
- Komisaris Utama PT Telaga
Mulya Abadi, 2015-sekarang
- Anggota DPR RI, 2019-2024



Media Sosial

- Facebook : **Hamid Noor Yasin** | Website : **hamidnooryasin.com**
- Twitter : **@HamidNoorYasin**
- Instagram : **@hamidnooryasinslmp**

- Penasehat Paguyuban Seniman Jalanan
Wonogiri (PSJW)
- Penasehat Paguyuban Pedagang Asongan
Wonogiri (P3AW)
- Penasehat Paguyuban Pedagang dan
Pengasong Koran Wonogiri (P3KW)

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap **Hj. Nevi Zuairina**
- Tempat, Tanggal Lahir **Jakarta, 20 September 1965**
- Dapil **Sumatera Barat II**



Pendidikan

- **SMAN 31 Jakarta Timur, DKI Jakarta**



Riwayat Organisasi

- Ketua TP-PKK Provinsi Sumatera Barat, 2010-2021
- Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Barat
- Ketua P2TP2A (Pusat Perlindungan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
- Ketua Forum Silaturahmi Majlis Ta'lim Prov. Sumatera Barat
- Ketua LKKS Provinsi Sumatera Barat
- Ketua Forum PAUD Provinsi Sumatera Barat
- Ketua Ikatan Istri Kepala Daerah DPP Partai PKS
- Ketua Aliansi Perempuan Peduli Indonesia (ALPPIN) Prov. Sumatera Barat
- Ketua PW hlmtpaudi Sumbar
- Ketua YKI sumbar ketua PPTI sumbar



Keluarga

- Suami : **Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi. MSc**
- Anak : **3 Laki-Laki
7 Perempuan**



Riwayat Pekerjaan

- Wiraswasta
- Anggota DPR RI, 2019-2024



Media Sosial

- fb : **Nevi Zuairina**
- twitter : **@nzualrina**
- instagram : **@nevizualrina**
- website : **<https://nevizualrina.id/>**

NEVI ZUAIRINA

- Ketua forum UMKM sumbar
- Ketua Forum PAUD Sumbar
- Ketua Yayasan kanker Indonesia Wilayah Sumatera Barat
- Ketua Forikan Prov. Sumatera Barat
- Wakil ketua kadIn bidang UMKM
- Penasehat Bundo kandung Sumbar
- Penasehat Dharma Wanita Persatuan Prov. Sumatera Barat
- Penasehat BKMT sumbar
- Penasehat BKOW
- HIRA Alsiyiyah cabang tebet
- Penasehat bundo kundang IKM

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
H. Rafli
- Tempat, Tanggal Lahir
Samadua, 1 Agustus 1967
- Dapil
**Nanggroe Aceh
Darussalam I**



Tanda Penghargaan

- Duta Lingkungan Aceh
- Duta Perdamaian Aceh



Riwayat Pekerjaan

- **Seniman**
- **Curu PNS, 1994-2004**
- **Anggota DPD RI, 2014-2019**
- **Anggota DPR RI FPKS,
2019-2024**



RAFLI



Media Sosial

- : Rafli Aceh
- : @RaflyAceh



Keluarga

- Istri : **Dewi Lisnadia**
- Anak : **7 Orang**



Pendidikan

- **SDN Air Sialang,
Aceh Selatan, 1976-1982**
- **SMPN 1 Sama Dua,
Aceh Selatan, 1982-1985**
- **SMKN Tapak Tuan,
Aceh Selatan, 1985-1988**
- **Universitas Syiah Kuala
Banda Aceh**

- : @rafly.kande
- : Rafly KanDe Official
- : rakanrafli.net

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
Amin, Ak., MM.
- Tempat, Tanggal Lahir
Kebumen, 6 Juli 1965
- Dapil
Jawa Timur IV (Kab. Jember
dan Kab. Lumajang)



Pendidikan

- **SMAN 1 Purworejo**,
Jawa Tengah, 1985
- **D3 Sekolah Tinggi
Akuntansi Negara
(STAN)**, 1988
- **D4 Sekolah Tinggi
Akuntansi Negara
(STAN)**, 1995
- **Magister Manajemen**
Univ. Jember, 2002



Keluarga

- Istri : **Ninik Sukantini**
- Anak : **3 Laki-Laki
1 Perempuan**



Riwayat Organisasi

- **Ketua II Komisariat Mahasiswa
STAN**, 1986-1987
- **Ketua I Komisariat Mahasiswa
STAN**, 1987-1988
- **Ketua Umum Masjid Baitul
Maal STAN**, 1992-1993
- **Ketua Dept SDM Wilda Jatijaya**,
2009 - 2014
- **Wakil Ketua BPW Jatijaya**,
2019-2024



Media Sosial

- **f** : **Amin Akram**
- **t** : **@Aminakram_**
- **i** : **@aminakram_**

AMIN AK, M.M.



Riwayat Pekerjaan

- **Auditor di Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP)**, 1988 – 2007
- **Direktur Keuangan di PT BBJ**, 2011 – 2013
- **Direktur Utama PT LBS**, 2014 – 2019
- **Anggota DPR RI**, 2019 - sekarang



Tanda Penghargaan

- **Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun**
- **Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun**

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
H. Mahfudz Abdurrahman, S. Sos.
- Tempat, Tanggal Lahir
Jakarta, 18 Juni 1958
- Dapil
Jawa Barat VI
(Kota Depok, Kota Bekasi)



Pendidikan

- **SMAN 5**, Kota Jambi
- **Univ. Jayabaya & Univ. Krisna Dwipayana di Jakarta, 1980-1990**



Riwayat Pekerjaan

- **Anggota DPR RI FPKS, 2014-2019**
- **Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), 2014-2019**
- **Pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**
- **Anggota Dewan Pimpinan Tingkat Tinggi (DPTT) PKS**
- **Bendahara umum DPP PKS**
- **Anggota Majelis Syuro PKS**
- **Komisaris Utama PT. Tata Optima Prestisa (property)**
- **Ketua dewan pembina yayasan Iqro', Kota Bekasi**
- **Ketua Harian Yayasan Al-hassan Kota, Bekasi**
- **Penasihat Gerakan Moral Pelestari Silat Betawi, Bekasi**



Keluarga

- Istri : **Hj. Latifah Abdussomad**
- Anak : **7 Laki-Laki, 3 Perempuan**



Riwayat Organisasi

- **Ketua Senat Mahasiswa Universitas Jayabaya**
- **Bendahara Ikatan Penulis Dan Wartawan Muda Islam**
- **Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Univ. Jayabaya**
- **Ketua Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)**
- **Ketua Bidang Peternakan HKTI**
- **Wakil Sekretaris Real Estate Indonesia**
- **Pendiri Yayasan Sosial Tabung Amanah Umat (TAMU) - Bekasi**
- **Ketua Bidang Kaderisasi DPW PKS Jawa Barat**
- **Ketua Bidang Ekonomi DPW PKS Jawa Barat**



Media Sosial

- **f : Mahfudz Abdurrahman**
- **@MahfudzAbdurra1**
- **@mahfudz.abdurrahman**

Apps : Mahfudz Abdurrahman

MAHFUDZ ABDURRAHMAN

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
H. Rofik Hananto, SE.
- Tempat, Tanggal Lahir
Purbalingga, 9 Desember 1971
- Dapil
Jawa Tengah VII
(Kab. Purbalingga,
Banjarnegara,
dan Kebumen)



Pendidikan

- **SMAN 1 Purbalingga,**
1987 – 1990
- **STAN, 1993**
- **STIE Muhammadiyah**
Jakarta, 2006



Riwayat Pekerjaan

- **Staf Keuangan Dirjen Bea dan Cukai**
Departemen Keuangan, 1993 – 1997
- **Kasie Akunting PT. Asuransi Takaful,**
1997 – 2000
- **Manager Web Content di Lintasindo**
Ecomm, 2000 – 2002
- **Direktur UKM Center Purbalingga**
- **Direktur Marketing PT. HNI – HPAI,**
2012 – 2019
- **Direktur Utama PT. HEW, 2014–sekarang**
- **Komisaris PT. HNI – HPAI, 2019 – sekarang**
- **Anggota DPR RI MPR/DPR RI FPKS,**
2019 – sekarang



Media Sosial

- **f** : **Rofik Hananto**
- **t** : **@rofikhananto**
- **i** : **@rofikhananto**
- **y** : **Rofik Hananto Channel**
- **g** : **rofikhananto.com**



Keluarga

- Istri : **Hj. Fidloh**
Threeyati, S.Pd.I
- Anak : **2 Laki-Laki**
4 Perempuan



Riwayat Organisasi

- **Ketua OSIS SMPN 2 Kalimantan**
1985-1987
- **Ketua OSIS SMAN 1**
Purbalingga, 1988-1990
- **IPM Purbalingga saat SMA**
- **Staf SENAT STAN Prodiip**
Keuangan, 1991-1993
- **Ketua Masjid Kampus STAN**
Prodiip Keuangan, 1991-1993
- **Ketua DEWANGGGA, 1991-1993**
- **Bendahara Yayasan SIDIK**
Jakarta, 1994-1999
- **Sekretaris Umum DPD PKS**
Kota Bekasi, 1998-2001
- **Bendahara Umum DPD PKS**
Kota Bekasi, 2001-2004
- **Sekretaris Umum DPD PKS**
Kab. Purbalingga, 2004-2009
- **Forum Pengembangan Ekonomi**
Pariwisata Penciptaan Lapangan
Kerja dan Penanggulangan
Pengangguran Kab. Purbalingga
2007-2010
- **Sekretaris Umum Ikatan**
Persaudaraan Haji (IPHI)
Purbalingga, 2011-2015
- **Ketua Umum Pengkab**
PELTI Purbalingga, 2020-2024
- **Ketua Bidang BPJE DPP PKS,**
2020-2025

ROFIK HANANTO



BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I.
- Tempat, Tanggal Lahir
Bandung, 20 September 1967
- Dapil
Jawa Barat IX
(Kab. Majalengka,
Kab. Subang
& Kab. Sumedang)



Pendidikan

- **SI : Institut Agama Islam
Al Aqidah Jakarta**



Keluarga

- Istri : **Herliani, M.Ag.**
- Anak : **6 Laki-Laki
1 Perempuan**



Riwayat Pekerjaan

- **Anggota DPR RI, 2009 – 2014**
- **Anggota DPR RI, 2014 – 2019**
- **Anggota DPR RI, 2019 – 2024**



Riwayat Organisasi

- **Sekum PII Komisariat Tanah Abang, 1984**
- **Ketua Umum PP Pemuda PUI, 2005 – 2010**
- **Wasekjen PKS, 2005-2010**
- **ICMI Pusat, 2009**
- **Ketua Umum DPP PUI, 2009 – 2014**
- **Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PUI, 2014-2019**
- **Ketua Badan Penyelenggara Harian Universitas
Halim Sanusi (UHS) PUI, Bandung, 2016 – 2019**
- **Wakil Ketua BPU PKS, 2015-2020**
- **Sekretaris Komisi Ukhuwah MUI Pusat, 2015-2020**
- **Ketua Umum DPP PUI, 2019 – sekarang**



Media Sosial

- **f : Nurhasan Zaidi**
- **t : @Dede_Nurhasan**
- **@nurhasanzaidi**
- **Nurhasan Zaidi**
- **www.nurhasanzaidi.com**

NURHASAN ZAIDI

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol
- Tempat, Tanggal Lahir
Bandung, 24 Oktober 1967
- Dapil
Dapil Jabar 2
(Kab. Bandung dan Kab. Bandung Barat)



Riwayat Organisasi

- **Ketua Bidang Organisasi DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPi)** (2016-2021)
- **Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS** (2015-2020; 2020-2025)



Keluarga

- Suami : **Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, MSc**



Riwayat Pekerjaan

- **Aircraft Performance Engineer PT Dirgantara Indonesia (1995-2002)**
- **Dosen Non Organik Sesko TNI AD (2006)**
- **Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (2004-2009; 2009-2014)**
- **Tenaga Ahli Anggota DPR RI (2014-2021)**

DIAH NURWITASARI



Pendidikan

- **Studien Kolleg Hannover, Jerman (1986-1987)**
- **Luft- und Raumfahrtstechnik (Aeronautical Engineering), Technische Universitaet (TU) Braunschweig, Jerman (1987-1994)**
- **Flugzeugbau (Teknik Konstruksi Pesawat Terbang), Fachhochschule/University of Applied Science Aachen, Jerman (1994-1995)**
- **Univ. Padjajaran, Magister Ilmu Pemerintahan (2015-2016)**



Media Sosial

- FanPage : **Diah Nur**
- f : **Diah Nurwitasari II**
- ig : **diahnurpks**
- globe : **diahnurwitasari.com**

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
Ir. H. Tifatul Sembiring
- Tempat, Tanggal Lahir
**Bukit Tinggi,
28 September 1961**
- Dapil
Sumatera Utara I
(Kota Medan,
Deli Serdang,
Serdang Bedagai
dan Tebing Tinggi)



Pendidikan

- **STM Pembangunan
dan SMA IPA Jakarta**
- **S1: STMIK Jakarta**
- **S2: International Politic
Centre For Asian Studies
Strategic Islamabad,
Pakistan**



Riwayat Pekerjaan

- **PT PLN Pusat Pengaturan Beban
Jawa, Bali, Madura, 1982-1989**
- **Presiden Partai Keadilan Sejahtera
2005-2009**
- **Ketua Komisi I DPR RI, 2009 (1 Bulan)**
- **Menteri Komunikasi & Informatika
Republik Indonesia, 2009-2014**
- **Anggota Legislatif DPR RI Komisi VI,
2014-2016**
- **Anggota Legislatif DPR RI
Komisi III, 2016-2017**
- **Anggota Legislatif DPR RI
Komisi VII, 2017-2019**
- **Ketua Fraksi PKS MPR RI,
2017-2019**
- **Ketua Fraksi PKS MPR RI,
2019-Sekarang**
- **Ketua Poksi Komisi VII
FPKS DPR RI, 2019-Sekarang**



TIFATUL SEMBIRING



Keluarga

- Istri : **Sri Rahayu P**
- Anak : **4 Laki-Laki
2 Perempuan**



Riwayat Organisasi

- **Aktivis Pelajar Islam Indonesia**
- **Aktivis Korps Mubaligh
Khairu Ummah**
- **Aktivis Yayasan Pendidikan
Nurul Fikri, 1990**
- **Pendiri Partai Keadilan (PK), 1998**
- **Humas Partai Keadilan (PK),
1999-2000**
- **Ketua DPP PKS Wilda I
Bagian Sumatera, 2000-2004**
- **Pejabat Sementara Presiden PKS,
Oktober 2004- April 2005**



Media Sosial

- **f : Tifatul Sembiring**
- **t : @tifsembiring**
- **@ : @tifsembiring**
- **y : Tifatul Sembiring**



Penghargaan

- **Bintang Mahaputra
Adipradana**

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
H. Iskan Qolba Lubis, M.A
- Tempat, Tanggal Lahir
Sibuhuan, 01 Juli 1961
- Dapil
Sumatera Utara II



Riwayat Pekerjaan

- Dosen Ma'had Al-Hikmah
Jakarta
- Dosen Sekolah Tinggi
Tafsir Hadis
- Konsultan "Syariah Consulting
Center" Jakarta



Riwayat Organisasi

- Ketua Yayasan Bumi Andalas
- Ketua Pusat Studi Islam
Fajar Hidayah



Keluarga

- Istri : **Erni Asfliati
Hasibuan**
- Anak : **3 Laki-Laki
2 Perempuan**



Pendidikan

- Pondok Pesantren AEK
**HAYUARA (Tsanawiyah
& Aliyah)**
- S1 Fak. Ushuhuludin
Univ. Al-Azhar Mesir, 1987
- S2 Islamic Studies, Punjab
University, Lahore, Pakistan
1990
- S2 Magister Arabic
Language Islamabad,
1992

ISKAN QOLBA LUBIS



Media Sosial

f : [Iskan Qolba Lubis / Sahabat Iskan Qolba Lubis](#)

@ : [@sahabatiskanqolbalubis / Iskanql](#) t : [@IskanQL](#)

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
Dr. H. Hidayat Nur Wahid, MA.
- Tempat, Tanggal Lahir
Klaten, 08 April 1960
- Dapil
DKI Jakarta II



Pendidikan

- SDN Kebondalem Kidul I,
Klaten, Jateng. 1972
- Ponpes Walisongo, Ngabar,
Ponorogo, Jawa Timur. 1973
- Ponpes Modern Darussalam
Gontor, Ponorogo, Jatim. 1978
- IAIN Sunan Kalijaga
Fak. Syari'ah, Yogyakarta, 1979.
- S1 - Univ. Islam Madinah,
Fak. Dakwah dan Ushuluddin,
Saudi Arabia, 1983.
- S2 - Univ. Islam Madinah, 1987.
- S3 - Univ. Islam Madinah,
Saudi Arabia. 1992.



Riwayat Organisasi

- Anggota PII, 1973
- Andalan Koordinator Pramuka Gontor Bidang
Kesekretariatan, 1977 - 1978
- Training HMI IAIN Yogyakarta, 1979
- Sekretaris MIP PPI Madinah, Arab Saudi, 1981 - 1983
- Ketua PPI Arab Saudi, 1983 - 1985
- Ketua Yayasan Al-Haramain, 1994
- Wakil Ketua Dewan Penasehat ICMI Pusat
- Ketua Dewan Penasehat IKADI
- Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor
- Anggota Dewan Penasehat KAICIID (King Abdullah
bin Abdulaziz International Centre for Interreligious
and Intercultural Dialogue), Wina, Austria
- Anggota Majelis Tinggi Muslim World League,
Makkah Al-Mukarramah, Arab Saudi



HIDAYAT NUR WAHID



Keluarga

- Istri : **dr Diana Abbas Thalib.
MARS.**
- Anak : **5 Laki-Laki
2 Perempuan**



Riwayat Pekerjaan

- Wakil Ketua MPR RI,
2014 - 2019 & 2019-2024.
- Ketua Fraksi PKS DPR RI,
2012 - 2014.
- Ketua Badan Kerjasama
Antar-Parlemen DPR RI,
2009 - 2012
- Ketua MPR RI, 2004 - 2009.
- Dosen Pascasarjana UMJ
- Dosen Pascasarjana IAIN
- Negeri Syarif Hidayatullah,
Jakarta
- Dosen Pascasarjana
Univ. Islam Asy - Syafiyah,
Jakarta.



Media Sosial

- : Hidayat Nur Wahid
- : @hnurwahid
- : @hnwahid
- : Hidayat Nur Wahid

- Deklarator PK, 1998
- Ketua MPP PK, 1998-1999
- Presiden PK & PKS, 2000-2004
- Ketua FPKS DPR RI, 2012-2014
- Wakil Ketua Majelis Syura PKS, 2015-2025
- Ketua Majelis Tahkim/Mahkamah Partai,
2016-2021

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
Hj. Nur Azizah Tamhid, BA, MA.
- Tempat, Tanggal Lahir
Blitar, 18 September 1954
- Dapil
Jawa Barat VI
(Kota Depok & Kota Bekasi)



Pendidikan

- Tk Tsanawiyah dan Aliyah di Madrasah Salafiyah Syafiyah Khairiyah Hasyim. (Ponpes Seblak-Jombang Jawa Timur)
- Sarjana Muda Fak. Tarbiyyah, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng - Jombang - Jatim
- S2 : Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta



Riwayat Pekerjaan

- Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 1995-2010.
- Guru Dan Pembina Ponpes Miftahul 'Ulum Jakarta.
- Guru Mts. Salafiyah Syafiyah Khairiyah Hasyim Jombang, 1973-1980.
- Anggota DPR RI FPKS, 2019-2024



Keluarga

- Suami : **Dr.Ir. Nur Mahmudi Ismail, MSc.**
- Anak : **1 Laki-Laki**
2 Perempuan



Riwayat Organisasi

- Ketua TP PKK Kota Depok, 2006-2016
- Ketua Yayasan Kanker Indonesia Kota Depok, 2007-2016
- Pembina Forum Kota Depok Sehat (FKDS), 2010-2016
- Ketua P2TP2A Kota Depok, 2010-2016
- Ketua Forum Paud Kota Depok, 2014-2016
- Ketua Dekranasda Kota Depok

NUR AZIZAH TAMHID



Media Sosial

- Facebook : **Nur Azizah Tamhid**
- Twitter : **@NurAzizahTamhid**
- Instagram : **@nurazizahTamhid**



Penghargaan

- Penghargaan Manggala Karya Kencana Tingkat Nasional dari BKKBN, 2012
- Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri), 2012
- Pangan Nusantara (Kementan), 2011

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap **KH. Bukhori, Lc, MA.**
- Tempat, Tanggal Lahir **Jepara, 5 Maret 1965**
- Dapil **Jawa Tengah I** (Kota Semarang, Kab. Semarang, Kota Salatiga dan Kab. Kendal)



Pendidikan

- **Madrasah A'liyah Walisongo Pecangaan Jepara-Jawa Tengah Jurusan Syari'ah, 1985**
- **LIPIA Jakarta, Program Bahasa Arab, 1985-1987**
- **LIPIA Jakarta Jurusan Syari'ah, 1987**
- **SI Univ. Islam Madina, Saudi Arabia Fak. Hadist Ilmu Hadist dan Studi Islam**
- **S2 Wifaq Madaris Salafiyah, Pakistan, 1993-1994**



Riwayat Pekerjaan

- **Anggota DPR RI, 2009 – sekarang**
- **Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI, 2015-2019**
- **Konsultan Pioneer Global Resources & Development SDN. BHD. Kajang Selangor Darul Ehsan Malaysia**
- **Direktur Law Center FPKS, 2014- 2017**
- **Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin (STIU) Dirasat Islamiah al- Hikmah, Jakarta, 1999 – sekarang**
- **Dosen Dirasat Islamiah Al-Hikmah Jakarta, 1996 – 1999**
- **Ketua Yayasan al-Mubarak Kembangan Jakbar, 2005-sekarang**
- **Pengasuh SMP IT Boarding School Insan Mubarak Kembangan Jakbar, 2005- sekarang**



BUKHORI

: Bukhori Yusuf : @buchori_sby
 : @bukhori_bkh : khbukhoriyusuf
 : Bukhori Sby : bukhori440.com



Keluarga

- Istri : **Rosita Komala Dewi**
- Anak : **4 Orang**



Riwayat Organisasi

- **Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPP PKS, 2020-sekarang**
- **Ketua Badan Perencanaan DPP PKS, 2012 – 2020**
- **Majelis Idarah (pengurus harian) dan anggota International Forum for Islamic Parliament (IFIP), 2013**
- **Direktur eksekutif Dewan Syariah Pusat PKS, 2011-2012**
- **Sekretaris Dewan Syariah Pusat PKS, 2005 – 2010**
- **Ketua panitia pelaksana Daurah musim semi bagi mahasiswa Indonesia di Arab Saudi, 1990**
- **Anggota Karang Taruna Kelurahan Matraman Jakarta Timur, 1986 – 1987**
- **Anggota KNPI Jakarta Timur, 1986**
- **Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Anak Cabang Pecangan dan Ranting Karangrandu, Pecangaan Jepara Jawa Tengah, 1986-1987**
- **Ketua Pesantren Tsamratul Hidayah, Pecangaan, Jepara, Jawa Tengah. 1984 – 1985**

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
Dr. K.H. Surahman Hidayat, M.A.
- Tempat, Tanggal Lahir
Ciamis, 13 Mei 1957
- Dapil
Jawa Barat X (Kab. Ciamis, Pangandaran, Kuningan, Kota Banjar)



Pendidikan

- **MA PUI Cijantung Ciamis**
Jawa Barat, 1973
- **S1 Syari'ah Universitas Al Azhar**, Cairo, 1989
- **S2 Syari'ah Universitas Al Azhar**, Cairo, 1991
- **S3 Syari'ah Universitas Al Azhar**, Cairo, 2001



Riwayat Pekerjaan

- **Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Jakarta**
- **Direktur Pusat Konsultan Syari'ah Jakarta**
- **Dewan Pengawas Syari'ah di Bank Syari'ah DKI**

- **Dosen Program Pasca Sarjana UMY Jakarta**
- **Dewan Pengawas Syari'ah di Bumida Syari'ah**
- **Dewan Pembina PKPU**
- **Pengasuh Majelis Yas-alunaka Islam Solusi Kehidupan**



Keluarga

- Istri : **Dra. Hj. Cucu Nining**
- Anak : **2 Laki-Laki, 2 Perempuan**



Riwayat Organisasi

- **Dewan Kerja Cabang Pramuka**
- **Menwa**
- **HMI**
- **HPMI**, Mesir
- **Poskolap Tim Penanggulangan Krisis Mahasiswa Indonesia**, Mesir
- **Badan Wakaf Mahasiswa Indonesia**, Mesir
- **Ikatan Dai Indonesia (IKADI)**
- **Pusat Konsultasi Syariah**
- **Syariah Economics dan Banking Institute**
- **Institut Manajemen Zakat**



Media Sosial

- **f** : KH. DR. Surahman Hidayat, MA
- **@**kh.dr.surahmanhidayat.ma
- **@** KH. Dr. Surahman Hidayat, MA.

- **Pengasuh Ponpes Tahfizh SMA Tarbawi Zaid bin Tsabit**
- **Anggota DPR RI**, 2009-2014
- **Anggota DPR RI**, 2014-2019
- **Anggota DPR RI**, 2019-2024

SURAHMAN HIDAYAT



BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
dr. H. Adang Sudrajat, M.M., Av
- Tempat, Tanggal Lahir
Ciamis, 23 Oktober 1962
- Dapil
Jawa Barat II
(Kab. Bandung dan
Kab. Bandung Barat)



Keluarga

- Istri : **Evelina Dewi
Hapsari**
- Anak : **9 Orang**



Riwayat Organisasi

- **DPP PKS Ketua Bidang
Buruh Petani Nelayan, 2015**
- **Wakil Bendahara FPKS
MPR RI, 2015**



Pendidikan

- **SMAN 1 Ciamis, 1978-1981**
- **S1 : Fakultas Kedokteran
Universitas Padjajaran
(UNPAD), 1982-1987**
- **S2 : Magister Manajemen
STMB Telkom Bandung,
1993-1995**



Riwayat Pekerjaan

- **Wakil Direktur Bidang SDM
RS. Al Islam Bandung, 1997-2000**
- **Wakil Direktur Penunjang Medik
RS Al Islam Bandung, 2000-2001**
- **Wakil Direktur Bidang Akademik
RS. Al Islam Bandung, 2001-2004**
- **Anggota Tim Dokter Bulan Sabit
Merah Indonesia(BSMI), 2009**
- **Anggota DPRD Kota Bandung,
2004-2009**
- **Anggota DPR RI, 2014-2019**
- **Anggota DPR RI, 2019-2024**



Media Sosial

- **f : dr. Adang Sudrajat**
- **@BaladDrAdangS**
- **@dr.adangsudrajat**

(Alm.) ADANG SUDRAJAT

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
H. Alifudin, SE, MM.
- Tempat, Tanggal Lahir
Jakarta, 25 Agustus 1965
- Dapil
Kalimantan Barat I



Pendidikan

- **SMAN 29 Jakarta**
- **D3 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), 1985-1988**
- **S1 Univ. Tanjungpura Pontianak (Untan), 1994-1998**
- **S2 Univ. Tanjungpura Pontianak (Untan), 2001-2005**



Riwayat Pekerjaan

- **BPKP Provinsi Kalimantan Barat**
- **Anggota DPRD Kota Pontianak, 1999 – 2004**
- **Anggota DPRD Prov. Kalimantan Barat, 2009 – 2014**
- **Anggota DPR RI, 2019 – 2024**



Keluarga

- Istri : **Hj. Susanti, SE**
- Anak : **6 Laki-Laki
1 Perempuan**



Riwayat Organisasi

- **Anggota Majelis Syuro PKS, 2020-2025**
- **Ketua BPW Kalimantan DPP PKS, 2020-2025**
- **Anggota Majelis Syuro PKS, 2015-2020**
- **Ketua Departemen Wilda Kalimantan, 2015-2020**
- **MPW PKS Kalimantan Barat Ketua, 2010-2015**
- **Wilayah Dakwah DPP PKS, Staff, 2006-2010**
- **DPW PKS Kalimantan Barat, Sekretaris – 2004-2006**
- **DPW PK Kalimantan Barat Sekretaris – 1999-2004**
- **DPW PK Kalimantan Barat Wakil Ketua, 1998-1999**
- **YRI KETUA, 1992-1994**
- **PII**



Media Sosial

- **f : H Alifudin SE MM**
- **t : @bangalifptk**
- **@bangalifptk**
- **globe : alifudin.com**

ALIFUDIN



BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
H. Ansory Siregar, Lc
- Tempat, Tanggal Lahir
Bangun Purba, 10 Juni 1965
- Dapil
Sumatera Utara III



Pendidikan

- SDN Nagasaribu
Paluta
- SMPN Lumut Tapteng
- Pondok Modern
Darussalam Gontor
Ponorogo
- Kuliah Dakwah
Al-Islamiyyah Jamil'
Abu Nur Damaskus Syria
- Univ. Damaskus Syria



Keluarga

- Istri : **Hj. Anita Zaharah Harahap**
- Anak : **Nurullah Al-Mufti Siregar, MM
& Muhammad Musthofa Siregar, S.Sos**



Riwayat Organisasi

- Organisasi Pelajar Pondok
Modern (OPPM)
- Ketua Perhimpunan Pelajar
Indonesia Damaskus Syria
- Staff Islamic Cultural Centrum
of Netherland Holland (ICCN)
- DPP PK/PKS Wilda Sumatera
- DPP PKS Wilda Sumatera
Bagian Utara
- DPP PKS Bidang Pembinaan
Ummat
- Yayasan Bumi Andalas Jakarta
- Yayasan Darul Izzah Jakarta
- Yayasan Al-Ihsan Jakarta
- Ikatan Alumni Syam Jakarta
- Ikatan Keluarga Pondok
Modern Gontor
- Ikatan Alumni Gontor 1987

ANSORY SIREGAR



Riwayat Pekerjaan

- Guru di PPI Damaskus Syria
- Dosen Islamic Centre Holland
- Dosen STAI AL-Hikmah Jakarta
- Dosen Makhad Asyasyukriyah Tangerang
- Anggota Mahkamah Kehormatan
Dewan DPR RI
- Anggota Bamus DPR RI
- Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI
- Anggota DPR RI 2004-2009
2009-2014, 2014-2019, 2019-2024



: Anshori Siregar



: @Anshori Siregar



: @Ansory Siregar



: Ansorysiregar.com

• Public Group : INFO BANG
ANSORY SIREGAR

• F. Fan Page : Kawan Ustadz
Ansory Siregar DPR RI

- Panja RUU Penanggulangan Bencana,
RUU Narkotika, RUU Keperawatan,
RUU Kebidanan, RUU BPJS
- Ketua Pansus RUU Kepalaangmerahan
- Pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Wakil Ketua BURT DPR RI
- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si
- Tempat, Tanggal Lahir
Pekalongan, 19 Februari 1970
- Dapil
DKI Jakarta II (Jakarta Pusat,
Jakarta Selatan, Luar Negeri)



Pendidikan

- **SMAN 1 Pekalongan,**
IPA, 1985-1988
- **SI IKIP Semarang,**
Bhs. Inggris, 1988-1992
- **S2 Univ. Indonesia**
Ilmu Administrasi dan
Kebijakan Pendidikan,
1996-1998
- **S3 Univ. Indonesia,**
Ilmu Administrasi,
2008-2012



Riwayat Organisasi

- **Anggota Keluarga Besar Pelajar Islam
Indonesia Pusat,** 1995 – sekarang
- **Sekretaris Keputrian Yayasan Alhikmah
Jakarta,** 1995 – 2000
- **Sekretaris Bid. Kewanitaan DPD
Partai Keadilan Jaksel,** 1999 – 2003
- **Bidang Kewanitaan DPP PKS,** 2009 – 2014
- **Sekretaris Bid. BPPN DPP PKS,** 2015 – sekarang
- **Anggota Muhammadiyah,** 2015 – sekarang
- **Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan
Keluarga DPP PKS,** 2020 – 2025



Keluarga

- Suami : **M. Faridj Wajdi SE.Msi.**
- Anak : **2 Laki-Laki**
2 Perempuan



Riwayat Pekerjaan

- **SIT Auliyah Manajer Edukasi,**
1999-2003
- **SIT Auliyah Wakil Direktur,**
2003-2006
- **SIT Auliyah Direktur,**
2006-Sekarang
- **Anggota DPRD DKI Jakarta,**
2009-2014
- **Dosen MIA FISIP Universitas
Muhammadiyah Jakarta,**
2015-sekarang
- **Sekprodi MIA FISIP Universitas
Muhammadiyah Jakarta,**
2016-2019
- **Anggota DPR/MPR RI,** 2019-2024



KURNIASIH MUFIDAYATI



Media Sosial

- f : Kurniasih Mufidayati
- @mufidayati_id
- @kurniasihmufidayati.id
- Kurniasih Mufidayati
- <https://kurniasihmufidayati.com/>

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
DR. H. Abdul Fikri Faqih
- Tempat, Tanggal Lahir
Tegal, 17 Juli 1963
- Dapil
Jawa Tengah IX (Kab. Tegal,
Brebes, Kota Tegal)



Pendidikan

- **SMA Negeri Slawi,**
Tegal, Jawa Tengah
- **S1 Teknik Elektro, IKIP**
Semarang
- **S2 Manajemen,**
Univ. Muhammadiyah
Surakarta
- **S3 Ilmu Lingkungan,**
Univ. Diponegoro



Riwayat Organisasi

- **Wakil Ketua PDPII,** Kabupaten dan Kota Tegal
- **Ketua Ikatan Remaja Masjid Al Huda,** Semarang
- **Wakil Ketua Pengurus Wilayah PII,** Jawa Tengah
- **Pembina Yayasan Ulin Nuha**
- **Ketua DPD PKS Kabupaten Tegal**
- **Ketua Daerah Dakwah Lima DPW PKS Jawa Tengah**
- **Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Jawa Tengah**
- **Sekretaris Wilda Jatijaya DPP PKS**



Keluarga

- Istri : **Zubaedah**
- Anak : **5 Laki-Laki**
2 Perempuan



Riwayat Pekerjaan

- **Guru PNS,** Kota Tegal
- **Guru Madrasah Aliyah NU**
Al Imam Adiwerna, Tegal
- **Kepala STM Muhammadiyah**
Tegal, Jawa Tengah
- **Sekretaris Komisi A DPRD**
Kabupaten Tegal
- **Anggota Komisi A DPRD**
Provinsi Jawa Tengah
- **Wakil Ketua DPRD**
Provinsi Jawa Tengah
- **Wakil Ketua Komisi X DPR RI**



ABDUL FIKRI FAQIH

f : Fikri Faqih

t : @FikriFaqih

i : @afikrifaqih

g : http://fikrifaqih.com

- **Ketua DPW PKS Jawa Tengah**
- **Ketua Majelis Amanah**
Mathlaul Anwar Jateng
- **Pembina Yayasan Pertiwi, Tegal**
- **Ketua BPW Jatijaya DPP PKS**

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
Hj. Sakinah Aljufri, S.Ag.
- Tempat, Tanggal Lahir
Solo, 2 Juni 1964
- Dapil
Sulawesi Tengah



Pendidikan

- Madrasah Ibtidaiyah
Alkhairaat
- Madrasah Tsanawiyah
Alkhairaat
- Madrasah Aliyah
Alkhairaat, 1981 – 1984
- S1 : Sarjana Syariah,
Universitas Alkhairaat
1991 – 1995



Riwayat Pekerjaan

- Guru TK Alkhairaat Pusat Palu, 1985 -1990
- Guru SMK Alkhairaat Pondok Putri,
2010 – 2013
- Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
Fraksi PKS, 2009 – 2014
- Anggota DPR RI Fraksi PKS,
2019 – Sekarang
- Anggota BKSAP DPR RI Fraksi PKS,
2019 – Sekarang



Keluarga

- Kakek : **Sayyid Idrus bin
Salim Al-Jufrie**
- Ayah : **Habib Saggaf bin
Syech bin Salim Aljufri**
- Ibu : **Sy.Lu'lu binti Idrus bin
Salim Aljufri**
- Suami : **Haidar Aljufri**
- Anak : **3 Laki-Laki
1 Perempuan**



Riwayat Organisasi

- Ketua Bidang Dakwah Pengurus
Pusat Wanita Islam Alkhairaat
- Sekretaris Jenderal Pengurus
Pusat Wanita Islam Alkhairaat,
2014-sekarang
- Ketua BPU DPW PKS
Sulawesi Tengah, 2014-2019
- Ketua Bidang Pengembangan
Daerah DPW PKS Sulteng,
2020-sekarang
- Pengurus Wilayah BKMT Sulteng,
2014-sekarang

SAKINAH

ALJUFRI



Media Sosial

- Facebook : **Sakinah Aljufri**
- Instagram : **@sakinahaljufri**
- YouTube : **Sakinah Aljufri**



Penghargaan

- **Juru Penerang Agama Islam
Provinsi Sulawesi Tengah**

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
H. Mustafa Kamal, SS.
- Tempat, Tanggal Lahir
Jakarta, 14 Desember 1969
- Dapil
Sumatera Selatan I



Pendidikan

- **SD Ria Persit KCK Jakarta**
- **SMPN 20 Jakarta, 1986**
- **SMAN 14 Jakarta, 1989**
- **SI Universitas Indonesia Fakultas Sastra, 1995**



Riwayat Pekerjaan

- Staf Pengajar Nurul Fikri
- Staf Pimpinan dan Dosen Program Extension FE UI
- Dosen Sejarah Perguruan Islam Al Hikmah
- Direktur Retas Leadership Centre
- Anggota KPU RI
- Pemimpin Redaksi Jurnal Politik Akses
- Advisor Youth & Student Asia Pacific Foundation
- Komisaris Visi Publishing
- Divisi Riset Program Manajemen, Pasca Sarjana Universitas Indonesia
- Redaktur Pelaksana Majalah Tarbawi



MUSTAFA KAMAL



Keluarga

- Istri : **Eko Sri Wahyuni Setiawati**
- Anak : **3 Laki-Laki
2 Perempuan**



Riwayat Organisasi

- **Sekretaris Komisi Ideologi MPP PKS, 2005-2009 & 2020-2025**
- **Sekjen DPP PKS, 2016-2020**
- **Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS, 2015-2016**
- **Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik DPP PKS, 2013-2015**
- **Ketua Bidang Kebijakan Publik DPP PKS, 2009-2013**
- **Ketua Dept. Kepeloporan Pemuda DPP PKS, 2003-2005**
- **Ketua Dept. Kepeloporan Pemuda DPP PK, 1998-2003**
- **Wakil Sekjen DPP PK, 1998-1998**
- **Deklarator KAMMI, 1998**

: Mustafa Kamal : @h.mustafakamal

: H. Mustafa Kamal

- **Anggota Badan Legislasi DPR RI**
- **Anggota Mahkamah Kehormatan DPR RI**
- **Anggota Badan Musyawarah DPR RI, 2004-2014**
- **Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, 2006-2009**
- **Wakil Ketua FPKS DPR RI, 2004-2006, 2013-2014**
- **Ketua Fraksi PKS DPR RI, 2009-2013**
- **Wakil Ketua Komisi II DPR RI, 2014-2016**
- **Anggota DPR RI FPKS, 2004-sekarang**
- **Wakil Ketua I Fraksi PKS MPR RI, 2019-sekarang**

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
Dr. H. Fahmy Alaydroes,
MM, M.Ed.
- Tempat, Tanggal Lahir
Jakarta, 26 Januari 1962
- Dapil
Jawa Barat V (Kab. Bogor)



Pendidikan

- **SMA Negeri 4 Jakarta,**
1978-1981
- **SI: Fakultas Psikologi**
Univ.Indonesia, 1981-1988
- **Magister Manajemen**
Univ. Pajajaran Bandung,
1998-2000
- **Master of Education**
UNSW Sydney, 2001-2002
- **Doktoral Univ. Pendidikan**
Indonesia, 2008-2013



Riwayat Organisasi

- **Pendiri, Pengurus dan Pembina Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia,** 2003-sekarang
- **Pendiri Persaudaraan Guru Sejahtera Indonesia**
Pengurus dan Pembina Sekolah Islam Terpadu
Nurul Fikri: Depok, Aceh
- **Pembina Nurul Fikri Boarding School Anyer,**
2003 – 2017
- **Pengurus Nurul Fikri Boarding School Bogor,**
2017 – Sekarang
- **Pembina Nurul Fikri Peduli,** 2019 – Sekarang
- **Anggota Majelis Syuro PKS**
- **Ketua Dep. Pendidikan DPP PKS,** 2005-2010
- **Tim Perumus Platform MPP PKS,** 2010-2015
- **Ketua Bidang Kesra DPP PKS,** 2015-2020



Keluarga

- Istri : **Nailly Mohammad Thalib**
- Anak : **4 Laki-Laki**
2 Perempuan



Riwayat Pekerjaan

- **PT NF Bina Prestasi**
- **PT NF Testing Centre**
- **PT Royal Sakinah Propertindo**
- **PT NF Bina Usaha Bersama**
- **PT NF Edukasi Cendekia**
- **Anggota DPR RI,** 2019-2024



Media Sosial

- **f** : **fahmy.alaydroes**
- **t** : **@fahmyalaydroes**
- **i** : **@sahabatfahmy**

FAHMY ALAYDROES

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si
- Tempat, Tanggal Lahir
Surabaya, 09 Maret 1967
- Dapil
DKI Jakarta I (Jakarta Timur)



Pendidikan

- **D3 Akademi Pimpinan Perusahaan**, Jurusan Financial Management
- **S1 STAI Al-Hikmah Jakarta**, Program Intensif Berbahasa Arab, Fakultas Syari'ah
- **S2 Universitas Indonesia** Program Pascasarjana, Kekhususan Ekonomi Islam
- **S3 Universitas Airlangga** Program Doktor Ilmu Ekonomi Islam



Riwayat Pekerjaan

- **Dekan Fakultas Ekonomi Univ. YARSI Jakarta**, 2014-2017
- **Sekretaris Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI Jakarta**, 2017-2019
- **Dosen Universitas Airlangga Surabaya**
- **Anggota Badan Legislasi DPR RI**, 2019-2020
- **Anggota Komisi XI DPR RI**, 2019-sekarang



Keluarga

- Suami : **H.M. Isbir Renwarin**
- Anak : **4 Laki-Laki**
4 Perempuan



Riwayat Organisasi

- **Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga IAEI DPW DKI Jakarta**, 2018-2021
- **Ketua Majelis Sarana Ekonomi Islam (MASEI) Wilayah DKI Jakarta**, 2017-2021
- **Ketua Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I)**, 2012-2016
- **Anggota Forum Dosen Ekonomi Islam Indonesia (FORDEBI)**, 2016-sekarang
- **Ketua Bidang Perempuan DPP PKS**, 2010-2015
- **Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS**, 2020-2025



Media Sosial

- **f** : **AnisbyarwatiPKS**
- **@** : **@anisbyarwatiPKS**
- **t** : **@AnisbyarwatiPKS**



ANIS BYARWATI

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
H. Hidayatullah, S.E.
- Tempat, Tanggal Lahir
Malaysia, 24 Oktober 1961
- Dapil
Sumatera Utara I
(Kab. Deli Serdang,
Serdang Bedagai,
Kota Medan,
Kota Tebing Tinggi)



Keluarga

- Istri : **Hamidah**
- Anak : **1 Laki-Laki**
5 Perempuan



Pendidikan

- **SMA Univa (Universitas Alwashliyah) Medan, 1980**
- **Fakultas Ekonomi USU Medan**
Jurusan Ekonomi dan Studi
Pembangunan, 1989



Media Sosial

- Facebook : **Haji Hidayatullah SE**
- Instagram : **@hidayatullahmk**
- Website : **hidayatullah.co.id**

HIDAYATULLAH



Riwayat Organisasi

- **Sekretaris Asosiasi Bank Syariah Indonesia**
Sumatera Utara, 2002-2007
- **Anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat**
MUI Medan, 1999-2004
- **Anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat**
MUI Sumatera Utara, 2015-2020
- **Ketua Umum KBB (Kerukunan Bubuhan-Banjar)**
Sumatera Utara, 2015 - sekarang
- **Al-Washliyah (Anggota), 1985-sekarang**



Riwayat Pekerjaan

- **DPRD Kabupaten Deli Serdang**
Anggota, 1987-1992; 1992-1997;
1997-1999
- **PT. BPRS Al-Washliyah**
Direktur, 1999-2004
- **DPRD Prov. Sumatera Utara**
Anggota, 2004-2009; 2009-2014
- **Koperasi Berkah Mandiri,**
Pengurus, 2016-sekarang

BIO GRAFIS

YUK KENALI ALEG KAMU



Profil

- Nama Lengkap
DR. Ir. H. A. Junaidi Auly, MM
- Tempat, Tanggal Lahir
Tanjung Karang, 26 Juni 1963
- Dapil
Lampung II



Pendidikan

- **SMAN 2 Tanjung Karang, 1982**
- **S1 - Peternakan, IPB, 1986**
- **S2 - Magister Manajemen, Universitas Lampung, 2003**
- **S3 - Ilmu Pemerintahan IPDN Jakarta**



Riwayat Pekerjaan

- **DPRD Provinsi Lampung, Sebagai Wakil Ketua, 2004-2007**
- **DPRD Provinsi Lampung, Sebagai Anggota Komisi C, 2007-2009**
- **DPRD Provinsi Lampung, Sebagai Ketua Komisi II, 2009-2014**
- **Anggota Komisi XI DPR RI, 2015-2024**
- **Anggota Badan Legislasi DPR RI, 2015-2018**
- **Anggota BAKN DPR RI, 2018-2019**
- **Kapoksi XI FPKS DPR RI, 2019-2024**



Keluarga

- Istri : **Dra. Sri Puji Astuti**
- Anak: **1 Orang**



Riwayat Organisasi

- **IPB, Senat dan BPM Fakultas Peternakan, 1982-1986**
- **PW Muhammadiyah Lampung, 1987-1992**
- **DPW PK Lampung, sebagai Ketua, 2000-2003**
- **DPW PKS Lampung, sebagai Ketua, 2003-2004**
- **DPP PKS, Kawilda Sumbangsel, 2019-2024**



Media Sosial

- **f : Ahmad Junaidi Auly**
- **t : @Junaidiauly_**
- **@Junaidiauly**
- **: Junaidi Auly**

JUNAIIDI AULY



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kreatif Atraktif Substantif